



WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA JAMBI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan arah dan rumusan Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2019;
- b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2019 merupakan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 serta merupakan tolak ukur penilaian kinerja Pemerintahan Daerah Kota Jambi selama 1 (satu) tahun;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);

11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Jambi yang selanjutnya disebut RKPD Kota Jambi adalah dokumen perencanaan Pembangunan tahunan yang memuat Visi Misi dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019 Rancangan Kerangka Ekonomi Makro serta kaidah pelaksanaannya.
5. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi.
6. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi.
7. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusun RKPD Kota Jambi Tahun 2019 untuk menentukan kegiatan dan indikasi besaran anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Pemerintah Daerah.

- (2) RKPD Kota Jambi Tahun 2019 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- (3) RKPD Kota Jambi Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi :
 - a. pedoman bagi OPD dalam menyusun rencana kerja OPD Tahun 2019; dan
 - b. pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun rancangan APBD tahun 2019.

Pasal 3

Dalam rangka menyusun Rancangan APBD Tahun 2019, maka :

- a. pemerintah daerah menggunakan RKPD tahun 2019 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara di DPRD Kota Jambi; dan
- b. OPD menggunakan RKPD Tahun 2019 dalam melakukan pembahasan rancangan APBD dengan DPRD Kota Jambi.

Pasal 4

Tujuan RKPD Kota Jambi Tahun 2019 adalah :

- a. untuk menentukan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan daerah; dan
- b. untuk menyusun program dan kegiatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip anggaran kinerja dan dokumen perencanaan daerah.

BAB III

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2019

Pasal 5

- (1) RKPD Kota Jambi Tahun 2019, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
- BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat tentang isi dan uraian RKPD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

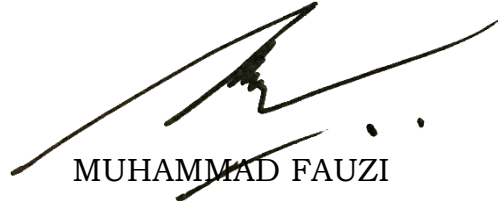
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 07 Juni 2018

Pjs. WALIKOTA JAMBI,



MUHAMMAD FAUZI

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 07 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,



BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada esensinya berupaya meningkatkan kewenangan dan peranan daerah kabupaten/kota dalam mengelola potensi yang ada guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dimana sebagian besar kewenangan yang bersifat operasional dan berhubungan langsung dengan kegiatan masyarakat telah menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan titik berat pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menuntut adanya aparatur pemerintahan yang bersih dan menempatkan diri sebagai orang yang harus melayani kepentingan masyarakat.

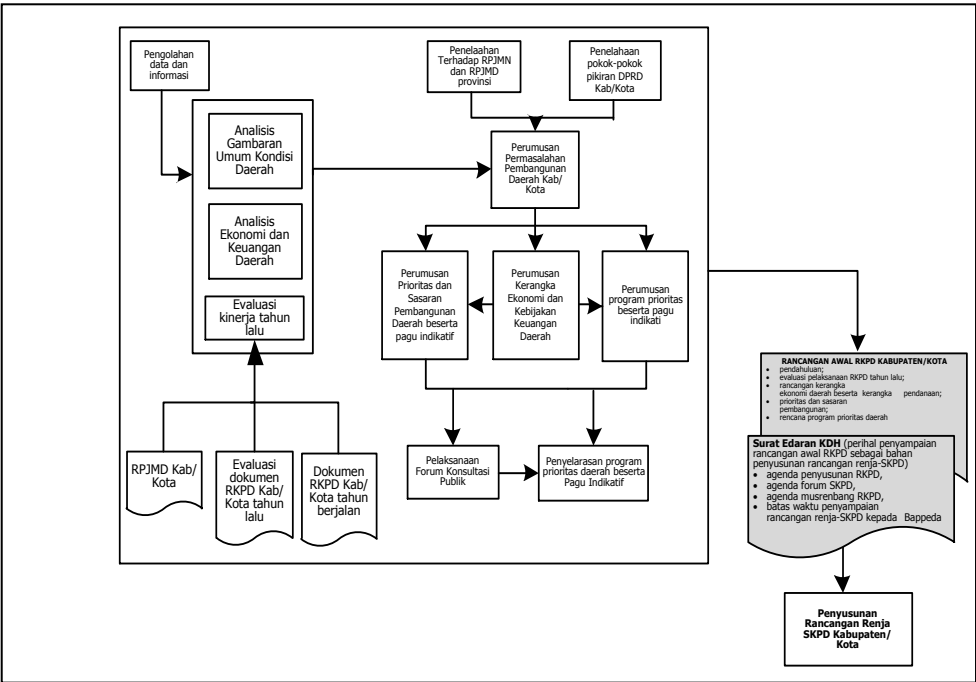
Dalam menerapkan hal tersebut, diperlukan suatu *Sistem Perencanaan* guna dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggung jawaban kinerja pemerintah daerah. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan memiliki sasaran yang terukur maka pemerintah pada tahun 2004 mengesahkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam rangka pembangunan yang bersifat tahunan berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pemerintah Daerah harus menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Akhir atau Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan APBD yang sekaligus menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Penyusunan Rancangan Akhir RKPD ini adalah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada bagian tiga pasal 20 ayat (2) tertulis bahwa Rancangan Akhir RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, untuk itu dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD tahun 2019 ini berdasarkan RPJPD Kota Jambi 2005-2025. Proses penyusunan Ranwal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1

Diagram alur penyusunan Rancangan Akhir RKPD 2019

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi tahun 2019 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
8. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 06 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jambi Tahun 2005 – 2025.
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005 – 2025.
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 – 2033.
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD merupakan penjabaran RPJPD Kota Jambi 2005-2025, dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2018 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 07 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Penyusunan Ranwal RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi dokumen ini harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota di Provinsi Jambi sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RANCANGAN AKHIR RKPD

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2019, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Kondisi Umum Daerah
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
 - 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
 - 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
 - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib
 - 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan
 - 2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Penunjang Urusan
 - 2.1.3.4. Fokus Layanan Urusan Pendukung
 - 2.1.3.5. Fokus Layanan Urusan Kewilayahan

- 2.1.3.6. Fokus Layanan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
 - 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
 - 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
 - 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi
 - 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia
 - 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program DAN Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
 - 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
- BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
 - 3.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah
 - 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
 - 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019
- BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB VII P E N U T U P

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1 Maksud

Sebagai upaya untuk menentukan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

1.5.2 Tujuan

- (1) Untuk menentukan Prioritas Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk menyusun program / kegiatan yang didasarkan pada Prinsip-prinsip Anggaran Kinerja dan Dokumen Perencanaan Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kota Jambi merupakan ibukota Provinsi Jambi yang lebih dikenal dengan sebutan “Tanah Pilih Pusako Betuah”. Wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Muaro Jambi baik dari arah Utara, Selatan, Barat, maupun Timur. Luas *de facto* Kota Jambi sesuai RTRW 175,53 Km² yang terdiri dari :

a) Kecamatan Kotabaru	= 26,26 Km (14,96 %)
b) Kecamatan Jambi Selatan	= 7,51 Km (4,27 %)
c) Kecamatan Jelutung	= 7,63 Km (4,34 %)
d) Kecamatan Pasar Jambi	= 1,67 Km (0,95 %)
e) Kecamatan Telanaipura	= 19,20 Km (10,93 %)
f) Kecamatan Danau Teluk	= 15,20 Km (8,65 %)
g) Kecamatan Pelayangan	= 12,77 Km (10,12 %)
h) Kecamatan Jambi Timur	= 14,32 Km (8,15 %)
i) Kecamatan Alam Barajo	= 39,87 Km (22,71 %)
j) Kecamatan Danau Sipin	= 7,27 Km (4,14 %)
k) Kecamatan Paal Merah	= 23,77 Km (13,54 %)

Secara geografi wilayah Kota Jambi terletak di antara 103°30'1,67" Bujur Timur sampai 103°40'0,22" Bujur Timur. 01°30'2,98" Lintang Selatan sampai 01°40'1,07" Lintang Selatan.

Geografi wilayah Kota Jambi secara keseluruhan terdiri atas daratan seluas 94,81% dan perairan seluas 5,19%. Topografi wilayah Kota Jambi terdiri dari sebagian besar datar (0-2%), bergelombang (2-8%), dan sedikit curam (8-15%) dengan komposisi sebagai berikut :

a) Datar (0-2%)	= 54,53 %
b) Bergelombang (2-8%)	= 24,66 %
c) Curam (8 – 15%)	= 15,62 %

Wilayah Kota Jambi memiliki ketinggian dengan kisaran 10 – 60 m dari permukaan laut. Berdasarkan kecamatan, sebagian besar wilayah Kecamatan Pasar Jambi, Pelayangan, dan Danau Teluk berada pada ketinggian 0 – 10 meter dari permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan

Telanaipura, Danau Sipin, Jambi Selatan, Paal Merah, Jelutung, Jambi Timur, Kotabaru, dan Alam Barajo sebagian besar berada pada ketinggian 10 – 60 meter dari permukaan laut.

Kota Jambi beriklim tropis. Musim hujan jatuh pada bulan Oktober sampai dengan bulan April (dipengaruhi oleh Musim Timur Selatan) dan musim kemarau pada bulan April sampai dengan bulan Oktober (dipengaruhi oleh Musim Barat). Suhu rata-rata terendah berkisar 26,0 °C dan tertinggi berkisar 34,9°C. Kelembaban udara rata-rata terendah berkisar 80% dan tertinggi berkisar 86%. Curah hujan rata-rata terendah berkisar 29,1 mm dan tertinggi berkisar 326,0 mm. Sedangkan kecepatan angin rata-rata terendah berkisar 16 knots dan tertinggi berkisar 28 knots.

Pemanfaatan lahan di Kota Jambi didominasi oleh permukiman dengan luasan lebih 26,48% dan Bangunan 13.56% dari total luas Kota Jambi. Isu penyediaan RTH sebesar minimal 30% dari total luas daerah tentunya masih sangat jauh untuk konteks pengembangan Kota Jambi, namun jika dilihat dari guna lahan kebun dan hutan saja sudah mencapai 30%. Akan tetapi hal ini belum sesuai amanat undang-undang dimana terkait kepemilikan RTH itu sendiri daerah wajib memenuhi RTH publik 20% dan 10% RTH Privat dari total luas wilayah. Pola Pemanfaatan lahan di Kota Jambi secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

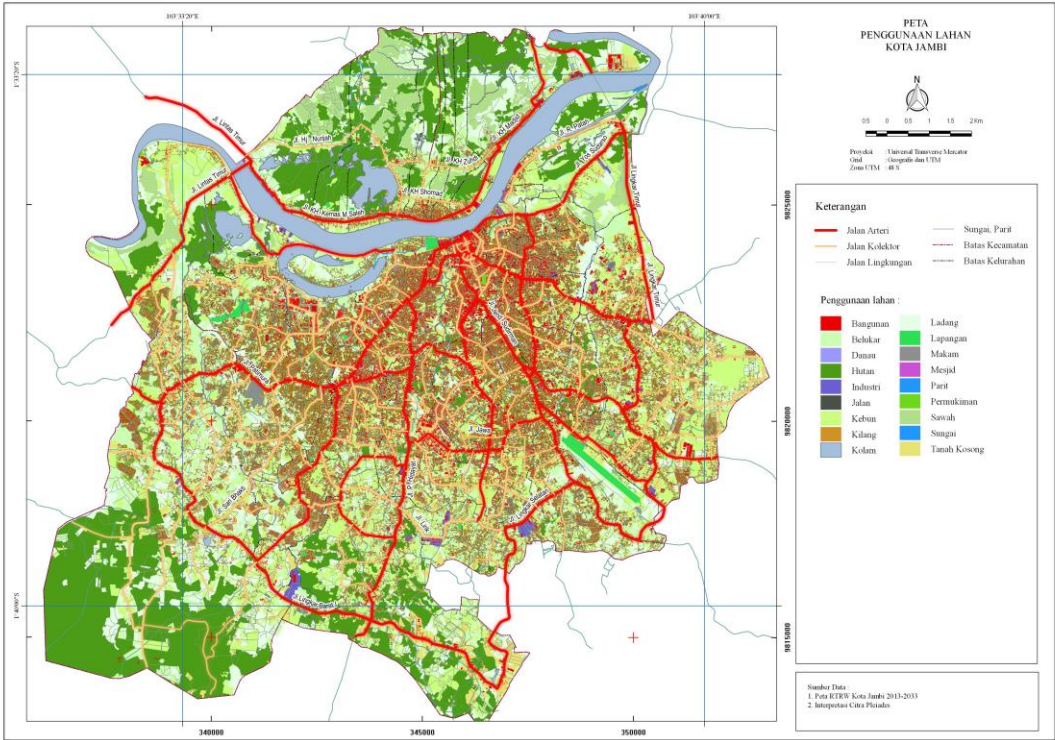
Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata, dengan tetap berpedoman pada RTRW Kota Jambi dan berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah juga, dapat diidentifikasi bahwa pada sebagian wilayah Kota Jambi berpotensi rawan bencana alam banjir dan kebakaran.

Tabel 2.1
Pola Pemanfaatan Lahan di Kota Jambi tahun 2017

Landuse	Luas(Ha)	%
Bangunan	2,379.720	13.56%
Belukar	1,073.119	6.11%
Danau	244.523	1.39%
Hutan	3,209.340	18.29%
Industri	112.632	0.64%
Jalan	743.723	4.24%
Kebun	2,083.129	11.87%
Kilang	0.277	0.00%
Kolam	99.629	0.57%
Ladang	1,181.382	6.73%
Lapangan	29.429	0.17%
Makam	33.907	0.19%
Mesjid	13.423	0.08%
Parit	22.883	0.13%
Permukiman	4,647.976	26.48%
Sawah	635.861	3.62%
Sungai	757.662	4.32%
Tanah Kosong	284.384	1.60%
Grand Total	17553	100.00%

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi 2017

Sedangkan peta tutupan lahan di Kota Jambi bisa dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1
Peta Tutupan Lahan Kota Jambi Tahun 2017

Penduduk Kota Jambi adalah heterogen, jumlah penduduk Kota Jambi Tahun 2017 tercatat **609.620 jiwa**. Dilihat dari segi kepadatan penduduk tahun 2017 maka kepadatan per Km² menurut Kecamatan adalah:

- a) Kecamatan Kotabaru = 2.911 Orang/Km²
- b) Kecamatan Jambi Selatan = 7.410 Orang/Km²
- c) Kecamatan Jelutung = 9.581 Orang/Km²
- d) Kecamatan Pasar Jambi = 9.202 Orang/Km²
- e) Kecamatan Telanaipura = 2.888 Orang/Km²
- f) Kecamatan Danau Teluk = 839 Orang/Km²
- g) Kecamatan Pelayangan = 1.061 Orang/Km²
- h) Kecamatan Jambi Timur = 5.105 Orang/Km²
- i) Kecamatan Alam Barajo = 2.483 Orang/Km²
- j) Kecamatan Danau Sipin = 7.818 Orang/Km²
- k) Kecamatan Paal Merah = 3.927 Orang/Km²

Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan (*sex ratio : 103,10*).

Jumlah penduduk Kota Jambi menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
 Jumlah Penduduk Kota Jambi
 Menurut Jenis Kelamin Tahun ,2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017

No	Penduduk	J u m l a h				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Laki-laki	273,490	283,832	306,151	309,089	309.456
2	Perempuan	265,752	275,739	296,819	298,707	300.164
J u m l a h		539,242	559,571	602,970	607,796	609.062
Sex Rasio		102,91	102,94	103,14	103,48	103,10

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi

Tingkat kepadatan penduduk Kota Jambi secara rata-rata berdasarkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah Kota Jambi masih tergolong jarang. Namun tingkat kepadatan penduduk untuk kawasan perkotaan sudah tergolong cukup padat. Pada tahun 2017 tingkat kepadatan penduduk rata-rata Kota Jambi adalah 4.839 jiwa/km².

Dari aspek ketenagakerjaan, persentase pekerjaan penduduk Kota Jambi yang berusia di atas 15 tahun adalah :

- 1. Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan ----- 4.98 %
- 2. Industri Pengolahan ----- 7.85 %

3. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan & Hotel ----- 35.60 %
4. Jasa Kemasyarakatan----- 27.68 %
5. Lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, persewaan dan Jasa Perusahaan ---- 23.89 %
- Data Sakesnas 2015

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Secara umum gambaran kondisi ekonomi makro Kota Jambi dapat digambarkan melalui variabel ekonomi diantaranya PDRB, laju inflasi, Pertumbuhan ekonomi, Tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan Gini Ratio.

Tabel 2.3
Pertumbuhan ekonomi, Tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan Gini Ratio Kota Jambi

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Target 2019
Pertumbuhan ekonomi	7,67	8,50	8,17	5,56	Dtt	Dtt	7,35
Tingkat kemiskinan	9,96	8,94	9,67	8,87	8,84	Dtt	8,67
Tingkat Pengangguran	7,44	10,13	7,32	Dtt	Dtt	Dtt	5,10
Gini Ratio	0,34	0,33	0,39	0,38	0,39	Dtt	0,36

Sumber : BPS Provinsi Jambi

a. PDRB

Pembentukan struktur ekonomi Kota Jambi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari perkembangan PDRB Kota Jambi. Berikut disampaikan perkembangan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di Kota Jambi.

Tabel 2.4
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016**
Atas Dasar Harga Konstan Seri 2010 Kota Jambi

NO	Sektor	2012		2013		2014		2015*		2016**	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Rp)	%
A	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	160.061,77	1,25	167.004,31	1,20	176.100,19	1,17	180.644,75	1,13	183.855,40	1,08
B	Pertambangan & Penggalian	739.002,86	5,75	760.239,31	5,45	766.189,06	5,08	595.342,33	3,74	578.341,06	3,40
C	Industri Pengolahan	1.651.457,11	12,85	1.751.315,06	12,56	1.866.508,19	12,38	1.962.940,77	12,33	2.045.888,96	12,03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21.569,17	0,17	23.517,51	0,17	27.639,64	0,18	29.450,48	0,18	31.178,23	0,18

NO	Sektor	2012		2013		2014		2015*		2016**	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Rp)	%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	38.233,88	0,30	38.816,89	0,28	40.081,26	0,27	41.270,38	0,26	42.990,45	0,25
F	Konstruksi	1.113.983,86	8,67	1.421.240,67	10,20	1.479.150,45	9,81	1.516.106,75	9,52	1.578.659,80	9,28
G	Perdagangan Besar dan Ecran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.039.039,39	23,65	3.318.509,55	23,81	3.763.510,19	24,96	4.219.917,98	26,51	4.544.458,55	26,72
H	Transportasi dan Pergudangan	1.606.566,45	12,50	1.744.401,74	12,51	1.887.577,49	12,52	1.995.122,52	12,53	2.242.842,84	13,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	263.445,78	2,05	280.183,67	2,01	336.428,67	2,23	350.227,18	2,20	379.073,77	2,23
J	Informasi dan Komunikasi	648.472,85	5,05	683.711,96	4,90	709.840,16	4,71	776.304,68	4,88	843.486,09	4,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	793.173,59	6,17	889.807,88	6,38	919.657,88	6,10	936.666,28	5,88	1.050.080,18	6,17
L	Real Estate	362.069,82	2,82	377.286,48	2,71	392.461,27	2,60	402.011,46	2,53	421.727,51	2,48
M,N	Jasa Perusahaan	384.549,08	2,99	394.128,81	2,83	418.398,68	2,77	446.930,08	2,81	476.179,42	2,80
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	985.000,25	7,67	996.421,76	7,15	1.142.178,95	7,57	1.215.546,12	7,63	1.251.814,37	7,36
P	Jasa Pendidikan	647.201,33	5,04	665.362,67	4,77	674.122,54	4,47	725.595,57	4,56	771.534,47	4,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	284.804,47	2,22	315.471,84	2,26	364.416,91	2,42	401.894,32	2,52	430.571,09	2,53
R,S, T,U	Jasa Lainnya	109.509,64	0,85	112.315,14	0,81	115.968,00	0,77	125.234,41	0,79	133.095,94	0,78
	PDRB	12.848.141,29	100	13.939.735,24	100	15.080.229,51	100	15.921.206,06	100	17.005.778,14	100
	PDRB Tanpa Migas	12.172.332,21	94,74	13.247.719,94	95,04	14.387.706,84	95,41	15.400.736,50	96,73	16.484.678,81	96,94

Sumber : BPS Kota Jambi
* Angka Perbaikan
** Angka Sementara

Nilai kontribusi masing-masing sektor PDRB didapatkan dari perhitungan total nilai PDRB tahun n dibagi dengan nilai masing-masing sektor PDRB tahun n dikali 100. Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Atas Harga Konstan Seri 2010 didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang kemudian diikuti sektor Transportasi dan Pergudangan serta sektor industri pengolahan. Sedangkan Atas Harga Berlaku nilai nilai dan kontribusi masing-masing sektor PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016**
Atas Dasar Harga Berlaku Seri 2010 Kota Jambi

NO	Sektor	2012		2013		2014		2015*		2016**	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Rp)	%
A	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	194.911,0	1,33	222.955,9	1,34	259.500,2	1,37	285.976,4	1,34	310.926,4	1,27
B	Pertambangan & Penggalian	844.923,1	5,78	934.925,6	5,64	945.870,0	4,98	601.713,1	2,82	564.833,2	2,31
C	Industri Pengolahan	1.839.981,9	12,58	1.988.887,0	11,99	2.254.423,9	11,88	2.467.766,5	11,56	2.655.297,7	10,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	24.741,8	0,17	24.084,1	0,15	30.776,1	0,16	38.209,0	0,18	47.918,2	0,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	40.791,6	0,28	47.188,9	0,28	51.108,5	0,27	56.355,4	0,26	62.059,2	0,25
F	Konstruksi	1.252.696,8	8,57	1.685.207,9	10,16	1.830.534,8	9,65	1.929.782,2	9,04	2.090.379,7	8,55
G	Perdagangan Besar dan Ecran, Reparasi Mobi dan Sepeda Motor	3.615.624,0	24,73	4.121.004,4	24,85	5.021.859,3	26,46	5.999.141,8	28,09	7.233.207,3	29,58
H	Transportasi dan Pergudangan	1.711.821,6	11,71	1.963.931,4	11,84	2.162.103,7	11,39	2.535.824,6	11,88	3.072.603,0	12,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	311.882,1	2,13	357.047,0	2,15	439.121,6	2,31	484.230,5	2,27	558.390,6	2,28
J	Informasi dan Komunikasi	674.470,7	4,61	721.768,2	4,35	788.716,6	4,16	941.735,8	4,41	1.115.130,2	4,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	920.275,3	6,29	1.090.057,0	6,57	1.179.766,0	6,22	1.251.236,8	5,86	1.465.861,8	6,00
L	Real Estate	409.178,9	2,80	437.891,0	2,64	480.596,2	2,53	526.996,7	2,47	586.664,0	2,40
M,N	Jasa Perusahaan	457.466,2	3,13	497.993,6	3,00	554.290,1	2,92	633.413,1	2,97	729.191,4	2,98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.114.675,4	7,62	1.208.885,7	7,29	1.597.559,5	8,42	2.021.306,5	9,47	2.152.994,6	8,81
P	Jasa Pendidikan	783.477,6	5,36	813.561,0	4,91	830.899,7	4,38	956.332,3	4,48	1.091.377,9	4,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	308.018,8	2,11	346.359,9	2,09	419.766,2	2,21	473.040,5	2,22	544.568,9	2,23
R,S,T,U	Jasa Lainnya	116.020,2	0,79	122.196,4	0,74	130.618,2	0,69	150.391,9	0,70	169.123,8	0,69
	PDRB	14.620.956,9	100,0	16.583.945,0	100,0	18.977.510,7	100,0	21.353.452,9	100,0	24.450.528,0	100,0
	PDRB Tanpa Migas	13.849.813,7	94,73	15.735.286,7	94,88	18.129.994,9	95,53	20.855.763,7	97,67	23.967.718,6	98,03

Sumber : BPS Kota Jambi

* Angka Perbaikan

** Angka Sementara

Nilai kontribusi masing-masing sektor PDRB didapatkan dari perhitungan total nilai PDRB tahun n dibagi dengan nilai masing-masing sektor PDRB tahun n dikali 100. Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Seri 2010 dalam didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang kemudian diikuti sektor Transportasi dan Pergudangan serta sektor industri pengolahan.

Perkembangan nilai kontribusi masing-masing sektor PDRB didapatkan dari perhitungan masing-masing nilai sektor PDRB tahun n dikurang masing-masing nilai sektor PDRB tahun n-1, lalu dibagi dengan nilai masing-masing nilai sektor PDRB tahun n dikali 100. Dari tabel di atas diketahui bahwa Atas Dasar Harga Berlaku maupun Harga Konstan Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB didominasi oleh sektor tersier yang mempunyai prospek perkembangan yang signifikan. Sedangkan sektor primer (Pertanian, Kehutanan & Perikanan) mengalami perlambatan, begitu pula dengan sektor sekunder (Pertambangan & Penggalian) juga mengalami perlambatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kota Jambi telah berhasil mewujudkan visinya sebagai pusat perdagangan dan jasa.

Selanjutnya disampaikan pertumbuhan kontribusi sektor dan PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan dari tahun 2012 ke tahun 2016 seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
 dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016
 Kota Jambi

NO	Sektor	Pertumbuhan	
		Hb	Hk
		%	%
A	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	59,52	14,87
B	Pertambangan & Penggalian	(33,15)	(21,74)
C	Industri Pengolahan	44,31	23,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	93,67	44,55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	52,14	12,44
F	Konstruksi	66,87	41,71
G	Perdagangan Besar dan Ecran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	100,05	49,54
H	Transportasi dan Pergudangan	79,49	39,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	79,04	43,89
J	Informasi dan Komunikasi	65,33	30,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	59,29	32,39
L	Real Estate	43,38	16,48
M,N	Jasa Perusahaan	59,40	23,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	93,15	27,09
P	Jasa Pendidikan	39,30	19,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	76,80	51,18
R,S,T,U	Jasa Lainnya	45,77	21,54
	PDRB	67,23	32,36
	PDRB Tanpa Migas	73,05	35,43

Sumber : BPS Kota Jambi

Pertumbuhan nilai kontribusi masing-masing sektor PDRB didapatkan dari perhitungan masing-masing nilai sektor PDRB pada tahun 2016 dikurang masing-masing nilai sektor PDRB pada tahun 2012, lalu dibagi dengan nilai masing-masing nilai sektor PDRB tahun 2016 dikali 100. Dari tabel di atas diketahui bahwa Pertumbuhan Kontribusi Sektor PDRB tahun 2012 ke tahun 2016 terbesar adalah dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 100,05% (hb) dan 49,54% (hk). Sedangkan sektor yang mengalami perlambatan adalah Pertambangan & Penggalian - 33,15% (hb) dan -21,74% (hk), hal ini dikarenakan Kota Jambi bukan sebagai daerah pertambangan.

b. Laju Inflasi

Laju inflasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
 Nilai inflasi rata-rata Tahun 2013 s.d 2017
 Kota Jambi

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
Inflasi	8,74	8,72	1,37	4,54	2,68	5,21

Sumber : BPS Kota Jambi

Laju inflasi Kota Jambi selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam hal *administered price* terutama kenaikan BBM dan tarif dasar listrik pada tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2015, terjadi penurunan laju inflasi yang terimplikasi dari penurunan aktivitas ekonomi yang disebabkan oleh kebakaran lahan dan kabut asap. Untuk tahun 2016 dan 2017 laju inflasi terjadi pada kelompok *volatile food*.

Laju inflasi Kota Jambi tahun 2017 terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 7 (tujuh) kelompok pengeluaran yaitu kelompok bahan makanan sebesar 3,69 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,17 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,30 persen, kelompok sandang sebesar 0,14 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,09 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,62 persen serta kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 2,77 persen.

Jika melihat inflasi pada tahun 2016 dan 2017 yang terjadi pada *volatile food* maka kebijakan yang perlu diambil antara lain adalah fokus pada peningkatan jumlah pasokan dengan memperhatikan tata niaga perdagangan, memperbaiki sarana dan prasarana pasar dan menumbuhkan kembangkan usaha pedagang-pedagang kecil. Dengan kegiatan yang diarahkan pada Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dan melaksanakan penyuluhan sumber-sumber pangan alternatif yang disesuaikan dengan kondisi Kota Jambi.

Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Angka melek huruf

Adapun perkembangan angka melek huruf di Kota Jambi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2013 s.d 2017
Kota Jambi

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	411.458	419.340	406.997	461.118	461.198
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	418.164	425.462	407.235	461.203	461.257
3	Angka melek huruf	0,983963	0,985611	0,9999	0,9998	0,9999

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi

Melek huruf dapat disebut juga dengan melek aksara yaitu kemampuan membaca dan menulis, jadi angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang adibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas, dimana pada data tersebut angka melek huruf untuk Penduduk diatas 15 tahun sudah sangat baik tinggal 0.0001 yang menjadi PR kita.

b. Angka rata-rata lama sekolah

Sedangkan perkembangan rata-rata lama sekolah di Kota Jambi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2012 s.d 2016
Kota Jambi

URAIAN	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,56	10,57	10,62	10,63	10,65

Sumber : BPS Provinsi Jambi

c. Angka partisipasi kasar

Perkembangan angka partisipasi kasar di Kota Jambi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10
Angka Partisipasi Kasar
SD/MI/Paket A, SMP/MTS/Paket B dan SMA/SMK/Paket C
Tahun 2013 s.d 2017 Kota Jambi

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
SD/MI/Paket A						
1	Jumlah Siswa di Jenjang SD	64,398	70,520	71,011	71,197	73.485
2	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	60,992	64,793	65,228	65,393	66.234
3	APK SD/MI, Paket A	105.58%	108.84%	108.87%	108.88%	110.95
SMP/MTS/Paket B						
1	Jumlah Siswa di Jenjang SMP	24,634	24,634	34,894	35,962	34.985
2	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun	22,633	22,633	31,614	32,574	31.236
3	APK SMP/MTS, Paket B	108.84%	108.84%	110.38%	110.40%	112.00
SMA/SMK/Paket C						
1	Jumlah Siswa di Jenjang SMA	28,955	28,955	35,015	33,710	Pengelolaan Provinsi
2	Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun	32,201	32,201	38,532	35,984	Pengelolaan Provinsi
3	APK SMA/SMK, Paket C	89.92%	89.92%	90.87%	93.68%	Pengelolaan Provinsi

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi

Angka Partisipasi kasar adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu dimana pada data diatas menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sudah tinggi.

d. Angka pendidikan yang ditamatkan

Angka Pendidikan yang Ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 presentase pendidikan yang ditamatkan stabil dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Angka Kelulusan SD/MI
Tahun 2013 s.d 2017 Kota Jambi

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SD	10.695	9.842	11.164	11.164	11.074
2	Jumlah Siswa SD	10.695	9.842	11.164	11.164	11.074
3	Angka Kelulusan SD/MI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi

Tabel 2.12
Angka Kelulusan SMP/MTS
Tahun 2013 s.d 2017 Kota Jambi

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SMP/MTS	7.383	10.551	13.448	13.448	13.343
2	Jumlah Siswa SMP/MTS	7.465	10.551	13.448	13.448	13.343
3	Angka Kelulusan SMP/MTS	98,90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi

e. Angka partisipasi murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan Persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama dengan kata lain APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat daya serap partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Angka Partisipasi Murni
SD/MI/Paket A, SMP/MTS/Paket B dan SMA/SMK/Paket C
Tahun 2012 s.d 2016 Kota Jambi

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
SD/MI/Paket A						
1	Jumlah Siswa Usia 7-12 tahun	60,847	64,684	65,154	65,325	66.212
2	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	60,992	64,793	65,228	65,393	66.234
3	APM SD/MI, Paket A	99.76%	99.83%	99.89%	99.90%	99.97%
SMP/MTS/Paket B						
1	Jumlah Siswa Usia 13-15 tahun	20,679	29,573	30,775	29,989	29.698
No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
2	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun	22,633	31,614	32,574	31,614	31.236
3	APM SMP/MTS, Paket B	91.37%	93.54%	94.48%	94.86%	95.08%

SMA/SMK/Paket C						
1	Jumlah Siswa Usia 16-18 tahun	23,865	30,140	28,436	28,162	Pengelolaan Provinsi
2	Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun	32,201	38,532	35,984	36,550	Pengelolaan Provinsi
3	APM SMA/SMK, Paket C	74.11%	78.22%	79.02%	79.22%	Pengelolaan Provinsi

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi

f. Angka kelangsungan hidup bayi

Tabel 2.14
Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Tahun 2013 s.d 2017 Kota Jambi

No	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Kematian Bayi	27	9	9	9	12
2	Jumlah Kelahiran Hidup	13.592	13.079	12.745	10.430	13.039

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Jambi

g. Persentase balita gizi buruk

Tabel 2.15
Persentase balita gizi buruk
Tahun 2013 s.d 2017 Kota Jambi

No	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Balita Gizi Buruk	18	10	11	5	6
2	Jumlah Balita	59.462	56.670	58.012	52.933	72.942
3	Rasio PBGB (%)	0.03%	0.02%	0.02	0.01	0.01

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Jambi

h. bekerja

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Adapun rasio penduduk yang bekerja di Kota Jambi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16
Rasio Penduduk yang Bekerja Kota Jambi Tahun 2013 s.d 2017

No	Uraian	TAHUN					
		2012	2013	2014	2015	2016***	2017
1	Penduduk Yang Bekerja (PYB)	226.607	230.478	235.722	254.351	-	268.264
2	Angkatan Kerja (AK)	238.264	248.663	262.291	274.449	-	284.018
	Rasio PYB (%)	95,11	92,69	89,87	92,68	-	94,45

*** BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016 dikarenakan kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi

Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Salah satunya ditunjukkan dengan jumlah group kesenian di suatu daerah. Untuk Kota Jambi terjadi peningkatan jumlah group kesenian, dimana pada tahun 2012 terdapat 174 group kesenian sedangkan di tahun 2016 menjadi 185 grup kesenian. Dimana terjadi peningkatan group kesenian sebesar 6,32 %.

Untuk gedung kesenian, Kota Jambi sendiri dari tahun 2012 hingga sekarang belum memiliki gedung kesenian untuk menampung aktifitas berkesenian masyarakat Jambi. Mengenai penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2012 Kota Jambi telah menyelenggarakan 1 event kegiatan seni dan budaya, sedangkan di tahun 2016 telah menyelenggarakan sebanyak 5 event.

Tabel 2.17
Perkembangan Jumlah Group Kesenian dan Jumlah Gedung Kesenian
Tahun 2013 s.d 2017 Kota Jambi

No	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Grup Kesenian	Grup	185	185	185	185	185
2	Jumlah Gedung Kesenian	Unit	0	0	0	0	0
3	penyelenggaraan festival seni & budaya	Unit	1	3	3	5	5
4	Jumlah Penduduk	Jiwa	539,242	559,571	602,970	607,796	609,620
5	Rasio Grup Kesenian	Grup/10.000 jiwa	2,66	2,55	2,46	2,39	2,39

Sumber : Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Jambi

Tabel 2.18
Perkembangan Jumlah Benda,Situs, dan Kawasan Cagar Budaya
yang dilestarikan Tahun 2013 s.d 2017 Kota Jambi

No	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Benda Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	2	2	2	2	2
2	Situs Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	3	3	3	3	3
3	Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Jambi

Tabel 2.19
Pemuda dan Olahraga Kota Jambi
Tahun 2013 s.d 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Cabor Olahraga	28	28	28	28	28
2	Jumlah Gedung Olahraga	3	3	3	3	3
3	Jumlah Kegiatan Olahraga	28	28	28	28	11
4	Lapangan Olahraga	1	1	1	1	7
5	Jumlah Organisasi Pemuda	15	15	15	14	20
6	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	1	6	6	6	6

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khusus bagi penduduk usia sekolah, semakin tinggi Angka Partisipasi sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Untuk APS Kota Jambi disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.20
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Jambi
Tahun 2013 s.d 2017

NO	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1.	jumlah murid usia 7-12 thn	62.847	64.684	67.552	62.444	66.212
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	62.992	64.793	67.651	62.544	66.234
1.3.	APS SD/MI	99,769812	99,831772	99,85366	99,8401	99.990
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah murid usia 13-15 thn	28.369	29.573	30.357	27.918	29.698
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	30.948	31.614	32..420	27.968	31.236
2.3.	APS SMP/MTs	91,666667	93,543999	93,63	99,821	95.076

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi

Sedangkan perkembangan Angka Partisipasi Sekolah menurut kecamatan tahun 2017 di sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.21
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Jambi
Tahun 2017 Menurut Kecamatan

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		jumlah murid umur 7-12 tahun	jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	jumlah murid umur 13-15 tahun	jumlah penduduk usia 13-15 th	APS
1	2	3	4	(5=3/4)	6	7	(8=6/7)
1	Kec. Alam Barajo	8.254	8.256	2.064	2.179	2.645	0,824
2	Kec. Danau Sipin	4.620	4.626	1.155	3.397	3.402	0,999
3	Kec. Danau Teluk	1.456	1.461	364	584	624	0,936
4	Kec. Jambi Selatan	7.856	7.857	1.964	3.045	3.322	0,917
5	Kec. Jambi Timur	9.779	9.780	2.445	4.425	4.465	0,991
6	Kec. Jelutung	7.452	7.455	1.863	1.917	2.017	0,950
7	Kec. Kota Baru	7.650	7.651	1.913	4.802	5.214	0,921
8	Kec. Paal Merah	7.781	7.782	1.945	4.125	4.254	0,970
9	Kec. Pasar Jambi	1.258	1.259	315	1.258	1.354	0,929
10	Kec. Pelayangan	1.167	1.168	292	124	185	0,670
11	Kec. Telanai Pura	8.939	8.939	2.235	3.842	3.754	1,023
JUMLAH		66.212,00	66.234,00	16.553,00	29.698,00	31.236,00	10,13

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi

Analisis rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di Kota Jambi disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.22
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Jambi
Tahun 2013 s.d 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	2.317	2.327	2.327	2.432	2.595
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	62.992	64.793	67.651	62.544	66.212
1.3.	Rasio	0,0367824	0,0359144	0,0343971	0,038846	0,03919229
2.	SMP/MTS					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	997	1.007	1.007	1.007	1.125
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	30.948	31.614	30.357	27.968	29.698
2.3.	Rasio	0,0322153	0,031853	0,0331719	0,0360054	0,0378813

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi

Sedangkan ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah menurut kecamatan tahun 2017 di sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.23
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Jambi
Tahun 2017 Menurut Kecamatan

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
1	2	3	4	(5=3/4)	6	7	(8=6/7)
1	Kec. Alam Barajo	217	8.256	0,026283915	55	2645	0,0208
2	Kec. Danau Sipin	215	4.626	0,046476438	80	3.402	0,0235
3	Kec. Danau Teluk	82	1.461	0,056125941	28	624	0,0449
4	Kec. Jambi Selatan	348	7.857	0,044291714	114	3.322	0,0343
5	Kec. Jambi Timur	370	9.780	0,037832311	132	4.465	0,0296
6	Kec. Jelutung	287	7.455	0,038497653	71	2.017	0,0352
7	Kec. Kota Baru	314	7.651	0,041040387	245	5214	0,0470
8	Kec. Paal Merah	303	7.782	0,038936006	125	4.254	0,0294
9	Kec. Pasar Jambi	85	1259	0,0675139	85	1354	0,0628
10	Kec. Pelayangan	60	1168	0,051369863	15	185	0,0811
11	Kec. Telanai Pura	314	8939	0,035126972	175	3754	0,0466
Jumlah		2.595	66.234	0,4834951	1.125	31.236	0,455

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi

Pelayanan pendidikan juga dapat dilihat dari jumlah ketersediaan guru terhadap jumlah murid. Pada tahun 2016 untuk pendidikan dasar, rasio guru dengan murid sebesar 1 : 20. Untuk pendidikan menengah, rasio guru dengan murid sebesar 1 : 20. Sedangkan untuk tahun 2017 rasio guru dengan murid untuk pendidikan dasar mengalami peningkatan. Untuk pendidikan menengah, rasio guru dengan murid sedikit lebih meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan berupa penyediaan guru masih belum memadai sehingga perlu ditingkatkan. Selain itu, meskipun telah terjadi berbagai peningkatan yang cukup berarti, pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan merata, berkualitas dan terjangkau. Sebagian masyarakat berpendapat pendidikan belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sehingga belum dinilai sebagai bentuk investasi. Adapun rasio jumlah guru terhadap jumlah murid Kota Jambi dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.24
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kota Jambi
Tahun 2013 s.d 2017

NO	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	3.267	3.561	3.477	3.354	3.607
1.2.	Jumlah Murid	65.732	69.870	69.958	69.973	66.212
1.3.	Rasio	0,0497018	0,0509661	0,04970125	0,047933	0.054476
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	2.228	2.269	2.295	2.273	1.777
2.2.	Jumlah Murid	24.835	34.710	34.838	34.928	29.698
2.3.	Rasio	0,0897121	0,0653702	0,06587634	0,065077	0.059835

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi

Sedangkan jumlah guru dan murid jenjang pendidikan dasar menurut kecamatan tahun 2017 di sajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.25
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kota Jambi
Menurut Kecamatan

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	2	3	4	(5=3/4)	6	7	(8=6/7)
1	Kec. Alam Barajo	412	8.254	0,049915193	139	2.179	0,06379073
2	Kec. Danau Sipin	294	4.620	0,063636364	167	3.397	0,049161024
3	Kec. Danau Teluk	104	1.456	0,071428571	28	584	0,047945205
4	Kec. Jambi Selatan	401	7.856	0,051043788	126	3.045	0,04137931
5	Kec. Jambi Timur	578	9.779	0,059106248	268	4.425	0,060564972
6	Kec. Jelutung	456	7.452	0,061191626	120	1.917	0,062597809
7	Kec. Kota Baru	392	7.650	0,05124183	310	4.802	0,064556435
8	Kec. Paal Merah	328	7.781	0,042153965	205	4.125	0,04969697
9	Kec. Pasar Jambi	79	1.258	0,062798092	133	1.258	0,10572337
10	Kec. Pelayangan	90	1.167	0,077120823	18	124	0,14516129
11	Kec. Telanai Pura	473	8.939	0,052914196	263	3842	0,06845393
Jumlah		3.607	66.212	0,054476529	1.777	29.698	0.05983567

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi

Tabel 2.26
Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA
Kota Jambi

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
SD/MI/Paket A						
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SD	10,695	9,842	11,164	11,164	11.074
2	Jumlah Siswa SD	10,695	9,842	11,164	11,164	11.074
3	Angka Kelulusan SD/MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
SMP/MTS/Paket B						
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang	7,383	10,551	13,448	13,448	13.343

	SMP/MTS					
2	Jumlah Siswa SMP/MTS	7,465	10,551	13,448	13,448	13.343
3	Angka Kelulusan SMP/MTS	98.90%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
SMA/SMK/Paket C						
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SMA/SMK	8,674	9,918	10,533	10,533	Pengelolaan Provinsi
2	Jumlah Siswa SMA/SMK	8,680	9,922	10,533	10,533	Pengelolaan Provinsi
3	Angka Kelulusan SMA/SMK	99.93%	99.96%	100.00%	100.00%	Pengelolaan Provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi

b. Kesehatan

Rasio Posyandu Per Satuan Balita, Rasio Rumah Sakit, Puskesmas/Pustu dan Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Jambi disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.27
Rasio Posyandu Per satuan Balita

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Posyandu	453	459	460	460	460
2	Jumlah Balita	59.462	56.670	58.012	52.933	72.942
3	Rasio RPPB (%)	7,62	8,10	7,93	8,69	6,31

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi

Tabel 2.28
Rasio Rumah Sakit Per satuan Penduduk

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Rumah Sakit	17	17	14	14	17
2	Jumlah Penduduk	539,242	559,571	602,970	607,796	609,620
3	Rasio RSPP (%)	0,003	0,003	0,002	0,002	0,003

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi

Tabel 2.29
Rasio Puskesmas/Pustu Per Satuan Penduduk

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	58	58	58	59	59
2	Jumlah Penduduk	539,242	559,571	602,970	607,796	609,620
3	Rasio P5 (%)	0,011	0,010	0,010	0,010	0,010

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi

Tabel 2.30
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah dokter	252	258	255	255	59
2	Jumlah Penduduk	539,242	559,571	602,970	607,796	609,620
3	Rasio DPP (%)	0,047	0,046	0,042	0,042	0,010

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor dan diantaranya adalah layanan kesehatan. Efektifitas layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain: (1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan; (2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat, bidan dan apoteker; dan (3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan.

Pada tahun 2016, jumlah rumah sakit di Kota Jambi sebanyak 15 unit, puskesmas ini sebanyak 20 unit terdiri dari puskesmas perawatan 3 unit, puskesmas Non perawatan 17 unit, puskesmas pembantu 39 unit, dan poskesdes 8 unit. Pemberi layanan kesehatan, terdiri dari dokter umum sebanyak 185 orang, dokter spesialis 189 orang, dokter gigi 53 orang, bidan 529 orang, dan perawat sebanyak 1.216 orang.

Upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilakukan secara rawat jalan bagi masyarakat yang mendapat gangguan kesehatan ringan dan pelayanan rawat inap bagi masyarakat yang mendapatkan gangguan kesehatan hingga berat. Sebagian besar sarana pelayanan puskesmas dipersiapkan untuk pelayanan kesehatan dasar terutama pelayanan rawat jalan, sedangkan rumah sakit disamping memberikan pelayanan pada kasus rujukan untuk rawat inap juga melayani kunjungan rawat jalan.

Untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Jambi telah menambah pelayanan puskesmas menjadi 24 jam di 20 Puskesmas yang menerima pelayanan Poliklinik Umum, Ibu Hamil dan Emergensi, yaitu Puskesmas AurDuri, Simpang IV Sipin, Tanjung Pinang, Talang Banjar, Kebun Kopi, Tahtul Yaman, Koni, Paal V, Paal X, Simpang Kawat, Kebun Handil, Talang Bakung, Payo Selincah, Paal Merah I, Paal Merah II, Kenali Besar dan Rawasari. Selain itu ada 3 Puskesmas yang terakreditasi yang memiliki mutu pelayanan, SDM dan sarana prasarana yang baik yang sesuai dengan standarisasi akreditasi, meliputi Puskesmas Pakuan Baru, Tanjung Pinang dan Simpang kawat dan Puskesmas yang rawat inap 24 jam ada 3 Puskesmas yaitu Puskesmas PakuanBaru, Olak Kemang dan Puti Ayu.

Sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Manap yang merupakan satu-satunya rumah sakit milik Pemerintah Kota Jambi melayani pasien umum, pasien yang menggunakan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), Jamsostek, Trimitra dan BPJS. Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Manap merupakan Rumah Sakit Rujukan Regional Wilayah Timur untuk Rumah Sakit yang memiliki Type C meliputi Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjabtim.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur wilayah yang menjadi fokus kegiatan pekerjaan umum pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari penataan ruang. Dimana infrastruktur diharapkan menjadi *trigger* bagi tumbuh kembangnya pusat-pusat kegiatan baru yang bersinergi dan lebih lanjut berimplikasi pada akselerasi pembangunan dan perekonomian daerah.

Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur jalan, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah.

Pada kawasan perkotaan seperti Kota Jambi, ketersediaan infrastruktur jalan menjadi salah satu yang mendapat perhatian khusus. Hal ini tentunya tidak lepas dari pesatnya pertumbuhan perkotaan yang mengakibatkan daya tampung jalan semakin berkurang dan membutuhkan operasional cost yang mumpuni untuk memastikan kualitasnya dalam kondisi baik. Kondisi status jalan kota dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31

Tabel Rasio Panjang Jalan Yang Baik di Kota Jambi

No	Variabel	2013	2014	2015	2016	2017
1	Panjang Jalan Status Kota (Km)	506.67	506.67	506.67	510.452	510.452
2	Panjang Jalan Kondisi Baik (Km)	331.56	344.54	431.38	456.00	466.14
3	Ratio Jaringan Jalan Kondisi Baik (%)	65.44	68.10	85.14	90.00	92.00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi

Dari tabel diatas dapat dilihat dalam lima tahun terakhir rasio panjang jalan yang baik di Kota Jambi setiap tahunnya terus mengalami perbaikan. Khususnya pada periode 5 tahun terakhir dimana peningkatan rata-rata ratio panjang jalan yang baik berkisar $\pm 6,29\%$ dan ditambah lagi dengan peningkatan panjang jalan status kota dari 506,67 Km menjadi 510,452 Km pada tahun 2017. Sebagai dampak dari inventarisir jalan kota berbasis GIS serta adanya peningkatan status jalan lingkungan yang diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat khususnya terkait aksesibilitas kawasan perkotaan.

Sedangkan untuk transportasi udara di Kota Jambi dilayani oleh Bandar Udara Sultan Thaha Saifudin dan transportasi sungai di Kota Jambi terbatas bagi kapal motor yang tidak terlalu besar, mengingat kondisi sedimentasi yang berpengaruh pada kedalaman Sungai Batanghari. Untuk memasok kebutuhan bahan pangan untuk Kota Jambi di lakukan bongkar muat di Dermaga Angso Duo baru. Untuk keperluan Bongkar Muat kapal yang besar pelayanannya dilakukan melalui Pelabuhan Talang Duku yang berada di Kabupaten Muaro Jambi.

Pada aspek infrastruktur sumber daya air, kondisi infrastruktur yang mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai. Potensi sumber daya air di Kota Jambi yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan domestik.

Sungai Batanghari yang melintasi Kota Jambi merupakan bagian dari Sub DAS Batanghari hilir yang masih berada dalam kesatuan DAS Batanghari. Sub DAS Batanghari hilir memiliki luas 861.904 Ha, panjang sungai 2.287,33 Km, dan keliling Sub DAS 630.693,80 Km. Sedangkan panjang sungai Batanghari yang melintasi Kota Jambi yaitu ± 18 Km. Posisinya yang termasuk bagian hilir dari DAS Batanghari membuat sungai Batanghari yang berada di Kota Jambi juga mendapatkan imbas dari kondisi lingkungan di hulunya. Sedimentasi DAS Batanghari saat ini semakin parah, penyebabnya diduga adalah usaha pertambangan, penebangan liar, perkebunan (sawit), dan adanya industri pengolahan kayu (*sawmill*/penggergajian kayu) di

sepanjang DAS Batanghari baik legal maupun illegal, serta kegiatan permukiman yang berada di sepanjang sungai.

Berdasarkan analisis status mutunya pada stasiun pemantauan kualitas air Sungai Batanghari telah tercemar berat dan untuk beberapa parameter tidak memenuhi kriteria mutu air kelas I dan II. Penggunaan air sungai Batanghari sebagai sumber Baku Air Minum perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut sesuai dengan kondisinya sehingga memenuhi syarat untuk baku mutu air minum. Namun demikian Pemerintah Kota Jambi juga terus berupaya menggali potensi sumber air baku yang baru seperti halnya rencana pembangunan embung pada lokasi yang memungkinkan.

Untuk meminimalisir ekses negatif seperti banjir dan peningkatan tingkat pencemaran, dinilai perlu dilakukan peningkatan jaringan drainase Kota Jambi. Dimana sesuai SK Walikota Jambi Nomor 464 Tahun 2016 total panjang drainase Kota Jambi adalah 127,2 Km dengan capaian realisasi panjang drainase dalam kondisi baik dalam tabel berikut.

Tabel 2.32

Tabel Rasio Panjang Drainase Yang Baik di Kota Jambi

No	Variabel	2013	2014	2015	2016	2017
1	Panjang Drainase Status Kota (Km)	127,2	127,2	127,2	127,2	127,2
2	Panjang Drainase Kondisi Baik (Km)	59,36	70,27	105,94	107,10	114.48
3	Ratio Jaringan Drainase Kondisi Baik (%)	46,67	57,60	83,29	84,20	90.00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat dalam lima tahun terakhir rasio panjang Drainase yang baik di Kota Jambi setiap tahunnya terus mengalami perbaikan. Khususnya pada periode 5 tahun terakhir dimana peningkatan rata-rata ratio panjang jalan yang baik berkisar $\pm 11,34\%$ per tahunnya.

Terkait dengan kurusan penataan ruang dimana rasio ketaatan terhadap RTRW ditargetkan sebesar 100% setiap tahunnya. Target capaian ini di wujudkan dengan cara tertib pemberian perizinan yang sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang terdiri dari rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan dan rencana kawasan strategis. Untuk indikator rasio ketaatan terhadap RTRW ditargetkan mencapai angka 100% setiap tahunnya belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini terlihat

masih adanya pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam RTRW, sebagai contoh pembuatan bangunan yang menyalahi ketentuan GSB (Garis Sepadan Bangunan), kemudian pemasangan papan merek reklame yang tidak memenuhi standar pemasangan yang telah ditetapkan. Bertolak dari beberapa pelanggaran yang masih ditemukan tersebut, ketaatan terhadap tata ruang juga menuntut lebih optimalnya fungsi pengawasan dari instansi teknis, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Jambi diminta untuk lebih profesional dan proaktif terkait ketertiban administrasi rekomendasi perizinan serta pengawasan.

Selain terkait ketaatan terhadap rencana tata ruang tersebut, pemenuhan rasio RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota Jambi sesuai amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi. Capaian target tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.33
Rasio Ruang Terbuka Hijau

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Luas Kota Jambi	17533	17533	17533	17533	17533
Luas RTH	1175.399	1193.724	1212.05	1272.145	1290.47
Ratio RTH	6.70%	6.81%	6.91%	7.26%	7.36%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Jambi

Tingginya harga dan terbatasnya lahan merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Jambi dalam mencapai target RTH tersebut. Sebagaimana tergambar pada tabel diatas rasio RTH di Kota Jambi pada tahun 2016 baru mencapai 7,36% atau seluas 1.290,47 ha. Hal ini tentunya masih jauh dari yang ditargetkan. Salah satu upaya yang dilakukan Kota Jambi adalah dengan terus melaksanakan “land banking” setiap tahunnya.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018 pada urusan ini dijabarkan dalam misi 1 yaitu membangun infrastruktur perkotaan yang merata dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas cakupan pelayanan infrastruktur dasar antara lain cakupan pelayanan jaringan air minum dan kecukupan lampu

penerangan jalan umum dan lampu taman. Peningkatan pelayanan dasar khususnya yang terkait dengan cakupan pelayanan jaringan air minum masih terus mengalami peningkatan, hal ini dapat terlihat dari data yang saat ini masih 75% yang artinya masih ada 25% lagi yang belum terlayani fasilitas air bersih khususnya dengan jaringan perpipaan.

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2019 pembangunan infrastruktur masih menitikberatkan dalam peningkatan pelayanan dan sambungan air bersih.

Tabel 2.34
 Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Jambi

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	61,661 SR	62,883 SR	63,429 SR	69,379 SR	72,965 SR
Cakupan Pelayanan	65%	66%	66%	72%	75%

Sumber : Data PDAM Tirta Mayang (data diolah)

Selain dari cakupan pelayanan air bersih dan kecukupan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018 pada Urusan Perumahan yang dijabarkan dalam misi 1 terdapat juga arah kebijakan penurunan luasan kawasan kumuh per luas wilayah.

Adapun luas wilayah Kumuh Kota Jambi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 166 tahun 2016 seluas 986,5 Ha yang tersebar pada 38 kawasan dan total data rumah tidak layak huni sampai tahun 2016 sebanyak 1140 unit.

Dalam rangka melakukan pemenuhan kebutuhan rumah, penataan perumahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kawasan perumahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.

Sedangkan rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35

Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk

No	Uraian	2014	2015	2016
1	Jumlah TPS	366	402	443
2	Jumlah Daya Tampung TPS (m3/hari)	836	906	994
3	Jumlah Penduduk	559.571	602.970	607.796
4	Rasio Daya Tampung TPS Terhadap Jumlah Penduduk	1,150	1,204	1,282

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi**e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat***Tabel 2.36**Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja dan Pos Siskamling
Di Kota Jambi Tahun 2017

Uraian	Tahun 2017	
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	$\frac{263 \text{ orang}}{609.620 \text{ jiwa}}$	0,04
Rasio Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan	$\frac{582}{62}$	9,39

Sumber : Satpol PP Kota Jambi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 148 ayat (1) menyatakan bahwa “untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”. Sampai tahun 2017, jumlah personil Satpol PP 263 orang. Apabila jumlah ideal anggota Satpol PP adalah 1:1500, dengan jumlah penduduk ±609.620 jiwa, maka seharusnya jumlah personil Satpol PP Kota Jambi adalah 500an orang. Selanjutnya jumlah Pos Siskamling sampai tahun 2017 adalah 582 buah yang tersebar di 62 kelurahan, sehingga Rasio Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan 9,39.

Tabel 2.37

Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Di Kota Jambi

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah patroli petugas satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 jam	102 Kali	377 Kali	552 Kali	703 Kali	939 Kali

*Sumber : Satpol PP Kota Jambi***Tabel 2.38**

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Di Kota Jambi

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan di kab/kota)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Satpol PP Kota Jambi

Penanggulangan ketentraman dan ketertiban serta pendekatan yang dilakukan di Kota Jambi sesuai dengan jenis gangguannya, artinya jika terjadi demonstrasi atau kerusuhan di berbagai tempat di Kota Jambi, baik kantor pemerintah maupun di tempat-tempat lain, maka personil Satpol PP akan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan demonstrasi tersebut. Jika terjadi kekacauan atau anarkisme maka personil Satpol PP akan bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Kendala lain yang juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi, yaitu menyangkut Pedagang Kaki Lima. Pertumbuhan pedagang kaki lima di Kota Jambi sangat pesat, hal tersebut menunjukkan makin menggeliatnya roda perekonomian di Kota Jambi. Namun disatu sisi pertumbuhan pedagang kaki lima menyumbangkan kesembrawutan dan kemacetan, oleh karena itu Pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki lima yaitu Perda PKL No.5 Tahun 2006 dan PW No.6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaannya. Namun, dalam pelaksanaannya masih di jumpai pedagang-pedagang yang tidak mematuhi aturan, untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan razia-razia dan penertiban pedagang kaki lima termasuk area parkir di Kota Jambi.

f. Sosial

Sesuai dengan target indikator kinerja urusan sosial pada dokumen RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018, dengan sasaran terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengangan PMKS, pada tahun 2017 ditargetkan indikator kinerja dengan rasio peningkatan jumlah PMKS yang dilayani per tahun sebesar 54% dari total target selama 5 tahun sebesar 7.543 PMKS. Realisasi yang diperoleh selama kurun waktu tahun 2017 adalah sebesar 65% atau 4.903 PMKS. Angka tersebut menggambarkan bahwa, pada tahun 2017, realisasi indikator kinerja yang ditargetkan pada RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2017.

Sarana Sosial

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia akan berpengaruh pada pelayanan sosial dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Kota Jambi,

berdasarkan hasil data dinas sosial jumlah penduduk lanjut usia (lansia) pada tahun 2017 sebanyak 19229 orang lansia potensial dan 8482 lansia miskin , untuk tahun 2017 Dinas Sosial Memberikan bantuan terdiri dari 88 orang mendapat bantuan apbn dan 6 orang mendapatkan bantuan APBD untuk lansia. Data tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa penduduk lansia seluruhnya terlantar, namun sebagian besar masih memiliki anak tetapi keluarga miskin, sehingga didata sebagai lansia terlantar, keberadaan sarana sosial khususnya Panti Jompo memiliki peran dalam memelihara keberadaan PMKS khususnya pada lansia. Terbatasnya jumlah Panti Jompo menyebabkan belum maksimalnya melindungi dan memelihara lansia di Kota Jambi dimana saat ini Kota Jambi baru memiliki 1 buah Panti Jompo.

Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Sesuai dengan amanat UU nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya melalui jaminan sosial dan perlindungan sosial. Jaminan sosial bertujuan menjamin PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Sementara itu perlindungan sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat agar keberlangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal. Tahun 2017 ditetapkan sebanyak 31707 orang PMKS memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan dasar, untuk mencapai target tersebut dilaksanakan kegiatan peningkatan dan pembinaan pelayanan PMKS yang didalamnya terdiri dari rangkaian sub kegiatan pelayanan pemberdayaan lanjut usia. Dari target yang ditetapkan baru dapat direalisasikan sebesar 26751 orang PMKS (84,4%).

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Disamping itu selain memberikan bantuan kebutuhan dasar Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini dinas sosial juga memberikan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti pelatihan kuliner dan bantuan bagi kelompok usaha bersama (KUBE), dll, sesuai dengan ketrampilan masing-masing. Berdasarkan data jumlah populasi penanganan PMKS meningkat 4340 atau 69,8% dari tahun 2013

sebesar 6229 orang menjadi 10569 orang pada tahun 2017, sementara jumlah PMKS yang ditangani hanya sebesar 70% dari tahun 2013 hingga 2017. Kenaikan terjadi pada tahun 2017 yang mencapai 80%. Salah satu tidak tercapainya target penanganan ialah keterbatasan anggaran dan tinggi partisipasi masyarakat PMKS yang ingin mendapatkan kegiatan tersebut.

Tabel 2.39

Penanganan PMKS di Kota Jambi tahun 2013 – 2017

No.	Tahun	Populasi PMKS	Jumlah Penanganan	Persentase	Tahun
1	2013	6229	3891	60,07	2013
2	2014	6229	3891	60,07	2014
3	2015	7563	4671	61,92	2015
4	2016	9039	5317	70,00	2016
5	2017	10569	7398	70,00	2017

Sumber : Dinas Sosial Kota Jambi

Fokus Layanan Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Tabel 2.40

Rasio Penduduk Yang Bekerja Tahun 2013 s.d 2017 Kota Jambi

No	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016***	2017
1	Penduduk Yang Bekerja (PYB)	230.478	235.722	254.351		268.264
2	Angkatan Kerja (AK)	248.663	262.291	274.449		284.018
	Rasio PYB (%)	0,93	0,90	0,93		94,45

*** BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016 dikarenakan kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan data yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah, adapapun kondisi di Kota Jambi dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.41

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2013 s.d 2017 Kota Jambi

No	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016***	2017
1	Angkatan Kerja (AK)	248.663	262.291	274.449	dtb	284.018
2	Penduduk Usia Kerja (PUK)	412.249	420.428	428.542	dtb	443.343
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	60,32	62,39	64,04	dtb	64,06

*** BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016 dikarenakan kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Seperti pada tahun 2017 dikota Jambi sebesar 64 % artinya

dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas sebanyak 64 orang tersedia untuk memproduksi pada periode tertentu.

Adapun kondisi pencari kerja yang mendaftar di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.42
Pencari Kerja Yang Ditempatkan Tahun 2013 s.d 2017 Kota Jambi

No	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	639	2.164	1.665	2.237	2.703
2	Pencari Kerja Yang Mendaftar	8.450	6.491	4.692	5.903	5.431
3	Pencari Kerja Yang ditempatkan (Rasio) %	7,56	33,34	35,49	37,90	49,77

Dari data tersebut saat ini di Kota Jambi jumlah pencari kerja yang ditempatkan semakin besar jumlahnya dari tahun ke tahun.

Sedangkan kondisi pengangguran terbuka di Kota Jambi dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.43
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2013 s.d 2017 Kota Jambi

No	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016***	2017
1	Pengangguran Terbuka	18.185	26.569	20.098	dtb	15.754
2	Angkatan Kerja (AK)	248.663	262.291	274.449	dtb	284.018
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	7,31	10,13	7,32	dtb	5,55

*** BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016 dikarenakan kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran

TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Di Kota Jambi kondisi pada tahun 2017 sekitar 5,5 %, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 5 orang merupakan pengangguran.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase partisipasi perempuan bekerja di lembaga pemerintah

Peningkatan kualitas hidup perempuan dilaksanakan diberbagai bidang pembangunan, diantaranya dengan meningkatnya partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah, berdasarkan data kepegawaian Kota Jambi tahun 2013 – 2016 persentase rata-rata perempuan yang bekerja di pemerintahan tidak mengalami peningkatan disebabkan salah satunya belum adanya penerimaan pegawai baru di pemerintahan dan

selain itu juga setiap tahunnya bertambah jumlah pegawai negeri Kota Jambi yang pensiun, terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.44
 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan
 di Kota Jambi Tahun 2013–2016

No	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Jumlah pekerja perempuan (orang)	92.399	93.797	81.588	89.061
2	Jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintah (orang)	4.930	5.156	5.227	4.554
3	Persentase	5.34%	5.50%	6.41%	5.11%

Sumber : BKPSDMD Kota Jambi

Partisipasi perempuan dilembaga swasta

Disamping itu juga selain dari perempuan bekerja di lembaga pemerintah terdapat pekerja perempuan yang bekerja di sektor swasta, bila dilihat dari kurun waktu empat tahun terakhir pekerja perempuan sektor swasta yang mendominasi.

Tabel 2.45
 Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta
 Di Kota Jambi Tahun 2013-2016

No	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Jumlah pekerja perempuan (orang)	92.399	93.797	81.588	89.061
2	Jumlah pekerja perempuan disektor swasta (orang)	87.469	88.641	76.361	84.507
3	Persentase	94.66%	94.50	93.59	94.89

Sumber : DPMPPA Kota Jambi

Partisipasi angkatan kerja perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan berdasarkan data survey angkatan kerja nasional (sakernas) tahun 2013 -2015, persentasi rata-rata perempuan yang berkerja mengalami peningkatan dari 43,05% menjadi 46,69% atau 45,17% setiap tahunnya.

Tabel 2.46
 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

No	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	204.387	209.688	213.694	-
2	Jumlah angkatan kerja perempuan	89.545	95.991	99.978	-
3	Persentase	43.05	45.78	46.69	-

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Rasio KDRT

Tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga masih dianggap sebagai masalah pribadi dan bisa menimbulkan aib keluarga, sehingga banyak warga yang tidak berani melaporkan permasalahan tersebut. Kekerasan ini terjadi mayoritas karena masalah ekonomi keluarga, serta usia pernikahan dini yang menyebabkan secara mental masih cukup labil. Seiring dengan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan penanganan korban kekerasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, masyarakat sudah berani untuk melaporkannya bila terjadi tindak kekerasan baik yang dari korban maupun dari warga setempat kejadian.

Kesadaran masyarakat khususnya perempuan di Kota Jambi untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (Perempuan dan Anak-anak) mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini terlihat dari pada tahun 2013 terjadi pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak sebanyak 4 kasus, namun pada tahun 2015 mencapai 60 kasus, dan pada tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 36,4% atau 16 kasus.

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak-anak dari tindakan kekerasan dari tahun 2013-2016 berfluktuasi, yaitu sebanyak 4 kasus (tahun 2013), 20 kasus (tahun 2014), 60 kasus (tahun 2015) dan pada tahun 2016 sebanyak 44 kasus, namun dari fluktuasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak semua pengaduan dapat diselesaikan 100%.

Tabel 2.47
Rasio Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan
Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan

No	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak-anak	4 kasus	20 kasus	60 kasus	44 kasus
2	Jumlah pengaduan yang terselesaikan	4 kasus	20 kasus	60 kasus	44 kasus
3	Persentase	100	100	100	100

Sumber: DPMPPA Kota Jambi

c. Lingkungan Hidup

Persentase penanganan sampah di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.48
 Persentase penanganan sampah Kota Jambi

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Sampah yang ditangani	333.060	371.490	379.778	349.221
2	Volume Produksi Sampah	545.857,5	571.444,0	578.475,0	561.799,3
3	Persentase	60,8	64,8	65,5	69,3

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

d. *Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil*

Tabel 2.49
 Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	299,371	301,113	301,122	308,077	348,022
2	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	401,560	411,483	418,231	438,234	581,230
Rasio		0.75	0.73	0.72	0.70	0.60

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi

Tabel 2.50
 Rasio Pasangan Berakte Nikah

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	72,857	73,639	74,241	78,811	94,961
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	259,092	263,684	266,605	273,263	336,393
Rasio		0.28	0.28	0.28	0.29	0.28

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi

Tabel 2.51
 Cakupan Penerbitan KTP

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	299,371	301,113	301,122	308,077	348,022
2	Jumlah penduduk wajib KTP	401,560	411,483	418,731	438,234	581,230
Persentase		74.6%	73.2%	71.9%	70.3%	59.9%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi

Tabel 2.52
 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	4,803	9,191	9,116	8,327	8,287
2	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	10,596	10,004	9,887	9,017	8,935
Persentase		45.3%	91.9%	92.2%	92.3%	92.7%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi

Permasalahan dasar atau Isu strategis yang berkaitan dengan masalah dasar di bidang kependudukan di Kota Jambi adalah belum optimalnya pengelolaan data kependudukan dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Tantangan tersebut harus ditangani secara efektif dan tepat sasaran dengan menetapkan program yang tepat pula. Pemerintah Kota Jambi melalui visi dan misi Walikota Jambi, telah menetapkan misi “Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bersih (Clean governance)”. Melalui misi tersebut, ditetapkan tujuan “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government)”. Sasaran dari tujuan ini adalah, tercapainya pemerataan dan kualitas pelayanan publik. Adapun strategi yang diterapkan untuk mewujudkan misi ini adalah, dengan peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya strategi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah dengan menerapkan SOP dalam pelayanan publik.

Peningkatan jumlah penduduk disebabkan urbanisasi dan kematian bayi yang sudah dapat dikendalikan. Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan kependudukan dan catatan sipil yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, hanya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk kedepan antara lain : ketersediaan Blangko KTP-el; masih terdapatnya penduduk yang merekam data lebih dari 1 (satu) kali dan terdampak tidak bisa diterbitkan KTP bersangkutan; lambatnya perekaman data terkirim ke data center di Jakarta; dan belum optimalnya pelaporan mengenai kelahiran dan kematian oleh RT maupun kelurahan.

e. Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Informasi dan komunikasi masuk dalam Misi ke 4 yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Bersih (Clean Governance) dengan strategi peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan arah kebijakan menerapkan mekanisme penilaian kinerja aparatur dan SPM melalui program Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemanfaatan

Teknologi Informasi. Urusan informasi dan komunikasi pada tahun 2017 terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 terutama pada jaringan komunikasi, warnet dan jumlah penyiaran Radio/TV di Kota Jambi hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Jumlah Jaringan Komunikasi

Adapun Jumlah Jaringan Komunikasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.53
 Jaringan Komunikasi Tahun 2013 s/d 2017 Kota Jambi

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumah Jaringan Telepon Genggam	5	6	6	6	6
2	Jumlah Jaringan Telepon Stationer	1	1	1	1	1
3	Total Jaringan Kominukasi (1+2)	6	7	7	7	7

Sumber : Diskominfo Kota Jambi

Peningkatan jaringan Komunikasi di Kota Jambi terjadi peningkatan di tahun 2013 sampai dengan 2017 hal ini di karena perkembangan komunikasi di Kota Jambi semakin berkembang pesat. Semakin banyak jumlah jaringan komunikasi maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Rasio Warnet/Wartel terhadap Penduduk

Analisis rasio Warnet/wartel di Kota Jambi tahun 2013 sampai dengan 2017 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.54
 Rasio Wartel/Warnet Kota Jambi Tahun 2013 s/d 2017

No	Uraian	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1	Jumlah Penduduk	696.235		726.821		752.514		775,427		609,620	
2	Jumlah Wartel	10	0,014	5	0,0069	4	0,0053	3	0,0039	1	0,0016
3	Jumlah Warnet	85	0,122	92	0,127	100	0,133	103	0,13	19	0,311

Sumber : Diskominfo Kota Jambi

Dari tabel di atas dapat terlihat untuk jumlah wartel dan warnet di Kota Jambi dari tahun ketahun mengalami penurunan. Jumlah wartel turun

setiap tahunnya dikarenakan di era kemajuan jaman, perkembangan telekomunikasi di Kota Jambi terus mengalami peningkatan. Masyarakat sekarang lebih banyak menggunakan telepon genggam karena lebih praktis dan efisien dari pada menggunakan wartel. Untuk Jumlah warnet di Kota Jambi terjadi penurunan dari tahun 2016 sampai tahun 2017. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah banyak yang mempunyai komputer/laptop sendiri dan juga biaya internet yang semakin murah. Selain itu masyarakat sudah banyak orang yang mempunyai smartphone dan bisa mencari rujukan atau mengerjakan kiprah tanpa harus pergi ke warnet.

Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Jambi

Sedangkan jumlah surat kabar Nasional/Lokal tahun 2013 sampai dengan 2017 di sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.55

Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2013 s/d 2017 Kota Jambi

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Nasional	15	15	15	15	15
2	Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Lokal	32	32	32	32	32
3	Total	47	47	47	47	47

Sumber: Diskominfo Kota Jambi

Jumlah Penyiaran Radio/TV Tahun 2013 sampai dengan 2017 di Kota Jambi

Jumlah penyiaran Radio/TV di Kota dari tahun 2013 sampai dengan 2017 disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.56

Jumlah Penyiaran Radio/TV Tahun 2013 s/d 2017 Kota Jambi

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penyiaran Radio Lokal	8	8	8	13	13
2	Jumlah Penyiaran Radio Nasional	1	1	1	1	1
3	Jumlah Penyiaran TV Lokal	2	2	2	15	15
4	Jumlah Penyiaran TV Nasional	6	6	10	14	14
5	Total	17	17	21	43	43

Sumber: Diskominfo Kota Jambi

Untuk penyiaran Radio/TV dari tahun 2013 sampai dengan 2017 secara keseluruhan mengalami peningkatan terutama pada rentang waktu tahun 2014 sampai tahun 2015. Pada periode tahun ini semua penyiaran baik radio maupun televisi mengalami peningkatan yang cukup signifikan kecuali untuk penyiaran radio nasional yang jumlah konstan pada 1

penyiaran. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya Kota Jambi sehingga berdampak positif terhadap jumlah penyiaran untuk radio maupun televisi baik lokal maupun nasional.

f. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah masih merupakan prioritas Pembangunan Daerah Kota Jambi dalam RPJMD 2013-2018 yang difokuskan pada perkembangan Koperasi dan UMKM, tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kemiskinan atau penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah diharapkan mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian Kota Jambi menuju “PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA”.

Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah saat ini lebih mengarah pada upaya penciptaan kemandirian, partisipasi, daya inovasi dan kreativitas pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai motivator dan fasilitator yang tujuannya adalah mencapai kemandirian, kematangan dan kedewasaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin kompleks.

Capaian yang telah dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM pada tahun 2016 telah melebihi dari target RPJMD Kota Jambi yaitu untuk Koperasi Aktif sebanyak 208 unit dan UMKM Mandiri sebanyak 155 Unit. Jumlah koperasi aktif dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.57
 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2012-2017 Kota Jambi

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah koperasi aktif	347	346	362	377	381
2.	Jumlah koperasi	745	774	787	801	804
3.	Persentase koperasi aktif	46,58	44,70	46,00	47,07	47,39

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi

g. Penanaman Modal

Tabel 2.58
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kota Jambi

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
2013	Jumlah Investor	(n/a)	(n/a)	(n/a)
2014	Jumlah Investor	5	-	5
2015	Jumlah Investor	8	-	8
2016	Jumlah Investor	11	-	11
2017	Jumlah Investor	5	-	5

Sumber : DPMPTSP Kota Jambi

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 belum ada data mengenai jumlah investasi di Kota Jambi, hal ini disebabkan karena belum terbentuknya DPMPTSP. Pada tahun 2014 terdapat 5 (lima) investor PMDN, tahun 2015 terdapat 8 (delapan) investor PMDN, pada tahun 2016 terdapat 11 (sebelas) investor PMDN dan pada tahun 2017 terdapat 5 (lima) investor PMDN.

Tabel 2.59
Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2013 s.d 2017 Kota Jambi

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp.)	JumlahProyek	Nilai Investasi (Rp.)
2013	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)
2014	5	979.731.601.000	4	391.573.244.050
2015	8	552.875.000.000	8	8.483.400.000
2016	11	320.035.500.000	11	101.618.589.536
2017	5	545.511.000.000.	5	83.100.700.000

Sumber : DPMPTSP Kota Jambi

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 belum ada data mengenai jumlah investasi di Kota Jambi, hal ini disebabkan karena belum terbentuknya DPMPTSP. Pada tahun 2014 terdapat 5 proyek dengan nilai investasi Rp. 979,7 milyar dan realisasi investasi pada tahun tersebut sebesar Rp. 391,5 milyar. Tidak terealisasi sepenuhnya nilai investasi tersebut dikarenakan ada sebagian izin prinsip yang terbit pada akhir tahun 2014 sehingga baru terealisasi pada tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun 2015 terdapat 8 proyek dengan nilai investasi Rp. 552,8 milyar dan realisasi investasi pada tahun tersebut sebesar Rp. 8,4 milyar. Rendahnya realisasi pada tahun ini dikarenakan banyak izin prinsip yang terbit pada akhir tahun 2015 sehingga baru terealisasi pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2016 terdapat 11 proyek dengan nilai investasi Rp. 320 milyar dan realisasi investasi pada tahun tersebut sebesar Rp. 101,6

milyar, dan masih berjalan hingga saat ini. Pada tahun 2017 terdapat 5 proyek dengan nilai investasi Rp. 545,5 milyar dan realisasi investasi pada tahun 2017 sebesar Rp. 83,1 milyar, masih rendahnya realisasi tersebut dikarenakan belum adanya realisasi dari Transmart yang merupakan investor dengan nilai terbesar pada tahun 2017.

Sesuai dengan target indikator kinerja urusan ketenagakerjaan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018, dengan sasaran terciptanya lapangan pekerjaan, pada tahun 2017 ditargetkan indikator kinerja Jumlah angkatan kerja terdaftar yang terserap sebesar 20% dari total target selama 5 tahun sebesar 5.903 angkatan kerja. Realisasi yang diperoleh selama kurun waktu tahun 2017 adalah sebesar 49,19% atau 2.703 angkatan kerja. Angka tersebut menggambarkan bahwa, pada tahun 2017 realisasi indikator kinerja yang ditargetkan pada RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2017.

Sasaran kedua adalah tersedianya tenaga kerja lokal yang berdaya saing, pada tahun 2017 ditargetkan indikator kinerja Jumlah serapan tenaga kerja pada UMKM sebesar 3% dari total target selama 5 tahun sebesar 13,986 tenaga kerja. Realisasi yang diperoleh selama kurun waktu tahun 2017 adalah sebesar 15,38% atau 2.703 tenaga kerja. Angka tersebut menggambarkan bahwa, pada tahun 2017 realisasi indikator kinerja yang ditargetkan pada RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2017.

Dari kinerja di bidang ketenagakerjaan dapat dilihat dari prestasi yang didapat Pemerintah Kota Jambi yaitu: mempertahankan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008 untuk kegiatan Pelayanan Penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK 1) di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi dari Transpacific Certification Limited.

Analisis rasio daya serap tenaga kerja di Kota Jambi disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.60

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2013 s.d 2017 Kota Jambi

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	(n/a)	1.407	661	507	1.592
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	(n/a)	5	8	11	5
3	Rasio daya serap tenaga kerja	(n/a)	284,4	82,63	46,09	318,4

Sumber: DPMPTSP Kota Jambi

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 belum ada data mengenai jumlah tenaga kerja dan PMA/PMDN, hal ini disebabkan karena belum terbentuknya DPMPTSP sehingga tidak bisa dihitung rasio daya serap tenaga kerja di Kota Jambi. Pada tahun 2014 rasio daya serap tenaga kerja sebesar 284,4, tahun 2015 sebesar 82,63, tahun 2016 sebesar 46,09 dan tahun 2017 sebesar 318,4.

h. *Perpustakaan*

Pendidikan dan dunia perpustakaan merupakan sasaran strategis Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun rencana pembangunan bidang pendidikan yang penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Jambi tahun 2013- 2018, yaitu dalam rangka misi “Mewujudkan Masyarakat Kota Jambi Yang Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing”, dengan tujuan “Meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Kota Jambi melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, dan merata”. Strategi yang dicapai untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan mutu dan akses pendidikan, yaitu dengan arah kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana penddikan.

Untuk urusan pelayanan publik dalam bidang perpustakaan telah dilaksanakan berupa :

1. Memotivasi masyarakat Kota Jambi untuk datang berkunjung serta menjadi anggota perpustakaan melalui program pengembangan minat budaya baca dimana pada tahun 2014 jumlah anggota Perpustakaan Kota Jambi sebanyak 663 orang, meningkat menjadi 922 orang di Tahun 2017. Namun pada tahun 2017 terjadi penurunan dibandingkan 2016. Hal ini bukan berarti penurunan jumlah anggota namun disebabkan

karena terdapat anggota yang tidak melaporkan diri untuk memperpanjang kartu anggota sehingga sebanyak 111 anggota dinyatakan pasif.

Tabel 2.61

Anggota Perpustakaan Kota Jambi Tahun 2014 - 2017

Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017
Jumlah Anggota Pustaka	Orang	663	776	1.033	922

Sumber : DKP Kota Jambi

Sedangkan untuk jumlah pengunjung Perpustakaan Kota Jambi di Tahun 2014 sebanyak 9.441 orang meningkat menjadi 28.435 orang di tahun 2016. Dimana terjadi peningkatan pengunjung perpustakaan dari tahun 2012 sebesar 201,18 %.

Tabel 2.62

Pengunjung Perpustakaan Kota Jambi Tahun 2013 - 2017

Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pengunjung Pustaka	Orang	11.769	12.692	14.896	28.435	37.337
Jumlah Penduduk	Orang	539,242	559,571	602,970	607,796	609,620
Nilai		0,02	0,02	0,03	0,05	-

Sumber : DKP Kota Jambi

2. Penambahan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dari tahun 2014-2017 sebesar 63,1 %, dimana pada tahun 2014 terdapat 1.215 judul buku dan 1.863 eksemplar buku sedangkan pada tahun 2017 menjadi 20.128 judul buku dan 46.180 eksemplar buku. Terjadi penambahan sebesar 63,1 % judul buku dan 64,76 % eksemplar buku.

Tabel 2.63

Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Kota Jambi Tahun 2013 - 2017

Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Koleksi Judul Buku	Judul	1.549	1.215	18.298	19.569	20.128
Jumlah Koleksi Buku	Eks	4.028	1.863	41.326	44.639	46.180
Nilai		0,38	0,44	0,38	0,65	0,59

Sumber : DKP Kota Jambi

3. Membina perpustakaan sekolah di lingkungan Kota Jambi dimana diperoleh hasil sebagai berikut: Lomba Perpustakaan Sekolah Peringkat I

Provinsi, Lomba Pidato Bahasa Inggris Peringkat 1 dan 2 Provinsi, Lomba Cerita Anak Peringkat I Provinsi.

4. Memberikan pelayanan khusus kepada pelajar SD yang tidak dapat berkunjung langsung ke Perpustakaan Kota Jambi melalui kegiatan mobil perpustakaan keliling, terdapat 2 unit mobil perpustakaan keliling yang beroperasi memberikan pelayanan dari hari senin sampai dengan jum'at setiap minggunya.

i. Kearsipan

Kearsipan dan dokumentasi merupakan salah satu sasaran strategis Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun rencana pembangunan bidang kearsipan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Jambi tahun 2013-2018, yaitu dalam rangka misi "Mewujudkan Masyarakat Kota Jambi Yang Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing", dengan tujuan "Meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Kota Jambi melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, dan merata". Strategi yang dicapai untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan mutu dan akses pendidikan, yaitu dengan arah kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.

Arsip merupakan dokumen penting yang diperlukan sebagai sumber informasi hukum, historis, dan perkembangan kekinian. Untuk itu sistem informasi kearsipan mestinya tersedia agar dapat mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kearsipan ini. Sesuai dengan fungsinya jenis pelayanan umum yang meliputi urusan kearsipan yaitu telah melaksanakan bimbingan dan pembinaan dalam pengelolaan arsip secara baku untuk Organisasi Perangkat daerah (OPD), Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Politik (Orpol) di lingkungan Kota Jambi dan mengelola Arsip inaktif yang ada di Organisasi Perangkat Daerah untuk disimpan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) guna penyelamatan dan pelestarian. Pengelolaan arsip secara baku telah dilakukan pembinaan tahun 2016.

Tabel 2.64

Jumlah SKPD Yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku Di Kota Jambi
Tahun 2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah SKPD Yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku	-	-	-	1	12
Jumlah SKPD	50	50	50	50	50
Persentase Pengolahan Arsip secara Baku	0	0	0	0	0

Sumber : DKP Kota Jambi

Sementara itu, untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan arsip, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi juga menyelenggarakan kegiatan peningkatan SDM dalam pengelola kearsipan, yaitu sebanyak 7 kali pada tahun 2016.

Hasil yang sudah diperoleh dalam pelaksanaan bimbingan pengelolaan arsip :

- a. Telah dibina pengelola arsip OPD sampai dengan tahun 2017 sebanyak 60 orang untuk menyusun Jadwal Retensi Arsip (JRA) arsip dinamis dan JRA yang sudah disusun telah mendapatkan penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Karena Kota Jambi sudah berhasil membuat JRA yang disahkan oleh Walikota Jambi.
- b. Terkumpulnya arsip Inaktif sejumlah 16.000 dokumen berupa dokumen arsip keuangan dari Dinas Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Jambi.

Kendati telah terjadi kenaikan jumlah kegiatan peningkatan SDM untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip khususnya kepada SKPD, akan tetapi masih perlu dioptimalkan terus menerus, seiring dengan kebutuhan yang semakin meningkat.

Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, dan perindustrian.

a. Pariwisata

Urusan Pariwisata merupakan urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DPK) Kota Jambi. Penyelenggaraan Urusan Pariwisata ditujukan untuk meningkatkan peran Pariwisata yang berbasis potensi daerah serta memperhatikan kearifan lokal melalui peningkatan kunjungan wisatawan, penyelenggaraan event dan promosi pariwisata di dalam dan luar daerah serta mengikuti event pariwisata tingkat nasional/internasional.

Pada tahun 2017 untuk menyelenggarakan Urusan Pariwisata dijabarkan ke dalam Program Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Budaya dan Pariwisata dengan kegiatan Pengembangan dan Promosi Pariwisata Daerah. Adapun pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2017 diantaranya adalah terselenggaranya Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan melalui Pelaksanaan Lomba Perahu Angsa, Haul Tuanku Keramat Tambak dan Haul Pangeran Wiro Kusumo serta Pemilihan Bujang Gadis Kota Jambi.

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin di capai oleh Urusan Pariwisata adalah terselenggaranya event berskala nasional/internasional Pencapaian IKU pada tahun 2017 ditargetkan 2 kali terselenggaranya event berskala nasional/internasional . Urusan Pariwisata pada tahun 2017 telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target IKU tersebut dengan menyelenggarakan 2 kali event berskala nasional/internasional, yaitu pelaksanaan Haul Pangeran Wiro Kusumo (Kesultanan Jambi) pada bulan Januari 2017 dan Haul Tuanku Keramat Tambak (Habib Husain Bin Ahmad Baraqbah) pada bulan Februari 2017 di Seberang Kota Jambi, yang dihadiri para peziarah dari berbagai daerah dan mancanegara. Dengan demikian dari 2 event berskala nasional dan internasional yang ditargetkan telah terpenuhi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pariwisata adalah keterbatasan dana yang tersedia, dan kurangnya inovasi untuk pengembangan destinasi wisata di Kota Jambi.

b. Perdagangan

Penyelenggaraan Urusan Perdagangan ditujukan untuk peningkatan peredaran barang dan jasa yang sesuai standar, terwujudnya peningkatan jumlah usaha formal dan informal, tercapainya target penerimaan retribusi pelayanan perpasaran sebagai salah satu penyumbang PAD Kota Jambi, meningkatkan sarana dan prasarana pasar dan sarana penunjang lainnya untuk mewujudkan pasar bersih, kondusif dan refresentatif, serta meningkatkan pelayanan, pembinaan, penataan dan penertiban pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan dan konsisten guna mewujudkan perilaku yang berakhlak dan berbudaya.

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Urusan Perdagangan adalah peningkatan cakupan bina perdagangan/usaha informal sebesar 2,8% dengan realisasi peningkatan target menjadi 5,30%, rasio peningkatan sarana dan prasarana pasar-pasar tradisional pemerintah sebesar 72,25% dan peningkatan rasio PKL yang tertata sebesar 55%. Urusan Perdagangan pada tahun 2016 telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target IKU tersebut, diantaranya adalah:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pasar diantaranya lanjutan pembangunan Pasar Olak Kemang di Kecamatan Danau Teluk dan rehabilitasi pasar di beberapa lokasi.
2. Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan, pameran-pameran, bazar, pasar murah dan pemberian bantuan hibah kepada masyarakat
3. Terlaksananya penertiban serta pengamanan pasar pada hari-hari besar dengan tujuan untuk meningkatkan ketertiban pedagang kaki lima serta mewujudkan Pasar Kota Jambi yang bersih dan tertib sekaligus rasa aman di lingkungan pasar pada hari-hari besar

c. Perindustrian

Penyelenggaraan Urusan Parindustrian ditujukan untuk peningkatan daya saing produk lokal, peningkatan sarana dan prasarana IKM, pembinaan dan peningkatan jumlah IKM serta peningkatan jangkauan wilayah pemasaran produk IKM. Pada tahun 2016 kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan perindustrian antara lain melaksanakan pelatihan-pelatihan,

sosialisasi, penyuluhan, pameran, lomba, pemberian bantuan hibah barang kepada masyarakat dan revitalisasi rumah batik sebanyak 3 unit di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk dan Kelurahan Jelmu Kecamatan pelayangan. Revitalisasi ini diperuntukan kepada pengrajin yang telah menerima sertifikat OVOP (One Village One Produk) dari Kementerian Perindustrian RI pada tahun 2015.

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Urusan Perindustrian adalah peningkatan jumlah IKM mandiri, dan peningkatan pertumbuhan industri. Pencapaian jumlah IKM Mandiri pada tahun 2016 tercatat sebanyak 402 IKM melebihi target IKU RPJMD sebesar 255 IKM dan pertumbuhan industri pada tahun 2016 tercatat 2.884 industri atau meningkat dari tahun 2015 dengan jumlah 2.654 industri atau 7,98%, target ini melebihi pada RPJMD untuk tahun 2016 sebesar 3,10%.

Fokus Layanan Urusan Penunjang Urusan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta tugas pembantuan.

Pada tahun 2017 BPKAD mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 9,662,166,743.00,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 8,543,974,934.00,- atau 88.43% dan realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2017 BPKAD melaksanakan 6 program rutin (22 kegiatan) dan 1 program urusan (24 kegiatan). Pada tahun 2017 target kontribusi yang diberikan dari pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah sebesar Rp. 390.892.633.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 336.251.791.862.56,- dengan persentase sebesar 86,02%.

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh BPKAD Kota Jambi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian IKU tersebut pada tahun 2017 menunggu hasil audit oleh BPK, sedangkan pada tahun 2016 pencapaian IKU sudah menghasilkan WTP. Progres capaian yang diperoleh sampai saat ini adalah 75% dengan upaya yang telah dilakukan berupa penatausahaan aset dengan menggunakan sistem/aplikasi yang terintegritas dengan sistem/aplikasi keuangan dan juga menginventarisir selisih seluruh data barang milik daerah

dengan neraca secara komprehensif yang melibatkan seluruh elemen dan unsur terkait. Akan tetapi WTP tersebut masih terdapat kelemahan dalam system pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, Antara lain:

1. Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak dapat ditelusuri rinciannya pada DBMD sebesar Rp. 7,45 Miliar dan Aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp. 4,94 Miliar tidak diketahui keberadaannya
2. Aset tetap lainnya tidak dapat ditelusuri rinciannya pada DBMD sebesar Rp. 6,32 miliar dan Aset tetap lainnya pada dua SKPD tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp. 4,15 miliar

Langkah-langkah yang dilakukan oleh BPKAD Kota Jambi untuk perbaikan meliputi:

1. Melakukan Inventarisasi Aset terhadap Sisa OPD yang belum melakukan Inventarisasi sebanyak 17 yaitu OPD dengan Progres Capaian 12 SKPD
2. Melakukan Update data melalui aplikasi aset
3. Pengurusan Sertifikat Aset Tanah Milik Pemda Kota Jambi

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pendapatan dan tugas pembantuan dengan melakukan perencanaan, pembinaan dan pengendalian sumber – sumber pendapatan daerah yang meliputi pendataan, penetapan, penagihan, perencanaan dan Pelaporan, Pengendalian dan Penyuluhan, Ketatausahaan/Kesekretariatan serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun pencapaian beberapa program dan kegiatan pada tahun 2017 diantaranya :

- a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan/Penerimaan Daerah.
 - Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat.
 - Updating basis data pajak daerah sert optimalisasi pemanfaatan kepada masyarakat.
 - Kebijakan Insentif.

- Melakukan evaluasi dan pengkajian perkembangan Pajak Daerah guna mendapatkan data potensi dari Pajak Daerah.
- Mengoptimalkan pelaksanaan pendataan melalui survey lapangan terhadap perkembangan/ perubahan data objek pajak, dengan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan wajib pajak seperti tutup usaha, perubahan tempat, ukuran dan lain sebagainya.

Melakukan pengkajian Peraturan – Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku.

b. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi pada Tahun 2017 sebesar Rp. 200.024.000.000,15,-realisasi penerimaan yang dapat di capai adalah sebesar Rp. 202.865.713.413,15 atau 101,42% dengan demikian pada Tahun 2017 mengalami peningkatan penerimaan sebesar Rp. 2.841.713.413.15,- atau sebesar 1,42%.

Sedangkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Jambi Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp. 34.000.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 21.980.028.497,- atau 64,65%.

Permasalahan/kendala yang dihadapi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam rangka mmeningkatkan penerimaan Pajak Daerah yaitu :

- 1) Pelayanan melalui situs pemerintah belum ditunjang oleh system manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam system manajemen dan proses kerja pemerintah.
- 2) Belum mapannya strategi optimalisasi PAD sector pajak daerah.
- 3) Tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan pajak online pada instansi pemungut pajak daerah.

Upaya yang dilaksanakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam mengatasi permasalahan yang ada antara lain :

- 1) Penyederhanaan dan modernisasi/komputerisasi Sistem Perpajakan Daerah.

- 2) Penyempurnaan landasan hukum serta Law Enforcement bagi pengenaan pajak
- 3) Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat.
- 4) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.
- 5) Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit satuan kerja terkait.
- 6) Peningkatan kualitas aparatur pajak daerah.
- 7) Kebijakan insentif.

Sedangkan untuk mencapai misi ke-4 (empat) dari RPJMD Kota Jambi, didalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bersih (Clean Government), maka Pemerintah Kota Jambi melalui BKD sebagai pelaksana kegiatan, telah membuat Indikator Kinerja Utama didalam pencapaian misi tersebut, yaitu rasio jabatan terhadap pendidikan dan keahlian.

Target RPMJD untuk indikator ini pada tahun 2017 adalah sebesar 80%, dengan jumlah pegawai negeri sipil 6.581 orang, dimana 55,76 % didominasi dengan tamatan S1, diikuti 23,71% tamatan SD-SMA, tamatan D1-D3 sebesar 15,49 % dan hanya 0,15 % S3 dan 4,86 % S2, dengan program-program yang telah dilaksanakan, maka pencapaian indikator kinerja utama didalam penempatan aparatur sesuai dengan bidang pendidikan, dan keahlian sesuai dengan IKU RPJMD adalah sebesar 95,00% dari target yang telah ditentukan oleh RPMJD.

Fokus Layanan Urusan Pendukung

Melalui bagian Kerjasama Kota Jambi, Pemerintah Kota Jambi selama tahun 2017 terlibat aktif didalam kerjasama antar daerah melalui APEKSI (Assosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) dan AKKOPSI (Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi). Kebijakan yang dilaksanakan pada kerjasama antar daerah adalah melalui program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah dengan kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerja sama antara daerah dalam penyediaan pelayanan publik, Pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), pertemuan Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI). Keikutsertaan Pemerintah Kota Jambi dalam

ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives), UCLG (United Cities and Local Government) dan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pada tahun 2017 Bagian Perekonomian Setda Kota Jambi melaksanakan kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) dan kegiatan Pengawasan dan Pemantauan Distribusi Gas (Konversi BBM Bersubsidi). Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk melaksanakan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang ada di Kota Jambi. Dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Nasional Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg, Bagian Perekonomian Setda Kota Jambi melaksanakan koordinasi antar Dinas/Instansi Konsultan, PT. Pertamina, Pemerintah Provinsi Jambi dan Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementrian ESDM RI tentang Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg di Kota Jambi, membentuk Tim Pendukung Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg di Kota Jambi dan melakukan Pengawasan dan Pemantauan terhadap pendistribusian Paket LPG 3 kg pada 11 Kecamatan di 62 Kelurahan dalam Kota Jambi. Selain itu Bagian Perekonomian Setda juga melakukan pemantauan pengendalian pedagang barang bersubsidi dan pemantauan harga sembako di Kota Jambi.

Fokus Layanan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada tahun 2017 target penyelesaian konflik adalah 100%, yang berarti semua konflik yang terjadi pada tahun 2017, dapat diselesaikan dengan baik. Untuk mencapai target tersebut, dilaksanakan beberapa kegiatan dan program, diantaranya program pengembangan wawasan kebangsaan, program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan seterusnya. Selain itu, dari masing – masing OPD juga memiliki Indikator Kinerja Kunci yang mendukung tercapainya ketertiban kerukunan beragama, yang pencapaiannya juga difasilitasi didalam program dan kegiatan di kedua OPD tersebut.

Sedangkan angka kriminalitas di Kota Jambi cenderung sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk. Kedepan Pemerintah Kota Jambi Bersama instansi terkait akan terus mengurangi angka kriminalitas sehingga mewujudkan Kota Jambi yang aman dan nyaman.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, bahwa Pemungutan Suara Pilkada serentak 171 Daerah yang terdiri dari 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota termasuk Kota Jambi, yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018.

Program – program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Jambi di dalam menangani urusan ini diantaranya pelaksanaan kegiatan Pemantauan Perkembangan Situasi politik Kota Jambi, Sosialisasi Pemilukada, Pemilihan Pemula, Pendidikan Politik dan Budaya serta Etika Politik. Adapun jumlah pemilih untuk Kota Jambi diperkirakan sebanyak 400an orang dengan jumlah TPS 982 buah.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Analisis konsumsi RT perkapita dapat disajikan dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.65
Angka Konsumsi RT perkapita
Tahun 2013 s.d 2017 Kota Jambi

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Total Pengeluaran RT	426.607,00	479.495,00	606.249,00	701.797,00	696.291
2.	Jumlah RT	819.972,00	924.956,00	1.066.587,00	1.254.523,00	1.272.452
3.	Rasio (1./2.)	52,03	51,84	56,84	55,94	54,72

Sumber : BPS Kota Jambi

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Luas wilayah produktif

Persentase luas wilayah produktif Kota Jambi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.66

Persentase luas Wilayah Produktif
Tahun 2013 s.d 2017 Kota Jambi

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Luas Wilayah produktif					
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306
3.	Rasio (1./2.)					

Sumber : Bappeda Kota Jambi

Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator-indikator: angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

a. Angka kriminalitas

Jumlah angka kriminalitas disajikan pada tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.67

Angka Kriminalitas Tahun 2011 s.d 2015 Kota Jambi

No	Jenis Kriminal	2011	2012	2013	2014	2015**
1.	Jumlah kasus Narkoba	97	115	96	98	52
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	9	1	1	-	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	42	53	21	146	48
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	60	222	326	392	139
5.	Jumlah kasus Pencurian	130	299	356	528	191
6.	Jumlah kasus Penipuan	137	206	360	528	234
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	1	1	-	-
8.	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	475	897	1.161	1.692	664
9.	Jumlah Penduduk	613.644	662.587	696.235	726.821	752.514
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)					

Sumber : Polres Kota Jambi

b. Jumlah demonstrasi

Untuk jumlah demonstrasi ditampilkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.68
Jumlah Demo Tahun 2011 s.d 2015 Kota Jambi

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015**
1	Bidang Politik	-	-	-	10	-
2	Ekonomi	265	195	280	158	65
3	Kasus pemogokan kerja	-	-	-	-1	-
4	Jumlah Unjuk Rasa	265	195	280	169	65

Sumber : Polres Kota Jambi

Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan dan rasio lulusan S1/S2/S3.

a. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Analisis rasio lulusan S1/S2/S3 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.69
Rasio lulusan S1/S2/S3 Tahun 2012 s.d 2016 Kota Jambi

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah lulusan S1	51.128	52.594	53.778	54.668	55.491
2.	Jumlah lulusan S2	4.250	4.382	4.490	4.556	4.610
3.	Jumlah lulusan S3	379	392	402	406	409
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	57.769	59.381	60.694	61.645	62.526
5.	Jumlah penduduk	662.587	696.235	726.821	752.514	775.427
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 ((4/5)x10000)	871.8704	852.8873	835.0611	819.1874	806.3428

Sumber : BPS Kota Jambi

b. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Analisis rasio ketergantungan disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.70
Rasio Ketergantungan Tahun 2012 s.d 2016 Kota Jambi

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	148.524	148.730	148.722	148.672	148.302
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	18.430	19.131	19.916	20.828	21.826
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	166.954	167.861	168.638	169.500	170.128
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	384.760	392.327	399.424	406.566	413.359
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	43.39	42.79	42.22	41.69	41.16

Sumber : BPS Kota Jambi

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Jambi dirangkum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.71
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Jambi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
1.	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB	8,50	8,18	5,58	6,81			
1.1.1.2	Laju inflasi	8,74	8,72	1,37	4,54		±4	
1.1.1.3	PDRB per kapita	29,13 juta	33,41 juta	37,07 juta	41,90 juta			
1.2.	Kesejahteraan Sosial							
1.2.1	Pendidikan							
1.2.1.1	Angka melek huruf	98.33	98.37	98.54	99.98	99.99	99.30	<
1.2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah	10.56	10.57	10.63			11.5	<
2.	PELAYANAN UMUM							
2.1	Pelayanan Urusan Wajib							
2.1.1	Pendidikan							
2.1.1.1	Pendidikan dasar							
2.1.1.1.1	APS	95.5987	95.7182	96.6879	96.7418	99.990	93.56	>
2.1.1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	3.5753	3.52778369	3.45825511			3.97	<
2.1.1.1.3	Rasio terhadap murid	7.15431	6.97070	5.81682	5.77888		5.35	>
2.1.1.2	Pendidikan menengah							
2.1.1.2.1	Angka partisipasi sekolah	73.02	74.11	75.46	95.076	99.821	76.56	<
2.1.1.2.2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah							
2.1.2	Kesehatan							
2.1.2.1	Rasio posyandu per satuan balita	22.300	22.650	22.950			50	>
2.1.2.2	Rasio puskesmas per satuan penduduk	11.03428	11.20376	11.20376			50.000	>
2.1.2.3	Rasio Pustu persatuan penduduk	55.1714	56.0188	56.0188			10.000	>
2.2	Pelayanan Urusan Pilihan							
2.2.1	Pertanian							
2.2.1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar							
2.2.1.2	Kontribusi sektor pertanian thd PDRB							
2.2.2	Kehutanan							
2.2.2.1	Rehabilitasi hutan dan							

	lahan kritis							
2.2.2.2	Kerusakan KawHutan							
3.	DAYA SAING DAERAH							
3.1	Kemampuan Ekonomi							
3.1.1	Otonomi Daerah, Pem- an Umum, Admkeudaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian &Persandian							
3.1.1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita							
3.1.1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita							
3.1.1.3	Produktivitas total daerah							
3.1.2	Pertanian							
3.1.2.1	Nilai tukar petani							
3.2	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
3.2.1	Perhubungan							
3.2.1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan							
3.2.1.2	Jumlah org/ brg yg terangkut angkutan umum							
3.2.2	Penataan Ruang							
3.2.2.1	Ketaatan terhadap RTRW							
3.2.2.2	Luas wilayah produktif							

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD DAN REALISASI RPJMD

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2017 dilihat dari bidang urusan kewenangan sebagai berikut :

Urusan Pendidikan

Guna meningkatkan pelayanan pendidikan secara profesional, maka Dinas Pendidikan Kota Jambi telah menyusun rencana pembangunan bidang pendidikan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Jambi tahun 2013-2018, yaitu dalam rangka “Mewujudkan Masyarakat Kota Jambi Yang Berakhlak, Berbudaya, dan Berdaya Saing” dengan Misi “Meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Kota Jambi melalui pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata”.

Selain itu, Renstra Dinas Pendidikan disusun dengan mengacu kepada Visi dan Misi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang memiliki Visi; “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan

Kebudayaan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan Berkarakter Kuat”, dengan misi sebagai berikut : 1). Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan; 2). Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan dan kebudayaan; 3). Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan; 4). Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan dan kebudayaan; 5). Menjamin kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan; dan 6). Melestarikan dan memperkuat Bahasa dan Kebudayaan Indonesia.

Sebagaimana kebijakan Pemerintah Kota Jambi yang ingin mewujudkan sumber daya manusia Kota Jambi yang produktif dan “berdaya saing” maka, melalui program Tiga Tahun Kota Jambi Bangkit, untuk bidang pendidikan Pemerintah Kota Jambi telah meluncurkan program sekolah bebas pungutan dan pemberian beasiswa bagi semua siswa miskin, serta kegiatan pengadaan pakaian seragam dan peralatan sekolah dari tingkat SD sampai SMP dan bantuan SPP bagi siswa kurang mampu pada dua puluh empat satuan pendidikan di Sekolah Swasta di Kota Jambi Melalui program ini diharapkan tidak ada lagi putra-putri daerah Kota Jambi yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dan layak.

Persentase anggaran untuk belanja fungsi pendidikan dari total APBD Pemerintah Kota Jambi Tahun 2017 adalah sebesar 31,70 persen. Angka ini telah memenuhi persentase minimal yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 2, ayat (1) bahwa alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan ditetapkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen).

Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 2, ayat (1) bahwa Alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan ditetapkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen). Selanjutnya ayat (2) disebutkan bahwa alokasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan perbandingan antara anggaran belanja fungsi pendidikan terhadap seluruh belanja APBD. Pasal 3 disebutkan bahwa alokasi belanja fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi belanja modal, belanja barang, belanja pegawai, belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja hibah. Pasal 6 menyatakan belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan struktural, tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru, dan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru.

Sesuai dengan target RPJMD Kota Jambi pada bidang pendidikan, indikator kinerja Utama Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada usia sekolah pada tahun 2017 ditargetkan 83.54%, terealisasi 117.78%. Indikator kinerja utama Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) pada tahun 2017 ditargetkan 11,25%, sampai saat ini belum dapat diketahui realisasinya dikarenakan data BPS belum dipublikasikan. Indikator kinerja utama jumlah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi pada tahun 2017 ditargetkan 94,57%, terealisasi sebesar 96.11%. Indikator kinerja utama jumlah sekolah sesuai SNP pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2017 ditargetkan 80%, terealisasi sebesar 101.25%.

Permasalahan yang dihadapi didalam pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan pada umumnya tidak terlalu signifikan sehingga dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran pembangunan pendidikan antara lain adalah keterbatasan waktu dan lokasi sekolah yang akan dilaksanakan sebagian besar berada pada daerah dengan topografi yang berada di atas rawa.

Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi dan RSUD H. Abdul Manap. Kesehatan merupakan hak dasar yang wajib diterima oleh setiap manusia. Tanpa adanya taraf kesehatan yang layak dan baik diterima oleh masyarakat, sasaran dan tujuan pembangunan tidak akan dapat tercapai dengan baik. Dapat dikatakan bahwa, sukses atau tidaknya pembangunan suatu bangsa

ditentukan oleh baiknya kualitas kesehatan bangsa tersebut. Kualitas kesehatan masyarakat suatu bangsa merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat, baik itu dari sisi masyarakat, pemerintah dan stakeholders. Seluruh komponen tersebut harus secara bersama dan bersinergi bekerja sama membangun kualitas kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kota Jambi melalui visi dan misi Walikota Jambi, telah menetapkan misi "Mewujudkan masyarakat kota yang berakhlak, berbudaya dan berdaya saing". Melalui misi tersebut, ditetapkan tujuan "peningkatan pelayanan kesehatan dan revitalisasi infrastruktur kesehatan". Sasaran dari tujuan ini adalah, tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat untuk semua. Adapun strategi yang diterapkan untuk mewujudkan misi ini adalah, dengan peningkatan mutu dan akses kesehatan. Dengan adanya strategi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah dengan meningkatkan mutu tenaga medis dan paramedis, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Keseluruhan langkah strategis ini dicapai untuk mewujudkan Kota Jambi Bangkit Tahun 2017.

Pembangunan Kesehatan Kota Jambi Tahun 2017 diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat yang memberikan prioritas pada upaya kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak dalam kandungan sampai usia lanjut. Selain itu pembangunan bidang kesehatan Kota Jambi diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Sementara itu, kehadiran sebuah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) bagi masyarakat Kota Jambi sangatlah dibutuhkan. Selain biaya pelayanan kesehatan yang terjangkau, fasilitas dan peralatan yang lengkap, dan kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan sebuah Rumah Sakit. Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, rumah sakit dituntut untuk memberikan

pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi memberikan pelayanan kesehatan tanpa membedakan tingkat sosial masyarakat. RSUD H. Abdul Manap melayani pasien umum, pasien pengguna kartu Jamkesmas, Jamkesmasda, Askes/BPJS, Jamsostek, dan Trimitra.

Sesuai dengan target RPJMD Kota Jambi pada bidang kesehatan, pada tahun 2017 terealisasi target 100%, 5 unit jumlah puskesmas dengan pelayanan 24 jam. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi dalam pelaksanaan urusan wajib di bidang kesehatan antara lain, penyusunan program dan penganggaran Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2017, belum mengacu pada penetapan indikator pencapaian 17 (tujuh belas) Sasaran Grand Strategy Departemen Kesehatan Republik Indonesia, melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 457/2008, dan disesuaikan pula dengan visi Pemda Kota yaitu "Terwujudnya Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya". Hasil kegiatan program pembangunan kesehatan yang melalui anggaran keuangan tahunan daerah masih belum mengacu pada SPM Kesehatan dengan mempedomani Peraturan Menkes RI Nomor 741/2008 dan yang terakhir, masih ada kegiatan yang tidak dapat teralisasi 100% dikarenakan karena adanya keterlambatan dalam Penetapan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan.

Permasalahan yang dihadapi oleh RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi dalam pelaksanaan urusan wajib di bidang kesehatan adalah masih banyak program dan kegiatan yang belum mencapai target yang diinginkan sehingga masih banyak pembenahan bagi pihak rumah sakit untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasana pelayanan di rumah sakit dengan melengkapi peralatan kesehatan, pembenahan ruang dan gedung serta penampilan rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan lebih maksimal. Adapun prestasi yang didapat RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi pada tahun 2017 adalah sebagai motivator Rumah Sakit Sayang Ibu dan Anak (tingkat Provinsi Jambi).

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada Tahun 2016 dilaksanakan pada dua SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi dan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi. Namun dengan diterbitkannya PP 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terhitung mulai 1 Januari 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi akan diubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi. Hal ini tentunya akan berimplikasi pada Tupoksi Dinas, artinya tidak hanya sebagai eksekutor dalam upaya peningkatan kapasitas, kuantitas dan kualitas serta kontinuitas infrastruktur, akan tetapi juga diharapkan mampu melaksanakan fungsinya sebagai perencanaan, pemanfaatan serta pengawasan pengendalian ruang di Kota Jambi. Pada tahun 2016 urusan pekerjaan umum dijabarkan dalam 4 (empat) program dan 8 (delapan) dan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui perbaikan sinergitas internal serta peningkatan kualitas perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi.

Upaya meningkatkan kualitas urusan pekerjaan umum sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018 pada Urusan Pekerjaan Umum dijabarkan dalam misi 1 (satu) yaitu membangun infrastruktur perkotaan yang merata dan berwawasan lingkungan. Dengan indikator kinerja daerah meningkatkan Rasio panjang jaringan jalan dan drainase yang baik serta penurunan luas kawasan kumuh yang bertujuan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas. Pada tahun 2017 urusan pekerjaan umum memiliki target harus dicapai dalam RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, yaitu :

1. Target rasio panjang jaringan jalan yang baik sebesar 100 % atau sepanjang 510,452 km, pada tahun 2017 baru mencapai 92,00% atau sepanjang 466.14 km. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kinerja Dinas PUPR Kota Jambi, khususnya terkait kebina margaan termasuk dalam mencari sumber-sumber pembiayaan baru yang dapat digunakan untuk mengakselerasi capaian target serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian guna meminimalisir laju kerusakan jalan pertahunnya.
2. Rasio panjang drainase dalam kondisi baik sebesar 90,00% atau sepanjang 114,48 km dari total panjang drainase Kota Jambi 127,2 km

dan terrealisasi sebesar 90,00% atau sesuai target yang ditetapkan dalam RPJM.

3. Rasio luas kawasan kumuh per luas wilayah pada tahun 2017 adalah sebesar 0,50% atau 4.93 Ha dari total luas kawasan kumuh Kota Jambi seluas 986.5 Ha dan sudah terealisasi sebesar 2.49% atau seluas 24.6 Ha, pada tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum fokus pada dokumen perencanaan penanganan kawasan kumuh Kota Jambi sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 700 Tahun 2013, akan tetapi kegiatan penanganan tetap dilaksanakan khususnya pembangunan jalan lingkungan dan drainase.

Secara umum urusan pekerjaan umum telah mencapai target indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, akan tetapi tentunya dinilai masih perlu dilakukan peningkatan kualitas serta totalitas penanganan infrastruktur, sehingga umur pembangunan fisik yang dihasilkan lebih lama dan dapat menekan anggaran dalam pemeliharaan rutin nantinya.

Pada urusan Penataan Ruang sebagaimana di tetapkan dalam RPJMD bahwa target indikator daerah untuk urusan penataan ruang adalah rasio ketaatan terhadap RTRW sebesar 100% setiap tahunnya. Target capaian ini idealnya dilaksanakan melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Dinas PUPR Kota Jambi, namun sampai saat ini belum berjalan secara optimal mengingat masih terdapat dualisme pelaksanaan tupoksi antara Dinas PUPR Kota Jambi dan Dinas Perkim Kota Jambi. Namun demikian berdasarkan kajian yang dilakukan Bappeda Kota Jambi terkait kesesuaian ruang Kota Jambi pada tahun 2017 tingkat kesesuaian ruang Kota Jambi mencapai 51%. Kondisi ini menuntut peningkatan kinerja dan profesionalisme instansi teknis pelaksana fungsi pengawasan dan pengendalian ruang serta pemberian rekomendasi perizinan.

Disamping itu, kondisi ini tentunya harus didukung dengan penyediaan regulasi peraturan zonasi sebagai turunan untuk mengimplementasikan Perda Tata Ruang berupa dokumen rencana untuk menganalisa dan menciptakan program dan kegiatan yang menjadi skala prioritas penganggaran guna merealisasikan rencana tata ruang yang telah

ditetapkan dalam Perda tata ruang sehingga dapat menjawab berbagai persoalan perkotaan yang harus segera diselesaikan.

Dalam pelaksanaan operasional terkait tata ruang, saat ini hanya berdasarkan rencana umum RTRW sehingga untuk mengambil keputusan untuk fungsi bangunan yang belum diatur dalam Perda No. 9 Tahun 2013 sulit dilakukan secara tepat. Sebagai contoh, banyak izin yang dikeluarkan berdasarkan Perda RTRW Kota Jambi Tahun 2000-2010, terutama bangunan gudang yang tidak sesuai dengan Perda RTRW Kota Jambi 2013-2033. Dengan telah rampungnya penyusunan RDTR untuk BWK II, III, V dan VI pada tahun 2016 artinya telah melengkapi penyusunan RDTR Kota Jambi yang telah dilaksanakan dari tahun 2015 dan diharapkan dapat segera di sahkan menjadi Perda pada tahun 2018 mendatang sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ruang di Kota Jambi.

Urusan Perumahan

Urusan Perumahan merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Penataan Ruang, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, serta Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018 pada Urusan Perumahan dijabarkan dalam misi 1 yaitu membangun infrastruktur perkotaan yang merata dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas cakupan pelayanan infrastruktur dasar antara lain cakupan pelayanan jaringan air minum dan kecukupan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman serta pengurangan Kawasan Kumuh.

Pada tahun 2016 urusan wajib perumahan memiliki target harus dicapai dalam RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, yaitu :

1. Cakupan pelayanan jaringan air minum per jumlah rumah sebesar 75% dan terealisasi sebesar 72,25%, dimana mengalami peningkatan 8,25% dari kondisi awal pada akhir tahun 2015 yaitu sebesar 64%.

2. Kecukupan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman sebesar 78.41% atau sebanyak 13.421 titik dan terrealisasi sebesar 75.47% atau sebanyak 12.917 titik dari total kebutuhan selama 5 tahun sebanyak 17.116 titik, dimana pada tahun 2016 terpasang sebanyak 846 titik terdiri dari 402 titik dengan sistem LED dan 444 titik sistem Non LED .

Urusan perumahan secara kelembagaan terdapat Dinas Tata Ruang dan Perumahan yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni, sebagai informasi jumlah perumahan yang dibangun oleh pengembang sebanyak 367 lokasi dan jumlah rumah sebanyak 118.000 unit dengan angka backlog sebesar 18.000 unit.

Pada Tahun 2016 Pemerintah Kota Jambi mendapat Program Pengurangan Kawasan Kumuh melalui SNVT Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) pada 3 (tiga) Lokasi yaitu: Kelurahan Tanjung Sari, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Legok. Selain dari itu terdapat Program Rumah Tidak Layak Huni melalui SNVT Penyediaan Perumahan Prov. Jambi dimana untuk Kota Jambi mendapat bantuan sebanyak 250 unit rumah tersebar pada 10 Kelurahan di Kota Jambi.

Dan untuk Tahun 2016 Pemerintah Kota Jambi juga mengusulkan Pembangunan Rumah Susun Sewa yang diperuntukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah khusus Tenaga Medis yang dibangun pada Lokasi RSUD Abdul Manap Kota Jambi sebanyak 1 (satu) Tower yang terdiri dari 70 (tujuh puluh) unit type 36, melalui SNVT Penyediaan Perumahan.

Terakhir dapat disampaikan bahwa pada urusan perumahan terdapat juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran adapun misi Memberikan pelayanan prima dalam bidang pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan korban bencana, Meningkatkan peran serta masyarakat, swasta dan instansi pemerintah dalam bidang pencegahan, penanggulangan, penyelamatan dan rekondisi korban bencana.

Strategi yang dilakukan terkait dengan urusan perumahan adalah dengan cara melaksanakan koordinasi perizinan pembangunan gedung (IMB), Izin penggunaan bangunan dan Izin lokasi (Rekomendasi keruangan).

Dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana dan kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran didukung dengan :

Dengan kondisi yang dimiliki pada tahun 2016 BPBD dan Damkar masih memiliki respon time sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang penanggulangan kebakaran yaitu selama 15 menit dari pos terdekat menuju lokasi kebakaran.

Urusan Penataan Ruang

Pada urusan Penataan Ruang sebagaimana di tetapkan dalam RPJMD bahwa target indikator daerah untuk urusan penataan ruang adalah rasio ketaatan terhadap RTRW sebesar 100% setiap tahunnya. Target capaian ini di wujudkan dengan cara tertib pemberian perizinan yang sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang terdiri dari rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan dan rencana kawasan strategis. Namun demikian, pada tahun 2016 terdapat 150.550 bangunan ber-IMB di Kota Jambi, dimana 9.500 bangunan diantaranya termasuk dalam kategori melanggar atau pembangunan dilaksanakan tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Dengan demikian capaian target kesesuaian ruang pada tahun 2016 adalah sebesar 93,69% atau masih terdapat margin sebesar 6,31% margin bangunan yang harus ditertibkan. Kondisi ini menuntut peningkatan kinerja dan profesionalisme instansi teknis pelaksana fungsi pengawasan dan pengendalian ruang serta pemberian rekomendasi perizinan.

Disamping itu, kondisi ini tentunya harus didukung dengan penyediaan regulasi peraturan zonasi sebagai turunan untuk mengimplementasikan Perda Tata Ruang berupa dokumen rencana untuk menganalisa dan menciptakan program dan kegiatan yang menjadi skala prioritas penganggaran guna merealisasikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam Perda tata ruang sehingga dapat menjawab berbagai persoalan perkotaan yang harus segera diselesaikan.

Dalam pelaksanaan operasional terkait tata ruang, saat ini hanya berdasarkan rencana umum RTRW sehingga untuk mengambil keputusan untuk fungsi bangunan yang belum diatur dalam Perda No. 9 Tahun 2013 sulit dilakukan secara tepat. Sebagai contoh, banyak izin yang dikeluarkan berdasarkan Perda RTRW Kota Jambi Tahun 2000-2010, terutama bangunan gudang yang tidak sesuai dengan Perda RTRW Kota Jambi 2013-2033. Dengan telah rampungnya penyusunan RDTR untuk BWK II, III, V dan VI

pada tahun 2016 artinya telah melengkapi penyusunan RDTR Kota Jambi yang telah dilaksanakan dari tahun 2015 dan diharapkan dapat segera disahkan menjadi Perda pada tahun 2017 mendatang sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ruang di Kota Jambi.

Urusan Perencanaan Pembangunan

Urusan wajib bidang perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi.

Selanjutnya untuk melaksanakan urusan perencanaan pembangunan Bappeda Kota Jambi pada Tahun 2017 melaksanakan 8 Program dengan 29 Kegiatan yang antara lain melaksanakan Sistem Perencanaan Daerah (SIMREDA), menyusun Buku Statistik Kota Jambi Tahun 2017, melaksanakan Forum SKPD Musrenbang RKPD Tingkat Kota Jambi tahun 2017 untuk perencanaan 2018, menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2018, buku Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2017, buku KUA PPAS Tahun Anggaran 2018 dan buku KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017, buku Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban (LKPJ) dan Summary LKPJ Walikota Jambi tahun 2017, menyusun laporan pelaksanaan DAK tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005, melaksanakan koordinasi dengan SKPD dan stakeholders lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan bidang infrastruktur, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan sumberdaya manusia di Kota Jambi; menyusun Buku Jambi Dalam Gambar; Menyusun Feasibility Study Techno Park; menyusun Kajian Daya Saing Kota Jambi; Menyusun Laporan LP2KD Kota Jambi Tahun 2016; Menyusun kajian faktor-faktor pendorong urbanisasi; Inventarisasi dan identifikasi Keragaman budaya Kota Jambi; menyusun Analisa Ketimpangan Gender Kota Jambi; Menyusun Analisa Tingkat Pengembalian Investasi Pendidikan di Kota Jambi; Menyusun Analisa Kondisi Ketenagakerjaan Kota Jambi; Menyusun kajian Peranan Pembantu dan Anggota Rumah Tangga lain Terhadap Partisipasi Kerja dan Lapangan Usaha Ibu Rumah Tangga di Kota Jambi; Menyusun Analisa Kependudukan dan Bonus Demografi Kota Jambi; menyusun Kajian Kesesuaian Ruang di Kota Jambi.

Urusan Perhubungan

Pembangunan urusan perhubungan bertujuan untuk mencapai terwujudnya penyelenggaraan perhubungan yang lancar, tertib, teratur, aman, nyaman, selamat dan terjangkau sehingga tercipta pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien dalam rangka akselerasi kegiatan ekonomi daerah. Permasalahan yang perlu segera diatasi di Kota Jambi adalah kelancaran lalu lintas, dan kenyamanan di terminal baik terminal penumpang maupun terminal barang. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan diimplementasikan melalui program dan kegiatan difokuskan pada aspek pengendalian dan pengawasan angkutan. Untuk mendukung arah dan tujuan pembangunan tersebut, dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana keselamatan perhubungan. Selain itu, juga untuk peningkatan pelayanan perhubungan yang cepat, tertib, efektif dan efisien, dalam penanganannya dititik beratkan pada pengaturan lalu lintas dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas armada lalu lintas di Kota Jambi.

Dalam rangka mewujudkan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa melalui pembangunan infrastruktur perkotaan, salah satunya yaitu meningkatkan dan menata sarana dan prasarana perhubungan yang nyaman dan terpadu. Untuk itu Dinas Perhubungan Kota Jambi berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sektor-sektor pembangunan disegala bidang secara selamat, cepat, aman dan nyaman serta terjangkau dengan mengembangkan sarana prasarana perhubungan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Jambi Jambi yang bertanggung jawab terhadap urusan perhubungan pada tahun 2016 adalah Dinas Perhubungan dan Kantor Pengelola Parkir.

Urusan Lingkungan Hidup

Melihat Kondisi lingkungan hidup di kota Jambi secara umum sudah sangat memprihatinkan, sehingga sangat mendesak dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dulu hanya di pikirkan bagaimana mengelola limbah cair, gas dan padat, artinya pengelolaan dilakukan setelah limbah itu terjadi. Pada paradigma baru, tidak semata berfokus pada pengolahan limbah, tapi upaya untuk menghindari, meminimalisir, dan

memitigasi (merehabilitasi) limbah juga menjadi pemikiran utama. Makanya pengelolaan lingkungan lebih di tarik ke ranah hulu mulai dari perencanaan, formulasi kebijakan, sehingga pelaksanaan kegiatan usaha. Pada setiap siklus usaha diupayakan mereduksi dampak lingkungan opsi pengelolaan lingkungan seperti kajian lingkungan hidup strategi, instrumen ekonomi lingkungan, polluter must pay principle, produksi bersih, ISO 14001, dan seterusnya.

Pada tahap rencana kegiatan maka Amdal,UKL/UPL merupakan instrumen yang harus dipenuhi dengan baik. AMDAL merupakan salah satu instrumen perlindungan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan. Tantangan yang di hadapi Dinas lingkungan Hidup Kota Jambi dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi antara lain :

1. Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan sumber daya alam.
2. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah dan kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan.
3. Pencemaran lingkungan (air, Udara dan tanah) yang di akibatkan oleh aktivitas manusia (limbah cair rumah tangga/pabrik).

Target Indikator kinerja Daerah yang pertama pada Tahun 2016 dalam Pengendalian kerusakan lingkungan hidup dengan terbentuknya 3 kawasan Kampung Iklim, terbentuknya 2 kelompok bank sampah, terbentuknya 30 Sekolah Adiwiyata, terbentuknya 12 sekolah bank sampah, sebanyak 20 Perusahaan yang telah di bina untuk ikut Profer, tersusunya sebanyak 15 buah buku Status Lingkungan hidup Daerah dan Basis Data LH.

Target Indikator kinerja Daerah yang kedua pada Tahun 2016 dengan menurunnya beban pencemaran di Kota Jambi karena Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap 50 Perusahaan penghasil dan pengelola limbah berjalan secara baik dan efektif, sosialisasi berjalan dengan sukses, adanya bantuan sebanyak 50 orang duta sanitasi kota Jambi, kualitas udara selalu di pantau dengan melaksanakan uji emisi pada tempat-tempat tertentu, terlaksannya dengan baik koordinasi antar lintas sektoral dalam

penentuan sebanyak 86 titik pantau Adipura yang tersebar di 11 Kecamatan dalam kota Jambi.

Target Indikator Kinerja Daerah yang ke tiga pada tahun 2016 dengan meningkatnya pemberian Pelayanan pengujian kadar limbah padat dan cair dengan melakukan pemantauan pemantauan kualitas sumber air sebanyak 23 titik lokasi dan pengambilan 800 sampel limbah yang di uji kualitasnya.

Target Indikator Kinerja Daerah yang ke empat pada Tahun 2016 dengan meningkatnya Pengawasan dan penegakan hukum tentang lingkungan terbukti dengan selesainya seluruh permasalahan atas pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran /perusakan lingkungan hidup sebanyak 25 Pengaduan.

Target Indikator Kinerja Daerah yang kelima pada tahun 2016 sebaiknya terintegrasi dengan rencana kegiatan antar instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup, informasi kondisi lingkungan hidup kota Jambi dan masih tersedianya kawasan ruang terbuka hijau (RTH) yang refresentatif seperti terlihat pada tabel ini.

Tabel 2.72
Ruang Terbuka Hijau Kota Jambi Tahun 2016

No	Nama Ruang Terbuka Hijau	Lokasi (Kecamatan)	Luas (Ha)
1	RTH Hutan Kota	Kota Baru, Telanaipura, Jambi Timur.	524,00
2	RTH Taman	Kota Jambi (tersebar)	875,90
3	RTH sempadan danau	Telanaipura, Danau Teluk	300,00
4	RTH sempadan sungai	Kota Jambi	325,00
5	RTH Jalau Hijau jalan dan pedestrian	Kota Jambi	93,00
6	RTH Makam	Kota Jambi	140,00
7	RTH Kawasan Perkantoran Pemerintah	Kota Baru dan Telanaipura	27,00
8	RTH Fungsi tertentu (sabuk Hijau)	Kota baru dan Telanaipura	376,50
9	RTH fungsi tertentu (lahan pertanian Perkantoran)	Kota Jambi	956,10
Jumlah			3.617,50

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan tugas dan tanggung jawab dari SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Jambi.

Adapun isu strategis yang berkaitan dengan masalah pokok di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Jambi adalah masih tingginya angka tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap anak, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, serta masih rendahnya persentase perempuan pada posisi eselon II dan III di lembaga pemerintahan. Tantangan tersebut harus ditangani secara efektif dan tepat sasaran dengan menetapkan program yang tepat pula.

Pemerintah Kota Jambi melalui visi dan misi Walikota Jambi, telah menetapkan misi "Mewujudkan masyarakat kota yang berakhlak, berbudaya dan berdaya saing". Melalui misi tersebut, ditetapkan tujuan "peningkatan kesejahteraan keluarga dan pengarusutamaan gender di semua aspek pembangunan". Sasaran dari tujuan ini adalah terwujudnya peningkatan peran serta perempuan dalam pemerintahan. Adapun strategi yang diterapkan untuk mewujudkan misi ini adalah, dengan upaya peningkatan peran perempuan di pemerintahan. Dengan adanya strategi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah dengan meningkatkan porsi perempuan dalam jabatan pemerintahan. Keseluruhan langkah strategis ini dicapai untuk mewujudkan Kota Jambi Bangkit Tahun 2017.

Adapun pencapaian dan hasil yang telah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Jambi, sesuai dengan pencapaian target Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Kota Jambi yang dicapai selama kurun waktu tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pendataan keluarga tingkat Kota Jambi tahun 2017 terdapat 130.134 kepala keluarga dengan 501.572 jiwa, atau rata-rata jiwa dalam keluarga sebanyak 4.1 jiwa terdiri dari 268.692 jiwa laki-laki dan 263.931 jiwa perempuan.

Dari 130.134 kepala keluarga yang ada di Kota Jambi, digolongkan kedalam 5 tahap keluarga, Pra Sejahtera 5.229 jiwa, KS tahap I sebanyak 63.051 jiwa, KS tahap II sebanyak 61.854 jiwa.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan

pemberdayaan dan perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi pada tahun anggaran 2017.

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera merupakan tugas dan tanggungjawab dari SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Jambi

Adapun isu strategis yang berkaitan dengan masalah pokok di bidang pemberdayaan program Keluarga Berencana (KB) di Kota Jambi adalah masih tingginya angka kelahiran yang tidak terkontrol, implikasi dari fenomena ini adalah masih tingginya jumlah tindak KDRT dan anak, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Tantangan tersebut harus ditangani secara efektif dan tepat sasaran dengan menetapkan program yang tepat pula.

Adapun pencapaian dan hasil yang telah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Jambi, sesuai dengan pencapaian target Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Kota Jambi yang dicapai selama kurun waktu tahun 2017 adalah Pelayanan peserta KB baru dengan total 14.401 akseptor (84.05 % dari PPM) dari perkiraan peserta Kb aktif permintaan masyarakat sebanyak 17.134, dengan total Peserta KB aktif sejumlah 70.596 akseptor (72.,25%) dari PUS sebanyak 97.707 pasangan. Untuk pelayanan KB Pria Baru berjumlah 1.175 akseptor (158,6%) dari perkiraan permintaan masyarakat 741 orang, dengan jumlah KB pria aktif sebanyak 3.388 (4,80). Sepanjang tahun 2017 telah terjadi 11 kegagalan yaitu akseptor IUD sebanyak 7 kasus, implant 4 kasus (0.015% dari peserta KB aktif) dan 7 kasus komplikasi besar alat kontrasepsi namun dapat di atasi secara medis.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Jambi pada tahun anggaran 2017.

Urusan Ketenagakerjaan

Sesuai dengan target indicator kinerja urusan ketenagakerjaan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018, dengan sasaran terciptanya lapangan pekerjaan, pada tahun 2017 ditargetkan indicator kinerja jumlah pencari kerja terdaftar yang terserap sebesar 20% dari total target selama 5 tahun sebesar 5.431 pencari kerja. Realisasi yang diperoleh selama kurun waktu tahun 2017 adalah sebesar 49,19% atau 2.703 orang. Angka tersebut menggambarkan bahwa, pada tahun 2017 realisasi indicator kinerja yang ditargetkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2017.

Sasaran kedua adalah tersedianya tenaga kerja local yang berdaya saing, pada tahun 2017 ditargetkan indikstor kinerja jumlah serapan tenaga kerja pada UMKM sebesar 3% dari total target selama 5 tahun sebesar 13.986 tenaga kerja. Realisasi yang diperoleh selama kurun waktu tahun 2017 adalah sebesar 15,38% atau 2.703 tenaga kerja. Angka tersebut menggambarkan bahwa pada tahun 2017 realisasi indicator kinerja yang ditargetkan pada RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2017.

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Adapun rasio penduduk yang bekerja di Kota Jambi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.73

Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2013 s.d 2017 Kota Jambi

No	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016***	2017
1	Penduduk Yang Bekerja (PYB)	230.478	235.722	254.351		268.264
2	Angkatan Kerja (AK)	248.663	262.291	274.449		284.018
	Rasio PYB (%)	92,69	89,87	92,68		94,45

*** BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016 dikarenakan kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan data yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara

ekonomi di suatu wilayah, adapapun kondisi di Kota Jambi dapat di lihat pada table sebagai berikut:

Tabel 2.74
 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2013 s.d 2017
 Kota Jambi

No	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016***	2017
1	Angkatan Kerja (AK)	248.663	262.291	274.449		284.018
2	Penduduk Usia Kerja (PUK)	412.249	420.428	428.542		443.343
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	60,32	62,39	64,04		64,06

*** BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016 dikarenakan kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Seperti pada tahun 2017 dikota Jambi sebesar 64 % artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas sebanyak 64 orang tersedia untuk memproduksi pada periode tertentu.Adapun kondisi pencari kerja yang mendaftar di Kota Jambi dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.75
 Pencari kerja Yang ditempatkan Tahun 2013 s.d 2017 Kota Jambi

No	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	639	2.164	1.665	2.237	2.703
2	Pencari Kerja Yang Mendaftar	8.450	6.491	4.692	5.903	5.431
3	Pencari Kerja Yang ditempatkan (Rasio) %	7,56	33,34	35,49	37,90	49,77

Dari data tersebut saat ini di Kota Jambi jumlah pencari kerja yang ditempatkan semakin besar jumlahnya dari tahun ke tahun.

Sedangkan kondisi pengangguran terbuka di Kota Jambi dapat disajikan pada table berikut:

Tabel 2.76
 Tingkat Pengangguran terbuka Tahun 2013 s.d 2017 Kota Jambi

No	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016***	2017
1	Pengangguran Terbuka	18.185	26.569	20.098		15.754
2	Angkatan Kerja (AK)	248.663	262.291	274.449		284.018
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	7,31	10,13	7,32		5,55

*** BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016 dikarenakan kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran

TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Di Kota Jambi kondisi pada tahun 2017 sekitar 5,5 %, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 5 orang merupakan pengangguran.

Sedangkan rasio kesempatan kerja terhadap penduduk Usia 15 Tahun keatas dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.77

rasio kesempatan kerja terhadap penduduk Usia 15 Tahun keatas

No	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016***	2017
1	Kesempatan Kerja	230.478	235.722	254.351	dtb	268.264
2	Penduduk Usia 15 Tahun ketas	412.249	420.428	428.542	dtb	443.343
	Rasio Kesempatan Kerja	55.91	56.07	59.35	dtb	60.51

*** BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016 dikarenakan kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran

Untuk data proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja, disajikan pada table berikut:

Tabel 2.78

proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja

No	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016***	2017
1	TK yng berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga	45.359	53.659	51.611	dtb	64.146
2	Total Kesempatan Kerja	230.478	235.722	254.351	dtb	268.264
	Proporsi TK yang berusaha sendiri dan pekerja bebas	19,68	22.76	20.29	dtb	23.91

*** BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016 dikarenakan kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran

Terkait pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.79

Besaran Tenaga Kerja Yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

No	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Tenaga Kerja Yang dilatih	60	40	40	40	40
2	Pendaftar Pelatihan Berbasis Kompetensi	77	56	62	68	75
	Rasio (%)	77.92	71.43	64.52	58.82	53.33

Tabel 2.80

Besaran Tenaga Kerja Yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

No	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Tenaga Kerja Yang dilatih	90	90	90	90	90
2	Pendaftar Pelatihan Berbasis Masyarakat	98	95	92	97	101
	Rasio (%)	91.84	94.74	97.83	92.78	89.11

Tabel 2.81

Besaran Tenaga Kerja Yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

No	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Tenaga Kerja Yang dilatih	20	20	20	20	20
2	Pendaftar Pelatihan Kewirausahaan	23	25	28	30	34
	Rasio (%)	86.96	80.00	71.43	66.67	58.82

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penyelenggaraan urusan koperasi usaha mikro kecil dan menengah merupakan urusan wajib yang dilaksanakan Dinas koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah masih merupakan prioritas Pembangunan Daerah Kota Jambi dalam RPJMD 2013-2018 yang difokuskan pada perkembangan Koperasi dan UMKM, tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kemiskinan atau penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah diharapkan mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian Kota Jambi menuju “PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA”.

Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah saat ini lebih mengarah pada upaya penciptaan kemandirian, partisipasi, daya inovasi dan kreativitas pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai motivator dan fasilitator yang tujuannya adalah mencapai kemandirian, kematangan dan kedewasaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin kompleks.

Capaian yang telah dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM telah sesuai dengan target RPJMD Kota Jambi yaitu untuk meningkatkan jumlah koperasi aktif dan jumlah UMKM dan IKM mandiri. Sampai dengan tahun 2016 jumlah koperasi aktif sebanyak 208 unit dan jumlah UMKM dan IKM mandiri sebanyak 155 unit. Pada tahun 2017 target yang akan dicapai untuk koperasi aktif berjumlah 213 unit dan UMKM mandiri adalah 165 unit.

Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)

Kota Jambi seiring dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi. Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal ditujukan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam menarik investor dalam pengembangan usaha di Kota Jambi.

Adapun pencapaian beberapa program dan kegiatan pada tahun 2017 diantaranya adalah:

- 1) Realisasi Investasi PMDN melalui Izin Prinsip Penanaman Modal, baik yang terbit pada tahun 2017 maupun terbit pada tahun sebelumnya sampai dengan bulan Desember tahun 2017 terealisasi sebesar Rp. 527.417.530.763,-
- 2) Penerbitan 10.172 izin baru dan sebanyak 12.605 izin yang diregistrasi (Daftar Ulang).
- 3) Melaksanakan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan metode survey kemasyarakat melalui 9 unsur pelayanan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) pada tahun 2017 dapat dikonversi dengan angka IKM 85,23% dengan mutu pelayanan pada kategori *SANGAT BAIK*
- 4) Selama tahun 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi telah mengikuti Promosi Investasi sebanyak 4 (empat) kali. Promosi ini bertujuan mengenalkan kepada calon investor dalam dan luar negeri tentang potensi-potensi investasi yang ada di Kota Jambi dengan harapan dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kota Jambi.
- 5) Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah yang bertujuan mensinergikan antara aktivitas pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan investasi serta memberikan multiplayer effect positif bagi perekonomian daerah.

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Urusan Penanaman Modal adalah peningkatan realisasi investasi dan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Adapun pencapaian realisasi investasi Kota Jambi pada semester IV (bulan Desember) tahun 2017 sebesar Rp. 527.417.530.763,- Untuk pencapaian IKM pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan status

“SANGAT BAIK”, menghasilkan angka 85,23% tercapai dengan angka yang sangat memuaskan.

Adapun keberhasilan dari DPMPTSP Kota Jambi pada tahun 2017, antara lain :

- 1) Meraih Penghargaan sebagai Role Model Pelayanan Publik di Indonesia dengan Kategori “A” DPMPTSP Kota Jambi menempati urutan ketiga dari 59 Kabupaten/Kota yang di release oleh Kementrian PAN-RB. Penghargaan ini diberikan sebagai Apresiasi atas keberhasilan kepada Walikota Jambi yang memiliki komitmen tinggi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik didaerahnya yang mengedepankan kemudahan, kecepatan dan transparansi.
- 2) Meraih Penghargaan dari Kementerian PUPR karena keberhasilan Kota Jambi dalam memberikan kemudahan perizinan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- 3) Meraih Penghargaan Local Governance Capacity for Bussiness (LGCB) Award 2017. Penghargaan ini diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) kepada Kota Jambi sebagai salah satu kota yang berhasil membangun suasana usaha atau investasi yang kondusif.
- 4) Meraih Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) dari OMBUDSMAN RI, berdasarkan observasi dan evaluasi indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, Kota Jambi meraih nilai 85,23%. Standar penilaian meliputi : atribut, tanda layanan yang wajib disediakan pada setiap unit pelayanan publik.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Penanaman Modal adalah kegiatan Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE), tidak dapat dilaksanakan karena Surat Keputusan Pelimpahan kewenangan dalam penandatanganan Izin Prinsip Penanaman Modal baru diterima pada akhir Triwulan IV, sehingga pelaksanaan kegiatan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) tidak optimal, dan ini berpengaruh pada sosialisasi peraturan penanaman modal yang salah satunya berisi tentang kewajiban bagi para penanaman modal untuk memiliki izin prinsip

penanaman modal, sebelum memulai kegiatan investasi ataupun dalam proses pelaksanaan pengembangan investasi, dan investor juga memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala.

Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DPK) Kota Jambi. Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan ditujukan untuk melestarikan nilai-nilai budaya dengan cara pembinaan sanggar-sanggar seni dan pelestarian cagar budaya di Kota Jambi. Peningkatan sarana dan prasarana seni dan budaya serta pelaksanaannya dan mengikuti even-even seni budaya di dalam maupun di luar daerah.

Untuk menyelenggarakan urusan Kebudayaan selama tahun 2017 kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Bulan Promosi Pemerintah Kota Jambi di TMII Jakarta
2. Festival Angso Duo
3. Penampilan Promosi Kesenian Kota Jambi di Jakarta
4. Penampilan Kesenian dalam daerah dalam Propinsi Jambi
5. Penampilan Kesenian luar daerah Propinsi Jambi
6. Apresiasi Seni dan Budaya
7. Festival Cap Go Meh
8. Gelar malam seni budaya tanah pilih Kota Jambi
9. Gelar Seni dan Budaya Undangan dalam rangka HUT Kota Lubuk Linggau
10. Promosi Kesenian Kota Jambi
11. Rehab Makam bersejarah

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin di capai oleh Urusan Kebudayaan adalah Peningkatan jumlah sarana dan prasarana seni dan budaya. Pencapaian IKU jumlah sarana dan prasarana seni dan budaya tahun 2017 ditargetkan menjadi 80% dari kondisi awal sebesar 20% (tahun 2013). Urusan Kebudayaan pada tahun 2017 telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan target IKU tersebut, diantaranya adalah Pemugaran Makam

bersejarah, memberikan hibah peralatan kesenian kepada sanggar-sanggar seni dan budaya yang ada di Kota Jambi, Penyediaan tempat/panggung untuk kegiatan penampilan dan pementasan kesenian dan kebudayaan bagi para seniman dan untuk pemberian bantuan peralatan kesenian tersebut belum semuanya dapat kami penuhi secara maksimal dikarenakan keterbatasan dana yang tersedia, dengan demikian target IKU pada tahun 2017 tersebut belum tercapai.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Kebudayaan adalah keterbatasan dana yang tersedia, sehingga minimnya peningkatan jumlah sarana dan prasarana budaya. Terkait hal tersebut akan terus diusahakan untuk mengajukan anggaran ke Pemerintah Pusat dan juga ke Pemerintah Provinsi Jambi.

Pembangunan bidang seni erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Salah satunya ditunjukkan dengan jumlah grup kesenian di suatu daerah Untuk kota Jambi terjadi peningkatan jumlah grup kesenian, dimana pada tahun 2012 terdapat 174 grup kesenian sedangkan di tahun 2016 menjadi 185 grup kesenian. Dimana terjadi peningkatan grup kesenian sebesar 6,32 %.

Untuk gedung kesenian Kota Jambi sendiri dari tahun 2012 hingga sekarang belum memiliki gedung kesenian untuk menampung aktifitas berkesenian masyarakat Jambi. Mengenai penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2012 Kota Jambi telah menyelenggarakan 1 event kegiatan seni dan budaya, sedangkan di tahun 2016 telah menyelenggarakan sebanyak 5 event.

Tabel 2.82
Jumlah festival dan sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kota Jambi

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Grup Kesenian	Grup	174	185	185	185	185
Jumlah Gedung Kesenian	Unit	0	0	0	0	0
penyelenggaraan festival seni & budaya	Unit	1	1	3	3	5
Jumlah Penduduk	Jiwa	662,587	696,235	726,821	752,514	775,427
Rasio Grup Kesenian	Grup/10.000 jiwa	2.63	2.66	2.55	2.46	2.39

Sumber : Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Jambi, 2017

Sedangkan keberadaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.83

Tabel Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Kota Jambi

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Benda Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	2	2	2	2	2
2	Situs Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	3	3	3	3	3
3	Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	1	1	1	1	1

*Sumber : Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Jambi, 2017****Urusan Kepemudaan dan Olah Raga***

Urusan Pemuda dan Olahraga merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Jambi. Penyelenggaraan urusan Pemuda dan Olahraga ditujukan untuk meningkatkan peran Pemuda dan Olahraga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan upaya memberikan kesempatan kepada pemuda untuk berkreatifitas, pengembangan jiwa kewirausahaan pemuda, peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan pelaksanaan event-event pertandingan serta pencarian atlet-atlet berprestasi dan pembinaannya. Pada tahun 2016, untuk menyelenggarakan urusan Pemuda dan Olahraga dijabarkan ke dalam 1 program dengan 5 kegiatan.

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013 – 2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh urusan Pemuda dan Olahraga adalah peningkatan jumlah sarana dan prasarana olahraga, seni dan budaya serta terselenggaranya event berskala nasional/internasional. Pencapaian IKU pada tahun 2016 ditargetkan meningkat menjadi 30% dari target tahun 2015 sebesar 20%. Urusan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2015 telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target IKU tersebut, diantaranya adalah pengadaan dayung dragon boat race serta pelaksanaan tinju amatir Piala Wakil Presiden dan Piala Walikota Jambi. Walau telah melakukan berbagai upaya, namun IKU tersebut pada tahun 2016 belum tercapai terutama dari sisi peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pemuda dan Olahraga adalah keterbatasan dana yang tersedia, sehingga menyebabkan minimnya peningkatan jumlah sarana dan prasarana olahraga.

Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “mewujudkan masyarakat kota yang berakhlak, berbudaya dan berdaya saing” yang merupakan Misi yang ke-3 dari RPJMD Kota Jambi guna mendukung visi Kota Jambi yaitu “mewujudkan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat yang berakhlak dan berbudaya. Urusan ini pada tahun 2016 dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan misi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2016 memiliki 2 (dua) program urusan yang terdiri atas 7 kegiatan, didukung dengan 2 (dua) program urusan dari Satuan Polisi Pamong Praja yang terbagi dalam 5 kegiatan.

Didalam melaksanakan 4 (empat) program pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri ini, kedua SKPD mengacu kepada pemenuhan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD pada misi ke - 3 (tiga) yaitu, persentase penyelesaian permasalahan keagamaan. Pada tahun 2016 target penyelesaian konflik adalah 100%, yang berarti semua konflik yang terjadi pada tahun 2016, dapat diselesaikan dengan baik. Untuk mencapai target tersebut, dilaksanakan beberapa kegiatan dan program, diantaranya program pengembangan wawasan kebangsaan, program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan seterusnya. Selain itu, dari masing - masing SKPD juga memiliki Indikator Kinerja Kunci yang mendukung tercapainya ketertiban kerukunan beragama, yang pencapaiannya juga difasilitasi didalam program dan kegiatan di kedua SKPD tersebut.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian dan Persandian

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta tugas pembantuan.

Pada tahun 2017 BPKAD mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 9,662,166,743.00,- dengan realisasi penyerapan anggaran

sebesar Rp. 8,543,974,934.00,- atau 88.43% dan realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2017 BPKAD melaksanakan 6 program rutin (22 kegiatan) dan 1 program urusan (24 kegiatan). Pada tahun 2017 target kontribusi yang diberikan dari pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah sebesar Rp. 390.892.633.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 336.251.791.862.56,- dengan persentase sebesar 86,02%.

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh BPKAD Kota Jambi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian IKU tersebut pada tahun 2017 menunggu hasil audit oleh BPK, sedangkan pada tahun 2016 pencapaian IKU sudah menghasilkan WTP. Progres capaian yang diperoleh sampai saat ini adalah 75% dengan upaya yang telah dilakukan berupa penatausahaan aset dengan menggunakan sistem/aplikasi yang terintegritas dengan sistem/aplikasi keuangan dan juga menginventarisir selisih seluruh data barang milik daerah dengan neraca secara komprehensif yang melibatkan seluruh elemen dan unsur terkait. Akan tetapi WTP tersebut masih terdapat kelemahan dalam system pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, Antara lain:

1. Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak dapat ditelusuri rinciannya pada DBMD sebesar Rp. 7,45 Miliar dan Aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp. 4,94 Miliar tidak diketahui keberadaannya
2. Aset tetap lainnya tidak dapat ditelusuri rinciannya pada DBMD sebesar Rp. 6,32 miliar dan Aset tetap lainnya pada dua SKPD tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp. 4,15 miliar

Langkah-langkah yang dilakukan oleh BPKAD Kota Jambi untuk perbaikan meliputi:

1. Melakukan Inventarisasi Aset terhadap Sisa OPD yang belum melakukan Inventarisasi sebanyak 17 yaitu OPD dengan Progres Capaian 12 SKPD
2. Melakukan Update data melalui aplikasi aset
3. Pengurusan Sertifikat Aset Tanah Milik Pemda Kota Jambi

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pendapatan dan tugas pembantuan dengan

melakukan perencanaan, pembinaan dan pengendalian sumber – sumber pendapatan daerah yang meliputi pendataan, penetapan, penagihan, perencanaan dan Pelaporan, Pengendalian dan Penyuluhan, Ketatausahaan/Kesekretariatan serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun pencapaian beberapa program dan kegiatan pada tahun 2017 diantaranya :

a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan/Penerimaan Daerah.

- Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat.
- Updating basis data pajak daerah sert optimalisasi pemanfaatan kepada masyarakat.
- Kebijakan Insentif.
- Melakukan evaluasi dan pengkajian perkembangan Pajak Daerah guna mendapatkan data potensi dari Pajak Daerah.
- Mengoptimalkan pelaksanaan pendataan melalui survey lapangan terhadap perkembangan/ perubahan data objek pajak, dengan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan wajib pajak seperti tutup usaha, perubahan tempat, ukuran dan lain sebagainya.

Melakukan pengkajian Peraturan – Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku.

b. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi pada Tahun 2017 sebesar Rp. 200.024.000.000,15,-realisasi penerimaan yang dapat di capai adalah sebesar Rp. 202.865.713.413,15 atau 101,42% dengan demikian pada Tahun 2017 mengalami peningkatan penerimaan sebesar Rp. 2.841.713.413.15,- atau sebesar 1,42%.

Sedangkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Jambi Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp. 34.000.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 21.980.028.497,- atau 64,65%.

Permasalahan/kendala yang dihadapi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah yaitu :

- 1) Pelayanan melalui situs pemerintah belum ditunjang oleh system manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam system manajemen dan proses kerja pemerintah.
- 2) Belum mapannya strategi optimalisasi PAD sector pajak daerah.
- 3) Tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan pajak online pada instansi pemungut pajak daerah.

Upaya yang dilaksanakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam mengatasi permasalahan yang ada antara lain :

- 1) Penyederhanaan dan modernisasi/komputerisasi Sistem Perpajakan Daerah.
- 2) Penyempurnaan landasan hokum serta Law Enforcement bagi pengenaan pajak
- 3) Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat.
- 4) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.
- 5) Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit satuan kerja terkait.
- 6) Peningkatan kualitas aparatur pajak daerah.
- 7) Kebijakan insentif.

Untuk mencapai misi ke-4 (empat) dari RPJMD Kota Jambi, didalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bersih (Clean Government), maka Pemerintah Kota Jambi melalui BKD sebagai pelaksana kegiatan, telah membuat Indikator Kinerja Utama di dalam pencapaian misi tersebut, yaitu Rasio jabatan terhadap Pendidikan dan Keahlian.

Target RPMJD untuk indikator ini pada tahun 2017 adalah sebesar 80%, dengan jumlah pegawai negeri sipil 6.581 orang, dimana 55,76 % didominasi dengan tamatan S1, diikuti 23,71% tamatan SD-SMA, tamatan D1-D3 sebesar 15,49 % dan hanya 0,15 % S3 dan 4,86 % S2, dengan program-program yang telah dilaksanakan, pada tahun 2017 telah

mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 5.988.875.000,- untuk melaksanakan program pembinaan dan pengembangan aparatur.

Dengan program-program yang telah dilaksanakan, maka pencapaian indikator kinerja utama didalam penempatan aparatur sesuai dengan bidang pendidikan, dan keahlian sesuai dengan IKU RPJMD adalah sebesar 95,00% dari target yang telah ditentukan oleh RPMJD yaitu 80%. Pada Tahun 2017 Pemerintah Kota Jambi telah berkoordinasi dengan Diklat Propinsi untuk mengirim peserta diklat struktural (PIM 3 dan PIM 4) dan mempersiapkan kontribusi sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh Propinsi Jambi dan mengirim peserta diklat PIM 2 sesuai yang telah di jadwalkan oleh pemerintah pusat.

Kedepan pemerintah Kota Jambi telah berkoordinasi dengan diklat propinsi untuk mengirim peserta diklat struktural (PIM 3) dan mempersiapkan kontribusi sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh Propinsi Jambi dan mengirim peserta diklat PIM 2 sesuai yang telah di jadwalkan oleh pemerintah pusat serta mengadakan sendiri diklat PIM 4 di Kota Jambi.

Selanjutnya untuk mencapai misi ke-4 juga, Pemerintah kota Jambi melalui Inspektorat telah menetapkan Indikator Kinerja di RPJMD, yaitu opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2017.

Didalam pelaksanaan urusan otonomi daerah ini, Pemerintah Kota Jambi melalui kecamatan-kecamatan melaksanakan program pemberdayaan kecamatan dengan kegiatan samisake, kegiatan koordinasi pengelola kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan dan kegiatan pembinaan administrasi pemerintah kelurahan, kegiatan peningkatan kualitas pelayanan kecamatan serta kegiatan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.

Melalui bagian Pemerintahan Kota Jambi, urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, juga melaksanakan program-program diantaranya program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah, program peningkatan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan, program peningkatan kerja sama daerah. Juga melalui bagian

Kerjasama Kota Jambi, pemerintah kota Jambi terlibat aktif didalam kerjasama antar daerah melalui APEKSI (Assosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) dan AKKOPSI (Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi).

Urusan Ketahanan Pangan

Pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian masih merupakan prioritas Pembangunan Daerah kota Jambi yang di fokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan dan konsumsi pangan dan percepatan penganeekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.

Upaya yang telah dilaksanakan BKPP pada tahun 2016 antara lain :

1. Terlaksananya Gerakan makan bergizi berimbang, pengujian sampel produk pangan, pengadaan alat labor uji sampel prima 3 dan sosialisasi keamanan pangan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
2. Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan pekarangan dan pembentukan POKJA untuk penganeekaragaman konsumsi pangan, yang dikarenakan masih rendahnya konsumsi pangan sumber karbohidrat selain beras, serta terlaksananya sosialisasi keamanan pangan.
3. Terlaksananya pembinaan desa mandiri pangan di 12 (dua belas) Kelurahan dalam Kota Jambi.
4. Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebanyak 15.000 Kg untuk lokasi pasca bencana alam dan keadaan darurat.
5. Terlaksananya penilaian kemampuan kelas kelompok tani, Pelatihan petani di BPP, terlaksananya rembug KTNA dan terlaksananya peringatan HKP/PEDA, serta penyuluh dan pendamping bagi pertanian/perkebunan.

Prestasi yang diperoleh pada tahun 2016 adalah Juara I Kategori Cita rasa untuk B2SA Lomba Cipta Menu Tingkat Nasional Tahun 2016, Juara I Apresiasi Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tingkat Provinsi Jambi serta mendapatkan penghargaan Tingkat Nasional untuk kategori pelaku ketahanan pangan atas nama Abriyanto Kecamatan Pelayangan yang diserahkan langsung oleh Presiden RI, dan Juara II Apresiasi Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tingkat Provinsi Jambi untuk kategori Pengolahan Pangan atas nama Kelompok Amanah.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Urusan pemberdayaan masyarakat desa merupakan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi.

Pemerintah Kota Jambi melalui visi dan misi Walikota Jambi, telah menetapkan misi “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dalam Bingkai Kearifan Lokal”. Melalui misi tersebut, ditetapkan tujuan “Peningkatan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengembangkan seni, budaya serta memperhatikan kearifan lokal”. Sasaran dari tujuan ini adalah, terwujudnya peran masyarakat dalam pembangunan Kota Jambi. Adapun strategi yang diterapkan untuk mewujudkan misi ini adalah dengan upaya peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Keseluruhan langkah strategis ini dicapai untuk mewujudkan Kota Jambi Bangkit Tahun 2018.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan pemberdayaan masyarakat desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi pada tahun anggaran 2016.

Urusan Kearsipan

Kearsipan dan dokumentasi merupakan salah satu sasaran strategis Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun rencana pembangunan bidang kearsipan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Jambi tahun 2013-2018, yaitu dalam rangka misi “Mewujudkan Masyarakat Kota Jambi Yang Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing”, dengan tujuan “Meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Kota Jambi melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, dan merata”. Strategi yang dicapai untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan mutu dan akses pendidikan, yaitu dengan arah kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.

Sesuai dengan fungsinya jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah fungsi pelayanan umum yang meliputi urusan kearsipan telah melaksanakan

bimbingan pengelolaan arsip untuk Organisasi Perangkat daerah (OPD), Organisasi Masyarakat (ormas), Organisasi Politik (Orpol) di lingkungan Kota Jambi dan mengelola Arsip inaktif yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk disimpan pada Dinas Karsipan dan Perpustakaan (DKP) guna penyelamatan dan pelestarian dengan hasil yang sudah diperoleh :

- a. Telah dibina pengelola arsip OPD sampai dengan tahun 2016 sebanyak 60 orang untuk menyusun Jadwal Retensi Arsip (JRA) arsip dinamis dan JRA yang sudah disusun telah mendapatkan penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Karena Kota Jambi sudah berhasil membuat JRA yang disahkan oleh Walikota Jambi.
- b. Telah terkumpul arsip Inaktif sejumlah 16.000 dokumen berupa dokumen arsip keuangan dari OPD Dinas Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Jambi.

Urusan Informasi dan Komunikasi

Urusan Informasi dan Komunikasi diselenggarakan oleh 2 (dua) SKPD, yaitu Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kota Jambi. Pada tahun 2016, untuk mewujudkan pemerintahan yang professional dan bersih (clean governance), sesuai dengan misi ke-4 RPJMD Kota Jambi. Pemerintahan Kota Jambi telah melakukan peningkatan jaringan komunikasi dan informatika yang terintegrasi, melaksanakan diseminasi informasi yang efektif dan pengelolaan data secara elektronik untuk menjadikan Jambi sebagai Kota Pintar (Smart City).

Dalam penyelenggaraan urusan Informasi dan Komunikasi masih terdapat kendala yaitu terbatasnya Sumber Daya Aparatur yang menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi serta alokasi anggaran yang terbatas untuk urusan ini, karena distribusi belanja langsung lebih diprioritaskan pada program dan kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Urusan Perpustakaan

Pendidikan dan dunia perpustakaan merupakan sasaran strategis Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun rencana pembangunan bidang pendidikan yang penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Pemerintah Kota Jambi tahun 2013- 2018, yaitu dalam rangka misi “Mewujudkan Masyarakat Kota Jambi Yang Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing”, dengan tujuan “Meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Kota Jambi melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, dan merata”. Strategi yang dicapai untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan mutu dan akses pendidikan, yaitu dengan arah kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana penddikan.

Untuk urusan pelayanan publik dalam bidang perpustakaan telah dilaksanakan upaya antara lain memotivasi masyarakat Kota Jambi untuk datang berkunjung serta menjadi anggota perpustakaan melalui program pengembangan minat budaya baca dimana pada tahun 2014 jumlah anggota Perpustakaan Kota Jambi sebanyak 663 orang, meningkat menjadi 922 orang di Tahun 2017. Dimana terjadi peningkatan sebesar 81,04 %.

Tabel 2.84

Jumlah Anggota Perpustakaan di Kota Jambi Tahun 2014 - 2017

Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017
Jumlah Anggota Pustaka	Orang	663	776	1.033	922

Sumber : DKP Kota Jambi

Sedangkan untuk jumlah pengunjung Perpustakaan Kota Jambi di Tahun 2014 sebanyak 9.441 orang meningkat menjadi 28.435 orang di tahun 2016. Dimana terjadi peningkatan pengunjung perpustakaan dari tahun 2012 sebesar 201,18 %.

Tabel 2.85

Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Jambi

Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pengunjung Pustaka	Orang	12.692	14.896	28.435	37.337
Jumlah Penduduk	Orang	539,242	559,571	602,970	607,796
Nilai		0,02	0,03	0,05	-

Sumber : DKP Kota Jambi

Sedangkan penambahan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dari tahun 2012-2016 sebesar 63,1 %, dimana pada tahun 2012 terdapat 832 judul buku dan 1.876 eksemplar buku sedangkan pada tahun 2016 menjadi 1.357 judul buku dan 3.091 eksemplar buku. Terjadi penambahan sebesar 63,1 % judul buku dan 64,76 % eksemplar buku.

Tabel 2.86
Jumlah Koleksi Judul dan Buku Perpustakaan di Kota Jambi

Untuk pembinaan perpustakaan sekolah di lingkungan Kota Jambi diperoleh hasil sebagai berikut : Lomba Perpustakaan Sekolah Peringkat I Provinsi, Lomba Pidato Bahasa Inggris Peringkat 1 dan 2 Provinsi, Lomba Cerita Anak Peringkat I Provinsi.

Memberikan pelayanan khusus kepada pelajar SD yang tidak dapat berkunjung langsung ke Perpustakaan Kota Jambi melalui kegiatan mobil perpustakaan keliling, terdapat 2 unit mobil perpustakaan keliling yang beroperasi memberikan pelayanan dari hari senin sampai dengan jum'at setiap minggunya.

Urusan Pertanian

Dalam rangka mewujudkan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa selaras dengan Misi Kota Jambi dalam meningkatkan perekonomian kota berbasis potensi lokal menuju kemandirian daerah, sektor pertanian yang meliputi sub sektor tanaman pangan dan hortikultura berupaya untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan petani yang ada di Kota Jambi dengan berbagai program dan kegiatan baik dari APBD II, APBD I dan APBN baik berupa bantuan benih, pupuk, jaringan irigasi, alat dan mesin pertanian, saprodi lainnya.

Upaya-upaya yang dilaksanakan pada tahun 2016 antara lain :

1. Kegiatan Tanaman Pangan khususnya komoditi padi dan palawija pada tahun 2016 adalah pengembangan padi sawah dan memberikan bantuan kepada masyarakat petani yakni benih padi sawah sebanyak 14.500 kg untuk lahan sawah seluas 725 Ha. Disamping itu juga dibantu sarana produksi pertanian (saprodi) bagi petani penangkar padi sawah berupa benih, pupuk dan pestisida untuk lahan sawah seluas 6 Ha. Target tanam padi yang ditetapkan oleh Kementrian Pertanian Republik Indonesia untuk Kota Jambi sebesar 1.700 Ha hanya terpenuhi 944 Ha (55,53%), dari luas tanam tersebut yang bisa dipanen hanya seluas 395 Ha, kondisi tersebut disebabkan oleh kemarau dan kabut asap serta selebihnya

mengalami puso sebesar 569 Ha. Disamping bantuan yang bersumber dari APBD Kota Jambi ada juga bantuan dari APBD Provinsi Jambi berupa bantuan benih padi sawah untuk kawasan pangan terpadu seluas 250 Ha dan pengembangan jagung hibrida seluas 10 Ha, namun bantuan ini juga mengalami kondisi kekeringan dan puso.

2. Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian mendukung Tanaman Pangan khususnya komoditi padi berupa bantuan baki semai sebanyak 810 unit yang merupakan teknologi tepat guna untuk luas lahan 10 Ha/musim tanam. Selanjutnya untuk menghindari kehilangan hasil, akibat burung pemakan padi saat padi telah berisi, diberi bantuan jaring padi sebanyak 500 gulung untuk luas lahan sekitar 10 Ha/musin tanam. Melalui dana APBN diberi bantuan kepada kelompok tani untuk kegiatan Pengembangan optimalisasi lahan sawah seluas 200 Ha dan Pengembangan jaringan irigasi seluas 100 Ha, yakni untuk mendukung upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai. Disamping itu, juga diberikan bantuan alat dan mesin pertanian berupa Handtraktor 10 unit, pompa air 3 unit, minitraktor 1 unit dan bangunan serta penggilingan padi 1 unit.
3. Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian mendukung Tanaman Pangan berupa bantuan kendaraan roda 3 dan perlengkapan sebanyak 4 unit yang dimanfaatkan untuk alat angkut saprodi dan pemasaran produk pertanian dan pemasaran produksi pertanian. Dengan cara pemasaran secara langsung dari petani ke konsumen dapat memutus mata rantai pemasaran sekitar 20% sehingga keuntungan petani menjadi meningkat, selanjutnya bantuan alat penggilinging/juicer sebanyak 2 unit untuk pengolahan hasil pertanian
4. Kegiatan Hortikultura Aneka Tanaman pada optimalisasi pemanfaatan pekarangan diberikan bantuan berupa bibit dalam polybag yang diserahkan pada P2WKSS, HATINYA PKK, PHBS dan Kampung Bantar, yakni berupa tanaman cabe sebanyak 3.170 polybag, tanaman terong sebanyak 1.450 polybag, tanaman kembang kol 1.000 polybag serta toga 2.100 polybag. Disamping itu juga, kegiatan Pengembangan Kawasan Hortikultura diserahkan bantuan benih sayuran buah sebanyak 650 bungkus dan benih seeding net 1 unit dan tanaman florikultura (hias) juga

dikembangkan tanaman anggrek 350 pot. Pada tahun 2016 ini melalui dana APBD kegiatan Hortikultura dan Aneka Tanaman ada pengembangan komoditi cabe seluas 14 Ha. Jenis bantuan yang diberikan berupa bibit cabe dengan jenis Castillo F1 dan TM 999 dan untuk mendukung kegiatan ini diberi juga Sarana Produksi berupa Pupuk Tricokhompos, Pupuk NPK, Mulsa dan Agens Hayati. Disamping pengembangan cabe melalui dana APBD juga dibantu tanaman anggrek dan melati seluas 8.000 M2. Pada tahun 2016 ini dikarenakan kemarau yang panjang dan kabut asap, sehingga untuk capaian luas tanan, panen, produktifitas dan produksi tidak dapat tercapai.

5. Kegiatan Pengembangan bibit Unggul pertanian/perkebunan pada tahun 2016 adalah penyediaan calon induk dan perbanyak bibit/benih hortikultura yang difokuskan pada perbanyak penyediaan bibit tersebut pada awalnya dapat dilaksanakan 100% dari target yang telah ditentukan, namun akibat dari kemarau pada bulan Agustus-November 2016, maka bibit yang tersisa mengalami kematian sekitar 50% yang disebabkan oleh kekeringan.

Untuk pengembangan calon pohon induk yang telah mengalami kenaikan, dimana calon pohon induk buah-buahan yang diadakan pada tahun 2016 diantaranya tanaman jeruk 100 batang (BPMT), durian 50 batang, alpukat 20 batang, sirsak ratu 50 batang, mangga 10 batang, manggis 5 batang dan tanaman koleksi jeruk keprok siam 100 batang, keprok pontianak 100 batang yang kesemuanya telah ditanam pada lahan UPTD Balai Benih Hortikultura Mayang.

Urusan Kehutanan

Pembangunan Urusan Kehutanan bertujuan untuk mewujudkan peningkatan pemenuhan ratio Ruang Terbuka Hijau sebesar 30 % secara bertahap, mengembangkan dan mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta meningkatkan kualitas dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan urusan Kehutanan di Kota Jambi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi. Pada tahun 2016 pada Bidang Kehutanan memperoleh realisasi fisik sebesar 98,57 %.

Berkenaan dengan alokasi anggaran tersebut, telah dilaksanakan Program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengembangan Penanaman dan Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota dengan realisasi fisik 99,12 %. Dana yang digunakan untuk menambah sarana prasarana di Hutan Kota sebesar 3 % yaitu dari 71 % menjadi 74%.
- 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan.
Dengan realisasi fisik 100% dana yang digunakan untuk melaksanakan pembinaan peredaran hasil hutan pada 29 industri hasil hutan.
- 3) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian RTH Hutan Kota
Dengan realisasi fisik 96,58%, dana tersebut digunakan untuk melaksanakan pengaman hutan kota, patrol peredaran hasil hutan, patrol kebakaran hutan dan lahan dan tersedianya bahntuan bahan pagar lingkungan pada P2WKSS, PHBS.

Rasio RTH terhadap luas wilayah sesuai UU No. 26 Tahun 2007 adalah 30%, dimana pada tahun 2015 telah dilakukan pengadaan lahan sebanyak 7,17 Ha dari total rencana 94 Ha dilokasi Kel. Bagan Pete, yang terealisasi baru mencapai 41,2 Ha. Untuk tahun 2016 target 9,00% dari luas wilayah semestinya sudah mencapai 2191,63 Ha namun baru terealisasi sebesar 1224.17 Ha atau 6.97%.

Untuk pengembangan dan pengelolaan hutan Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain : penganeekaragaman hayati dengan menanam beberapa jenis tanaman, sampai tahun 2015 telah ada 222 jenis tanaman, pengendalian peredaran hasil hutan pada industri pengolahan hasil hutan sebesar 87% pada 25 industri, meningkatkan penghijauan lingkungan perkotaan sebesar 3% dan mensukseskan gerakan penanaman 1 milyar pohon.

Disamping menyelenggarakan mengembangkan, mengelola, meningkatkan kualitas dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau kehutanan, Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi juga mempunyai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan hutan.

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan energi dan sumber daya mineral tidak dilaksanakan, karena Kota Jambi tidak memiliki daerah pertambangan dan SDA lainnya. Namun Pemerintah Kota Jambi tetap melakukan kebijakan pusat yang terkait dengan urusan energi yang dilakukan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Jambi.

Pada tahun 2016 Bagian Perekonomian Setda Kota Jambi melaksanakan kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) dan kegiatan Pengawasan dan Pemantauan Distribusi Gas (Konversi BBM) Bersubsidi). Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk melaksanakan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang ada di Kota Jambi. Dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Nasional Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg, Bagian Perekonomian Setda Kota Jambi melaksanakan koordinasi antar Dinas/Instansi Konsultan, PT. Pertamina, Pemerintah Provinsi Jambi dan Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementrian ESDM RI tentang Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg di Kota Jambi, membentuk Tim Pendukung Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg di Kota Jambi dan melakukan Pengawasan dan Pemantauan terhadap pendistribusian Paket LPG 3 kg pada 11 Kecamatan di 62 Kelurahan dalam Kota Jambi.

Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata merupakan urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DPK) Kota Jambi. Penyelenggaraan Urusan Pariwisata ditujukan untuk meningkatkan peran Pariwisata yang berbasis potensi daerah serta memperhatikan kearifan lokal melalui peningkatan kunjungan wisatawan, penyelenggaraan event dan promosi pariwisata di dalam dan luar daerah serta mengikuti event pariwisata tingkat nasional/internasional.

Pada tahun 2017 untuk menyelenggarakan Urusan Pariwisata dijabarkan ke dalam Program Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Budaya dan Pariwisata dengan kegiatan Pengembangan dan Promosi Pariwisata Daerah. Adapun pencapaian program dan kegiatan pada

tahun 2017 diantaranya adalah terselenggaranya Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan melalui Pelaksanaan Lomba Perahu Angsa, Haul Tuanku Keramat Tambak dan Haul Pangeran Wiro Kusumo serta Pemilihan Bujang Gadis Kota Jambi.

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin di capai oleh Urusan Pariwisata adalah terselenggaranya event berskala nasional/internasional Pencapaian IKU pada tahun 2017 ditargetkan 2 kali terselenggaranya event berskala nasional/internasional . Urusan Pariwisata pada tahun 2017 telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target IKU tersebut dengan menyelenggarakan 2 kali event berskala nasional/internasional, yaitu pelaksanaan Haul Pangeran Wiro Kusumo (Kesultanan Jambi) pada bulan Januari 2017 dan Haul Tuanku Keramat Tambak (Habib Husain Bin Ahmad Baraqbah) pada bulan Februari 2017 di Seberang Kota Jambi, yang dihadiri para peziarah dari berbagai daerah dan mancanegara. Dengan demikian dari 2 event berskala nasional dan internasional yang ditargetkan telah terpenuhi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pariwisata adalah keterbatasan dana yang tersedia, dan kurangnya inovasi untuk pengembangan destinasi wisata di Kota Jambi.

Urusan Kelautan dan Perikanan

Pada tahun 2016 bidang perikanan yang terealisasi didalam empat kegiatan yaitu ;

- a. Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidayaan ikan, dimana kegiatan ini dalam rangka mendukung produksi perikanan budidaya yaitu bantuan paket Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 20 Unit dimana perunit diberikan juga bantuan benih ikan nila 20.000 ekor, pakan 3.000 Kg, bantuan benih dan pakan ikan, denfarm lele sistem bioflock, statistic budidaya dan forum budidaya/perbenihan.
- b. Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul, kegiatan ini didukung Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan dan APBD II, dimana kegiatan ini dalam rangka untuk mendukung produksi benih ikan. Kegiatan yang dilaksanakan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidangKelautan dan Perikanan yaitu : rehab berat rumah karyawan BBI

Danau Teluk, pengadaan perahu bermotor (fiberglass) 1 unit dan perahu tanpa motor (fiberglass) 2 unit, pakan untuk calon induk dan happa sebanyak 8 buah.

- c. Kegiatan pengelolaan dan pemesanan produksi perikanan, kegiatan ini berupa bantuan paket sarana pengolahan sebanyak 11 paket, Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) 2 kali untuk 300 orang, Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Perikanan untuk 50 Orang, lomba UMKM pengolahan hasil perikanan 1 kali dan pengujian sample produk hasil perikanan.
- d. Kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan, dimana kegiatan ini dalam rangka untuk mendukung kelestarian sumber daya perikanan terutama Perairan Umum Daratan (PUD), bantuan benih dan pakan ikan lele untuk pemanfaatan lahan pekarangan, bantuan kolam terpal sebanyak 5 unit (terdiri dari kolam terpal, pakan per unit 90 kg dan benih ikan lele per unit 1.000 ekor).

Pencapaian yang telah dilakukan pada bidang perikanan tahun 2016 ini antara lain adalah produksi perikanan di Kota Jambi pada tahun 2016 mencapai 2.612,71 ton yang terdiri dari produksi perairan umum (penangkapan) sebesar 908,9 ton, budidaya kolam sebesar 984,23 ton dan keramba/jarring apung sebesar 719,58 ton. Bila dibandingkan produksi tahun 2015 sebesar 3.008 ton, maka pada tahun 2016 secara keseluruhan terjadi penurunan sebesar 395,29 ton atau sebesar -13,14%.

Selama tahun 2016 produksi benih yang dihasilkan sebanyak 48.358.280 ekor, jika dibandingkan dengan produksi benih ikan pada tahun 2015 sebanyak 46.348.050, maka pada tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 2.010.230 ekor atau meningkat sebesar 4,4%. Konsumsi ikan masyarakat Kota Jambi pada tahun 2016 sebesar 33,3 kg/kap/Tahun, jika dibandingkan konsumsi ikan Kota Jambi tahun 2015 sebesar 33,1 kg/kap/Tahun, maka pada tahun 2016 meningkat sebesar 0,2 kg/kap/Tahun atau meningkat sebesar 0,6%.

Urusan Perdagangan dan Perindustrian

Urusan perdagangan merupakan urusan pilihan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin). Penyelenggaraan Urusan

Perdagangan ditujukan untuk peningkatan peredaran barang dan jasa yang sesuai standar, terwujudnya peningkatan jumlah usaha formal dan informal, tercapainya target penerimaan retribusi pelayanan perpasaran sebagai salah satu penyumbang PAD Kota Jambi, meningkatkan sarana dan prasarana pasar dan sarana penunjang lainnya untuk mewujudkan pasar bersih, kondusif dan refresentatif, serta meningkatkan pelayanan, pembinaan, penataan dan penertiban pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan dan konsisten guna mewujudkan perilaku yang berakhlak dan berbudaya.

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan urusan perdagangan pada tahun 2017 diantaranya adalah:

1. Terlaksananya revitalisasi Pasar Kasang serta pembuatan kios, los dan finishing Pasar Olak Kemang.
2. Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan, pameran-pameran, bazar, pasar murah dan pemberian bantuan hibah kepada masyarakat.
3. Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekonomian di pasar rakyat.
4. Terlaksananya penertiban serta pengamanan pasar pada hari-hari besar dengan tujuan untuk meningkatkan ketertiban pedagang kaki lima serta mewujudkan Pasar Kota Jambi yang bersih dan tertib sekaligus rasa aman di lingkungan pasar.
5. Terlaksananya pemantauan dan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa, juga terlaksananya pembinaan dan penyuluhan bagi IKM.
6. Terlaksananya relokasi Pasar Aur Duri yaitu penataan pedagang dan relokasi Pasar Angso Duo dengan melakukan pemindahan para agen dan sub agen ke Pasar Induk Talang Gulo.
7. Penerimaan dari retribusi pasar grosir atau pertokoan (sewa) pada tahun 2017 ditargetkan Rp. 4.000.000.000,- dengan realisasi Rp. 4.208.003.501,- dan penerimaan retribusi UTTP (metrologi) yang ditargetkan Rp. 193.000.000,- dengan realisasi Rp. 622.141.100,-

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, pada tahun 2017 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Urusan Perdagangan adalah peningkatan cakupan bina perdagangan/usaha informal sebesar 2,90% dengan realisasi sebesar 4%, rasio peningkatan sarana dan

prasarana pasar-pasar tradisional pemerintah sebesar 83,75% realisasi sebesar 100% dan peningkatan rasio PKL yang tertata sebesar 75% dengan realisasi sebesar 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Perdagangan adalah:

Kesiapan sumber daya manusia di bidang perdagangan dan perindustrian terutama pada IKM, pola kemitraan yang belum berjalan secara optimal, juga pengaruh pasar bebas dan persaingan usaha yang semakin ketat.

Urusan Perindustrian

Urusan Perindustrian merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi. Penyelenggaraan Urusan Perindustrian ditujukan untuk peningkatan daya saing produk lokal, peningkatan sarana dan prasarana IKM, pembinaan dan peningkatan jumlah IKM serta peningkatan jangkauan wilayah pemasaran produk IKM.

Pada tahun 2017 kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan perindustrian antara lain melaksanakan pelatihan-pelatihan, penyuluhan, pameran, lomba, pemberian bantuan kemasan kepada kelompok IKM serta monitoring dan evaluasi terhadap kehalalan pada produk.

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Urusan Perindustrian adalah peningkatan jumlah IKM mandiri, dan peningkatan pertumbuhan industri. Target IKM Mandiri pada tahun 2017 sebanyak 75 IKM Mandiri dengan realisasi sebanyak 80 IKM Mandiri, dan target pertumbuhan industri pada tahun 2017 sebesar 3,10% dengan realisasi 3,54%.

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di berbagai sektor selama beberapa tahun terakhir ini telah memberikan hasil dan manfaat bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan di Kota Jambi. Namun demikian, permasalahan yang timbul dalam proses pembangunan menyebabkan

tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang memadai belum terealisasi sesuai dengan harapan yang ditetapkan dalam RPJMD 2013-2018.

Pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kelembagaan publik, termasuk alokasi sumber daya yang efisien. Manfaat pembangunan yang diharapkan belum merata dan kerawanan sosial masih sering terjadi, sehingga kehidupan masyarakat belum sepenuhnya membaik. Keadaan ini timbul sebagai akibat dari berbagai permasalahan yang terjadi baik masa lalu maupun sekarang yang belum teratasi secara maksimal, seperti dijelaskan secara rinci di bawah ini.

2.3.1. Prioritas Pembangunan Daerah

Permasalahan pada bidang sosial budaya adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, jumlah penduduk miskin di Kota Jambi masih cukup besar.
2. Pembangunan bidang Kesehatan dihadapkan pada masalah tantangan mutu, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memadai, angka kesakitan masih tinggi terutama karena penyakit seperti demam berdarah dan infeksi saluran pernafasan atas. Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk, belum optimalnya dukungan pelayanan kesehatan di bidang obat dan perbekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan, dan keamanan pangan, serta perilaku hidup sehat yang belum menjadi budaya dalam masyarakat baik karena faktor sosial ekonomi maupun karena kurangnya pengetahuan.
3. Pembangunan pendidikan dihadapkan pada isu utama :
 - masih mahalnya sebagian biaya pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin.
 - masih belum meratanya kemudahan aksesibilitas ke tempat pendidikan, terutama di daerah pengembangan perumahan baru.
 - masih belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan yang ditunjukkan dengan masih terdapat guru TK, SD, SMP, SMA/K yang belum berpendidikan S1 maupun yang belum bersertifikasi.
4. Belum tersusunnya sistem perlindungan sosial yang memadai. Perlindungan sosial bagi masyarakat bagi penyandang masalah sosial, diperlukan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri

dan dapat mengakses sistem pelayanan sosial dasar namun dengan situasi ekonomi saat ini, menjadikan kelompok masyarakat penyangga masalah sosial ini yang berada di dekat garis kemiskinan menjadi kelompok rentan terhadap kemiskinan.

Beberapa permasalahan dalam upaya mendorong aktivitas perekonomian Kota Jambi :

Penataan kawasan perdagangan untuk Pedagang Kaki Lima di perkotaan.

Di Kota Jambi keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil. Keberadaan para PKL ini sesungguhnya juga mempunyai hak asasi dalam penguasaan bidang ekonomi sosial dan budaya. Fenomena PKL sebagai bagian dari kegiatan perekonomian rakyat kecil, yang melakukan aktivitas perdagangan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Pedagang Kaki Lima ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata diseluruh Indonesia. PKL ini juga timbul sebagai akibat dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi. Untuk itu penataan kawasan perdagangan yang nyaman dan representatif bagi pedagang kaki lima terus diupayakan oleh Pemerintah Kota Jambi dalam melaksanakan tanggung jawab pembangunan bidang perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Pengembangan kawasan-kawasan perdagangan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang potensial dan representatif.

Pengembangan kawasan cepat tumbuh perlu didukung oleh pengembangan dan peningkatan infrastruktur dasar perkotaan, fasilitas publik yang representatif akan meningkatkan daya tarik kawasan bagi masuk dan berkembangnya arus orang, modal, barang dan jasa. Strategi pengembangan kawasan akan melibatkan berbagai program/kegiatan sektoral dan lintas sektoral secara terintegrasi pada kawasan pengembangan.

Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi alternatif sebagai upaya untuk mengakomodasi kreatifitas dan hobi maupun produk-produk kerajinan yang dapat mengangkat nilai ekonomi lokal melalui

pendekatan yang ramah lingkungan serta terjangkau oleh segenap warga kota.

Peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan manajemen, mutu produksi dan penguasaan teknologi.

Kota Jambi sebagai ibukota Provinsi Jambi merupakan pusat dalam banyak aktivitas perekonomian dan sangat berpotensi menjadi simpul perdagangan regional karena letak geografisnya yang sangat mendukung. Disamping aksesnya yang mudah ke kota-kota utama di Sumatera, Kota Jambi juga berdekatan dengan pusat pertumbuhan regional seperti Batam, Singapura dan Johor.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa daya saing produk industri di Kota Jambi secara umum masih rendah, yang disebabkan antara lain karena sumber daya manusia pengusaha relatif rendah, teknologi mesin peralatan yang digunakan kurang efisien, pengepakan produk masih rendah.

Selain itu motivasi perajin industri kecil masih rendah, cepat puas dengan apa yang sudah diperoleh dan pengusaha kurang dapat mengadaptasi perkembangan globalisasi di sektor industri. Dari sisi pengelolaan usaha juga sebagian besar belum menerapkan manajemen usaha secara lebih baik, masih mencampurkan modal usaha dengan kebutuhan keluarga serta kurangnya promosi untuk merebut pasar.

Pembangunan bidang fisik, prasarana dan sumber daya alam

Sedangkan permasalahan-permasalahan dalam pembangunan bidang fisik, prasarana dan sumber daya alam dapat dijelaskan bahwa didalam RTRW Propinsi Jambi Kota Jambi merupakan pusat pengembangan Utama Provinsi dan didalam RTRW Nasional Kota Jambi merupakan Pusat Kegiatan Nasional wilayah I. Namun demikian saat ini kedudukan tersebut belum dapat berfungsi secara optimal. Tekanan Jumlah Penduduk serta aktivitas perkotaan menyebabkan daya dukung infrastruktur dan kualitas lingkungan perkotaan semakin menurun.

Kemampuan daya dukung dan kondisi yang kurang baik tersebut semakin terasa dampaknya sejalan dengan kemampuan keuangan daerah untuk perbaikan dan penyediaan utilitas perkotaan termasuk penyediaan

lahan bagi kegiatan pembangunan semakin sulit. Dengan keuangan pemerintah Kota Jambi yang terbatas tersebut pelaksanaan kegiatan pembangunan infra struktur dan SDA perkotaan tidak optimal dan tidak mampu menyelesaikan persoalan perkotaan yang semakin kompleks.

Masalah Lingkungan

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan pelaku industri pengolahan terhadap dampak pencemaran lingkungan.
2. Belum optimalnya pemanfaatan CSR.
3. Belum optimalnya pengelolaan terkait lingkungan hidup.
4. Belum optimal pengelolaan dan penanganan persampahan sejak dari sumber sampai ke tempat pengolahan akhir sampah.
5. Belum optimalnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau sesuai RTRW.
6. Belum optimalnya koordinasi antara OPD menangani Persampahan dan OPD angkutan Persampahan.

Masalah Penataan Ruang

1. Masih lemahnya fungsi penataan dan pemanfaatan ruang kota,
2. Masih lemahnya fungsi pengawasan pemanfaatan ruang,
3. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan mengenai tata ruang.
4. Masih kurangnya peraturan-peraturan mengenai penataan ruang yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan kota,
5. Rendahnya rasio ruang terbuka hijau.

Masalah Perumahan

1. Tidak optimalnya penyediaan fasum dan fasos di kawasan perumahan,
2. Kurang optimalnya penanganan permukiman kumuh perkotaan,
3. Kurangnya daya dukung sarana dan prasarana pemadaman kebakaran;
 - Luas wilayah yang dilayani oleh pos pemadam kebakaran kota tidak sebanding dengan jumlah pos kebakaran yang ada,
 - Infra struktur kota belum memadai, yaitu penataan hidrant kota untuk keperluan pemadaman,
 - jumlah dan ketrampilan personil pemadaman belum memadai.

Masalah Perhubungan

1. Kemacetan lalu lintas,
2. Kurangnya lebar jalan pada lokasi-lokasi cepat tumbuh,
3. Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja perhubungan
4. Kurangnya penegakan hukum terkait dengan penggunaan badan jalan (larangan bagi kendaraan tertentu utk masuk kota, PKL),
5. Kurangnya disiplin pengguna jalan,
6. Fungsi terminal angkutan umum yang ada belum optimal,
7. Kurangnya ketersediaan lahan parkir,
8. Rendahnya penyediaan dan kapasitas sarana dan prasarana IT.

Masalah Pekerjaan Umum

1. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar,
2. Rendahnya kuantitas dan kualitas gedung negara,
3. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh perkotaan,
4. Rendahnya kualitas infrastruktur pasar-pasar tradisional milik pemda,
5. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara infrastruktur kota,
6. Belum tercukupinya kebutuhan perumahan murah (RSH) dan Rusunawa untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

2.3.2. Urusan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan amanat pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota, bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic service*) bagi masyarakat antara lain seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan, dan sebagainya. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintah yang terkait dengan

pengembangan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan pemerintah daerah tetap harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang dijadikan dasar dalam penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

Seiring dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 2007 tersebut, dalam penerapannya terdapat permasalahan-permasalahan yang berpotensi menimbulkan ketidaktercapaian sasaran pembangunan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan stagnasi pembangunan daerah.

Permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain :

Urusan Perencanaan Pembangunan

1. Prinsip partisipatif merupakan landasan bagi perumusan perencanaan dan pelaksanaannya, sehingga sesuai dengan kondisi dan keinginan/aspirasi masyarakat. Dalam implementasinya, sebagian besar perencanaan dibuat di tingkat kecamatan belum secara optimal melibatkan masyarakat.
2. Kapasitas perencanaan belum memadai disemua tingkatan terutama yang terkait dengan identifikasi dan prioritas masalah, akar penyebab masalah, penentuan tujuan, penyusunan dan pengembangan rencana program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Identifikasi masalah belum dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik dan indikator yang tepat. Padahal, kegiatan ini merupakan salah satu kunci keberhasilan program pembangunan secara keseluruhan karena sangat menentukan derajat urgensi kebutuhan, akseptabilitas usulan opsi serta efisiensi dan efektivitas implementasi program yang dilaksanakan.
3. Ego sektoral dari berbagai lembaga/Dinas dalam pelaksanaan pembangunan juga masih kurang optimal memperhatikan faktor sinergitas dan keterpaduan, sehingga setiap lembaga/dinas cenderung bekerja sendiri-sendiri berdasarkan tugas dan fungsinya. Akibatnya,

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan menjadi relatif rendah.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian

1. Permasalahan dalam pembangunan bidang aparatur, antara lain kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang proporsional, sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja. Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat. Pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Terbaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi juga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja.
2. Dikaitkan dengan peningkatan daya guna kekayaan dan asset pemerintah daerah masih ditemukan permasalahan pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya asset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat.
3. Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemerintahan dan pembangunan masyarakat antara lain masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif, yang disebabkan rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha, kurangnya kesempatan ekonomi dan kesempatan berusaha. Rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha disebabkan oleh terbatasnya kepemilikan produktif, lemahnya sumberdaya modal usaha, terbatasnya pasar dan informasi pasar yang kurang sempurna/asimetris, serta rendahnya tingkat kewirausahaan sosial.

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Berbagai perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat pada implementasinya mengalami berbagai kendala karena belum didukung

oleh sistem hukum yang mapan, aparat hukum yang bersih serta prasarana dan sarana yang memadai. Akibatnya, penegakkan hukum menjadi lemah dan perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM) belum dapat diwujudkan.

2. Upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama terkait dengan ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang dan keberlanjutan maka pelaksanaan pembangunannya akan diatasi secara bertahap.

Kota Jambi sebagai pusat kegiatan pemerintahan Propinsi Jambi, juga merupakan kawasan pusat perdagangan dan pelayanan jasa utama di Propinsi Jambi, kedepan akan kita lakukan transformasi sektor perekonomiannya. Sektor-sektor perekonomian akan dikelola secara benar sekaligus mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal melalui peningkatan infrastruktur yang memadai dan berorientasi kedepan, kejelasan dan keteraturan tata ruang kota, serta didukung oleh estetika dan sanitasi kota.

Penurunan kinerja sektor industri, terutama yang berbasis kayu dan hasil hutan perlu dicari jalan keluarnya. Untuk memperlancar arus investasi terutama di sektor industri diperlukan pembenahan iklim investasi melalui pendirian BPMPPT dan menciptakan suatu kawasan industri dengan infrastruktur yang memadai.

Infrastruktur merupakan faktor penting dalam pembangunan perekonomian suatu daerah. Pembangunan infrastruktur jalan, kawasan industri dan pergudangan serta tersedianya sarana transportasi darat, sungai dan udara merupakan dukungan penting untuk meningkatkan nilai ekspor industri pengolahan. Kedepan, pembangunan jalan yang mampu mendukung kendaraan dengan tonase tinggi dan membangun kawasan industri sangat krusial untuk memacu peningkatan ekspor.

Diharapkan pembangunan kawasan industri akan membuka peluang investasi dari dalam dan luar negeri terutama di bidang industri non polutan yang akan menjadi titik picu pertumbuhan wilayah secara merata yang berbasis pada potensi daerah-daerah di Propinsi Jambi yang dimiliki, yakni pertambangan, industri, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan.

Pesatnya pertumbuhan pusat-pusat perbelanjaan modern perlu diimbangi dengan pembenahan pasar-pasar tradisional agar lebih nyaman, dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan modern serta menjaga mata pencaharian pedagang kecil dan tradisional. Pedagang kecil dan tradisional, semua usaha kecil harus mendapat ruang yang cukup untuk membangun ekonomi Kota Jambi.

Disamping itu, dengan adanya perkembangan jumlah penduduk yang pesat yang diikuti meningkatnya pembangunan kompleks perumahan perlu diikuti dengan dukungan dan pelayanan transportasi dan sarana transportasi massal yang mudah diakses oleh masyarakat termasuk diperlukannya pembangunan dan pengembangan terminal-terminal antara.

Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang cukup mendesak disebagian besar negara berkembang. Di Kota Jambi untuk beberapa sektor telah mampu mengendalikan limbah cair. Namun secara umum permasalahan lingkungan di kota kita ini sangat mendesak. Gangguan lingkungan ini tentu akan menyebabkan berbagai bencana dan penyebaran wabah penyakit, serta mempengaruhi kinerja sektor-sektor lain seperti perdagangan, hotel dan restoran yang menjadi andalan di Kota Jambi.

Kedepan perlu dikembangkan metode penyelesaian permasalahan terutama untuk mengendalikan emisi kendaraan atau kerusakan lingkungan yang lain, misalnya pengendalian limbah rumah tangga, penurunan kuantitas dan kualitas air tanah dan pencemaran sungai. Dengan demikian, citra Kota Jambi akan terangkat, baik ditingkat nasional maupun internasional.

Produk unggulan dunia usaha Kota Jambi antara lain Batik Jambi, industri makanan olahan, kopi bubuk, sayur-sayuran organik, ikan patin dan industri hasil hutan dan perkebunan, dan lain-lain. Meski menghadapi banyak hambatan dan tantangan ternyata masih ada peluang bagi pengusaha untuk lebih memacu persaingan ditingkat domestik, nasional maupun ekspor secara maksimal dengan memanfaatkan informasi pasar. Dalam situasi persaingan,

pelaku bisnis dan tidak cukup sekedar menawarkan nilai tambah, akan tetapi inovasi bisnis merupakan suatu keharusan melalui pemantapan sistem operasi yang selaras dengan kepentingan para pemasok, rekan bisnis dan konsumen.

Dari sisi penawaran, kinerja sektor unggulan daerah, yakni pertanian, industri, pengolahan, perdagangan, listrik, gas, dan air minum masih memperlihatkan daya bertahan dan berkembang yang relatif cukup kuat sehingga pada tahun mendatang diperkirakan masih dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap PDRB Kota Jambi.

Walaupun Kota Jambi bukan merupakan daerah wisata, potensi kunjungan wisata di Kota Jambi mempunyai prospek yang cukup baik mengingat Kota Jambi mempunyai obyek-obyek yang masih menyimpan potensi wisata yang dapat dikembangkan seperti Taman Mini Jambi, Danau Sipin, Wisata Sungai Batanghari, Hutan Kota dan Seberang Kota Jambi sebagai pusat wisata budaya dan rohani.

Kedepan, seluruh potensi ekonomi harus dikelola dengan maksimal dan senantiasa mempertimbangkan kelestarian lingkungan agar kegiatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat terus berkelanjutan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Sebagai simpul perdagangan dan jasa bagi kabupaten di Provinsi Jambi maka Kota Jambi telah memiliki prasarana dan sarana yang cukup memadai, seperti: (1) Bandara Udara Sulthan Thaha Syaifudin (2) Transportasi Sungai (3) Terminal Bus (4) Terminal Truk (5) Terminal Angkutan Kota (6) Sarana transportasi sungai (7) pengadaan listrik, gas, dan air minum (8) perbankan dan lembaga bukan perbankan (9) pusat-pusat pertokoan / mall dan pusat hiburan.

Tantangan kedepan yang akan dihadapi Kota Jambi cukup berat dan hal yang paling pokok adalah berkurangnya dana pembangunan yang mampu disediakan oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), ketimpangan antar daerah serta inefisiensi di sektor usaha swasta dan pemerintah. Salah satu hal yang paling mendasar didalam pencapaian solusi tersebut adalah perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

Dalam hubungannya dengan Fungsi-fungsi Pembangunan dan urusan-urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan pemerintah daerah maka permasalahan-permasalahan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dalam konteks fungsi pelayanan umum, yang meliputi urusan perencanaan pembangunan, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan , kearsipan, komunikasi dan informatika. Masih menghadapi persoalan antara lain :
 - Belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan.
 - Terbatasnya kompetensi dan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
 - Reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
 - Terbatasnya kapasitas keuangan daerah serta belum optimalnya pengelolaan keuangan dan manajemen aset daerah.
 - Implementasi kebijakan komunikasi dan informasi belum optimal.
 - Lemahnya manajemen kearsipan.
 - Rendahnya tingkat akuntabilitas dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan selaku mitra pemerintah daerah.
2. Dalam konteks fungsi ketertiban dan ketenteraman, yang meliputi kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. Persoalan yang dihadapi, yaitu :
 - Lemahnya kesadaran, kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat terhadap hukum dan peraturan.
 - Kurang optimalnya peran keluarga sebagai basis pembinaan masyarakat dan bangsa.
 - Menguatnya gejala perilaku asusila, penyalahgunaan narkoba, pornografi, dan perjudian.
 - Kurang optimalnya kehidupan sosial politik yang meliputi kemasyarakatan, kewilayahan, pemerintahan dan berdemokrasi.
3. Dalam konteks fungsi ekonomi, yang meliputi urusan perhubungan, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, pertanian, kehutanan,

energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri. Masalah yang dihadapi antara lain :

- Lemahnya perlindungan terhadap tenaga kerja.
 - Rendahnya keberlanjutan hasil produksi.
 - Kurang optimalnya informasi dan promosi investasi.
 - Rendahnya manajemen aset pemerintah.
 - Lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat.
 - Belum berkembangnya sentra produksi komoditas unggulan pertanian dan peternakan.
 - Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan produksi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan.
 - Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya perikanan, Daerah Aliran Sungai dan perairan umum.
 - Terbatasnya penanganan pasca panen dan pemasaran bagi produk-produk pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan.
4. Dalam konteks fungsi lingkungan hidup, yang meliputi urusan penataan ruang, lingkungan hidup, dan pertanahan.
- Peningkatan Jumlah Penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus berisiko terhadap kelangsungan sumber daya alam.
 - Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota akibat laju pembangunan yang meningkat jumlah dan kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan.
 - Pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah) yang diakibatkan oleh aktivitas manusia (limbah cair rumah tangga/ pabrik).
5. Dalam konteks fungsi perumahan dan fasilitas umum, yang meliputi urusan pekerjaan umum, dan perumahan.
- Rendahnya infrastruktur dan fasilitas umum permukiman.
 - Menurunnya kemampuan penyediaan air.
 - Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi.
 - Tingginya tingkat kerusakan jalan sebelum umur teknis jalan tersebut tercapai.

- Masih belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran
6. Dalam konteks fungsi kesehatan, yang meliputi urusan kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan.
 - Rendahnya cakupan Universal Child Immunization (UCI).
 - Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga kesehatan.
 - Kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat.
 - Masih adanya penyakit lokal spesifik dan berkembangnya penyakit menular serta berpotensi terjadinya KLB (Kejadian Luar Biasa).
 - Rendahnya peran serta masyarakat dan para pemangku kepentingan di bidang kesehatan.
 - Masih ditemukannya balita gizi kurang yang berpotensi menjadi gizi buruk
 - Belum berkembangnya pemberdayaan kualitas keluarga.
7. Dalam konteks fungsi pariwisata dan budaya, yang meliputi urusan kebudayaan, dan pariwisata.
- Kurangnya pengelolaan potensi wisata dan budaya daerah.
 - Kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran dan komitmen terhadap budaya daerah.
8. Dalam konteks fungsi pendidikan, yang meliputi urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, dan perpustakaan.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana
 - Masih rendahnya angka partisipasi pendidikan usia dini dan menengah.
 - Masih rendahnya angka melanjutkan pada jenjang pendidikan dasar.
 - Masih kecilnya rasio sekolah yang berstandar nasional, rintisan sekolah bertaraf internasional dan sekolah bertaraf internasional.
 - Masih rendahnya kompetensi dan belum meratanya sebaran tenaga pendidik dan kependidikan.
 - Masih rendahnya pelayanan pendidikan non formal dan informal (PNFI)
9. Dalam konteks fungsi perlindungan sosial, yang meliputi urusan kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial.

- Belum optimalnya penataan administrasi kependudukan.
- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan.
- Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Belum optimalnya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat kaum perempuan dalam pembangunan, khususnya bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik.
- Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan hak-hak anak.
- Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi masyarakat.
- Belum optimalnya perlindungan masalah sosial pasca bencana.
- Rendahnya akses ke pelayanan sosial dasar bagi penyandang cacat.
- Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial.
- Rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial.
- Belum optimalnya pemanfaatan tempat peribadatan serta belum optimalnya pengelolaan dana sosial keagamaan.
- Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan belum optimal memerankan fungsinya sebagai agen perubahan sosial.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

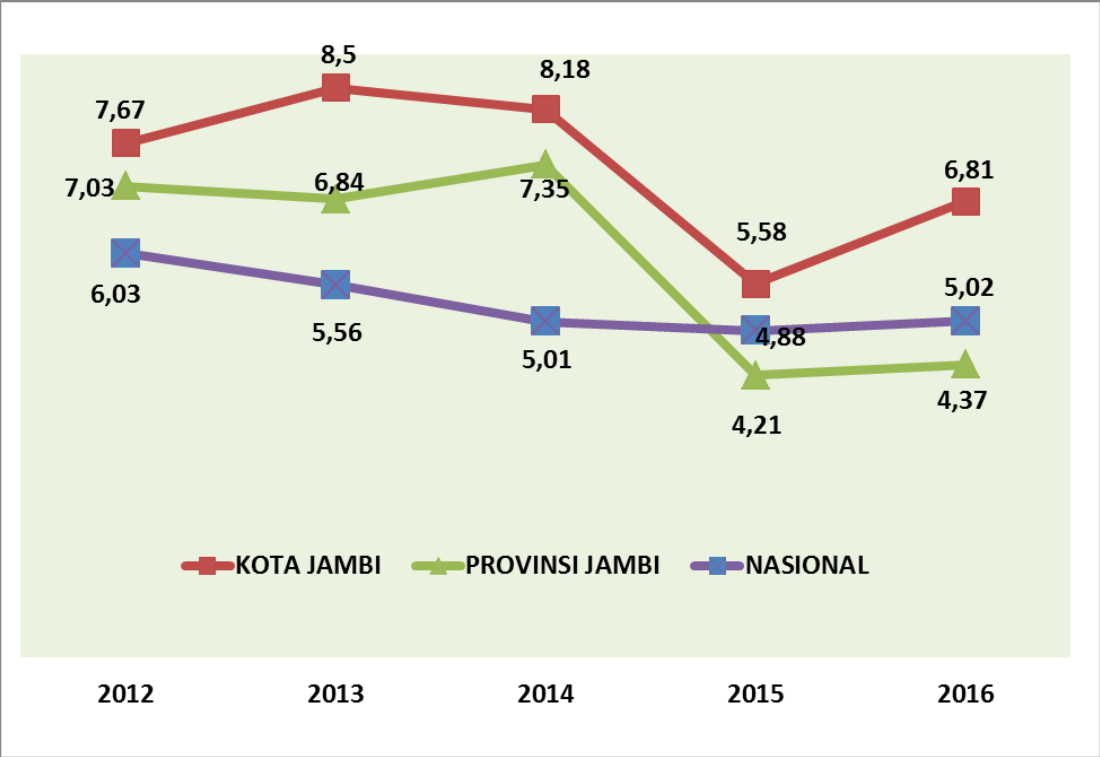
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Tahun 2019 merupakan awal dari RPJMD baru hasil Pilwako 2018, arah kebijakan ekonomi daerah merupakan rangkaian proses berkesinambungan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Struktur perekonomian masyarakat Kota Jambi pada kurun waktu 2012-2017 masih didominasi sektor Sekunder dan Tersier, hal ini telah sesuai dengan visi Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa. Sumbangan 5 sektor terbesar dihasilkan oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor, sektor Industri Pengolahan, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan sektor Konstruksi.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah 2017 dan Perkiraan Tahun 2018

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB menurut harga konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Pertumbuhan ekonomi (laju pertumbuhan PDRB) Kota Jambi pada tahun 2016 berdasarkan Harga Konstan mencapai 6,81 persen.

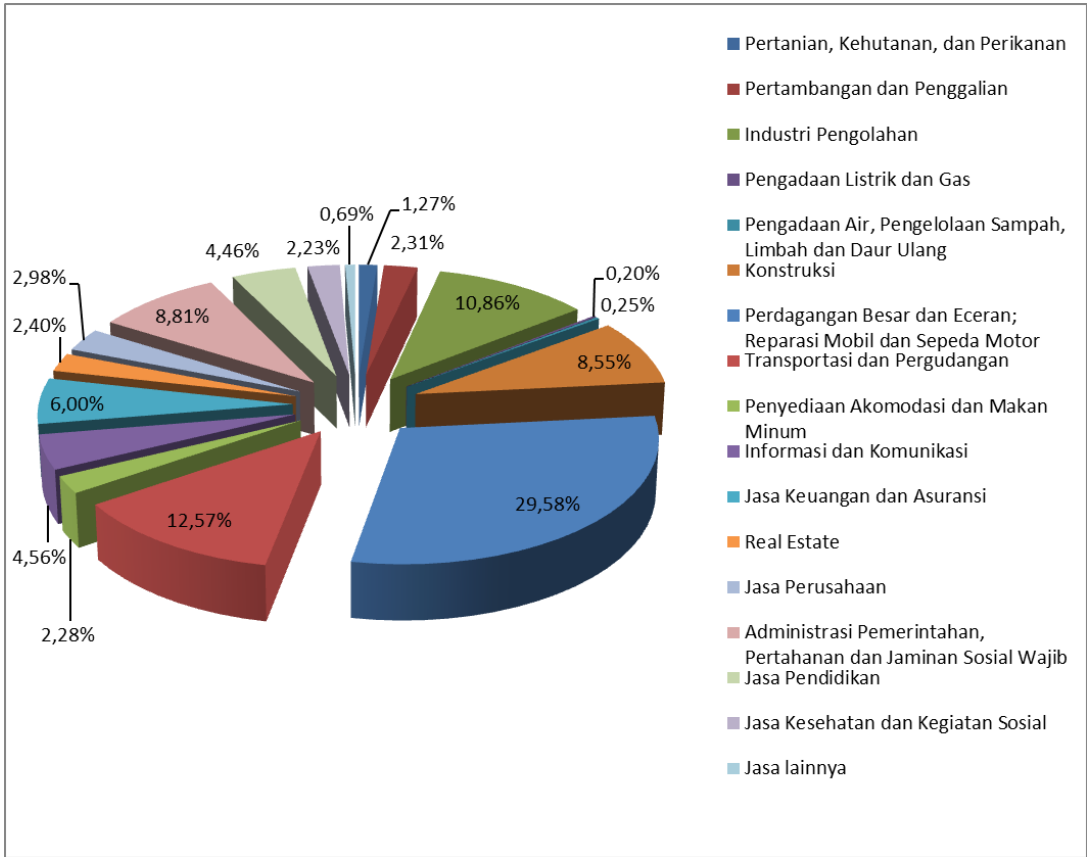
Untuk mengetahui pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi dari tahun 2012–2016 dan perbandingannya dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini.



Gambar 3.1

Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi Tahun 2012 – 2016 dan perbandingannya dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional

Dari gambar di atas, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Jambi tahun 2012 s.d tahun 2016 berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi provinsi Jambi maupun nasional. Sedangkan untuk melihat persentase distribusi PDRB (struktur ekonomi) Kota Jambi tahun 2016 digunakan PDRB berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha seperti pada Gambar 3.2 di bawah ini.



Gambar 3.2
Distribusi Persentase PDRB Kota Jambi Tahun 2016
Berdasarkan Harga Berlaku

Dari gambar di atas, terlihat bahwa distribusi PDRB Kota Jambi berdasarkan harga berlaku terbesar dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 29,58 persen, diikuti sektor Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 12,57 persen dan sektor Industri Pengolahan sebesar 10,86 persen, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,81 persen dan sektor Konstruksi sebesar 8,55 persen.

Sedangkan untuk mengetahui distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016, terlihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi
Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1.33	1.34	1.37	1.36	1,27
B	Pertambangan & Penggalian	5.78	5.64	4.99	2.82	2,31
C	Industri Pengolahan	12.58	11.99	11.89	11.58	10,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.17	0.15	0.15	0.17	0,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.28	0.28	0.27	0.26	0,25
F	Bangunan	8.57	10.16	9.65	9.05	8,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24.73	24.85	26.48	28.14	29,58
H	Transportasi dan Pergudangan	11.71	11.84	11.40	11.89	12,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.13	2.15	2.26	2.27	2,28
J	Informasi dan Komunikasi	4.61	4.35	4.16	4.42	4,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.29	6.57	6.22	5.87	6,00
L	Real Estate	2.80	2.64	2.53	2.47	2,40
M,N	Jasa Perusahaan	3.13	3.00	2.92	2.97	2,98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.62	7.29	8.42	9.33	8,81
P	Jasa Pendidikan	5.36	4.91	4.38	4.49	4,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.11	2.09	2.21	2.22	2,23
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0.79	0.74	0.69	0.71	0,69
PDRB		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kota Jambi

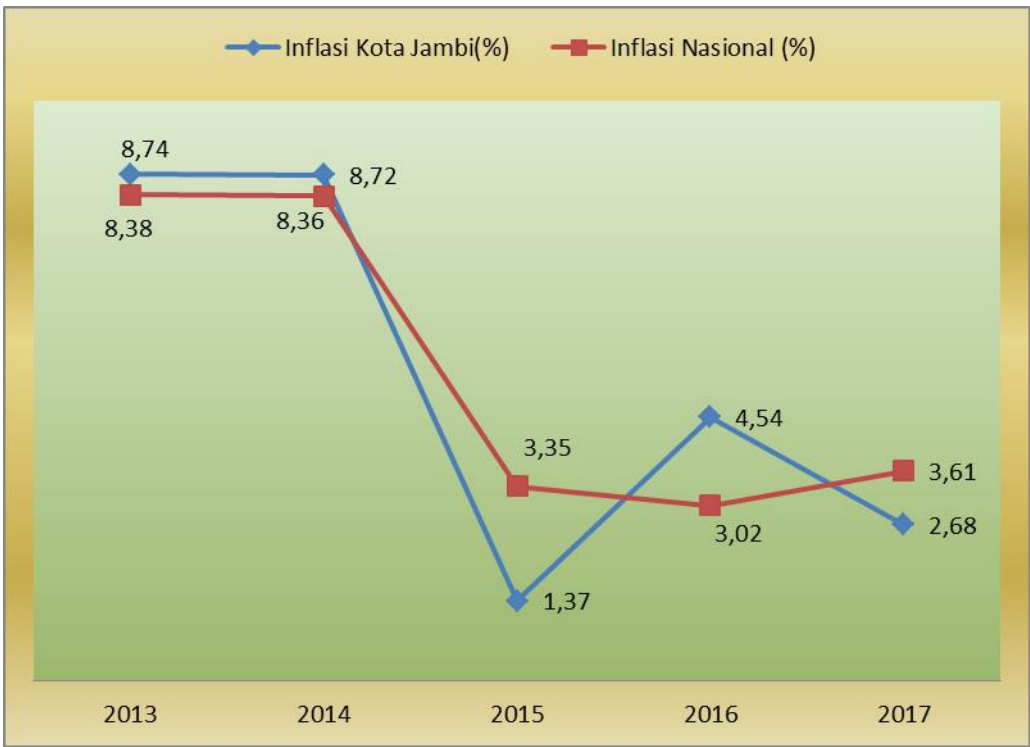
Kinerja perekonomian Kota Jambi tahun 2016 tergambarkan dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku, mengalami *pertumbuhan* dari tahun 2015 yang sebesar 5,58% menjadi 6,81% pada tahun 2016. Pertumbuhan ini berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sebesar 4,37 persen dan pertumbuhan Nasional sebesar 5,02 persen.

PDRB per Kapita dapat digunakan sebagai gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. PDRB Per Kapita diperoleh dari hasil pembagian antara PDRB dengan jumlah Penduduk.

Berdasarkan atas dasar harga berlaku, PDRB perkapita Kota Jambi pada tahun 2013 sebesar Rp 29,13 juta angka ini terus menunjukkan peningkatan

setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2014 sebesar Rp 33,41 juta, pada tahun 2015 sebesar Rp 37,07 juta dan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 41,90 juta.

Sementara itu Perkembangan Inflasi Kota Jambi dari tahun 2013-2017, cenderung mengalami fluktuasi. Hal ini terlihat pada gambar 3.3 di bawah ini.



Gambar 3.3

Inflasi Kota Jambi Tahun 2013-2017

Inflasi Kota Jambi dari tahun 2013-2017 cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 inflasi Kota Jambi sebesar 2,68% berada di bawah inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,61%

Dengan melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi 5 (lima) tahun sebelumnya yang cenderung di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional, maka untuk proyeksi pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi ditargetkan terus meningkat dari tahun 2016. Namun yang perlu menjadi catatan adalah perlu adanya keseimbangan pertumbuhan makro dan mikro diberbagai sektor dan subsektor. Pencapaian pertumbuhan ekonomi Kota Jambi pada tahun 2018 adalah lebih baik dari apa yang telah ditargetkan sehingga target-target pada tahun 2018 optimis bisa tercapai.

Target pertumbuhan ekonomi Kota Jambi akan ditingkatkan dari 6,81% menjadi 7,00% di tahun 2018. Sedangkan sasaran inflasi di tahun 2018 sebesar 4,00% sama dengan sasaran inflasi nasional dengan tingkat deviasi sebesar satu persen.

Pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial terkait dengan upaya meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Kota Jambi yang tercermin pada angka harapan hidup, angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan. Yang seluruhnya termasuk dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jambi dengan metode baru Tahun 2016 adalah 76,14.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019

Berbagai tantangan yang akan dihadapi Kota Jambi di tahun 2018 tentunya tidak terlepas dari perekonomian nasional yang masih akan dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pengelolaan arus modal (*capital inflow*) dan nilai tukar (*exchange rate*) dimana harga-harga komoditas terus merangkak naik. Selain itu adanya pasar bebas akan menyebabkan semakin beratnya industri kecil di Kota Jambi dalam melakukan persaingan dunia. Persaingan ini tidak hanya dalam hal produk tapi juga menyangkut SDM di Kota Jambi. Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih cukup tinggi juga akan terus mewarnai tantangan perekonomian Kota Jambi di tahun 2018.

Gambaran ekonomi Kota Jambi tahun 2019 tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan perekonomian nasional. Perekonomian nasional dalam hal ini juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Pada tahun 2019 perekonomian Kota Jambi diperkirakan akan lebih baik dari perkiraan awal.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, aspek keuangan merupakan salah satu faktor sangat strategis, karena keuangan merupakan sarana utama bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan

fungsi pemerintahan, pembangunan maupun fungsi pelayanan, maka untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali potensi pendapatan dan memanfaatkan secara optimal dana yang tersedia, selain itu juga pemerintah dituntut untuk mengelola administrasi keuangan tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu efektif, efisien, akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta memperhatikan asas-asas kepatutan.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Realisasi tahun 2016 dan tahun 2017, target tahun 2018 dan prediksi tahun 2019 penerimaan Pendapatan Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Jambi

NO	URAIAN	REALISASI 2016	REALISASI 2017	TARGET 2018	PROYEKSI 2019
1	PAJAK DAERAH	158.740.884.098,89	201.429.136.841,40	200.000.000.000,00	223.000.000.000,00
2	RETRIBUSI DAERAH	80.679.063.851,03	43.077.425.943,53	42.846.000.000,00	46.726.000.000,00
3	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	7.266.051.209,95	8.066.340.478,60	8.500.000.000,00	8.800.000.000,00
4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	40.839.214.844,62	144.754.944.025,57	77.550.647.550,00	85.416.193.000,00
	JUMLAH PAD	287.525.214.004,49	397.327.847.289,10	328.896.647.550,00	354.642.193.000,00
5	BAGI HASIL PAJAK	74.505.713.633,00	67.941.264.356,00	91.035.267.000,00	78.905.314.000,00
6	BAGI HASIL BUKAN PAJAK / SDA	37.000.216.041,00	34.786.709.077,00	27.908.722.000,00	27.857.989.000,00
7	D A U	714.783.378.000,00	727.564.344.000,00	714.783.378.000,00	714.783.378.000,00
8	D A K	231.500.605.000,00	347.564.966.775,00	291.823.567.000,00	0,00
9	D I D	0,00	0,00	18.000.000.000,00	0,00
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	1.057.789.912.674,00	1.177.857.284.208,00	1.143.550.934.000,00	1.038.046.681.000,00
10	PENDAPATAN HIBAH	39.039.796.578,00	2.819.000.000,00	0,00	0,00
11	BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	66,598,538,835.98	80,760,495,375.60	86.964.861.895,00	81.347.485.000,00
12	DANA PENYESUAIAN	311,385,000.00	0.00	61.845.400.000,00	61.845.400.000,00
13	BANTUAN KEUANGAN	0.00	6,720,000,000.00	6.720.000.000,00	6.720.000.000,00
14	D I D	0.00	0.00	0,00	18.000.000.000,00
	JML LAIN-LAIN PEND, DAERAH	105.949.720.413,98	90.299.495.375,60	155.530.261.895,00	167.912.885.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN SELURUHNYA	1.571.332.218.626,47	1.500.633.237.946,70	1.627.977.843.445,00	1.353.401.759.000,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2018

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas :

- a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah;
- b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana insentif daerah;
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

Dalam rangka upaya untuk terus meningkatkan penerimaan daerah, maka untuk tahun 2018 kebijakan -kebijakan yang diambil yaitu :

- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan pemungutan, efisiensi biaya, memperkecil tunggakan dan menegakkan sanksi hukum.
- Meningkatkan Penerimaan dari Dana Perimbangan pada komponen bagi hasil pajak melalui intensifikasi Pajak-pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan.
- Menggali dan mendapatkan sumber-sumber pendanaan lain.

Kebijakan Keuangan Daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kota Jambi sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pencapaian target yang telah direncanakan, pada Tahun Anggaran 2018 melaksanakan kegiatan baik intensifikasi maupun ekstensifikasi antara lain :

- Melakukan evaluasi dan pengkajian perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah guna mendapatkan data potensi pajak dan retribusi daerah dari masing-masing objek pajak dan retribusi daerah.
- Menyelenggarakan tertib administrasi perpajakan daerah guna mendapatkan data pajak daerah yang akurat.
- Mengoptimalkan pelaksanaan pendataan melalui survey lapangan terhadap perkembangan dan atau perubahan data objek pajak dan retribusi daerah, serta melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan wajib pajak seperti tutup usaha, perubahan tempat , ukuran dan lain sebagainya.
- Penyampaian Surat Ketetapan Pajak/ Retribusi Daerah.
- Penyelesaian serta pengecekan atas Keberatan Wajib Pajak/Wajib Retribusi Daerah.
- Penagihan atas tunggakan Pajak Retribusi kepada Wajib Pajak/Retribusi Daerah.
- Terlaksananya Tertib Administrasi Ketetapan dan Administrasi Tunggakan Pajak/Retribusi Daerah.
- Melakukan pengkajian Peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan Kota Jambi sampai dengan APBD Perubahan Tahun 2017 adalah sebesar Rp 1.544.367.408.169,00 yang bersumber dari :

- Pendapatan Asli Daerah
- Dana Perimbangan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari :

- Hasil Pajak Daerah
- Hasil Retribusi Daerah

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Target dan Realisasi Penerimaan PAD

Realisasi penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2017 mencapai Rp. 397.327.847.289,10 atau 101,65% dari target penerimaan sebesar Rp. 390.892.633.600,00.

Jika dibandingkan dengan jumlah Penerimaan PAD Tahun 2016 yakni sebesar Rp 287.525.214.004,49 maka realisasi PAD Tahun 2017 bertambah 38,19% atau Rp. 109.802.633.284,61,00.

Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2016 dengan Tahun 2017.

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2016 dengan TA 2017

No	Uraian	2016			2017		
		Target (000)	Realisasi (000)	% Realisasi	Target (000)	Realisasi (000)	% Realisasi
1	Pajak Daerah	187.252.000	158.740.884	84,77	198.940.000	201.429.136	101,25
2	Ret. Daerah	73.679.471	80.679.063	109,50	46.403.840	43.077.425	92,83
3	Bagi laba atas penyertaan modal pada perush milik negara/BUMD	8.000.000	7.266.051	90,83	8.060.000	8.066.340	100,08
4	Lain-lain PAD yg sah	47.532.302	40.839.214	85,92	137.488.793	144.754.944	105,28
TOTAL		316.463.773	287.525.214	90,86	390.892.633	397.327.847.289	101,65

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2018

Target dan Realisasi Dana Perimbangan

Dana perimbangan yang diterima Kota Jambi terdiri dari pos bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Perbandingan tahun 2016 dan 2017 dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4

Perbandingan Target dan Realisasi Dana Perimbangan
TA 2016 dengan TA 2017

No	Uraian	2016			2017		
		Target (000)	Realisasi (000)	% Realisasi	Target (000)	Realisasi (000)	% Realisasi
1	Bagi Hasil Pajak	70.099.864	67.941.264	96,92	74.505.713	67.555.720	90,67
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	14.362.780	34.786.709	242,20	37.000.216	40.781.003	110,22
3	Dana Alokasi Umum	727.564.344	727.564.344	100,00	714.783.378	714.783.378	100,00
4	Dana Alokasi Khusus	373.613.457	347.564.966	93,03	231.500.605	189.885.793	82,02
TOTAL		1.185.640.446	1.177.857.284	99,34	1.057.789.912	1.013.005.895	95,77

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2018

Target dana perimbangan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.057.789.912.674,00 dan realisasinya mencapai Rp. 1.013.005.895.282,00 atau 95,77 %.

Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diperoleh dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jambi atau Pemerintah Daerah lainnya. Selama tahun 2017, target pendapatan hibah sebesar Rp. 2.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.819.000.000 (140,95%) dan dana darurat nihil. Untuk Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya yg ditargetkan sebesar Rp 86.964.861.895,00 yang dapat terealisasi sebesar Rp 80.760.495.375,60,00 (92,87%).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2016 dengan tahun 2017 di bawah ini :

Tabel 3.5

Perbandingan Target dan Realisasi LLPDyS TA 2016 dengan TA 2017

No	Uraian	2016			2017*		
		Target (000)	Realisasi (000)	% Realisasi	Target (000)	Realisasi (000)	% Realisasi
1	Pendapatan Hibah	39.039.797	39.039.796	100	2.000.000	2.819.000	140,95
2	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	77.180.986	66.598.538	86,29	86.964.861	80.760.495	92,87
4	Dana Penyesuaian Otsus	0	311.385	0	0	0	
5	Bantuan Keuangan dari provinsi atau Pemda lainnya	4.385.100	0	0	6.720.000	6.720.000	100,00
TOTAL		120.605.883	105.949.720	88,26	95.684.861	90.299.495	94,37

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2018

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi antara lain :

- Masih adanya wajib pajak tidak menyampaikan informasi tentang pindah alamat maupun tutup usaha, yang berdampak pada ketidakakuratan data pajak, sehingga menyulitkan operasional pendataan dilapangan.
- Masih ditemuinya wajib pajak menyampaikan data-data tempat usaha tidak secara lengkap.
- Masih ada pemasangan reklame dilapangan tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme/ prosedur perizinan sehingga berdampak pada penerimaan pajak.
- Terbatasnya tenaga teknis (staf) dalam pendataan, penyampaian dan penagihan tunggakan kepada Wajib Pajak dan Retribusi Daerah.
- Masih banyaknya piutang/Retribusi Daerah yang sulit ditagih karena sudah tutup usaha atau pindah alamat tanpa memberikan informasi.
- Belum adanya sistem komputerisasi yang online pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi menyebabkan pelayanan kepada wajib pajak belum optimal.
- Kewajiban Wajib Pajak/Wajib Retribusi masih kurang.
- Sanksi/punishment bagi Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang melalaikan kewajiban membayar Pajak/Retribusi belum optimal.

Untuk lebih mengoptimalkan peningkatan pendapatan perlu dilakukan upaya-upaya antara lain :

- Terus mengoptimalkan peran dan fungsi staf untuk melaksanakan operasional pendataan pajak di lapangan.
- Terus melakukan pengawasan.
- Untuk menertibkan administrasi diperlukan penghapusan tunggakan pajak/retribusi daerah serta penghapusan NPWPD bagi wajib pajak yang tidak aktif.
- Penambahan tenaga teknis untuk memantau dan mendata wajib pajak/retribusi yang tersebar di berbagai kecamatan dalam Kota Jambi.
- Untuk memperlancar penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Penagihan terhadap wajib pajak/ retribusi daerah sangat diperlukan sarana kendaraan roda dua.
- Adanya sistem komputerisasi yang online agar administrasi penerimaan pajak/ retribusi dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akurat.
- Peran aktif dari Legislatif dalam mempercepat proses penerbitan Perda tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
- Revisi Perda tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang sesuai dengan kondisi sekarang dan berpedoman pada Undang-Undang.
- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemungut.
- Penerapan sanksi agar lebih tegas.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Kebijakan bidang belanja daerah pada hakekatnya merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan pembangunan yang dalam pelaksanaannya diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam mengalokasikan dan pengelolaan anggaran pembangunan secara efektif dan efisien.

Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan dengan mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah. Memperhatikan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, pasal 36 bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang

dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung, dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas: (1) belanja pegawai; (2) bunga; (3) subsidi; (4) hibah; (5) bantuan sosial; (6) belanja bagi hasil; (7) bantuan keuangan; dan (8) belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas: (1) belanja pegawai; (2) belanja barang non jasa; dan (3) belanja modal.

Merasionalkan belanja sangat penting agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran belanja daerah diarahkan pada program prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang didukung dengan pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya di Kota Jambi.

Kebijakan umum belanja daerah yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan melakukan penghematan di bidang belanja daerah sesuai dengan skala prioritas.
- Memprioritaskan anggaran belanja bagi kegiatan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat.
- Meningkatkan kualitas kelembagaan pengelola keuangan daerah dan penciptaan pedoman-pedoman serta peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pada tahun 2017 Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Jambi adalah sebesar Rp. 1.671.160.550.942,00 yang terdiri dari Belanja Langsung Rp. 930.751.073.304,00 dan Belanja Tidak Langsung Rp. 740.409.477.638,00. Jika dibanding dengan jumlah Anggaran Belanja tahun 2016 sebesar Rp. 1.712.022.855.320,00 maka tahun 2017 ini belanja Pemerintah Daerah Kota Jambi mengalami penurunan sebesar 2,39 %.

Realisasi tahun 2016 dan tahun 2017, target tahun 2018 dan prediksi tahun 2019 Belanja Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6**Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Jambi**

NO	Uraian	Jumlah			
		Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018	Proyeksi 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja pegawai	721.853.145.334,50	609.075.861.181,00	699.171.149.816,00	647.836.394.235,00
2.1.2	Belanja bunga	0	0	0	0
2.1.3	Belanja subsidi	0	0	0	0
2.1.4	Belanja hibah	26.133.087.504,00	27.987.501.839,00	42.593.414.275,00	5.811.300.000,00
2.1.5	Belanja bantuan sosial	1.557.150.000,00	3.407.880.000,00	4.116.455.000,00	4.116.455.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	0	0	0	0
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	1.292.132.400,00	1.292.132.400,00	1.292.132.400,00	1.292.132.400,00
2.1.8	Belanja tidak terduga	1.082.029.949,00	1.392.951.634,00	2.105.867.000,00	2.105.867.000,00
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	751.917.545.187,50	643.156.327.054,00	749.279.018.491,00	661.162.148.635,00
2.2	Belanja Langsung				
2.2.1	Belanja pegawai			80.090.602.958,00	
2.2.2	Belanja barang dan jasa	350.592.467.899,00	433.829.756.112,30	410.408.318.737,00	
2.2.3	Belanja modal	424.195.954.889,95	419.316.595.968,50	431.850.187.305,00	
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	774.788.422.788,95	853.146.352.080,80	922.349.109.000,00	722.797.868.250,00
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.526.705.967.976,45	1.496.302.679.134,80	1.671.628.127.491,00	1.383.960.016.885,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2018

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan (DCD), penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

Untuk tahun 2018, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan adalah untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2016 dan 2017 pembiayaan di Kota Jambi untuk realisasi penerimaan pembiayaan masing-masing sebesar Rp. 130.079.638.923,74 dan Rp. 133.974.290.815,00. Penerimaan

pembiayaan dimaksud untuk menutupi defisit anggaran, dimana anggaran pendapatan lebih kecil bila dibanding dengan anggaran belanja.

Untuk realisasi pengeluaran pembiayaan pada tahun 2016 sebesar Rp. 40.731.598.758,00 dan untuk tahun 2017 sebesar Rp. 7.181.148.042,00. Pengeluaran pembiayaan merupakan upaya pemanfaatan surplus realisasi anggaran tahun sebelumnya. Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk tahun 2016 dan tahun 2017, target tahun 2018 serta proyeksi tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Jambi

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah			
		Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018	Proyeksi 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1	Penerimaan pembiayaan				
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	130.079.638.923,74	134.489.386.517,76	48.650.284.046,00	30.558.257.885,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0
3.2	Pengeluaran pembiayaan	0	0	0	0
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	39.039.796.578,00	6.988.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
3.2.3	Pembayaran pokok utang	1.691.802.180,00	181.148.041,76	0	0
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	40.731.598.758,00	7.169.148.041,76	5.000.000.000,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	89.348.040.165,74	127.320.238.476,00	43.650.284.046,00	30.558.257.885,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2018

Selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto. Dalam APBD tahun anggaran 2018, pembiayaan netto ditargetkan Rp. 43.650.284.046,00, sedangkan realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2016 sebesar Rp 89.348.040.165,74, dan tahun 2017 sebesar Rp. 127.320.238.476,00.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam hal Kota Jambi melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Tahun 2018 dan/atau dokumen RPJMD berakhir, penyusunan RKPD Kota Jambi Tahun 2019 mengacu pada:

- 1) Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, RPJMD Provinsi, program prioritas nasional dalam RKP;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; dan
- 3) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Berikut gambaran keterkaitan Prioritas Nasional yang tertuang dalam Rancangan RKP Tahun 2019, Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi dan Prioritas Pembangunan Kota Jambi.

Tabel 4.1
Keterkaitan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota Jambi

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi	Prioritas Pembangunan Kota Jambi
1.	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Penanggulangan Kemiskinan	Peningkatan Dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial
		Pendidikan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
		Kesehatan	
2.	Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui Penguatan Konektivitas Dan Kemaritiman	Pengembangan Wilayah	Percepatan Peningkatan Dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur
			Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
3.	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pertanian, Industri, Pariwisata Dan Jasa Produktif Lainnya	Pembangunan Ekonomi	Percepatan Dan Perluasan Pengembangan Ekonomi & Investasi
4.	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, Dan Sumber Daya Air	Ketahanan Pangan	
5.	Stabilitas Keamanan Nasional Dan Kesuksesan Pemilu	Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang yang ada di Kota Jambi, dan mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, serta terjadinya fenomena anomali iklim akhir-akhir ini. Dan akan merujuk kepada RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025, evaluasi pembangunan tahun 2016 dan tahun berjalan 2017, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2018, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019 mengacu kepada visi pembangunan daerah kota Jambi tahun 2005-2025 yaitu :

" KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN BARANG DAN JASA, YANG RELIGUS DAN BERBUDAYA"

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka dijabarkan kedalam Misi yang menjadi pedoman bagi Pembangunan Kota Jambi, yaitu :

1. Mewujudkan pembangunan kota Jambi yang berbasis kepada masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu, dan menghargai nilai-nilai luhur budaya lokal.
2. Mewujudkan kawasan perdagangan barang dan jasa yang mampu menjadi simpul perdagangan baik antar kabupaten maupun provinsi yang berbasis kepada rancangan tata kota sesuai tata ruang wilayah.
3. Mengembangkan infrastruktur transportasi yang menghubungkan pusat pemukiman, fasilitas umum, dan pusat kegiatan ekonomi
4. Mengembangkan pendidikan yang berorientasi kepada peningkatan akses, mutu dan relevansi melalui peningkatan sarana dan prasarana serta mengembangkan kualitas pendidikan yang berorientasi kepada permintaan sektor riil.
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, profesionalisme dan produktivitas tinggi serta mempunyai integritas dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah, baik sebagai birokrat pelaksana pembangunan maupun sebagai aktor pembangunan lainnya.

6. Peningkatan kualitas aparaturn pemerintahan yang berorientasi kepada penegakan hukum dan demokratisasi, sehingga terjadi persaingan yang fair dalam segala aktivitas ekonomi, pemerintahan dan politik.
7. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, berwibawa dan terpercaya melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan berkesinambungan.
8. Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi potensi penerimaan daerah.
9. Mewujudkan kota Jambi menjadi kota yang mempunyai daya saing tinggi terutama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pemerintahan dalam era otonomi dan globalisasi.
10. Menciptakan keterkaitan antar wilayah melalui kerjasama baik regional maupun global yang saling menguntungkan yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan.
11. Pemberdayaan pengusaha kecil menengah dan koperasi yang didukung dengan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada SDA dan SDM yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
12. Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh pengentasan kemiskinan, meningkatnya kualitas kehidupan yang layak, bermartabat dan tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.
13. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
14. Menciptakan kota Jambi menjadi kota yang bersih, aman dan tertib serta estetik melalui pendekatan kota hutan tropis yang ramah lingkungan dan mendukung bagi berkembangnya sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Arah pembangunan daerah menggambarkan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Strategi merupakan cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual, analitis, realistis,

rasional dan komprehensif yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah, maka tujuan jangka panjang pembangunan daerah Kota Jambi (2005-2025) adalah untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral, sejahtera dan demokratis yang terintegrasi dengan pembangunan provinsi dan nasional.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks tabel berikut :

Tabel 4.2
 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
 Berdasarkan RPJPD Kota Jambi 2005-2025

TUJUAN JANGKA PANJANG 2005-2025	SASARAN PEMBANGUNAN
Mewujudkan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat	1. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Berilmu, Bertaqwa dan Berbudaya; 2. Mewujudkan Keunggulan Kompetitif; 3. Mewujudkan Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan Barang dan Jasa; 4. Mewujudkan Keselarasan Pemanfaatan Sumberdaya Alam dengan Lingkungan Hidup; 5. Mewujudkan Pemanfaatan Ruang yang Harmonis, Produktif, Estetis, dan Berdaya Dukung Lingkungan; 6. Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur yang Sesuai dengan Tata Ruang; 7. Mewujudkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Cukup dan Nyaman; 8. Mewujudkan Daerah Permukiman dan Prasarana Kota yang Bersih dan Nyaman; 9. Mewujudkan Masyarakat dan Pemerintahan yang Taat Hukum, dan Demokratis; 10. Mewujudkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban; 11. Mewujudkan Kota Jambi Menjadi Pusat Pendidikan; 12. Mewujudkan Masyarakat yang Sehat dan Berprilaku Positif; 13. Mewujudkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, perlindungan anak serta kota ramah anak; 14. Mewujudkan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan berdasarkan RPJPD Tahun 2005-2025 yang dijelaskan pada RPJM ke 3 (tiga) tahun 2015-2019, yang berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahapan pembangunan pada RPJMD ke-1 dan RPJMD ke-2 maka pada tahapan pembangunan ke-3 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian

berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Sejalan dengan kemandirian kota, maka perkembangan demokratisasi diarahkan pada semua aktivitas meliputi ekonomi, politik dan aktivitas lainnya telah berbasis kepada mekanisme pasar yang berorientasi kepada persaingan daya saing yang jujur berbasis kepada kualitas dan latar belakang pendidikan baik formal maupun informal. Pelaksanaan pembangunan didasarkan kehendak masyarakat yang dituangkan kedalam undang-undang atau peraturan daerah yang sudah disepakati.

Peningkatan kesejahteraan sosial tentunya memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas keagamaan yang mengedepankan kerukunan antar umat beragama dan akhlak yang mulia. Disamping itu juga berkembangnya dan mengakarnya kebudayaan dan adat istiadat daerah. Dalam hal ini pembangunan diarahkan mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pencapaian keserasian umat beragama dan perkembangan kebudayaan daerah.

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019

Dalam hal belum ditetapkannya RPJMD Kota Jambi 2019-2023, maka untuk menentukan program berdasarkan prioritas masih merujuk pada RPJMD Kota Jambi 2013-2018. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Program yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Tabel 4.3
Prioritas dan Program Daerah

No	Prioritas Pembangunan	Program Daerah
1	Percepatan Peningkatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur	1. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 2. Pembangunan dan Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong 3. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan 4. Pembangunan, pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan 5. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 6. Peningkatan kesiagaan dini dan manajemen logistik kebencanaan 7. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman berbasis kawasan

		8. Peningkatan Mutu dan Perluasan Kapasitas Pelayanan Perparkiran 9. Peningkatan Pengelolaan dan Keselamatan Perhubungan 10. Perencanaan Tata Ruang
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan Akses, mutu dan tata kelola pendidikan 2. Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga dan Kepemudaan 3. Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Budaya dan Pariwisata 4. Pengelolaan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 5. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat 6. Peningkatan Mutu dan Pelayanan Perpustakaan
3	Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi & Investasi	1. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM 2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 3. Pembinaan, Pengembangan, Peningkatan dan Pengawasan Industri dan Perdagangan 4. Peningkatan Produksi, Mutu Produk, dan Diversifikasi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan 5. Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Pemberdayaan Petani 6. Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Perpasaran 7. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
4	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1. Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 2. Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan 3. Pembinaan dan pemeliharaan perlindungan masyarakat 4. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Pembinaan, Pemberdayaan, dan Fasilitasi bagi Orkemas dan Parpol 6. Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Tramtibum, Serta Penegakkan Regulasi Daerah 7. Penataan Peraturan Per UU & Penyelesaian Perkara Pemerintah Daerah 8. Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah 9. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah 10. Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan rakyat daerah 11. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 12. Peningkatan Kerjasama Daerah 13. Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik 14. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda dan Kerumahtanggaan 15. Peningkatan pelayanan kedinasan DPRD 16. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, Sekda, Aparatur dan Keprotokolan 17. Peningkatan Sistem Pengawasan, Pembinaan Internal, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 18. Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan 19. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 20. Tata Kelola Organisasi Pemerintahan dan

		Administrasi Pembangunan 21. Pelayanan Administrasi Perkantoran 22. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23. Peningkatan Disiplin Aparatur 24. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 26. Perencanaan SKPD 27. Pengembangan Data/Informasi
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan, RTH, Ruang Publik dan keanekaragaman hayati 2. Penurunan Beban Pencemaran 3. Peningkatan pengelolaan persampahan
6	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial	1. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2. Pembinaan dan Fasilitasi bagi Organisasi dan Kegiatan Keagamaan 3. Pemberdayaan Masyarakat 4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan PMKS 5. Peningkatan Kesenjangan Gender dan perempuan dan perlindungan anak 6. Peningkatan Kualitas, Perlindungan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Untuk mewujudkan kebijakan dan sasaran misi-misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan beserta indikator kinerja pembangunan. Capaian tersebut ditargetkan dapat ditempuh ke dalam target tahunan, sehingga kinerja pembangunan yang akan diimplementasikan oleh masing-masing OPD dapat terukur, terarah dan terkendali dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 4.4

Prioritas Pembangunan, Program, Indikator
dan Target Kinerja SKPD Tahun 2019

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja										OPD
			Indikator	Target									
				SATUAN	AWAL	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	Percepatan Peningkatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur												
		1	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rasio panjang jaringan jalan baik	%	65.44	65.44	69.38	82.00	100.00	100.00	100.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2	Pembangunan dan Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	Rasio Panjang drainase dalam kondisi baik	%	46.67	56.67	68.00	80.00	90.00	100.00	100.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		3	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan	Peningkatan fasilitas terminal penumpang dan barang	%	31.00	40.00	52.00	68.00	87.00	95.00	95.00	Dinas Perhubungan
		4	Pembangunan, pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan	Cakupan pelayanan jaringan air minum per jumlah rumah	%	65.00	68.00	72.00	75.00	77.00	80.00	80.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		5	Pengendalian Pemanfaatan Ruang										Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		6	Peningkatan kesiagaan dini dan manajemen logistik kebencanaan										Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		7	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman berbasis kawasan	Rasio luas kawasan kumuh per luas wilayah	%	0.97	0.80	0.70	0.60	0.50	0.35	0.35	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		8	Peningkatan Mutu dan Perluasan Kapasitas Pelayanan Perparkiran										Dinas Perhubungan
		9	Peningkatan Pengelolaan dan Keselamatan Perhubungan	Peningkatan fasilitas keselamatan lalu lintas	%	50.00	58.00	65.00	73.00	81.00	88.00	88.00	Dinas Perhubungan
		10	Perencanaan Tata Ruang	Rasio ketaatan terhadap RTRW	%	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan		Kinerja									OPD
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia												
		1	Peningkatan Akses, mutu dan tata kelola pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah pada usia sekolah	%	77.78	79.22	80.66	82.10	83.54	84.98	84.98	Dinas Pendidikan
				Angka Rata-rata lama sekolah (ARLS)	%	10.45	10.65	10.85	11.05	11.25	11.45	11.45	Dinas Pendidikan
				Jumlah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	%	82.57	85.57	88.57	91.57	94.57	97.50	97.50	Dinas Pendidikan
				Jumlah sekolah sesuai SNP pada semua jenjang pendidikan	%	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	85.00	Dinas Pendidikan
		2	Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga dan Kepemudaan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga, seni dan budaya	%	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	60.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		3	Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Budaya dan Pariwisata	Angka kunjungan wisman dan wisnu	orang	4000	4500	5000	5500	6000	6500	6500	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		4	Pengelolaan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah										Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		5	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persentase rumah tangga yang ber-PHBS	%	50.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	80.00	Dinas Kesehatan
				Cakupan Jaminan Pelayanan Kesehatan	%	45.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	90.00	Rumah Sakit Umum Daerah
		6	Peningkatan Mutu dan Pelayanan Perpustakaan										Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3	Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi & Investasi												
		1	Pembinaan, Pengembangan, Peningkatan dan Pengawasan Industri dan Perdagangan										Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		2	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Jumlah Koperasi aktif	Unit	193	198	203	208	213	218	218	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No.	Prioritas Pembangunan	Program /Pembangunan		Kinerja									OPD
				Jumlah UMKM dan IKM mandiri	Unit	140	145	150	155	165	170	170	
		3	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Realisasi investasi	%	N.A	30.00	50.00	70.00	85.00	100.00	100.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		4	Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Pemberdayaan Petani										Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		5	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah serapan tenaga kerja pada UMKM, IKM dan Koperasi	Persen								Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		6	Peningkatan pelayanan pengelolaan perpasaran	Rasio peningkatan sarana dan prasarana pasar-pasar tradisional pemerintah	%	50.00					85.00	85.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Rasio PKL yang tertata	%	NA	30.00	45.00	55.00	75.00	90.00	90.00	
		7	Peningkatan Produksi, Mutu Produk, dan Diversifikasi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan										Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik												
		1	Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi										Dinas Komunikasi dan Informatika
													Bagian Humas
		2	Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan										Bagian Tata Pemerintahan
		3	Pembinaan dan pemeliharaan perlindungan masyarakat										Satuan Polisi Pamong Praja
		4	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio aparatur dengan keahlian teknis dibutuhkan									Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
				Jumlah Pegawai Strata 2 dan 3									

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja										OPD
		5	Pembinaan, Pemberdayaan, dan Fasilitas bagi Orkemas dan Parpol										Badan Kesbangpolinmas
		6	Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Tramtibum, Serta Penegakkan Regulasi Daerah										Satuan Polisi Pamong Praja
		7	Penataan Peraturan Per UU dan Penyelesaian Perkara Pemerintah Daerah										Bagian Hukum Per UU
		8	Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah										Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
		9	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah										Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		10	Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan rakyat daerah										Sekretariat DPRD
		11	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan										Badan Kesbangpolinmas
		12	Peningkatan Kerjasama Daerah										Bagian Kerjasama
		13	Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	N.A	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik Sekali	Baik Sekali	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
													Bagian Perekonomian
													Bagian Organisasi
		14	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda dan Kerumahtanggaan										Bagian Umum
		15	Peningkatan pelayanan kedinasan DPRD										Sekretariat DPRD

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja									OPD
		16 Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, Sekda, Aparatur dan Keprotokolan										Bagian Protokol
		17 Peningkatan Sistem Pengawasan, Pembinaan Internal, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kinerja pelayanan internal SKPD	%								Inspektorat Kota Jambi
		18 Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan										Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		19 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan										Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		20 Tata Kelola Organisasi Pemerintahan dan Administrasi Pembangunan										Bagian Organisasi
		21 Pelayanan Administrasi Perkantoran										Semua SKPD
		22 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										Semua SKPD
		23 Peningkatan Disiplin Aparatur										Semua SKPD
		24 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										Semua SKPD
		25 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										Semua SKPD
		26 Perencanaan SKPD										Semua SKPD
		27 Pengembangan Data & Informasi										Semua SKPD

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan		Kinerja									OPD
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup												
		1	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan, RTH, Ruang Publik dan keanekaragaman hayati	Rasio RTH terhadap luas wilayah	%	8.00	8.50	9.00	10.00	11.00	11.25	11.25	Dinas Lingkungan Hidup
		2	Peningkatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan	Cakupan penangan sampah	%	61.67	62.00	65.00	70.00	75.00	80.00	80.00	Dinas Lingkungan Hidup
		3	Penurunan Beban Pencemaran	Penurunan tingkat polusi air pada S. Tembuku & S. Asam	mg/L	26.23	26,23-24	24-22	22-20	20-18	18-16	18-16	Dinas Lingkungan Hidup
6	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial												
		1	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Cakupan PUS peserta KB yang ber KB	%	77.00	79.00	81.00	83.00	85.00	87.00	87.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	Pembinaan, dan Fasilitasi bagi organisasi dan kegiatan Keagamaan	Persentase penyelesaian permasalahan keagamaan	%	N.A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Bagian Kesra
		3	Pemberdayaan Masyarakat										Kecamatan
													Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		4	Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan PMKS	Rasio peningkatan jumlah PMKS yang dilayani per tahun	%	30.00	36.00	42.00	48.00	54.00	60.00	60.00	Dinas Sosial
				Persentase penduduk miskin	%	9.80	9.30	8.80	8.30	7.80	7.30	7.30	SKPD Terkait
		5	Peningkatan Kesetaraan Gender dan perempuan dan perlindungan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengadilan	%	47.00	51.10	55.00	60.00	65.00	70.00	70.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan		Kinerja									OPD
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	19.00	19.00	20.00	25.00	25.00	30.00	30.00	
				Kelurahan layak anak	Kel	2.00	4.00	7.00	10.00	14.00	17.00	17.00	
		6	Peningkatan Kualitas, Perlindungan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah angkatan kerja terdaftar yang terserap	%	N.A	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Jumlah serapan tenaga kerja pada UMKM, IKM dan Koperasi	Persen								

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2019 yang dituangkan dalam Bab V ini, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada Bab II sampai dengan Bab IV tersebut di atas. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk uraian (i) Rencana program dan kegiatan tematik; (ii) Rencana program dan kegiatan non tematik; serta (iii) Matrik rencana program dan kegiatan.

Mengenai penyajian matrik rencana program dan kegiatan yang digunakan dalam Bab V ini adalah mengacu kepada: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Jumlah usulan masyarakat dan usulan Renja OPD untuk perencanaan tahun 2019 pada Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 722.797.868.250,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Urusan Wajib sebesar Rp. 544.595.291.750,00 yang terbagi atas :
 - Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebesar Rp. 459.691.802.500,00.
 - Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sebesar Rp. 84.903.489.250,00.
2. Urusan Pilihan sebesar Rp. 13.604.426.000,00.
3. Urusan Penunjang sebesar Rp. 27.416.266.000,00.
4. Urusan Pendukung sebesar Rp. 84.055.300.000,00.
5. Urusan Kewilayahan sebesar Rp. 51.078.274.500,00.
6. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 2.048.310.000,00.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Dalam rangka perencanaan politis, Rancangan RKPD Tahun 2019 juga memuat Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Jambi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah bahwa Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. DPRD Kota Jambi telah menyalurkan sebanyak 343 Usulan kedalam e-planning Kota Jambi.

Selengkapnya mengenai matrik rencana program dan kegiatan tahun 2019 serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Jambi diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Rencana Program OPD Tahun 2019

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	OPD
I	<u>URUSAN WAJIB</u>				
	<i>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</i>				
1	Pendidikan	Program Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan	Meningkatnya Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan	100%	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Tersedianya obat PKD, Bahan Medis Habis Pakai, Reagensia di Puskesmas dan Pustu Terwujudnya Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100% 100%	Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Berbasis Kawasan Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Program pembangunan, Pemeliharaan dan Perluasan Utilitas Perkotaan	Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Permukiman Berbasis Kawasan Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Bangunan Meningkatnya infrastruktur kota Peningkatan ketersediaan infrastruktur sumber daya air Meningkatnya Penataan Prasarana infrastruktur	100% 100% 100% 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	OPD
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Perencanaan tata ruang penataan ruang kota	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan kualitas Lingkungan Permukiman Berbasis Kawasan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Berbasis kawasan	100%	
		Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Perluasan utilitas Perkotaan	Terwujudnya Keamanan dan kenyamanan Pengguna Jalan dan Taman	100%	
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Trantibum Serta Penegakan Regulasi Daerah	Kuantitas dan Kualitas Trantibum dan tranmas Kota Jambi sert penjagaan dan pengamanan aset dan pejabat Kota Jambi	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pembinaan dan Pemeliharaan Perlindungan Masyarakat	Kuantitas dan kualitas peningkatan fisik, mental dan sumberdaya personil serta pencitraan satpol PP	100%	
		Program Peningkatan Kesiagaan Dini dan Manajemen Logistik Kebencanaan	Program Peningkatan Kesiagaan Dini dan Manajemen Logistik kebencanaan	100%	
6	Sosial	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan PMKS	Terlaksananya penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan PMKS	100%	Dinas Sosial

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	OPD
1	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas dan Perlindungan Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja	100%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlaksananya Peningkatan Fasilitas Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Anak dan Pengembangan Organisasi Anak	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat dan Pemberdayaan Petani	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Masyarakat dan Pemberdayaan Petani	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4	Lingkungan Hidup	Program Penurunan Beban Pencemaran	Menurunnya pencemaran air dan udara serta kerusakan lahan sehingga memenuhi baku mutu lingkungan	100%	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan, RTH, Ruang Publik dan Keanekaragaman Hayati	Terpeliharanya kelestarian SDA dan fungsi lingkungan	100%	
		Program Peningkatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	Terwujudnya Peningkatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	100%	
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan	Terwujudnya Pemahaman tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	OPD
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat	Tersedianya Fasilitas Kelurahan Yang Memadai, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan TTG	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Terkendalinya penduduk	100%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Perhubungan	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Sarana dan Prasarana Perhubungan semakin bertambah dan baik	100%	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Pengelolaan dan Keselamatan Perhubungan	Pengelolaan Keselamatan Lalu Lintas Semakin Baik	100%	
		Program Peningkatan Pelayanan Perpakiran	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Parkir	100%	
9	Komunikasi dan Informatika	Program Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terwujudnya kualitas dan validitas data/informasi	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Peningkatan kualitas iklim usaha dan investasi	100%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	100%	
11	Penanaman Modal	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	OPD
12	Kepemudaan dan Olahraga	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan	100%	Dinas Pemuda dan Olahraga
13	Kebudayaan	Program Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Kebudayaan dan Pariwisata	Berkembangnya Kesenian, Kebudayaan Pariwisata Daerah Kota Jambi	100%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
14	Perpustakaan	Program Peningkatan Mutu dan pelayanan Perpustakaan	Telaksananya Peningkatan Mutu dan pelayanan Perpustakaan	100%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
15	Kearsipan	Program Pengelolaan, Penyelamatan & Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Telaksananya Pengelolaan, Penyelamatan & Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	100%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
II	<u>URUSAN PILIHAN</u> <u>URUSAN PILIHAN</u>				
1	Pariwisata	Program Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Kebudayaan dan Pariwisata	Berkembangnya Kesenian, Kebudayaan Pariwisata Daerah Kota Jambi	100%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Pertanian	Program Peningkatan produksi, mutu produk dan diversifikasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan	Terwujudnya Peningkatan produksi, mutu produk dan diversifikasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	Perdagangan	Program Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Perpasaran	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Perpasaran	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	OPD
4	Kehutanan	Program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan, RTH, Ruang Publik dan Keanekaragaman Hayati	Terpeliharanya kelestarian SDA dan fungsi lingkungan	100%	Dinas Lingkungan Hidup
5	Perindustrian	Program Pembinaan, Pengembangan, Peningkatan, dan Pengawasan Industri dan Perdagangan	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan, Peningkatan, dan Pengawasan Industri dan Perdagangan	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
III	PENUNJANG URUSAN PENUNJANG URUSAN				
1	Inspektorat	Program Peningkatan Sistem Pengawasan, Pembinaan Internal, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya Peningkatan Sistem Pengawasan, Pembinaan Internal, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%	Inspektorat
2	Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	100%	Badan Perencanaan Pembangunan
3	Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pengelola Keuangan Daerah Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah	100% 100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	OPD
4	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
IV	<u>PENDUKUNG</u> <u>PENDUKUNG</u>				
1	Sekretariat Daerah	Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik Program Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda, Aparatur dan Keprotokolan	Terlaksananya Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik Meningkatnya pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda, Aparatur dan Keprotokolan melalui kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	100% 100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sekretariat Daerah
		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda dan Kerumahtanggaan	Meningkatnya Pelayanan Rumah Tangga KDH dan WKDH	100%	
		Program Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan	Terwujudnya Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	100%	
		Program Peningkatan Kerjasama Daerah	Terlaksananya kerjasama antar daerah, dunia usaha/masyarakat dalam dan luar negeri	100%	
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelesaian Perkara Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Produk Hukum dan Tersusunnya Arsip Bagian Hukum	100%	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	OPD
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	Program Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatkan Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat	100%	Sekretariat DPRD
		Program Tata Kelola Organisasi Pemerintahan dan Administrasi Pembangunan	Tercapainya peningkatan tata kelola organisasi pemerintahan dan administrasi pembangunan	100%	
V	<u>KEWILAYAHAN</u> <u>KEWILAYAHAN</u>	Program Pembinaan Keagamaan dan Fasilitas bagi Organisasi dan Kegiatan Keagamaan	Pembinaan dan Fasilitas bagi Kegiatan Keagamaan melalui Peningkatan Peran Serta dan Kualitas Umat Beragama	100%	Kecamatan Kota Baru
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100%	
1	Kecamatan	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan DPRD	100%	Kecamatan Telanaipura
1	Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat kecamatan	100%	Kecamatan Jelutung
		Program Pemberdayaan Masyarakat	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat kecamatan	100%	Kecamatan Pasar Jambi
		Program Pemberdayaan Masyarakat	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat kecamatan	100%	Kecamatan Jambi Selatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat kecamatan	100%	
		Program Pemberdayaan Masyarakat	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat kecamatan	100%	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	OPD
VI	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK <i>URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</i>	Program Pemberdayaan Masyarakat	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat kecamatan	100%	Kecamatan Jambi Timur
		Program Pemberdayaan Masyarakat	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat kecamatan	100%	Kecamatan Danau Teluk
		Program Pemberdayaan Masyarakat	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat kecamatan	100%	Kecamatan Pelayangan
		Program Pemberdayaan Masyarakat	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat kecamatan	100%	Kecamatan Alam Barajo
		Program Pemberdayaan Masyarakat	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat kecamatan	100%	Kecamatan Danau Sipin
		Program Pemberdayaan Masyarakat	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat kecamatan	100%	Kecamatan Paal Merah
		Program Pemberdayaan Masyarakat	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat kecamatan	100%	
1	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Fasilitasi bagi Orkemas dan Parpol	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan Terlaksananya pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi bagi orkemas dan parpol	100% 100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 5.2.
Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Jambi

No	Nama Dewan	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD
1	WAHYUDI PANPRI	PAN	III	1	KEGIATAN PERBAIKAN JALAN LINGKUNGAN RT. 20 DAN RT 21 KELURAHAN SUNGAI ASAM	DPU
				2	PEMBANGUNAN POSKAMLING RT. 20 RT. 21 KELURAHAN SUNGAI ASAM	-
				3	PENGADAAN SARANA OLAHRAGA BULU TANGKIS DAN TENIS MEJA RT. 21 KELURAHAN SUNGAI ASAM	DISPORA
				4	PERBAIKAN TEMPAT IBADAH (LANGGAR) RT. 21 KELURAHAN SUNGAI ASAM	KESRA
				5	PENGENDALIAN DISTRIBUSI GAS BERSUBSIDI UNTUK USAHA	EKONOMI
				6	PENGASPALAN JALAN RT. 10 (JALAN MENUJU SD NEGERI 18) KELURAHAN SUNGAI ASAM	DPU
				7	PENGADAAN TENDA DAN KURSI INVENTARIS RT 10 KELURAHAN SUNGAI ASAM	-
				8	PROGRAM BANGKIT BERDAYA UNTUK RT 12 KELURAHAN BERINGIN	KEC
2	YENNY SINAGA, S.Th,	PDI - PERJUANGAN	I	1	PEMBANGUNAN DRAINASE DI RT. 07 KELURAHAN BERINGIN, RT. 06 KELURAHAN JELUTUNG DAN RT. 19 KELURAHAN CEMPAKA PUTIH	DPU
				2	PENYEDIAAN DANA BANTUAN UNTUK WARGA KURANG MAMPU DI RT. 19 KELURAHAN CEMPAKA PUTIH	DINSOS
				3	PEMBANGUNAN BAK SAMPAH (TPS) DI RT. 03 DAN RT. 04 KELURAHAN TALANG JAUH	DLH
				4	PENERTIBAN DAN PENGAWASAN PEMBUANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA (PENEGAKAN PERDA)	DLH
				5	PENINGKATAN LAMPU JALAN KELURAHAN TALANG JAUH RT. 03 DAN RT. 04	DPRKP
				6	PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN GAS BERSUBSIDI DI KELURAHAN BERINGIN	EKONOMI
				7	PENGENDALIAN ARUS LALU LINTAS DI KAWASAN JELUTUNG YANG RAWAN MACET	DISHUB
3	NYIMAS MAZNIATI	HANURA	IV	1	PEROBOHAN ISTANA ANAK-ANAK UNTUK MENGOPTIMALKAN LAHAN PARKIR DI PASAR JAMBI YANG SEMAKIN PADAT	DPU+DISHUB

No	Nama Dewan	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD
4	M. FUAD SAFARI, Sos, I	DEMOKRAT	III	2	KANTOR LURAH ORANG KAYO HITAM DIBESARKAN/ DITINGKATKAN UNTUK AULA DAN KEGIATAN PKK	DPU
				3	PEMBANGUNAN TURAP DI RT 07 KELURAHAN ORANG KAYO HITAM YANG SUDAH RUSAK SERTA PEMBANGUNAN DRAINASE DI RT TERSEBUT	DPU
				4	PEMBANGUNAN SARANA OLAHRAGA DI PASAR JAMBI	DISPORA
				5	PENANGANAN MASALAH BANJIR DI JALAN RT. 03, 04, 05 KELURAHAN PASAR JAMBI YANG DIKARENAKAN DRAINASE YANG ADA SAAT INI KECIL	DPU
				6	PENERTIPAN PUNGLI PADA PEDAGANG KECIL YANG TERJADI DI PASAR JAMBI	DPP
				1	REALISASI PEMBANGUNAN DRAINASE DI RT. 02 KELURAHAN PAYO LEBAR YANG SUDAH DIAJUKAN PADA TAHUN 2014	DPU
				2	PERBAIKAN DRAINASE DARI RT. 19 SAMPAI RT. 26 KARENA TERJADI PENDANGKALAN KELURAHAN PAYO LEBAR	DPU
				3	PERBAIKAN DRAINASE PADA RT. 33 YANG MANA DRAINASE TERSEBUT ALIRAN AIRNYA MELIMPAH SAMPAI KE JALAN	DPU
				4	PENGADAAN MIRROR ATAU KACA UNTUK TIKUNGAN JALAN DI RT. 17 KELURAHAN PAYO LEBAR	DISHUB
				5	REALISASI PENGADAAN LAMPU JALAN SEBANYAK EMPAT TITIK DI RT. 20 KELURAHAN PAYO LEBAR DI DEKAT ASRAMA BAITURAHIM DAN SD NEGERI 180 YANG MANA SUDAH DIAJUKAN DI MUSREMBANG	DPRKP
				6	KOS-KOSAN DI RT. 03 BELUM ADA IZIN YANG JELAS SERTA PENGHUNINYA TIDAK MELAPOR KE KETUA RT AGAR DITINDAK LANJUTI KARENA SUDAH MERESAHKAN WARGA	DPMPTSP
5	APRIZAL, S.Ag	GOLKAR	II	1	PENGASPALAN DAN PENGECORAN JALAN RT 23 KELURAHAN HANDIL JAYA	DPU
				2	PENGADAAN LAMPU DAN TIANG LAMPU JALAN DI RT.13 KELURAHAN HANDIL JAYA	DPRKP
				3	PERBAIKAN GORONG-GORONG DI RT. 14 KELURAHAN HANDIL JAYA	DPU
				4	PENGELOLAAN TAMAN DI SEBELAH KANTOR LURAH HANDIL JAYA AGAR DISERAHKAN KE WARGA	DPRKP

No	Nama Dewan	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD
6	EKO SETIAWAN, SE	GERINDRA	IV	5	PENGASPALAN RT. 01 JL. H. SUANDI	DPU
				6	PERBAIKAN (PENGERUKAN) DRAINASE DI RT. 12 SAMPAI KE RT. 16 KELURAHAN HANDIL JAYA	DPU
				7	PERBAIKAN INSTALASI KABEL LISTRIK DI RT. 26 KELURAHAN HANDIL JAYA KARENA TERLALU BANYAK YANG RENDAH	-
				8	PENGASPALAN JALAN DI RT. 26 PADA JL. EMPIT RAYA, JL. EMPIT 3, JL. EMPIT DARAJAYA KELURAHAN HANDIL JAYA	DPU
				9	PENGASPALAN DI RT. 03 PADA JL. MAYANGSARI 3, JL. PAPLIN DAN JL. ASTER RT. 06	DPU
				10	HONOR GURU PAUD DIANGGARKAN	DISDIK
				11	PENERTIBAN PARKIR DI JALAN SEKITAR KAMPUS BAITURRAHIM	DISHUB
				12	MOBIL SAMPAH AGAR MASUK KE LINGKUNGAN KE LURAHAN LEBAK BANDUNG	DLH+DPU
				13	PENINGKATAN INSENTIF RT	KEC
				14	REALISASI LAMPU JALAN LINGKUNGAN SEBANYAK ENAM TITIK DI RT. 34 KELURAHAN LEBAK BANDUNG	DPRKP
				1	PERBAIKAN LAMPU JALAN DI DEPAN MASJID PADA JL. MELATI I DAN JL.MELATI II RT. 48 KELURAHAN JELUTUNG	DPRKP
				2	PENINGKATAN LAMPU JALAN DI DAERAH PUNCAK	DPRKP
				3	PERBAIKAN JALAN DI RT. 28 KELURAHAN JELUTUNG DEPAN ABDURAHMAN	DPU
				4	PENGASPALAN DAN PENGADAAN LAMPU JALAN DI LORONG AMPEL RT. 55 KELURAHAN JELUTUNG	DPU
7	SUTIONO, ST	PDI - PERJUANGAN	II	5	PEMBANGUNAN DRAINASE DI RT. 29 DI DEKAT SD TUNAS ABADI	DPU
				6	PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN GAS BERSUBSIDI DI KELURAHAN JELUTUNG	EKONOMI
				1	PEMBANGUNAN BALAI ADAT DAN BUDAYA YANG BERFUNGSI SEBAGAI TEMPAT BELAJAR BAGI WARGA DI KELURAHAN MUDUNG LAUT	DPK
				2	PENAMBAHAN LAMPU JALAN SERTA TIANG LAMPU JALAN SEBANYAK 7 TITIK DI RT. 06 KELURAHAN MUDUNG LAUT	DPRKP

No	Nama Dewan	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD
8	ABDULLAH THAIF, A.	PKB	IV	3	PENGAWASAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH DARI TPS RT. 06 DAN RT. 07 KELURAHAN MUDUNG LAUT	DLH+DPU
				4	PENGENDALIAN LIMBAH RUMAH TANGGA DI RT. 06 KELURAHAN MUDUNG LAUT	DLH+DPU
				5	MENGEMBANGKAN PEMASANGAN TIANG LISTRIK DAN LAMPU JALAN SEBANYAK LIMA TITIK UNTUK JALAN LORONG DI RT. 08 KELURAHAN MUDUNG LAUT	DPRKP
				6	PEMASANGAN TIANG LISTRIK SERTA LAMPU JALAN SEBANYAK DUA BELAS TITIK DI RT. 09 KELURAHAN MUDUNG LAUT	DPRKP
				7	PENAMBAHAN LAMPU JALAN JEMBATAN DI PERBATASAN KELURAHAN TENGAH SEBANYAK DUA TITIK	DPRKP
				8	PEMASANGAN LAMPU JALAN UNTUK GAPURA DEPAN SEKOLAH PAUD KE ARAH RT. 09 SEBANYAK LIMA TITIK	DPRKP
				9	PENGAWASAN PEMBANGUNAN PASAR BARU KOTA JAMBI DI KELURAHAN TANJUNG SARI	DPP
				10	PERBAIKAN JALAN DI JL. SINGOSARI KELURAHAN TANJUNG SARI	DPU
				11	PENAMBAHAN LAMPU JALAN RT. 16 KELURAHAN TANJUNG SARI	DPRKP
				12	PERBAIKAN SALURAN AIR (GOT) YANG BUNTU DI RT. 09 KELURAHAN TANJUNG SARI	DPU
9	PARIS SIREGAR, SE	PDI - PERJUANGAN	II	1	PERBAIKAN JALAN SETAPAK ANTARA RT 14 DAN 15 KELURAHAN RAJAWALI	DPU
				2	PEMBUATAN DAN PERBAIKAN DRAINASE DI RT. 09 KELURAHAN RAJAWALI	DPU
				3	PERBAIKAN JALAN DI RT. 11 DAN RT.21 KELURAHAN RAJAWALI	DPU
				4	PENGENDALIAN LIMBAH RUMAH TANGGA DI RT 16,17,20,25 KELURAHAN RAJAWALI	DLH
				1	PEMBANGUNAN DRAINASE DI GANG 85 RT. 30 KELURAHAN TALANG BANJAR	DPU
				2	PERBAIKAN JALAN LORONG DAN PENERANGAN JALAN RT. 30 KELURAHAN TALANG BANJAR	DPU
				3	PEMBANGUNAN TURAP KELURAHAN TALANG BANJAR UNTUK MENCEGAH MUSIBAH SAAT CURAH HUJAN TINGGI KARENA MENYEBABKAN BANJIR DI SD SEHINGGA MEMBUTUHKAN PERBAIKAN LOKAL	DPU
				4	PENGAWASAN PENAMBAHAN BANGUNAN KIOS PASAR TALANG BANJAR	DPP

No	Nama Dewan	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD
10	PUTRA ABSOR	GERINDRA	I	1	PERBAIKAN JALAN LINGKUNGAN SEPANJANG 350 METER DI RT. 05 KASANG	DPU
				2	MASYARAKAT SEKITAR SEKOLAH DI HARAPKAN DAPAT MENJADI PRIORITAS	DIKNAS
				3	PENERIMAAN SISWA BARU	
				4	PENGAWASAN PENYALURAN DANA BANTUAN DARI PUSAT UNTUK USAHA KECIL	DTKK
					MENENGAH DAN KOPERASI	
					PENINGKATAN FASILITAS KESEHATAN DAN PELAYANAN KESEHATAN	DINKES
11	SARTONO, SH, M.Hum	PAN	III	1	PERBAIKAN INSTALASI LISTRIK DI RT. 23 KELURAHAN TANJUNG SARI SEKITAR SD	-
				2	NEGERI 159	
				3	PEMBANGUNAN DRAINASE RT. 23 KELURAHAN TANJUNG SARI	DPU
					PERBAIKAN JALAN LINGKUNGAN RT. 23 KELURAHAN TANJUNG SARI	DPU
12	ABDUS SOMAD	PPP	I	1	PENIMBUNAN JALAN, PENAMPALAN DAN PENGASPALAN JALAN DARI KELURAHAN	DPU
				2	TANJUNG JOHOR SAMPAI KELURAHAN TAHTUL YAMAN	
				3	PENAMBAHAN BPJS DAN PKH BAGI KELUARGA YANG KURANG MAMPU	DINKES
					DANA CSR DARI PERUSAHAAN UNTUK MASYARAKAT KELURAHAN TANJUNG JOHOR	-
13	HORIZON, SE, ME	DEMOKRAT	I	1	PENGAWASAN PENDATAAN DAN PENYALURAN PENERIMAAN BANTUAN RASTA	-
				2	LEBIH DIPERHATIKAN DI KELURAHAN TANJUNG SARI	
				3	PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN GAS BERSUBSIDI 3 KG DI KELURAHAN TANJUNG	EKONOMI
				4	SARI	
					PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	DINKES
					PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIBIDANG PENDIDIKAN	DISDIK
14	RR. NULLY KURNIASIH	DEMOKRAT	III	1	PERBAIKAN DRAINASE DI RT. 36 KELURAHAN PAAL MERAH	DPU
				2	PERBAIKAN (PENGEORAN) JALAN PERUMAHAN RT. 38 KELURAHAN PAAL MERAH	DPU
				3	PERBAIKAN DRAINASE DAN GORONG-GORONG DI RT. 24 DAN RT. 38 KELURAHAN	DPU
					PAAL MERAH	

No	Nama Dewan	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD
15	JUNEDI SINGARIMBUN,	PDI - PERJUANGAN	III	4	PENGADAAN LAMPU JALAN SEBANYAK EMPAT TITIK DI RT. 24 DAN RT 38 KELURAHAN PAAL MERAH	DPRKP
				5	REALISASI PEMBANGUNAN DRAINASE DI RT. 26 LORONG RAMBUTAN KELURAHAN PAAL MERAH	DPU
				6	PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN GAS 3 KG DI KELURAHAN PAAL MERAH	EKONOMI
				1	PERAMPUNGAN PENGGALIAN UNTUK JARINGAN PIPA GAS RUMAH TANGGA DI PAAL MERAH	-
				2	PERBAIKAN JALAN DI JALAN PERUMAHAN BUMI PAAL MERAH INDAH	DPU
				3	REALISASI LPJU DI RT. 50	DPRKP
				4	PERBAIKAN JALAN YANG MENUJU KE KANTOR LURAH PAAL MERAH	DPU
				5	PERBAIKAN JALAN RT. 47 YANG MERUPAKAN JALAN AKSES MENUJU SEKOLAH DASAR DI PAAL MERAH	DPU
				6	PERBAIKAN DRAINASE DARI RT. 25 DAN RT. 26 YANG TERPUTUS	DPU
				7	PEMBUATAN JALAN NIAGA DI RT. 08 UNTUK MEMPERLANCAR PEREKONOMIAN DAN ALTERNATIF JALAN ANAK SEKOLAH YANG BIASA MELEWATI JALAN LINTAS	DPU
				8	PEMBUATAN BOX COVER GORONG-GORONG DI RT. 39 DAN RT. 52 KELURAHAN PAAL MERAH	DPU
				9	PENGADAAN LPJU DI RT. 39 DAN RT. 52 KELURAHAN PAAL MERAH	DPRKP
				10	PERBAIKAN JALAN DI RT. 37 (LR. SUKA DAMAI) YANG MENUJU RT. 50 SERTA PEMBANGUNAN DRAINASE	DPU
				11	PEMBUATAN GORONG-GORONG DI RT. 32 KELURAHAN PAAL MERAH	DPU
				12	PENAMBAHAN LAMPU JALAN EMPAT TITIK DI RT 32 KELURAHAN PAAL MERAH	DPRKP
				13	PERBAIKAN (PENGERUKAN) DRAINASE DI RT. 32 KELURAHAN PAAL MERAH	DPU
				14	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN AKSES KE MASJID DI RT 07 KELURAHAN PAAL MERAH	DPU
				15	PEMBANGUNAN DRAINASE DI RT 25 KELURAHAN PAAL MERAH	DPU
				16	PERBAIKAN JALAN DI RT. 46 KELURAHAN PAAL MERAH SEBANYAK TIGA TITIK	DPU
				17	PERAMPUNGAN JARINGAN GALIAN PIPA GAS DI RT. 46 KELURAHAN PAAL MERAH	-

No	Nama Dewan	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD
16	SUPRANOTO, SP	PDI - PERJUANGAN	I	1	PERBAIKAN JALAN LINGKUNGAN SERTA PEMBUATAN PARIT DI RT. 17 YANG MERUPAKAN JALAN TEMBUSAN KE KANTOR LURAH THEHOK	DPU
				2	PERBAIKAN DRAINASE DI DEPAN LANGGAR MIFTAHUL JANNAH KELURAHAN THEHOK	DPU
				3	PEMBUATAN JALAN SETAPAK DI JL. PACITAN RT. 08 KELURAHAN THEHOK	DPU
				4	REALISASI USULAN MUSRENBANG UNTUK KELURAHAN KELURAHAN DI KECAMATAN PAAL MERAH	BAPPEDA
				5	EFISIENSI PENGANGKUTAN SAMPAH DI DEPAN PEMAKAMAN UMUM SUKAREJO	DLH
				6	PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN GAS BERSUBSUDI 3 KG DI KELURAHAN EKA JAYA	EKONOMI
				7	PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN PENGANGKUTAN SAMPAH DI PINGGIR JALAN RT. 29 LIPOSOS 2	DLH
				8	PERBAIKAN JALAN SETAPAK DI RT. 15 KELURAHAN THEHOK	DPU
17	PARDOMUAN	PKB	I	1	PENGADAAN LAMPU JALAN LR. MAHKAMAH I (KUBURAN) KELURAHAN TALANG BAKUNG	DPRKP
				2	PENINJAUAN DAN PENGADAAN TIANG LAMPU JALAN DARI LR. KARTINI SAMPAI DENGAN LR. MULYO KELURAHAN TALANG BAKUNG	DPRKP
				3	PEMBUATAN PARIT BESAR DARI KUBURAN RT. 42 SAMPAI KE PERUMAHAN HAMPARAN MULYO DI KELURAHAN TALANG BAKUNG	DPU
				4	PEMASANGAN LAMPU JALAN DI JL. KOPRAL RAMLI SAMPING PASAR RT.16 KELURAHAN PASIR PUTIH	DPRKP
				5	REALISASI PEMBUATAN/ PERBAIKAN JALAN DI JALAN GANG BERSAMA TEMBUSAN JALAN POROS	DPU
				6	PENAMBAHAN TIANG DAN LAMPU JALAN SEBANYAK TUJUH TITIK DI RT. 38 KELURAHAN TALANG BAKUNG	DPRKP
				7	PENINJAUAN UNTUK REALISASI PEMBUATAN JALAN SETAPAK DI RT. 45 PERUMAHAN RATU DAHA	DPU
				8	PERBAIKAN JALAN PERUMAHAN RATU DAHAN DARI BLOK D SAMPAI DENGAN MUSHOLLA	DPU

No	Nama Dewan	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD
18	DARMAWAN	GERINDRA	I	9	PENAMBAHAN LAMPU JALAN SEBANYAK ENAM TITIK DAN EMPAT TIANG PERUMAHAN RATU DAHA RT. 45	DPU
				10	PERBAIKAN DRAINASE DI RT. 45 PERUMAHAN RATU DAHA	DPU
				11	PENGASPALAN JALAN DI RT. 46 DAN RT. 16 KELURAHAN TALANG BAKUNG	DPU
				12	PENAMBAHAN LAMPU JALAN SERTA TIANG DI RT. 46 DAN RT. 16 KELURAHAN TALANG BAKUNG	DPRKP
				13	PEMBUATAN DAN PEMBANGUNAN JALAN LR. PANGADI LUHUR SAMPAI DENGAN LR. DAMAI DI RT. 24 KELURAHAN TALANG BAKUNG	DPU
				14	PENAMBAHAN TIANG LISTRIK SEBANYAK LIMA BELAS TITIK DI RT. 24 KELURAHAN TALANG BAKUNG	DPRKP
				15	REALSASI PROGRAM BEDAH RUMAH SEBANYAK LIMA UNIT DI RT. 24 KELURAHAN TALANG BAKUNG	-
				16	REALISASI PEMBUATAN JALAN DI RT. 45 KELURAHAN TALANG BAKUNG	DPU
				17	PENYAMBUNGAN PIPA PDAM SEKITAR 18 RUMAH TIDAK DISETUJUI PDAM DI RT. 45 DAN RT. 18 KELURAHAN TALANG BAKUNG	DPU
				18	PENANGGULANGAN BANJIR DI RT. 46 PERUMAHAN SAFIRA KELURAHAN TALANG BAKUNG	DPU
				19	PENYELESAIAN MASALAH TANAH HIBAH YANG SUDAH DI TIMBUN SELUAS 3 METER SERTA AGAR DAPAT DILAKUKAN Pengerasan Jalan	DPU
				20	PENGADAAN TIANG LAMPU JALAN SERTA LAMPU JALAN SEBANYAK ENAM TITIK DI RT. 29 ARAH KE KUBURAN KELURAHAN EKA JAYA	DPRKP
				21	PENAMBAHAN LAMPU JALAN DAN TIANG LAMPU JALAN DI RT. 37 KELURAHAN TALANG BAKUNG	DPRKP
				1	PERBAIKAN JALAN DI RT. 07 LR. MABES KELURAHAN WIJAYA PURA KURANG LEBIH SEPANJANG 150 METER	DPU
				2	PERBAIKAN JALAN DI RT. 07 LR. HAJI KAMIL (GANG 75) SERTA PENAMBAHAN LPJU	DPU
				3	PERBAIKAN JALAN SIMPANG MASJID NURUL IHSAN RT. 19 KE ARAH SMA UNGGUL SAKTI	DPU

No	Nama Dewan	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD
19	MUHILI AMIN, SH	GOLKAR	I	4	PERBAIKAN JALAN LINGKUNGAN DI LR. ARWANA	DPU
				5	PERBAIKAN JALAN DI LR. WIDATI KE ARAH MASJID RT. 20	DPU
				6	PEMASANGAN LAMPU JALAN DI RT. 20 KELURAHAN WIJAYAPURA	DPRKP
				1	PERBAIKAN JL. BUMI AYU SERTA PEMASANGAN LPJU DI RT. 09 KELURAHAN THEHOK	DPU
				2	PERBAIKAN JALAN LINGKUNGAN DAN DRAINASE DI RT 05 KELURAHAN THEHOK	DPU
				3	REALISASI PERBAIKAN JL. PACITA RT. 14 KELURAHAN THEHOK	DPU
20	HJ.RAHMAINUR	HANURA	I	4	EFISIENSI PENYALURAN RASKIN	EKONOMI
				5	PELATIHAN UNTUK WARGA SEBAGAI WADAH USAHA KECIL DAN MENENGAH DI RT. 09 KELURAHAN THEHOK	DTKK
				6	PENYALURAN KARTU SEHAT DAN BEROBAT GRATIS DI RT. 12 KELURAHAN THEHOK	DINKES
				1	PEMBUATAN JALAN DI RT. 22 KELURAHAN TALANG BAKUNG DI JL. ANGGREK AGAR TEMBUS DI LR. BAJA DAN LR. TERATAI	DPU
				2	PERBAIKAN JALAN DI RT.19 KELURAHAN TALANG BAKUNG DI JL. DARMAPALA	DPU
				3	REALISASI PEMBUATAN PARIT DI RT. 13 KELURAHAN TALANG BAKUNG	DPU
21	SYAIFUL IHSAN, SE	PAN	II	4	REALISASI PEMBUATAN JALAN DAN PARIT DI RT. 10 KELURAHAN TALANG BAKUNG	DPU
				5	PERAMPUNGAN JALAN YANG SEMULA DIAJUKAN 400 METER HANYA TERASPAL 100 METER DI JL.PERJUANGAN PENGHUBUNG ANTARA RT.12 DENGAN RT. 14	DPU
				1	RENOFASI ARAH KIBLAT LANGGAR NUR ISLAM DI RT.11 SIMPANG III SIPIN	KESRA
				2	PEMBANGUNAN POSKAMLING PERMANEN DI RT.11 KELURAHAN SIMPANG III SIPIN	-
				3	PERBAIKAN JALAN DI LR. HJ. AMINAH RT. 17 (SAMPING POSYANDU RT. 17) KELURAHAN SIMPANG III SIPIN	DPU
				4	PERBAIKAN JALAN DI JL. BAITUL MUSLIM RT. 17 KELURAHAN SIMPANG III SIPIN	DPU
				5	PERBAIKAN JALAN SISWA III BIDAN FARIDA RT. 32 KELURAHAN SIMPANG III SIPIN	DPU

No	Nama Dewan	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD
22	SYOFNI HERAWATI, SP	PKB	III	1	PEMBENAHAN DRAINASE DAN PENGADAAN PEMASANGAN LPJU DI SEBELAS TITIK RT. 32 KELURAHAN SIMP. III SIPIN	DPU
				2	RENOVASI POSYANDU DAN KEPEMILIKAN TANAH WARGA YANG DIDIRIKAN POSYANDU DI RT. 17 SIMPANG III SIPIN	DINKES
				3	PENAMBAHAN PEMASANGAN POLONGAN AIR DI JL. SUNAN BONANG RT. 17 SIMPANG III SIPIN	DPU
				4	PEMBANGUNAN JALAN DI JL. KEMUNING, LR. MULYANA, LR. BAITU SADDAH DAN LORONG AMPING KANTOR LURAH SIMPANG TIGA SIPIN	DPU
				5	PENGAWASAN PEMBUANGAN LIMBAH KE DRAINASE DAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH YANG TIDAK LAGI DIKELOLA BANK SAMPAH	DLH
23	HJ. HENDRIANI, S.Pd	DEMOKRAT	IV	1	PERBAIKAN JALAN RT. 19 JALAN MASUK KE PERUMAHAN KOTA BARU INDAH KELURAHAN BELIUNG	DPU
				2	PELEBARAN DAN PENGASPALAN JALAN, PENGADAAN LPJU DAN PERBAIKAN GORONG -GORONG DI RT. 07 KELURAHAN BELIUNG	DPU
				3	PENGADAAN LPJU DAN PEMBUATAN SEPTITANK DI RT. 06 KELURAHAN BELIUNG	DPRKP
				4	PENGASPALAN JALAN RT. 12 DI DAERAH PATIMURA SEBANYAK 10 LORONG	DPU
				5	PERBAIKAN JALAN LINGKUNGAN DAN PERBAIKAN LPJU DI RT. 45 KELURAHAN BELIUNG	DPU
				6	PENGADAAN LAMPU JALAN DAN TIANG LAMPU JALAN DI RT. 08 KELURAHAN BELIUNG	DPRKP
				7	PERBAIKAN GEDUNG POSYANDU RT. 45 KELURAHAN BELIUNG	DINKES
				8	PEMBANGUNAN DRAINASE DI RT. 22 SAMPAI DENGAN RT. 23 SEPANJANG 200 METER KELURAHAN BELIUNG	DPU
				9	PENGADAAN LAMPU JALAN DAN POSYANDU DI RT. 20,28,31 KELURAHAN BELIUNG	DPRKP
				10	PERBAIKAN JALAN DI RT. 01 KELURAHAN RAWASARI	DPU
				11	PERBAIKAN JALAN DI RT. 07 KELURAHAN MAYANG MANGURAI DI JL. MARGASARI	DPU
				12	PENGASPALAN JALAN DI RT. 18 KELURAHAN RAWASARI DI JL. PINANG PUTIH SEPANJANG 700 METER	DPU

No	Nama Dewan	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD
24	MARIA MAGDALENA,SS	PDI - PERJUANGAN	IV	13	RELOKASI TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH (TPS) DI WILAYAH KELURAHAN BELIUNG	DLH
				14	PERBAIKAN PARIT BUNTU DI RT. 08 KELURAHAN BELIUNG	DPU
				15	PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI RT. 18 KELURAHAN RAWASARI	DLH
				16	KELANCARAN PENGURUSAN KTP DI KECAMATAN KOTA BARU	DKPS
				17	PENGAWASAN PENYALURAN PENDISTRIBUSIAN GAS BERSUBSIDI 3 KG DI RT. 18 KELURAHAN RAWASARI	EKONOMI
				18	PENGADAAN SARANA OLAHRAGA (SENAM PAGI) SETIAP HARI MINGGU DI RT. 06 KELURAHAN BELIUNG	DISPORA
				1	PROSES PENERIMAAN SISWA BARU SESUAI ATURAN YANG TELAH DITETAPKAN	DISDIK
				2	OPTIMALISASI FUNGSI DANA BOS	DISDIK
				3	PENGASPALAN DAN PEMBUATAN SALURAN AIR (PARIT) SERTA LPJU DI DEPAN LANGGAR MUKLISIN DAN DI DEPAN LORONG LANGGAR MUKLISIN DI LR.LANGGAR MUKLISIN RT. 08 KELURAHAN RAWASARI	DPU
				4	PERBAIKAN PENGASPALAN JALAN LR. PRAWIRA DAN LPJU DI SIMPANG LORONG RT. 08 KELURAHAN RAWASARI	DPU
				5	PEMBUATAN PARIT, PERBAIKAN JALAN DAN PERBAIKAN LPJU DUA TITIK DI LR. AIR MANCUR RT. 08 KELURAHAN RAWASARI	DPU + DPRKP
				6	PERBAIKAN PENGASPALAN JALAN DAN PERBAIKAN LPJU SEBANYAK DUA TITIK DI RT. 04 KELURAHAN BAGAN PETE	DPU + DPRKP
				7	PERBAIKAN JALAN 400 METER SERTA PENGASPALAN JALAN DAN PEMBUATAN DRAINASE DI LR. BANK RT. 07 KELURAHAN RAWASARI	DPU
				8	PERUMAHAN MAYANG MANGURAI INDAH SEBELAS TAHUN TIDAK MENDAPATKAN/ TIDAK TERSENTUH PEMERINTAH (PENGASPALAN DAN LPJU)	DPU + DPRKP
				9	PENGECORAN JALAN SETAPAK DI LR. SAWIT TEMBUSAN KE LANGGAR RT. 08 KELURAHAN RAWASARI	DPU
				10	PERBAIKAN JALAN SERTA PERBAIKAN LPJU DUA TITIK DI LR. BERKAH RT. 08 KELURAHAN RAWASARI	DPU + DPRKP

No	Nama Dewan	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD
25	YULIUS NUR, SP	GOLKAR	III	11	PEMBUATAN JEMBATAN, PEMBUATAN KANAL DAN PERBAIKAN JALAN DI RT. 24 KELURAHAN MAYANG MANGURAI	DPU
				12	PENGASPALAN DI LR. JAMBU RT. 07 KELURAHAN BAGAN PETE	DPU
				13	PEMBANGUNAN POSYANDU DI RT. 08 KELURAHAN RAWASARI	DINKES
				14	PEMBANGUNAN POSYANDU DI RT. 04 KELURAHAN BAGAN PETE	DINKES
				15	PENYALURAN UMKM DI RT.08 KELURAHAN RAWASARI	DTKK
				16	PERBAIKAN JALAN DI JL. KENALI RT. 33 KELURAHAN KENALI ASAM BAWAH	DPU
				17	PENGAWASAN PERAMPUNGAN PEMBUATAN GORONG-GORONG, PERBAIKAN JALAN DAN PENGADAAN LPJU DI RT. 33 KELURAHAN KENALI ASAM BAWAH	DPU + DPRKP
				18	PEMBENTUKAN PERDA KHUSUS CSR WILAYAH PERTAMBANGAN (PERTAMINA) UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KENALI ASAM BAWAH	EKONOMI
				19	KELANCARAN PELAYANAN PROSES PENGobatan ATAU PENANGANAN PASIEN YANG MENGGUNAKAN SKTM	DINKES + RSUD
				1	PERBAIKAN JALAN LINGKUNGAN DAN PENGADAAN PEMASANGAN TIANG LISTRIK DI RT. 07 KELURAHAN BAGAN PETE SERTA BANTUAN PERBAIKAN MUSHOLAH	DPU
				2	RENOVASI SERTA PERBAIKAN DRAINASE DI RT. 17 KELURAHAN BAGAN PETE	DPU
				3	PERBAIKAN JALAN (PENGEORAN DAN PENGASPALAN) DI GANG PERUMAHAN PINANG MERAH DI RT. 18 KELURAHAN BAGAN PETE	DPU
				4	PENGAWASAN PENYALURAN GAS BERSUBSIDI 3 KG DI KELURAHAN BAGAN PETE	EKONOMI
				5	BANTUAN PEMBUATAN SERTIFIKAT BERUPA PROGRAM PRONA UNTUK WARGA PERUMAHAN PINANG MERAH KELURAHAN BAGAN PETE	PEM
				6	PEMBUATAN DAN PERBAIKAN DRAINASE SEPANJANG 1500 METER DI JALAN LINGKUNGAN RT. 18 PERUMAHAN PINANG MERAH KELURAHAN BAGAN PETE	DPU
				7	PEMBUATAN PARIT DAN DAM DI PERBATASAN RT. 30 KELURAHAN BAGAN PETE	DPU
				8	PEMBUATAN DAN PENGELOLAAN RUTIN SAMPAH RUMAH TANGGA DI DEPAN PERUMAHAN DI BELIUNG	DLH

No	Nama Dewan	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD
26	H. JEFRIZEN, SE	PDI - PERJUANGAN	III	9	PERBAIKAN JALAN, PEMASANGAN DAN RENOVASI LPJU TIGA TITIK DI RT.31 JALAN MENUJU MTS	DPU + DPRKP
				10	PENGECORAN PENGASPALAN JALAN, PEMBUATAN DAN PERBAIKAN DRAINASE SERTA PEMASANGAN LPJU DI GANG-GANG PERUMAHAN RT. 36	DPU + DPRKP
				1	PENGADAAN PEMASANGAN LPJU DI RT. 35 MAYANG MANGURAI	DPRKP
				2	PEMBANGUNAN PEMBUATAN DRAINASE DI RT. 36 MAYANG MANGURAI	DPU
				3	PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN GAS BERSUBSIDI 3 KG DI MAYANG MANGURAI	EKONOMI
				4	PERBAIKAN JALAN LINGKUNGAN, PENGADAAN LPJU DAN PENANGGULANGAN BANJIR DI RT. 8,35, DAN 40 KELURAHAN MAYANG MANGURAI	DPU + DPRKP
27	SUHERMAN, SE	HANURA	III	5	REALISASI PEMBUATAN JALAN LINGKUNGAN DAN DRAINASE DI RT. 43 KELURAHAN MAYANG MANGURAI	DPU
				6	PENAMBAHAN PERBAIKAN LPJU DI TEMBUSAN MASJID ANNUR DI DAERAH JALAN PERUMAHAN BARCELONA	DPRKP
				1	PENGADAAN PEMASANGAN LPJU DI JALAN TEMBUSAN RT. 72 SEBANYAK DUA TITIK KELURAHAN KENALI BESAR	DPRKP
				2	PEMBUATAN BOX CULVERT UKURAN 4 X 8 METER DI BELAKANG MASJID NURUL IMAN KE JL. ADELWEIS SERTA PEMBUATAN DRAINASE SEPANJANG 350 METER DI RT. 44 KELURAHAN KENALI BESAR	DPU
				3	PENGECORAN DAN PENGASPALAN JALAN LINGKUNGAN SEPANJANG 2.500 METER SERTA PEMASANGAN LPJU SEBANYAK TUJUH TITIK DI RT. 58 KELURAHAN KENALI BESAR	DPU + DPRKP
				4	PEMASANGAN LAMPU JALAN 25 TITIK DAN PEMASANGAN TIANG LAMPU JALAN 22 TITIK DI JL. MERAK RT. 60 KELURAHAN KENALI BESAR	DPRKP
				5	PEMBUATAN DRAINASE, PEMASANGAN LAMPU JALAN 4 TITIK SERTA TIANG JALAN DI JALAN PERUMAHAN LR. KENALI JAYA KELURAHAN KENALI BESAR RT. 53	DPU + DPRKP
				6	PEMBUATAN PARIT JALAN PERUMAHAN GRIYA KENCANA ASRI	DPU

No	Nama Dewan	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD
				7	PERBAIKAN JALAN LR. SEJAHTERA (BOGENVIL) SEPANJANG 100 METER RT. 46 KELURAHAN KENALI BESAR	DPU
				8	PERBAIKAN JALAN LR. DAMAI SEPANJANG 100 METER RT. 46 KELURAHAN KENALI BESAR	DPU
				9	PERBAIKAN PARIT PERUMAHAN LOTUS 30 METER RT. 69 KELURAHAN KENALI BESAR	DPU
				10	PENGERASAN/ KONBLOK HALAMAN SD NEGERI 222	DISDIK
				11	PEMASANGAN LPJU SEBANYAK 11 TITIK RT. 69 KELURAHAN KENALI BESAR	DPRKP
				12	PEMASANGAN LPJU 7 TITIK DI RT. 50 KELURAHAN KENALI BESAR	DPRKP
				13	PEMBANGUNAN POSYANDU RT. 16 KELURAHAN KENALI BESAR	DINKES
				14	PENGASPALAN JALAN LR. HARAPAN, LR. KELUARGA DAN PEMASANGAN LAMPU JALAN RT. 16 KELURAHAN KENALI BESAR	DPU + DPRKP
				15	PERBAIKAN JALAN LR. SEI. BENGKAL 750 METER MENUJU MASJID SERTA PEMBUATAN DAN PERBAIKAN DRAINASE SERTA PEMASANGAN PENGADAAN LPJU DI RT. 71 KELURAHAN KENALI BESAR	DPU + DPRKP
				16	PEMBUATAN PARIT JALAN LR. SERAI SERUMPUN 300 METER DI RT. 07 KELURAHAN KENALI BESAR	DPU
				17	PERAMPUNGAN JL. SERAI SERUMPUN DAN JL. BESTIKA RT. 07 KELURAHAN KENALI BESAR	DPU
				18	PEMBUATAN DRAINASE LR. BASAMO 300 METER DAN PENGADAAN PEMASANGAN LPJU 3 TITIK RT.39 KELURAHAN KENALI BESAR	DPU
				19	PEMBUATAN PARIT JALAN LR. MANGGA 70 METER DI RT. 41 KELURAHAN KENALI BESAR	DPU
				20	PERBAIKAN DRAINASE PERUMAHAN GRIYA KENALI JAYA 200 METER RT. 59 KELURAHAN KENALI BESAR	DPU
				21	PERBAIKAN PARIT DEPAN SPBU KENALI BESAR DAN DEPAN UNITED TRAKTOR RT. 43	DPU
				22	PERAMPUNGAN PENGASPALAN JALAN RT. 66 KELURAHAN KENALI BESAR SEPANJANG 500 METER	DPU

No	Nama Dewan	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD
28	JASRUL, S.Ag	GERINDRA	IV	23	PERAMPUNGAN PENGASPALAN JALAN RT. 55 KELURAHAN KENALI BESAR SEPANJANG 1.500 METER	DPU
				24	PENGASPALAN JALAN LR. KELUARGA RT. 01 KELURAHAN KENALI BESAR 70 METER	DPU
				25	PENGASPALAN JALAN LR. GANG SALAM RT. 40 KENALI BESAR 150 METER	DPU
				1	BANTUAN RENOVASI PENAMBAHAN PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH PAUD SERTA INSTALASI LISTRIK DI RT. 25 KELURAHAN KENALI ASAM ATAS	DISDIK
29	H.MUSTAMAR, SE	DEMOKRAT	II	2	REALISASI USULAN PROPOSAL YANG DI TERUSKAN KECAMATAN KE BAPPEDA SEKITAR 50 ITEM PENGAJUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN LPJU BELUM TEREALISASI DI KELURAHAN KENALI ASAM ATAS	DPU
				3	PEMASANGAN JARINGAN INSTALASI GAS CITY DI KELURAHAN KENALI ASAM ATAS	
				4	BANTUAN UNTUK MENGOPTIMALKAN PELAYANAN PDAM DI KELURAHAN KENALI ASAM ATAS	DPU
				1	PERBAIKAN GORONG-GORONG DI DEKAT MASJID RT. 08 KELURAHAN BAGAN PETE	DPU
				2	PENGAWASAN TERHADAP RUKO-RUKO YANG TIDAK MEMBUAT PARIT-PARIT DI RT. 08 KELURAHAN BAGAN PETE	DPMPTSP
				3	PENAMBAHAN PEMASANGAN TIANG LISTRIK DI RT.28 KELURAHAN MAYANG MANGURAI	DPRKP
				4	PERAMPUNGAN PEMBUATAN JALAN SEPANJANG 50 METER YANG SEMULA BERASAL DARI PROGRAM PNPM DI LR. SULTAN THAHA RT. 31 KELURAHAN BAGAN PETE	DPU
				5	PENGASPALAN JL. POLIKTEKNIK RT. 04 KELURAHAN BAGAN PETE	DPU
				6	PERAMPUNGAN JALAN DARI PROGRAM BANGKIT BERDAYA SEPANJANG 1.350 METER BARU TEREALISASI 50 METER DI LR. SEPAKAT DEPAN MADRASAH DAN TPU DI RT. 04 KELURAHAN BAGAN PETE	KEC
				7	PENGGANTIAN TIANG LISTRIK KAYU MENJADI BETON DI RT. 19 KELURAHAN BAGAN PETE	DPRKP
				8	PENAMBAHAN PEMBANGUNAN RUANGAN KELAS BELAJAR DI SD NEGERI 211	DISDIK

No	Nama Dewan	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD
30	EFRON PURBA, SE	GERINDRA	III	9	PENGADAAN PEMASANGAN LPJU DI PERUMAHAN CIPTA PESONA RT. 05 SEKITAR 6 TITIK	DPRKP
				10	PENGANTIAN TIANG LISTRIK KAYU MENJADI BETON KURANG LEBIH 200 TIANG DI RT. 23 DAN REALISASI USULAN 3 PAKET JALAN PADA TAHUN 2015	DPRKP
				11	PEMASANGAN LPJU DAN PEMBUATAN JALAN MENUJU MTS DI RT. 23 KELURAHAN BAGAN PETE	DPU + DPRKP
				12	HIMBAUAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGEMBANG PERUMAHAN AGAR MENYEDIAKAN FASILITAS UMUM (TPU)	DPMPTSP
				13	PERAMPUNGAN REALISASI PENGASPALAN JALAN LR. MELATI SEPANJANG 800 METER RT. 21 KELURAHAN BAGAN PETE DAN PENGADAAN PEMASANGAN TIANG LISTRIK	DPU
				14	PEMASANGAN INSTALASI JARINGAN GAS RUMAH TANGGA DI KELURAHAN BAGAN PETE	
				15	PEMASANGAN INSTALASI PDAM DI RT. 05 KELURAHAN BAGAN PETE	DPU
				16	PEMASANGAN LPJU DI LR. KOMANDO JL. PARIBAKTI RT. 09 BAGAN PETE	DPRKP
				1	PEMASANGAN LPJU DI SIMPANG IV PERUMAHAN PERMATA BIRU SEBANYAK 3 TITIK BAGAN PETE	DPRKP
				2	PENERTIBAN DAN PENDATAAN PERUMAHAN YANG TIDAK MEMILIKI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGAN PETE	BPPRD
				3	PENATAAN JARINGAN LISTRIK DI RT. 18 BAGAN PETE	
				4	PERBAIKAN JALAN LINGKUNGAN DAN SALURAN AIR DI RT. 18 BAGAN PETE	DPU
				5	PERBAIKAN PENATAAN KABEL LISTRIK DAN PENAMBAHAN PEMASANGAN TIANG LISTRIK DI UJUNG JALAN LR. MELATI 1 DAN 2 RT. 18 BAGAN PETE	
				6	PERBAIKAN PARIT JALAN POROS RT. 32 BAGAN PETE	DPU
				7	PERBAIKAN JALAN MENUJU PERUMAHAN PINANG MERAH DAN PERMATA BIRU DI 3 TITIK KELURAHAN BAGAN PETE	DPRKP
				8	PEMASANGAN TIANG LISTRIK DAN LAMPU JALAN DI JL. MAWAR 4 BAGAN PETE	DPRKP
				9	PEMBUATAN DAN PEMBENAHAN TEMPAT SAMPAH DI RT. 18 BAGAN PETE	DLH

No	Nama Dewan	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD
31	H. MUHAMMAD NASIR,	DEMOKRAT	IV	10	AIR PDAM TIDAK MENGALIR DI RT. 18 SEMENTARA BIAYA BEBAN TERUS DIBAYAR TIAP BULAN	DPU
				1	BANTUAN PENGAWASAN TERHADAP PENDUDUK KELUAR DAN MASUK YANG DIHARAPKAN DAPAT MEMBANTU KETUA RT UNTUK MENELUSURI DATA KETIKA ADA PENDUDUK YANG MENGAJUKAN PERSYARATAN MENIKAH ATAUPUN PEMBUATAN PASPORT	KEC
				2	PENGAWASAN TERHADAP PROSES PENDATAAN DAN PENCETAKAN KTP YANG SALAH ORANG	DKPS
				3	PERAMPUNGAN PAGAR TEMPAT PEMAKAMAN UMUM KURANG LEBIH 100 METER DI RT. 02 KELURAHAN PENYENGAT RENDAH	DPRKP
				4	PERBAIKAN JALAN DI RT. 01, 17, 02 DAN 04 DI KELURAHAN BULURAN KENALI	DPU
				5	PEMBANGUNAN TURAP DI RT. 01 KELURAHAN BULURAN KENALI	DPU
				6	PEMBUATAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH (TPS) DI RT. 01 KELURAHAN PENYENGAT RENDAH	DLH
				7	BANTUAN MOBIL CONTAINER (ARM ROLL) DI RT. 12 KELURAHAN PENYENGAT RENDAH	-
				8	PENAMBAHAN DAN PEMASANGAN TIANG LISTRIK DI RT.08 DAN 09 ULU GEDONG KEC DANAU TELUK	DPRKP
				9	PERBAIKAN DAN PENAMBAHAN JALAN SETAPAK DI RT.08 KEL.ULU GEDONG KEC.DANAU TELUK	DPU
				10	PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN PAGAR TPU KEL.ULU GEDONG	DPRKP
				11	PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN TPU KEL.TANJUNG PASIR	DPRKP
				12	PERBAIKAN ATAU REHAP JALAN SETAPAK RT.04 KEL ULU GEDOG	DPU
				13	PEMBANGUNAN ATAU REHAP GEDUNG KESENIAN DAN ADAT KEC.DANAU TELUK	DPK
				14	PENAMBAHAN DAN PEMASANGAN TIANG LISTRIK SERTA LAMPU JALAN SEBANYAK 16 TIANG DI RT. 12 KELURAHAN PENYENGAT RENDAH LR. KENIDAI	DPRKP

No	Nama Dewan	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD
32	Ir. M.A. FAUZI	PDI - PERJUANGAN	II	1	PERBAIKAN JALAN DI RT. 15 KELURAHAN SUNGAI PUTRI	DPU
				2	PERBAIKAN DRAINASE DAN PARIT JALAN YANG PATAH DI RT. 16 KELURAHAN SUNGAI PUTRI	DPU
				3	PERBAIKAN DRAINASE DI RT. 20 KELURAHAN SUNGAI PUTRI	DPU
				4	PERBAIKAN JALAN DI LR.PURNAWIRA RT. 21 KELURAHAN SUNGAI PUTRI	DPU
				5	PENGASPALAN SEPANJANG 200 METER DAN PERBAIKAN IRIGASI DI RT. 21 KELURAHAN SUNGAI PUTRI	DPU
				6	REALISASI PENGASPALAN JALAN DI RT. 22 KELURAHAN SUNGAI PUTRI	DPU
				7	PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN GAS BERSUBSIDI 3 KG DI KELURAHAN SUNGAI PUTRI	EKONOMI
				8	PENGAWASAN PENYALURAN BANTUAN RASTRA DI KELURAHAN SUNGAI PUTRI	EKONOMI
33	BAMBANG GUNAWAN,	GOLKAR	III	1	PEMASANGAN LPJU DAN PERBAIKAN DRAINASE DI RT. 16 KELURAHAN SIMPANG IV SIPIN	DPU + DPRKP
				2	PERBAIKAN JALAN LINGKUNGAN YANG MERUPAKAN JALAN AKSES MENUJU SMP NEGERI 7 SERTA PENGADAAN PEMASANGAN LPJU DI DEPAN MASJID RT. 24 KELURAHAN SIMPANG IV IPIN	DPU + DPRKP
				3	PENERTIBAN DAN PENGAWASAN PABRIK PENGOLAHAN KAYU	DPMPSTP
				4	PELEBARAN JALAN RD. P. KOLOPAKING KELURAHAN SIMPANG IV SIPIN YANG PADAT DIPAGI HARI KARENA MERUPAKAN AKSES JALAN KE KANTOR BULOG, DINAS PEPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI JAMBI	DPU
				5	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN DAN PEMBUATAN TPS (TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH) UNTUK EMPAT RT DI KOMP. PERMATA CITRA IV RT. 18 KELURAHAN BULURAN KENALI	DPU + DLH
				6	PERBAIKAN JALAN DI RT. 01 KELURAHAN TELUK KENALI SEPANJANG 63 METER	DPU
				7	BANTUAN UNTUK UKM BERUPA TEMPAT PENJUALAN IKAN DAN BUAH-BUAHAN SERTA TIMBANGAN	DTKK
				8	BANTUAN MODAL , BIBIT DAN KERAMBAH IKAN SERTA PERLENGKAPANNYA	DKPP
				9	PELEBARAN JALAN DI RT. 22 SIMPANG EMPAT SINJAI	DPU

No	Nama Dewan	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD
34	H. CANDRA JOHAN	PPP	III	10	PENGAWASAN PENYALURAN RASKIN, KIS DAN BLT YANG TIDAK TEPAT SASARAN DI RT. 16 SIMPANG IV SIPIN	EKONOMI
				11	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MASYARAKAT (BPJS KESEHATAN)	DINKES
				12	BANTUAN GEROBAK SAMPAH DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN TELUK KENALI	DLH
				1	PERBAIKAN DAN PEMBUATAN DRAINASE DILINGKUNGAN RT. 04 KELURAHAN PEMATANG SULUR KURANG LEBIH 600 METER	DPU
				2	PENGASPALAN JALAN LINGKUNGAN DI RT. 04 KELURAHAN PEMATANG SULUR JL. PELANGI 1,2 DAN 3 KURANG LEBIH 800 METER	DPU
				3	PERBAIKAN JALAN DI JL. A.THALIB DARI JL. YULIUS USMAN MENUJU LAPANGAN GOLF DAN KANTOR PU PROVINSI RT. 23 KELURAHAN PEMATANG SULUR	DPU
				4	NORMALISASI PERBAIKAN SALURAN AIR DARI JL. YULIUS USMAN MELINTASI KOMPLEK KEHUTANAN GOLF 1 DAN GOLF 3 BERAKHIR DISAMPING LAPANGAN GOLF	DPU
				5	RENOVASI BOX CULVERT DI SAMPING LAPANGAN GOLF AGAR DITINGGIKAN DAN DIPERBESAR	DPU
				6	PENGASPALAN JL. DEPAN MASJID A. RAHMAN DI JL. YULIUS USMAN RT. 23 KELURAHAN PEMATANG SULUR	DPU
				7	PENGASPALAN JALAN ALTERNATIF DARI JL. YULIUS USMAN (DEPAN KOMPLEK GURU) MENUJU JL.PATIMURA (DEPAN RCTI)	DPU
				8	PENGASPALAN JALAN LINGKUNGAN, PERBAIKAN DAN PEMBUATAN DRAINASE DI RT. 21 KELURAHAN PEMATANG SULUR	DPU
				9	PENGASPALAN JALAN LINGKUNGAN DI JL.PAKIS 2 RT. 06 KELURAHAN PEMATANG SULUR SEPANJANG 250 METER	DPU
				10	PENGASPALAN JL. BUNGA RAYA RT. 06 KELURAHAN PEMATANG SULUR SEPANJANG 300 METER	DPU
				11	PEMBUATAN TURAP DI TANAH PEMAKAMAN UMUM PEMATANG SULUR RT. 17	DPU
				12	PENAMBAHAN JAM PELAJARAN AGAMA ISLAM DI SETIAP SEKOLAH NEGERI	DISDIK

No	Nama Dewan	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD
35	RS. PRAYOGIE, S. KOM	DEMOKRAT	IV	13	PENAMBAHAN SEKOLAH MADRASAH NEGERI	DISDIK
				14	PENGADAAN PELATIHAN -PELATIHAN UNTUK KETENAGA KERJAAN YANG BEKERJA SAMA DENGAN BLK PROVINSI JAMBI UNTUK MASYARAKAT KOTA JAMBI	DTKK
				15	PEMBUATAN BAK SAMPAH UNTUK WARGA RT. 18 KELURAHAN PEMATANG SULUR	DLH
				16	PENAMBAHAN LAMPU JALAN DI SEPANJANG JL. DEPARTI PURBO DAN LINGKUNGAN RT. 18 KELURAHAN PEMATANG SULUR	DPRKP
				1	PENERTIBAN USAHA WARNET AGAR ANAK SEKOLAH TIDAK ADA YANG BERMAIN SAAT JAM SEKOLAH BERLANSUNG	DPMPTSP
				2	REALISASI PEMASANGAN PDAM DI RT. 17 KELURAHAN PEMATANG SULUR	DPU
				3	PENGAWASAN PELAYANAN SARANA KESEHATAN DI PUSKESMAS PEMBANTU YANG DIJADIKAN PUSKESMAS INDUK	DINKES
				4	PERBAIKAN JALAN DI LORONG - LORONG RT. 18 KELURAHAN PEMATANG SULUR	DPU
				5	PEMBANGUNAN DRAINASE DI RT. 19 KELURAHAN PEMATANG SULUR YANG MERUPAKAN JALAN AKSES MENUJU MASJID NURUL IKLAS	DPU
				6	PENGADAAN PANGKALAN DAN DISTRIBUSI GAS BERSUBSIDI 3 KG DI KELURAHAN PEMATANG SULUR	EKONOMI
36	UMAR FARUK, A.Md	GERINDRA	II	7	PERBAIKAN DRAINASE DI DEKAT LAPANGAN GOLF ARAH MENUJU KE KANTOR KPU	DPU
				1	PERBAIKAN JALAN DI DAERAH PERTANIAN KELURAHAN OLAK KEMANG RT.09,10 DAN 12 YANG TERHUBUNG DENGAN JL. PUTING	DPU
				2	PENGADAAN DAN PEMASANGAN TIANG LISTRIK DAN LAMPU JALAN DI RT. 09 KELURAHAN OLAK KEMANG SEBANYAK SATU TITIK	DPRKP
37	SONY ZAINUL H, SH	HANURA	I	3	PERBAIKAN DAN PENAMBAHAN JALAN SETAPAK DI RT.09 ULU GEDONG	DPU
				1	PEMBUATAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH PERMANEN DI RT. 03 KELURAHAN SELAMAT	DLH
				2	PERBAIKAN DRAINASE DI RT. 03 KELURAHAN SELAMAT	DPU
				3	KENAIKAN HONOR KETUA RT	KEC

No	Nama Dewan	Fraksi	Komisi	Pokir		OPD
38	SULAIMAN SYAWAL, S.	PKB	II	4	PERBAIKAN JALAN LORONG DI RT. 02 KELURAHAN SELAMAT	DPU
				1	REALISASI PEMBANGUNAN JALAN KE MASJID NURUDDIN RT. 24 KELURAHAN LEGOK	DPU
				2	PEMBUATAN SARANA OLAH RAGA BERUPA SARPRAS DI RT. 24 KELURAHAN LEGOK	DISPORA
				3	PERBAIKAN JALAN DAN PEMBUATAN DRAINASE DI SEKITAR MASJID RT. 01 KELURAHAN PEMATANG SULUR	DPU
				4	BANTUAN PINJAMAN KENDARAAN GEROBAK RODA TIGA UNTUK PENGANKUTAN SAMPAH DI KOMP. TELANAI INDAH RT. 07 KELURAHAN PEMATANG SULUR	DLH
				5	BANTUAN RENOVASI SARANA OLAH RAGA LAPANGAN TENIS DI KOMP. TELANAI INDAH RT. 07 KELURAHAN PEMATANG SULUR	DISPORA
				6	PEMBUATAN TEMPAT SAMPAH DI SETIAP RT KELURAHAN PEMATANG SULUR	DLH
				7	PEMBUATAN PANGKALAN GAS BERSUBSIDI 3 KG DI RT. 01 KELURAHAN PENYENGAT RENDAH	EKONOMI
39	ACHMAD RASYID	PAN	IV	8	PERAMPUNGAN PEMBANGUNAN LANJUTAN PAGAR TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) HIDAYATULLAH RT. 01 KELURAHAN PENYENGAT RENDAH	DPRKP
				1	PENAMBAHAN DAN PENDATAAN KEMBALI PENERIMA RASTRA DAN BANSOS KHUSUSNYA DI KELURAHAN LEGOK	EKONOMI
				2	PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN GAS BERSUBSIDI 3 KG KELURAHAN LEGOK	EKONOMI
				3	REALISASI PENERAPAN SEKOLAH GRATIS	DISDIK

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun 2019

Berdasarkan Urusan Pemerintah

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.	URUSAN WAJIB	544,595,291,750.00		
1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	459,691,802,500.00		
1.01.01.	PENDIDIKAN	95,344,054,000.00		
1.01.01.01.	Dinas Pendidikan	95,344,054,000.00		
1.01.01.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,343,141,700.00		
1.01.01.01.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	00.00		
1.01.01.01.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	375,000,000.00		
1.01.01.01.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	35,000,000.00		
1.01.01.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1,109,860,000.00		
1.01.01.01.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	198,500,000.00		
1.01.01.01.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	46,641,700.00		
1.01.01.01.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15,000,000.00		
1.01.01.01.01.1	Penyediaan peralatan rumah tangga	25,000,000.00		
1.01.01.01.01.1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,200,000.00		
1.01.01.01.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	75,000,000.00		
1.01.01.01.01.1	Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	3,620,700,000.00		
1.01.01.01.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	174,240,000.00		
1.01.01.01.01.2	Perjalanan Dinas	663,000,000.00		
1.01.01.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	954,049,800.00		
1.01.01.01.02.0	Pembangunan gedung kantor	00.00		
1.01.01.01.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	00.00		
1.01.01.01.02.1	Pengadaan mebeleur	152,790,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.01.01.01.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	00.00		
1.01.01.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	204,703,200.00		
1.01.01.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	534,243,600.00		
1.01.01.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	29,313,000.00		
1.01.01.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	33,000,000.00		
1.01.01.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	117,895,000.00		
1.01.01.01.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	117,895,000.00		
1.01.01.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	278,024,000.00		
1.01.01.01.05.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	132,207,000.00		
1.01.01.01.05.0	Penilaian Angka Kredit	145,817,000.00		
1.01.01.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	00.00		
1.01.01.01.06.0	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	00.00		
1.01.01.01.06.1	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	00.00		
1.01.01.01.08	Perencanaan SKPD	00.00		
1.01.01.01.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	00.00		
1.01.01.01.09	Pengembangan Data/Informasi	212,270,000.00		
1.01.01.01.09.0	Pengembangan Data/Informasi	212,270,000.00		
1.01.01.01.10	Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan	87,438,673,500.00		
1.01.01.01.10.0	Penyelenggara Akreditasi SD	38,962,500.00		
1.01.01.01.10.0	Workshop Penguatan dan Implementasi Kurikulum PAUD dan DIKMAS Serta Penilaian Pelaksanaan Kurikulum	318,503,000.00		
1.01.01.01.10.0	Peningkatan Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan DIKMAS	40,630,000.00		
1.01.01.01.10.0	Pengelolaan bantuan Operasional PAUD	1,282,735,500.00		
1.01.01.01.10.0	Peningkatan Minat Bakat Peserta Didik PAUD dan DIKMAS	338,813,000.00		
1.01.01.01.10.0	Workshop Penguatan dan Implementasi Kurikulum SD Serta Penilaian Pelaksanaan	98,281,000.00		
1.01.01.01.10.0	Peningkatan Sarana Prasarana SD	977,931,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.01.01.01.10.0	Pengembangan Kelembagaan SD	98,612,000.00		
1.01.01.01.10.0	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah SD	49,782,445,000.00		
1.01.01.01.10.1	Peningkatan Minta Bakat, Lomba Kreativitas, Olahraga Peserta Didik SD	337,067,000.00		
1.01.01.01.10.1	Penyelenggaraan Try Out dan Ujian Sekolah SD	238,561,000.00		
1.01.01.01.10.1	Perlindungan, Penghargaan dan Apresiasi Peserta Didik SD Berprestasi Tingkat Nasional	269,462,700.00		
1.01.01.01.10.1	Workshop Penguatan dan Implementasi Kurikulum SMP Serta Penilaian Pelaksanaan Kurikulum	192,020,000.00		
1.01.01.01.10.1	Peningkatan Sarana Prasarana SMP	6,606,605,600.00		
1.01.01.01.10.1	Pengembangan Kelembagaan SMP	111,233,000.00		
1.01.01.01.10.1	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah SMP	24,620,296,000.00		
1.01.01.01.10.1	Peningkatan Minat Bakat, Lomba Kreativitas, Olahraga Peserta Didik SMP	470,069,000.00		
1.01.01.01.10.1	Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru	168,819,000.00		
1.01.01.01.10.1	Penyelenggaraan Try Out dan Ujian Nasional SMP	15,535,000.00		
1.01.01.01.10.2	Penyelenggaraan Akreditasi SMP	00.00		
1.01.01.01.10.2	Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan	100,324,000.00		
1.01.01.01.10.2	Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengelola dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS	154,685,000.00		
1.01.01.01.10.2	Penyelenggaraan Akreditasi PAUD dan DIKMAS	40,132,500.00		
1.01.01.01.10.2	Penyelenggaraan Pengembangan PAUD dan DIKMAS	183,876,000.00		
1.01.01.01.10.2	Orientasi Calon Kepala Sekolah, Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah SD	00.00		
1.01.01.01.10.2	Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengawas SD, Tenaga Administrasi Sekolah, Tenaga Perpustakaan SD	43,475,000.00		
1.01.01.01.10.2	Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengawas , Tenaga Administrasi Sekolah, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Laboratorium SMP	00.00		
1.01.01.01.10.2	Rapat Koordinasi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Publikasi Pendidikan	246,150,000.00		
1.01.01.01.10.2	Perlindungan, Penghargaan dan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Tingkat Nasional	197,317,500.00		
1.01.01.01.10.3	Sosialisasi Tunjangan Profesi Guru	51,613,200.00		
1.01.01.01.10.3	Penguatan MGMP, KKG, MKKS, MKPS, KKPS	65,597,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.01.01.01.10.3	Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup	348,922,000.00		
1.01.02.	KESEHATAN	107,838,775,000.00		
1.01.02.01.	Dinas Kesehatan	63,799,525,000.00		
1.01.02.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,562,333,500.00		
1.01.02.01.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,000,413,500.00		
1.01.02.01.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	50,000,000.00		
1.01.02.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	811,600,000.00		
1.01.02.01.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	412,040,000.00		
1.01.02.01.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	110,000,000.00		
1.01.02.01.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	120,000,000.00		
1.01.02.01.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15,000,000.00		
1.01.02.01.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	80,000,000.00		
1.01.02.01.01.1	Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	554,400,000.00		
1.01.02.01.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	638,880,000.00		
1.01.02.01.01.2	Perjalanan Dinas	770,000,000.00		
1.01.02.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,183,900,000.00		
1.01.02.01.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	19,500,000.00		
1.01.02.01.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	162,000,000.00		
1.01.02.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	180,000,000.00		
1.01.02.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	432,400,000.00		
1.01.02.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	190,000,000.00		
1.01.02.01.02.4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	200,000,000.00		
1.01.02.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	102,600,000.00		
1.01.02.01.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	102,600,000.00		
1.01.02.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	202,549,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.01.02.01.05.0	Pendidikan dan pelatihan formal	151,754,000.00		
1.01.02.01.05.0	Perumusan produk hukum	15,000,000.00		
1.01.02.01.05.1	Pengembangan sistem informasi kepegawaian dan ketatausahaan	35,795,000.00		
1.01.02.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,000,000.00		
1.01.02.01.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5,000,000.00		
1.01.02.01.08	Perencanaan SKPD	10,000,000.00		
1.01.02.01.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	10,000,000.00		
1.01.02.01.09	Pengembangan Data/Informasi	80,686,450.00		
1.01.02.01.09.0	Pengembangan Data/Informasi	80,686,450.00		
1.01.02.01.10	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	57,652,456,050.00		
1.01.02.01.10.0	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	507,800,000.00		
1.01.02.01.10.0	Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit	78,443,000.00		
1.01.02.01.10.0	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	2,109,502,000.00		
1.01.02.01.10.0	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar	121,905,000.00		
1.01.02.01.10.0	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat dan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu	7,739,307,000.00		
1.01.02.01.10.0	Operasional BLUD Puskesmas	29,529,587,550.00		
1.01.02.01.10.0	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	5,406,773,000.00		
1.01.02.01.10.0	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	114,778,200.00		
1.01.02.01.10.0	Penyuluhan dan Pengembangan Media Promosi Kesehatan	161,335,000.00		
1.01.02.01.10.1	Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	186,700,000.00		
1.01.02.01.10.1	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	119,653,000.00		
1.01.02.01.10.1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Keluarga Berencana	22,500,000.00		
1.01.02.01.10.1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak, Remaja, dan Lansia	112,100,000.00		
1.01.02.01.10.1	Penyehatan Lingkungan	272,712,500.00		
1.01.02.01.10.1	Peningkatan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga	61,595,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.01.02.01.10.1	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	501,570,000.00		
1.01.02.01.10.1	Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung	150,320,000.00		
1.01.02.01.10.1	Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Pelayanan Kesehatan Jiwa	70,600,000.00		
1.01.02.01.10.1	Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	70,825,000.00		
1.01.02.01.10.2	Peningkatan Surveilans Epidermiologi dan Penanggulangan Wabah	58,600,000.00		
1.01.02.01.10.2	Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas	9,955,849,800.00		
1.01.02.01.10.2	Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas/Pustu APBD	230,000,000.00		
1.01.02.01.10.2	Pembinaan Organisasi PMI Kota Jambi	70,000,000.00		
1.01.02.01.10.2	Bantuan Operasional Kesehatan	00.00		
1.01.02.02.	Rumah Sakit Umum Daerah	44,039,250,000.00		
1.01.02.02.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,905,950,000.00		
1.01.02.02.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	00.00		
1.01.02.02.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	502,350,000.00		
1.01.02.02.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	00.00		
1.01.02.02.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	00.00		
1.01.02.02.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	00.00		
1.01.02.02.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	00.00		
1.01.02.02.01.1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	00.00		
1.01.02.02.01.1	Penyediaan bahan logistik kantor	00.00		
1.01.02.02.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	00.00		
1.01.02.02.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	1,083,600,000.00		
1.01.02.02.01.2	Perjalanan Dinas	320,000,000.00		
1.01.02.02.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	00.00		
1.01.02.02.02.0	Pembangunan gedung kantor	00.00		
1.01.02.02.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	00.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.01.02.02.02.1	Pengadaan mebeleur	00.00		
1.01.02.02.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	00.00		
1.01.02.02.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	00.00		
1.01.02.02.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	00.00		
1.01.02.02.02.4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	00.00		
1.01.02.02.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	00.00		
1.01.02.02.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	00.00		
1.01.02.02.03.0	Pengadaan pakaian kerja lapangan	00.00		
1.01.02.02.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	174,500,000.00		
1.01.02.02.05.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	174,500,000.00		
1.01.02.02.05.0	Penilaian Angka Kredit	00.00		
1.01.02.02.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	00.00		
1.01.02.02.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	00.00		
1.01.02.02.08	Perencanaan SKPD	00.00		
1.01.02.02.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	00.00		
1.01.02.02.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	00.00		
1.01.02.02.10	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	41,958,800,000.00		
1.01.02.02.10.2	Pengendalian Mutu Pelayanan Rumah Sakit	3,754,800,000.00		
1.01.02.02.10.2	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	00.00		
1.01.02.02.10.2	Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit dan Alat-alat Kesehatan Lainnya	00.00		
1.01.02.02.10.2	Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit	00.00		
1.01.02.02.10.2	Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan	576,000,000.00		
1.01.02.02.10.3	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Rumah Sakit dan Tenaga Teknis Rumah Saklt	1,128,000,000.00		
1.01.02.02.10.3	Dukungan Pelayanan BLUD	36,500,000,000.00		
1.01.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	207,926,878,500.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.01.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	207,926,878,500.00		
1.01.03.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,646,855,000.00		
1.01.03.01.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	00.00		
1.01.03.01.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	447,800,000.00		
1.01.03.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1,258,500,000.00		
1.01.03.01.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	150,300,000.00		
1.01.03.01.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	53,000,000.00		
1.01.03.01.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24,000,000.00		
1.01.03.01.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10,000,000.00		
1.01.03.01.01.1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1,135,000.00		
1.01.03.01.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	15,000,000.00		
1.01.03.01.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	87,120,000.00		
1.01.03.01.01.2	Perjalanan Dinas	600,000,000.00		
1.01.03.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,410,850,000.00		
1.01.03.01.02.1	Pengadaan mebeleur	136,500,000.00		
1.01.03.01.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	839,700,000.00		
1.01.03.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50,000,000.00		
1.01.03.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	560,650,000.00		
1.01.03.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15,000,000.00		
1.01.03.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	30,000,000.00		
1.01.03.01.02.4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	779,000,000.00		
1.01.03.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	162,500,000.00		
1.01.03.01.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	162,500,000.00		
1.01.03.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	200,000,000.00		
1.01.03.01.05.0	Pendidikan dan pelatihan formal	200,000,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.01.03.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	00.00		
1.01.03.01.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	00.00		
1.01.03.01.08	Perencanaan SKPD	10,000,000.00		
1.01.03.01.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	10,000,000.00		
1.01.03.01.09	Pengembangan Data/Informasi	5,964,000.00		
1.01.03.01.09.0	Pengembangan Data/Informasi	5,964,000.00		
1.01.03.01.10	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	103,654,472,500.00		
1.01.03.01.10.0	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan	47,733,117,400.00		
1.01.03.01.10.0	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Berbasis Usulan Masyarakat	7,500,000,000.00		
1.01.03.01.10.0	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Status Kota	35,636,380,100.00		
1.01.03.01.10.0	Pemeliharaan dan Pembangunan Jembatan	10,349,575,000.00		
1.01.03.01.10.0	Operasional dan Pemeliharaan Unit Pengelola Campuran Aspal	2,435,400,000.00		
1.01.03.01.11	Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	12,501,300,000.00		
1.01.03.01.11.0	Pembangunan / Peningkatan Jaringan Sungai, Saluran Drainase, Gorong-gorong dan Irigasi	7,501,300,000.00		
1.01.03.01.11.0	Pembangunan / Peningkatan Jaringan Sungai, Saluran Drainase, Gorong-gorong dan Irigasi Berbasis Usulan Masyarakat	5,000,000,000.00		
1.01.03.01.12	Pembangunan, Pemeliharaan dan Perluasan Utilitas Perkotaan	81,779,684,300.00		
1.01.03.01.12.0	Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Pemukiman Penduduk	20,300,656,000.00		
1.01.03.01.12.0	Pengembangan Sistem Distribusi Jaringan Air Bersih/Air Minum	7,252,601,000.00		
1.01.03.01.12.0	Pembangunan Gedung / Utilitas Pemerintah	31,548,223,500.00		
1.01.03.01.12.0	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Angkutan	15,172,417,050.00		
1.01.03.01.12.0	Peningkatan Operasional TPA	5,769,598,500.00		
1.01.03.01.12.0	Peningkatan Operasional IPLT	1,736,188,250.00		
1.01.03.01.13	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	258,097,000.00		
1.01.03.01.13.0	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	258,097,000.00		
1.01.03.01.14	Perencanaan Tata Ruang	201,250,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.01.03.01.14.1	Penataan Tata Ruang	201,250,000.00		
1.01.03.01.15	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Berbasis Kawasan	4,095,905,700.00		
1.01.03.01.15.0	Perencanaan, Koordinasi, dan Pengawasan bidang ke PUan	4,015,905,700.00		
1.01.03.01.15.0	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	80,000,000.00		
1.01.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	30,876,480,000.00		
1.01.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	30,876,480,000.00		
1.01.04.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,192,244,000.00		
1.01.04.01.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000.00		
1.01.04.01.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136,200,000.00		
1.01.04.01.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15,000,000.00		
1.01.04.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	317,244,000.00		
1.01.04.01.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	75,900,000.00		
1.01.04.01.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	20,000,000.00		
1.01.04.01.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20,000,000.00		
1.01.04.01.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,000,000.00		
1.01.04.01.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	25,000,000.00		
1.01.04.01.01.1	Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	215,820,000.00		
1.01.04.01.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	58,080,000.00		
1.01.04.01.01.2	Perjalanan Dinas	300,000,000.00		
1.01.04.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	330,740,000.00		
1.01.04.01.02.1	Pengadaan mebeleur	00.00		
1.01.04.01.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	10,000,000.00		
1.01.04.01.02.1	Pembangunan gudang kantor	00.00		
1.01.04.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	305,740,000.00		
1.01.04.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	15,000,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.01.04.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	40,500,000.00		
1.01.04.01.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	40,500,000.00		
1.01.04.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	55,000,000.00		
1.01.04.01.05.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	55,000,000.00		
1.01.04.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7,000,000.00		
1.01.04.01.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7,000,000.00		
1.01.04.01.08	Perencanaan SKPD	25,000,000.00		
1.01.04.01.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	15,000,000.00		
1.01.04.01.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	10,000,000.00		
1.01.04.01.09	Pengembangan Data/Informasi	15,000,000.00		
1.01.04.01.09.0	Pengembangan Data/Informasi	15,000,000.00		
1.01.04.01.12	Pembangunan, Pemeliharaan dan Perluasan Utilitas Perkotaan	25,406,245,000.00		
1.01.04.01.12.0	Peningkatan dan Pemeliharaan LPJU	23,501,245,000.00		
1.01.04.01.12.0	Peningkatan dan Pemeliharaan Makam	1,905,000,000.00		
1.01.04.01.15	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Berbasis Kawasan	3,804,751,000.00		
1.01.04.01.15.0	Penyelenggaraan Perumahan	434,360,000.00		
1.01.04.01.15.0	Penyelenggaraan Permukiman	3,107,296,000.00		
1.01.04.01.15.0	Pengawasan Bangunan	263,095,000.00		
1.01.05.	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	14,045,565,000.00		
1.01.05.01.	Satuan Polisi Pamong Praja	6,662,620,000.00		
1.01.05.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	586,220,000.00		
1.01.05.01.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22,000,000.00		
1.01.05.01.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147,000,000.00		
1.01.05.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	228,240,000.00		
1.01.05.01.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	20,000,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.01.05.01.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	20,000,000.00		
1.01.05.01.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12,000,000.00		
1.01.05.01.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12,000,000.00		
1.01.05.01.01.1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6,000,000.00		
1.01.05.01.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	16,000,000.00		
1.01.05.01.01.2	Perjalanan Dinas	102,980,000.00		
1.01.05.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	597,400,000.00		
1.01.05.01.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	00.00		
1.01.05.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	35,000,000.00		
1.01.05.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	477,400,000.00		
1.01.05.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	25,000,000.00		
1.01.05.01.02.4	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	60,000,000.00		
1.01.05.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	00.00		
1.01.05.01.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	00.00		
1.01.05.01.08	Perencanaan SKPD	00.00		
1.01.05.01.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	00.00		
1.01.05.01.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	00.00		
1.01.05.01.16	Pembinaan dan Pemeliharaan Perlindungan Masyarakat	410,000,000.00		
1.01.05.01.16.0	Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pencitraan Satuan Polisi Pamong Praja	220,000,000.00		
1.01.05.01.16.0	Pendataan, Pembentukan dan Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan dimasyarakat	190,000,000.00		
1.01.05.01.17	Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Tramtibus, Serta Penegakan Regulasi Daerah	5,069,000,000.00		
1.01.05.01.17.0	Sosialisasi, Pengawasan, Penyidikan dan Penegakan Regulasi Daerah	4,460,000,000.00		
1.01.05.01.17.0	Pengamanan, Pengawasan dan Penertiban serta Penyusunan, Pendataan dan Pemetaan rawan Tramtibus dan Tranmas	609,000,000.00		
1.01.05.02.	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	7,382,945,000.00		
1.01.05.02.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	780,970,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.01.05.02.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,400,000.00		
1.01.05.02.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142,000,000.00		
1.01.05.02.01.0	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1,650,000.00		
1.01.05.02.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	55,000,000.00		
1.01.05.02.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	224,423,000.00		
1.01.05.02.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	84,989,000.00		
1.01.05.02.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	27,000,000.00		
1.01.05.02.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22,506,000.00		
1.01.05.02.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13,000,000.00		
1.01.05.02.01.1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	19,750,000.00		
1.01.05.02.01.1	Penyediaan peralatan rumah tangga	20,252,000.00		
1.01.05.02.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	10,000,000.00		
1.01.05.02.01.2	Perjalanan Dinas	158,000,000.00		
1.01.05.02.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	598,995,000.00		
1.01.05.02.02.0	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	00.00		
1.01.05.02.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10,000,000.00		
1.01.05.02.02.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	8,000,000.00		
1.01.05.02.02.1	Pengadaan mebeleur	45,570,000.00		
1.01.05.02.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	22,500,000.00		
1.01.05.02.02.1	Pembangunan gudang kantor	00.00		
1.01.05.02.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10,000,000.00		
1.01.05.02.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	355,800,000.00		
1.01.05.02.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	7,000,000.00		
1.01.05.02.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	47,975,000.00		
1.01.05.02.02.4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	92,150,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.01.05.02.02.4	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	00.00		
1.01.05.02.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	178,550,000.00		
1.01.05.02.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	56,300,000.00		
1.01.05.02.03.0	Pengadaan pakaian kerja lapangan	122,250,000.00		
1.01.05.02.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	278,100,000.00		
1.01.05.02.05.0	Pendidikan dan pelatihan formal	278,100,000.00		
1.01.05.02.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4,550,000.00		
1.01.05.02.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4,550,000.00		
1.01.05.02.08	Perencanaan SKPD	2,500,000.00		
1.01.05.02.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	00.00		
1.01.05.02.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	2,500,000.00		
1.01.05.02.18	Peningkatan Kesiagaan Dini dan Manajemen Logistik Kebencanaan	5,539,280,000.00		
1.01.05.02.18.0	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual Kebencanaan	14,650,000.00		
1.01.05.02.18.0	Bimbingan Teknis, Diklat dan Sosialisasi Penanganan Bencana	92,670,000.00		
1.01.05.02.18.0	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran	16,500,000.00		
1.01.05.02.18.0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	1,602,500,000.00		
1.01.05.02.18.0	Pengadaan Logistik Mitigasi Bencana	00.00		
1.01.05.02.18.0	Pencegahan dan Pengendalian Kebencanaan	165,500,000.00		
1.01.05.02.18.0	Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana	2,300,000.00		
1.01.05.02.18.0	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran	432,900,000.00		
1.01.05.02.18.1	Kemitraan Asuransi Jiwa dan Kesehatan Satuan Tugas Kebencanaan	27,900,000.00		
1.01.05.02.18.1	Kegiatan Rekrutment Tenaga Sukarela Penanggulangan Bencana	2,983,860,000.00		
1.01.05.02.18.1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran	200,500,000.00		
1.01.05.02.18.1	Monitoring dan Evaluasi	00.00		
1.01.06.	SOSIAL	3,660,050,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.01.06.01.	Dinas Sosial	3,660,050,000.00		
1.01.06.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	980,755,900.00		
1.01.06.01.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,500,000.00		
1.01.06.01.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185,000,000.00		
1.01.06.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	184,820,000.00		
1.01.06.01.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	70,000,000.00		
1.01.06.01.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	40,000,000.00		
1.01.06.01.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40,000,000.00		
1.01.06.01.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10,000,000.00		
1.01.06.01.01.1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10,000,000.00		
1.01.06.01.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	40,000,000.00		
1.01.06.01.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	130,680,000.00		
1.01.06.01.01.2	Perjalanan Dinas	265,755,900.00		
1.01.06.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	550,800,000.00		
1.01.06.01.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	30,000,000.00		
1.01.06.01.02.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	15,000,000.00		
1.01.06.01.02.1	Pengadaan mebeleur	49,400,000.00		
1.01.06.01.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	20,000,000.00		
1.01.06.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40,000,000.00		
1.01.06.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	350,000,000.00		
1.01.06.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4,400,000.00		
1.01.06.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15,000,000.00		
1.01.06.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	12,000,000.00		
1.01.06.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	15,000,000.00		
1.01.06.01.02.4	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	00.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.01.06.01.02.4	Rehabilitasi Ringan/Sedang Gedung Kantor	00.00		
1.01.06.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	34,800,000.00		
1.01.06.01.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	34,800,000.00		
1.01.06.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15,000,000.00		
1.01.06.01.05.0	Pendidikan dan pelatihan formal	15,000,000.00		
1.01.06.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,000,000.00		
1.01.06.01.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5,000,000.00		
1.01.06.01.08	Perencanaan SKPD	5,000,000.00		
1.01.06.01.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	5,000,000.00		
1.01.06.01.09	Pengembangan Data/Informasi	8,000,000.00		
1.01.06.01.09.0	Pengembangan Data/Informasi	8,000,000.00		
1.01.06.01.19	Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	2,060,694,100.00		
1.01.06.01.19.0	Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	267,500,000.00		
1.01.06.01.19.0	Pemberdayaan dan Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	158,172,000.00		
1.01.06.01.19.0	Pembinaan dan Pelayanan Sosial Bagi Orang Terlantar	100,000,000.00		
1.01.06.01.19.0	Pelayanan dan Pembinaan Sosial Bagi Anak Yang Bermasalah Sosial dan Lansia	95,250,000.00		
1.01.06.01.19.0	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Tuna Sosial	350,000,000.00		
1.01.06.01.19.0	Pelayanan dan Rehabilitasi Disabilitas, Korban Napza	100,000,000.00		
1.01.06.01.19.0	Pelayanan dan Pembinaan Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	153,920,000.00		
1.01.06.01.19.0	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Dana Bantuan Sosial	52,252,100.00		
1.01.06.01.19.0	Pendataan dan Informasi Fakir Miskin	170,000,000.00		
1.01.06.01.19.1	Penyuluhan, Pelatihan dan Pemberdayaan Fakir Miskin	130,000,000.00		
1.01.06.01.19.1	Pembinaan dan Pelayanan Sosial Fakir Miskin	100,000,000.00		
1.01.06.01.19.1	Penanganan Masalah- masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat	383,600,000.00		
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	84,903,489,250.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.02.01.	TENAGA KERJA	5,065,371,250.00		
1.02.01.01.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5,065,371,250.00		
1.02.01.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,418,055,000.00		
1.02.01.01.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,400,000.00		
1.02.01.01.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	220,809,000.00		
1.02.01.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	199,090,000.00		
1.02.01.01.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	56,060,000.00		
1.02.01.01.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	53,804,000.00		
1.02.01.01.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	51,245,000.00		
1.02.01.01.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9,400,000.00		
1.02.01.01.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	17,507,000.00		
1.02.01.01.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	256,740,000.00		
1.02.01.01.01.2	Perjalanan Dinas	550,000,000.00		
1.02.01.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	424,550,000.00		
1.02.01.01.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	60,000,000.00		
1.02.01.01.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	72,459,000.00		
1.02.01.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	272,091,000.00		
1.02.01.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	20,000,000.00		
1.02.01.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	31,000,000.00		
1.02.01.01.03.0	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	31,000,000.00		
1.02.01.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	113,000,000.00		
1.02.01.01.05.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	113,000,000.00		
1.02.01.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2,588,000.00		
1.02.01.01.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,588,000.00		
1.02.01.01.08	Perencanaan SKPD	9,136,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.02.01.01.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	7,500,000.00		
1.02.01.01.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1,636,000.00		
1.02.01.01.09	Pengembangan Data/Informasi	42,300,000.00		
1.02.01.01.09.0	Pengembangan Data/Informasi	42,300,000.00		
1.02.01.01.20	Peningkatan Kualitas, Perlindungan dan Produktivitas Tenaga Kerja	696,731,500.00		
1.02.01.01.20.0	Pemberian Fasilitas dan Pengadaan Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi dan Berbasis Masyarakat	330,225,250.00		
1.02.01.01.20.0	Penyusunan dan Perluasan Informasi Tenaga Kerja	217,810,250.00		
1.02.01.01.20.0	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	108,250,000.00		
1.02.01.01.20.0	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial KetenagaKerjaan	40,446,000.00		
1.02.01.01.33	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	609,120,250.00		
1.02.01.01.33..	Sosialisasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	101,380,000.00		
1.02.01.01.33..	Penguatan Struktur permodalan Koperasi	138,102,000.00		
1.02.01.01.33..	Pembinaan dan pengawasan koperasi	333,170,250.00		
1.02.01.01.33..	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	36,468,000.00		
1.02.01.01.34	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	1,718,890,500.00		
1.02.01.01.34..	Pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM dan Koperasi	280,800,000.00		
1.02.01.01.34..	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	540,569,000.00		
1.02.01.01.34..	Penguatan pemasaran bagi Produk UMKM	897,521,500.00		
1.02.03.	PANGAN	6,729,435,000.00		
1.02.03.01.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6,729,435,000.00		
1.02.03.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,093,134,000.00		
1.02.03.01.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	00.00		
1.02.03.01.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	319,100,000.00		
1.02.03.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	338,384,000.00		
1.02.03.01.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	14,200,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.02.03.01.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	48,520,000.00		
1.02.03.01.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	47,940,000.00		
1.02.03.01.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13,000,000.00		
1.02.03.01.01.1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	00.00		
1.02.03.01.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	12,000,000.00		
1.02.03.01.01.1	Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	475,200,000.00		
1.02.03.01.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	348,480,000.00		
1.02.03.01.01.2	Perjalanan Dinas	476,310,000.00		
1.02.03.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	981,010,000.00		
1.02.03.01.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	38,100,000.00		
1.02.03.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	83,440,000.00		
1.02.03.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	826,070,000.00		
1.02.03.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	33,400,000.00		
1.02.03.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	135,000,000.00		
1.02.03.01.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	135,000,000.00		
1.02.03.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	53,800,000.00		
1.02.03.01.05.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	53,800,000.00		
1.02.03.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1,000,000.00		
1.02.03.01.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,000,000.00		
1.02.03.01.08	Perencanaan SKPD	9,060,000.00		
1.02.03.01.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	750,000.00		
1.02.03.01.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	8,310,000.00		
1.02.03.01.09	Pengembangan Data/Informasi	15,600,000.00		
1.02.03.01.09.0	Pengembangan Data/Informasi	15,600,000.00		
1.02.03.01.22	Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Pemberdayaan Petani	1,143,319,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.02.03.01.22.0	Peningkatan kemampuan lembaga petani	181,183,000.00		
1.02.03.01.22.0	Pengembangan cadangan pangan Pemerintah	129,248,000.00		
1.02.03.01.22.0	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	122,250,000.00		
1.02.03.01.22.0	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	128,700,000.00		
1.02.03.01.22.0	Penyuluhan sumber pangan alternatif	127,625,000.00		
1.02.03.01.22.0	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	109,960,000.00		
1.02.03.01.22.0	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian / perkebunan	138,992,000.00		
1.02.03.01.22.0	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	168,241,000.00		
1.02.03.01.22.0	Rakor Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Tingkat Kota Jambi	37,120,000.00		
1.02.03.01.39	Peningkatan Produksi, Mutu Produk dan Diversifikasi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan	2,297,512,000.00		
1.02.03.01.39.0	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	85,200,000.00		
1.02.03.01.39.0	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	310,040,000.00		
1.02.03.01.39.0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	106,071,000.00		
1.02.03.01.39.0	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	140,927,000.00		
1.02.03.01.39.0	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	440,000,000.00		
1.02.03.01.39.0	Pengembangan Agribisnis Peternakan	170,806,000.00		
1.02.03.01.39.0	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	146,064,000.00		
1.02.03.01.39.0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan dan Pengolahan Informasi Pasar Atas Hasil Produk Peternakan	127,961,000.00		
1.02.03.01.39.0	Pengembangan dan Pelayanan Pemotongan Hewan	180,400,000.00		
1.02.03.01.39.1	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	216,337,000.00		
1.02.03.01.39.1	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	106,600,000.00		
1.02.03.01.39.1	Optimalisasi Pengelola dan Pemasaran Produksi Perikanan	110,000,000.00		
1.02.03.01.39.1	Pendamping pada Kelompok Tani Pembudidayaan Ikan	157,106,000.00		
1.02.05.	LINGKUNGAN HIDUP	27,521,233,000.00		
1.02.05.01.	Dinas Lingkungan Hidup	27,521,233,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.02.05.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,909,112,767.00		
1.02.05.01.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,510,000.00		
1.02.05.01.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	288,000,000.00		
1.02.05.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	452,119,000.00		
1.02.05.01.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	44,730,000.00		
1.02.05.01.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	39,800,000.00		
1.02.05.01.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21,268,767.00		
1.02.05.01.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8,085,000.00		
1.02.05.01.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	80,000,000.00		
1.02.05.01.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	72,600,000.00		
1.02.05.01.01.2	Perjalanan Dinas	900,000,000.00		
1.02.05.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,008,695,000.00		
1.02.05.01.02.0	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	00.00		
1.02.05.01.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10,000,000.00		
1.02.05.01.02.1	Pengadaan mebeleur	00.00		
1.02.05.01.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	213,000,000.00		
1.02.05.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	24,520,000.00		
1.02.05.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	343,050,000.00		
1.02.05.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	30,000,000.00		
1.02.05.01.02.4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	388,125,000.00		
1.02.05.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	158,200,000.00		
1.02.05.01.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	158,200,000.00		
1.02.05.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	255,000,000.00		
1.02.05.01.05.0	Pendidikan dan pelatihan formal	255,000,000.00		
1.02.05.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2,498,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.02.05.01.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,498,000.00		
1.02.05.01.08	Perencanaan SKPD	3,884,400.00		
1.02.05.01.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	00.00		
1.02.05.01.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	2,767,000.00		
1.02.05.01.08.0	Penyusunan Standart Pelayanan Minimal (SPM)	1,117,400.00		
1.02.05.01.23	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan, RTH, Ruang Publik dan Keanekaragaman Hayati	10,966,883,300.00		
1.02.05.01.23.0	Pelaksanaan Konservasi dan AMDAL	1,117,940,000.00		
1.02.05.01.23.0	Penegakan Hukum dan Komunikasi Lingkungan	303,740,000.00		
1.02.05.01.23.0	Peningkatan Kinerja Pengelola RTH	8,015,555,500.00		
1.02.05.01.23.0	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	304,075,000.00		
1.02.05.01.23.0	Pengembangan, penanaman dan pengadaan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	1,225,572,800.00		
1.02.05.01.24	Peningkatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan	11,546,825,366.00		
1.02.05.01.24.0	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	11,140,035,366.00		
1.02.05.01.24.0	Peningkatan Pengelolaan Bank Sampah	406,790,000.00		
1.02.05.01.25	Penurunan Beban Pencemaran	1,670,134,167.00		
1.02.05.01.25.0	Pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan	843,744,900.00		
1.02.05.01.25.0	Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	826,389,267.00		
1.02.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4,901,430,000.00		
1.02.06.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,901,430,000.00		
1.02.06.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,883,990,000.00		
1.02.06.01.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,400,000.00		
1.02.06.01.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	332,400,000.00		
1.02.06.01.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	20,000,000.00		
1.02.06.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	210,476,000.00		
1.02.06.01.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	52,766,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.02.06.01.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	135,128,000.00		
1.02.06.01.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	57,000,000.00		
1.02.06.01.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6,600,000.00		
1.02.06.01.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	22,000,000.00		
1.02.06.01.01.1	Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	697,620,000.00		
1.02.06.01.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	72,600,000.00		
1.02.06.01.01.2	Perjalanan Dinas	275,000,000.00		
1.02.06.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,742,156,000.00		
1.02.06.01.02.0	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	00.00		
1.02.06.01.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	209,000,000.00		
1.02.06.01.02.1	Pengadaan mebeleur	8,000,000.00		
1.02.06.01.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	1,043,571,700.00		
1.02.06.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50,000,000.00		
1.02.06.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	273,900,000.00		
1.02.06.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	52,000,000.00		
1.02.06.01.02.4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	105,684,300.00		
1.02.06.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	67,200,000.00		
1.02.06.01.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	67,200,000.00		
1.02.06.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10,000,000.00		
1.02.06.01.05.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10,000,000.00		
1.02.06.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,000,000.00		
1.02.06.01.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5,000,000.00		
1.02.06.01.08	Perencanaan SKPD	7,000,000.00		
1.02.06.01.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	4,000,000.00		
1.02.06.01.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	3,000,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.02.06.01.09	Pengembangan Data/Informasi	96,250,000.00		
1.02.06.01.09.0	Pengelolaan Informasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	96,250,000.00		
1.02.06.01.26	Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan	1,089,834,000.00		
1.02.06.01.26.0	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	87,875,000.00		
1.02.06.01.26.0	Pembinaan dan pengembangan pelayanan kependudukan	163,275,000.00		
1.02.06.01.26.0	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	838,684,000.00		
1.02.06.01.26.0	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan	00.00		
1.02.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8,900,000,000.00		
1.02.07.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	8,900,000,000.00		
1.02.07.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,140,082,000.00		
1.02.07.01.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	69,320,000.00		
1.02.07.01.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250,000,000.00		
1.02.07.01.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15,200,000.00		
1.02.07.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	407,282,000.00		
1.02.07.01.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	55,720,000.00		
1.02.07.01.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	17,000,000.00		
1.02.07.01.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17,000,000.00		
1.02.07.01.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10,000,000.00		
1.02.07.01.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	30,000,000.00		
1.02.07.01.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	43,560,000.00		
1.02.07.01.01.2	Perjalanan Dinas	225,000,000.00		
1.02.07.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	799,960,000.00		
1.02.07.01.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	79,500,000.00		
1.02.07.01.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	79,000,000.00		
1.02.07.01.02.1	Pembangunan gudang kantor	155,580,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.02.07.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	208,380,000.00		
1.02.07.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10,000,000.00		
1.02.07.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	10,000,000.00		
1.02.07.01.02.4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	257,500,000.00		
1.02.07.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	33,600,000.00		
1.02.07.01.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	33,600,000.00		
1.02.07.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16,000,000.00		
1.02.07.01.05.0	Pendidikan dan pelatihan formal	16,000,000.00		
1.02.07.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,000,000.00		
1.02.07.01.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5,000,000.00		
1.02.07.01.08	Perencanaan SKPD	8,000,000.00		
1.02.07.01.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	4,000,000.00		
1.02.07.01.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	4,000,000.00		
1.02.07.01.09	Pengembangan Data/Informasi	100,000,000.00		
1.02.07.01.09.0	Pengembangan Data/Informasi	100,000,000.00		
1.02.07.01.21	Peningkatan Kesejahteraan Gender, Perempuan dan Perlindungan Anak	3,611,300,000.00		
1.02.07.01.21.0	Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	950,000,000.00		
1.02.07.01.21.0	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	287,000,000.00		
1.02.07.01.21.0	Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	303,000,000.00		
1.02.07.01.21.0	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	2,071,300,000.00		
1.02.07.01.27	Pemberdayaan Masyarakat	3,186,058,000.00		
1.02.07.01.27.0	Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2,124,058,000.00		
1.02.07.01.27.0	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	155,000,000.00		
1.02.07.01.27.0	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Ekonomi dan TKG	207,000,000.00		
1.02.07.01.27.0	Bersih, Aman dan Pintar (BANTAR)	700,000,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.02.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4,060,665,000.00		
1.02.08.01.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4,060,665,000.00		
1.02.08.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	881,055,000.00		
1.02.08.01.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,214,000.00		
1.02.08.01.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128,400,000.00		
1.02.08.01.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	19,300,000.00		
1.02.08.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	297,264,000.00		
1.02.08.01.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	26,820,000.00		
1.02.08.01.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	21,897,000.00		
1.02.08.01.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14,000,000.00		
1.02.08.01.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9,000,000.00		
1.02.08.01.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	15,600,000.00		
1.02.08.01.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	43,560,000.00		
1.02.08.01.01.2	Perjalanan Dinas	300,000,000.00		
1.02.08.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	687,800,000.00		
1.02.08.01.02.1	Pengadaan mebeleur	94,100,000.00		
1.02.08.01.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	60,000,000.00		
1.02.08.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	58,500,000.00		
1.02.08.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	455,200,000.00		
1.02.08.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	20,000,000.00		
1.02.08.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	93,750,000.00		
1.02.08.01.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	93,750,000.00		
1.02.08.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	17,000,000.00		
1.02.08.01.05.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	00.00		
1.02.08.01.05.0	Penilaian Angka Kredit	17,000,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.02.08.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9,000,000.00		
1.02.08.01.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6,000,000.00		
1.02.08.01.06.1	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	3,000,000.00		
1.02.08.01.08	Perencanaan SKPD	6,000,000.00		
1.02.08.01.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	3,000,000.00		
1.02.08.01.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	3,000,000.00		
1.02.08.01.09	Pengembangan Data/Informasi	307,000,000.00		
1.02.08.01.09.0	Pengembangan Data/Informasi	307,000,000.00		
1.02.08.01.28	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	2,059,060,000.00		
1.02.08.01.28.0	Pembinaan dan Operasional keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	700,000,000.00		
1.02.08.01.28.0	Kegiatan institusi dan partisipasi masyarakat serta KIE	922,100,000.00		
1.02.08.01.28.0	Pembinaan dan Operasional ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	436,960,000.00		
1.02.09.	PERHUBUNGAN	10,948,265,000.00		
1.02.09.01.	Dinas Perhubungan	10,948,265,000.00		
1.02.09.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,026,885,000.00		
1.02.09.01.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26,400,000.00		
1.02.09.01.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	267,960,000.00		
1.02.09.01.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	50,000,000.00		
1.02.09.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	350,000,000.00		
1.02.09.01.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	187,900,000.00		
1.02.09.01.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	79,550,000.00		
1.02.09.01.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	94,675,000.00		
1.02.09.01.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15,000,000.00		
1.02.09.01.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	40,000,000.00		
1.02.09.01.01.1	Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	42,600,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.02.09.01.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	472,800,000.00		
1.02.09.01.01.2	Perjalanan Dinas	400,000,000.00		
1.02.09.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,618,500,000.00		
1.02.09.01.02.0	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	75,000,000.00		
1.02.09.01.02.1	Pengadaan mebeleur	00.00		
1.02.09.01.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	180,000,000.00		
1.02.09.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	250,000,000.00		
1.02.09.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1,050,000,000.00		
1.02.09.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	20,000,000.00		
1.02.09.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	43,500,000.00		
1.02.09.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	445,520,000.00		
1.02.09.01.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	445,520,000.00		
1.02.09.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,000,000.00		
1.02.09.01.05.0	Pendidikan dan pelatihan formal	100,000,000.00		
1.02.09.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8,800,000.00		
1.02.09.01.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8,800,000.00		
1.02.09.01.08	Perencanaan SKPD	20,000,000.00		
1.02.09.01.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	15,000,000.00		
1.02.09.01.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	5,000,000.00		
1.02.09.01.29	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	3,065,100,000.00		
1.02.09.01.29.0	Penyusunan Perencanaan, Norma, Kebijakan dan Standar Perhubungan	158,400,000.00		
1.02.09.01.29.0	Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan	2,906,700,000.00		
1.02.09.01.30	Peningkatan Pengelolaan dan Keselamatan Perhubungan	1,382,200,000.00		
1.02.09.01.30.0	Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Perhubungan	982,200,000.00		
1.02.09.01.30.0	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Operasional Perhubungan	400,000,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.02.09.01.31	Peningkatan Pelayanan Perparkiran	2,281,260,000.00		
1.02.09.01.31.0	Peningkatan Efektifitas Operasional Pemungutan Retribusi	1,728,260,000.00		
1.02.09.01.31.0	Penertiban Sarana Parkir	353,000,000.00		
1.02.09.01.31.0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perparkiran	200,000,000.00		
1.02.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5,530,875,000.00		
1.02.10.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	5,530,875,000.00		
1.02.10.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,049,520,000.00		
1.02.10.01.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,700,000.00		
1.02.10.01.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114,000,000.00		
1.02.10.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	269,520,000.00		
1.02.10.01.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	46,400,000.00		
1.02.10.01.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	65,000,000.00		
1.02.10.01.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14,000,000.00		
1.02.10.01.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15,000,000.00		
1.02.10.01.01.1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,500,000.00		
1.02.10.01.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	75,000,000.00		
1.02.10.01.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	29,040,000.00		
1.02.10.01.01.2	Perjalanan Dinas	412,360,000.00		
1.02.10.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	383,880,000.00		
1.02.10.01.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	70,000,000.00		
1.02.10.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	229,920,000.00		
1.02.10.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	83,960,000.00		
1.02.10.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	41,250,000.00		
1.02.10.01.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	41,250,000.00		
1.02.10.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25,000,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.02.10.01.05.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	25,000,000.00		
1.02.10.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1,400,000.00		
1.02.10.01.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,400,000.00		
1.02.10.01.08	Perencanaan SKPD	1,800,000.00		
1.02.10.01.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	00.00		
1.02.10.01.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1,800,000.00		
1.02.10.01.09	Pengembangan Data/Informasi	126,600,000.00		
1.02.10.01.09.0	Kegiatan pengkoordinasian pelaksanaan survey, verifikasi, kompilasi dan diseminasi data statistik	10,000,000.00		
1.02.10.01.09.0	Pengelolaan persandian dan keamanan informasi	116,600,000.00		
1.02.10.01.32	Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	3,901,425,000.00		
1.02.10.01.32.0	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	481,395,000.00		
1.02.10.01.32.0	Pengelolaan Aplikasi Informatika	3,234,800,000.00		
1.02.10.01.32.0	Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	185,230,000.00		
1.02.12.	PENANAMAN MODAL	3,643,035,000.00		
1.02.12.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,643,035,000.00		
1.02.12.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,356,923,500.00		
1.02.12.01.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,860,000.00		
1.02.12.01.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	241,623,000.00		
1.02.12.01.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12,750,000.00		
1.02.12.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	251,125,000.00		
1.02.12.01.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	117,107,000.00		
1.02.12.01.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	75,980,000.00		
1.02.12.01.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	85,675,000.00		
1.02.12.01.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16,500,000.00		
1.02.12.01.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	39,800,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.02.12.01.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	161,503,500.00		
1.02.12.01.01.2	Perjalanan Dinas	350,000,000.00		
1.02.12.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	513,620,000.00		
1.02.12.01.02.0	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	35,000,000.00		
1.02.12.01.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	54,900,000.00		
1.02.12.01.02.1	Pengadaan mebeleur	61,720,000.00		
1.02.12.01.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	103,000,000.00		
1.02.12.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	189,000,000.00		
1.02.12.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	40,000,000.00		
1.02.12.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	30,000,000.00		
1.02.12.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	143,315,000.00		
1.02.12.01.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	143,315,000.00		
1.02.12.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20,000,000.00		
1.02.12.01.05.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20,000,000.00		
1.02.12.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3,750,000.00		
1.02.12.01.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3,750,000.00		
1.02.12.01.08	Perencanaan SKPD	7,709,000.00		
1.02.12.01.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	4,285,000.00		
1.02.12.01.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	3,424,000.00		
1.02.12.01.09	Pengembangan Data/Informasi	583,500,000.00		
1.02.12.01.09.0	Pengembangan Data/Informasi	583,500,000.00		
1.02.12.01.35	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	253,138,500.00		
1.02.12.01.35.1	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	196,880,000.00		
1.02.12.01.35.2	Sosialisasi Penanaman Modal	25,843,500.00		
1.02.12.01.35.3	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	27,465,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.02.12.01.35.4	Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE)	2,950,000.00		
1.02.12.01.48	Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik	761,079,000.00		
1.02.12.01.48.0	Identifikasi, Verifikasi dan Penerbitan Dokumen Perizinan	346,849,000.00		
1.02.12.01.48.0	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	255,903,000.00		
1.02.12.01.48.0	Pengelolaan Data dan Penataan Arsip Perizinan	13,415,000.00		
1.02.12.01.48.1	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan	144,912,000.00		
1.02.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4,750,000,000.00		
1.02.13.01.	Dinas Pemuda dan Olahraga	4,750,000,000.00		
1.02.13.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,232,360,000.00		
1.02.13.01.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	00.00		
1.02.13.01.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86,000,000.00		
1.02.13.01.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9,500,000.00		
1.02.13.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	372,560,000.00		
1.02.13.01.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	32,800,000.00		
1.02.13.01.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	50,000,000.00		
1.02.13.01.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	175,000,000.00		
1.02.13.01.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7,500,000.00		
1.02.13.01.01.1	Penyediaan peralatan rumah tangga	5,000,000.00		
1.02.13.01.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	40,000,000.00		
1.02.13.01.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	54,000,000.00		
1.02.13.01.01.2	Perjalanan Dinas	400,000,000.00		
1.02.13.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	866,340,000.00		
1.02.13.01.02.0	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	00.00		
1.02.13.01.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100,000,000.00		
1.02.13.01.02.1	Pengadaan mebeleur	100,000,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.02.13.01.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	100,000,000.00		
1.02.13.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	24,340,000.00		
1.02.13.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	197,000,000.00		
1.02.13.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	20,000,000.00		
1.02.13.01.02.4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	325,000,000.00		
1.02.13.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	70,250,000.00		
1.02.13.01.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	37,500,000.00		
1.02.13.01.03.0	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	32,750,000.00		
1.02.13.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30,000,000.00		
1.02.13.01.05.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	30,000,000.00		
1.02.13.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	00.00		
1.02.13.01.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	00.00		
1.02.13.01.08	Perencanaan SKPD	00.00		
1.02.13.01.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	00.00		
1.02.13.01.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	00.00		
1.02.13.01.36	Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga dan Kepemudaan	2,551,050,000.00		
1.02.13.01.36.0	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	500,000,000.00		
1.02.13.01.36.0	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	1,000,000,000.00		
1.02.13.01.36.0	Pembinaan Kepemudaan	1,000,000,000.00		
1.02.13.01.36.0	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga	51,050,000.00		
1.02.13.01.36.0	Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat	00.00		
1.02.18.	KEARSIPAN	2,853,180,000.00		
1.02.18.01.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2,853,180,000.00		
1.02.18.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	952,236,000.00		
1.02.18.01.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	303,000,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.02.18.01.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	16,000,000.00		
1.02.18.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	172,548,000.00		
1.02.18.01.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	70,080,000.00		
1.02.18.01.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	15,900,000.00		
1.02.18.01.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12,100,000.00		
1.02.18.01.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,400,000.00		
1.02.18.01.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	21,048,000.00		
1.02.18.01.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	116,160,000.00		
1.02.18.01.01.2	Perjalanan Dinas	220,000,000.00		
1.02.18.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	799,832,500.00		
1.02.18.01.02.0	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	00.00		
1.02.18.01.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	30,000,000.00		
1.02.18.01.02.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	471,432,500.00		
1.02.18.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	286,400,000.00		
1.02.18.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	12,000,000.00		
1.02.18.01.02.4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	00.00		
1.02.18.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	41,500,000.00		
1.02.18.01.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	40,500,000.00		
1.02.18.01.03.0	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	1,000,000.00		
1.02.18.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6,000,000.00		
1.02.18.01.05.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	6,000,000.00		
1.02.18.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	00.00		
1.02.18.01.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	00.00		
1.02.18.01.08	Perencanaan SKPD	00.00		
1.02.18.01.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	00.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
1.02.18.01.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	00.00		
1.02.18.01.37	Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Perpustakaan	500,920,500.00		
1.02.18.01.37.0	Pengembangan Koleksi Perpustakaan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka	270,920,000.00		
1.02.18.01.37.0	Pembinaan, Pengembangan Perpustakaan, Kerjasama dan Pembudayaan Gemar Membaca	230,000,500.00		
1.02.18.01.38	Program Pengelolaan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	552,691,000.00		
1.02.18.01.38.0	Akuisisi, Pengolahan dan Layanan Kearsipan Kota Jambi	276,400,000.00		
1.02.18.01.38.0	Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	276,291,000.00		
2.	URUSAN PILIHAN	13,604,426,000.00		
2.00.	URUSAN PILIHAN	13,604,426,000.00		
2.00.02.	PARIWISATA	3,365,575,000.00		
2.00.02.01.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3,365,575,000.00		
2.00.02.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	792,500,000.00		
2.00.02.01.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	00.00		
2.00.02.01.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70,000,000.00		
2.00.02.01.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10,000,000.00		
2.00.02.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	387,200,000.00		
2.00.02.01.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	20,000,000.00		
2.00.02.01.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	20,000,000.00		
2.00.02.01.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10,000,000.00		
2.00.02.01.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,500,000.00		
2.00.02.01.01.1	Penyediaan peralatan rumah tangga	00.00		
2.00.02.01.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	10,000,000.00		
2.00.02.01.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	52,800,000.00		
2.00.02.01.01.2	Perjalanan Dinas	210,000,000.00		
2.00.02.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	272,770,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
2.00.02.01.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	19,500,000.00		
2.00.02.01.02.1	Pengadaan mebeleur	15,000,000.00		
2.00.02.01.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	30,000,000.00		
2.00.02.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	198,270,000.00		
2.00.02.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	10,000,000.00		
2.00.02.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	20,000,000.00		
2.00.02.01.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	20,000,000.00		
2.00.02.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10,000,000.00		
2.00.02.01.05.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10,000,000.00		
2.00.02.01.08	Perencanaan SKPD	10,000,000.00		
2.00.02.01.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	5,000,000.00		
2.00.02.01.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	5,000,000.00		
2.00.02.01.09	Pengembangan Data/Informasi	174,000,000.00		
2.00.02.01.09.0	Pengembangan Data/Informasi	174,000,000.00		
2.00.02.01.40	Program Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Budaya dan Pariwisata	2,086,305,000.00		
2.00.02.01.40.0	Pengembangan, Pembinaan dan Pengelolaan Pariwisata Daerah	450,775,000.00		
2.00.02.01.40.0	Pengembangan, Pembinaan dan Pengelolaan Seni dan Budaya Daerah	760,300,000.00		
2.00.02.01.40.0	Pengembangan Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Daerah	875,230,000.00		
2.00.04.	PERDAGANGAN	10,238,851,000.00		
2.00.04.01.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10,238,851,000.00		
2.00.04.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,112,687,000.00		
2.00.04.01.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	00.00		
2.00.04.01.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	348,000,000.00		
2.00.04.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	265,960,000.00		
2.00.04.01.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	90,000,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
2.00.04.01.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	63,600,000.00		
2.00.04.01.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27,567,000.00		
2.00.04.01.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9,840,000.00		
2.00.04.01.01.1	Penyediaan peralatan rumah tangga	00.00		
2.00.04.01.01.1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,900,000.00		
2.00.04.01.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	25,000,000.00		
2.00.04.01.01.1	Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	566,620,000.00		
2.00.04.01.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	145,600,000.00		
2.00.04.01.01.2	Perjalanan Dinas	567,600,000.00		
2.00.04.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,176,580,000.00		
2.00.04.01.02.0	Pembangunan gedung kantor	330,000,000.00		
2.00.04.01.02.0	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	00.00		
2.00.04.01.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	12,000,000.00		
2.00.04.01.02.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	00.00		
2.00.04.01.02.1	Pengadaan mebeleur	50,000,000.00		
2.00.04.01.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	00.00		
2.00.04.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	431,900,000.00		
2.00.04.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	00.00		
2.00.04.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	45,680,000.00		
2.00.04.01.02.4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	307,000,000.00		
2.00.04.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	144,400,000.00		
2.00.04.01.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	144,400,000.00		
2.00.04.01.03.0	Pengadaan pakaian KORPRI	00.00		
2.00.04.01.03.0	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	00.00		
2.00.04.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15,000,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
2.00.04.01.05.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	15,000,000.00		
2.00.04.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,400,000.00		
2.00.04.01.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5,400,000.00		
2.00.04.01.08	Perencanaan SKPD	3,600,000.00		
2.00.04.01.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	2,250,000.00		
2.00.04.01.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1,350,000.00		
2.00.04.01.09	Pengembangan Data/Informasi	00.00		
2.00.04.01.09.0	Pengembangan Data/Informasi	00.00		
2.00.04.01.41	Pembinaan, Pengembangan, Peningkatan, dan Pengawasan Industri dan Perdagangan	2,427,460,500.00		
2.00.04.01.41.0	Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Industri kimia Agro dan Hasil Hutan	80,097,500.00		
2.00.04.01.41.0	Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka Kerajinan	26,377,500.00		
2.00.04.01.41.0	Ekspose Industri Kecil dan Menengah	1,100,000,000.00		
2.00.04.01.41.0	Peningkatan dan Pengembangan Kemasan IKM	66,180,000.00		
2.00.04.01.41.0	Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah	32,000,000.00		
2.00.04.01.41.0	Peningkatan, Pengembangan SDM Industri Kecil dan Menengah	25,000,000.00		
2.00.04.01.41.0	Pembentukan Kelembagaan Industri Kecil dan Menengah	25,000,000.00		
2.00.04.01.41.0	Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	209,320,000.00		
2.00.04.01.41.0	Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	16,130,000.00		
2.00.04.01.41.1	Pelatihan, Sosialisasi, Seminar dan Penyuluhan Perdagangan	80,000,000.00		
2.00.04.01.41.1	Promosi/ Pameran Produk Jambi	384,110,500.00		
2.00.04.01.41.1	Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan	238,562,000.00		
2.00.04.01.41.1	Penyuluhan dan Pembinaan Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian	144,683,000.00		
2.00.04.01.42	Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Perpasaran	4,353,723,500.00		
2.00.04.01.42.0	Peningkatan Kapasitas Pelaksana Operasional Perpasaran	346,650,000.00		
2.00.04.01.42.0	Penyelenggaraan Pasar Beduk	16,225,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
2.00.04.01.42.0	Peningkatan Pelayanan Operasional Perpasaran	3,570,428,500.00		
2.00.04.01.42.0	Penertiban dan Pengawasan Pedagang Pasar Daerah dan PKL di Lingkungan Pasar Daerah	420,420,000.00		
3.	PENUNJANG URUSAN	27,416,266,000.00		
3.00.	PENUNJANG URUSAN	27,416,266,000.00		
3.00.01.	INSPEKTORAT	4,034,300,000.00		
3.00.01.01.	Inspektorat Daerah	4,034,300,000.00		
3.00.01.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,040,200,000.00		
3.00.01.01.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000.00		
3.00.01.01.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157,200,000.00		
3.00.01.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	142,580,000.00		
3.00.01.01.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	83,895,000.00		
3.00.01.01.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	88,575,500.00		
3.00.01.01.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	43,539,500.00		
3.00.01.01.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,175,000.00		
3.00.01.01.01.1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	00.00		
3.00.01.01.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	26,895,000.00		
3.00.01.01.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	79,200,000.00		
3.00.01.01.01.2	Perjalanan Dinas	410,140,000.00		
3.00.01.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	399,510,000.00		
3.00.01.01.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	73,930,000.00		
3.00.01.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	236,580,000.00		
3.00.01.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	34,000,000.00		
3.00.01.01.02.4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	55,000,000.00		
3.00.01.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	34,000,000.00		
3.00.01.01.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	34,000,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
3.00.01.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	216,600,000.00		
3.00.01.01.05.0	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	68,100,000.00		
3.00.01.01.05.0	Penilaian Angka Kredit	00.00		
3.00.01.01.05.0	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	148,500,000.00		
3.00.01.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	00.00		
3.00.01.01.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	00.00		
3.00.01.01.06.0	Penyusunan laporan keuangan semesteran	00.00		
3.00.01.01.08	Perencanaan SKPD	00.00		
3.00.01.01.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	00.00		
3.00.01.01.09	Pengembangan Data/Informasi	00.00		
3.00.01.01.09.0	Pengembangan Data/Informasi	00.00		
3.00.01.01.43	Peningkatan Sistem Pengawasan, Pembinaan Internal, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2,343,990,000.00		
3.00.01.01.43.0	Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Internal	1,213,850,000.00		
3.00.01.01.43.0	Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah	240,375,000.00		
3.00.01.01.43.0	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	7,965,000.00		
3.00.01.01.43.0	Evaluasi LAKIP dan Review Laporan Keuangan Pemerintah	213,750,000.00		
3.00.01.01.43.0	Pengendalian Atas Penyelenggaraan Pemerintahan	232,675,000.00		
3.00.01.01.43.0	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	414,000,000.00		
3.00.01.01.43.0	Evaluasi dan Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi	21,375,000.00		
3.00.02.	PERENCANAAN	6,484,641,000.00		
3.00.02.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6,484,641,000.00		
3.00.02.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,853,328,000.00		
3.00.02.01.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,200,000.00		
3.00.02.01.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187,000,000.00		
3.00.02.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	326,820,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
3.00.02.01.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	110,000,000.00		
3.00.02.01.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	61,628,000.00		
3.00.02.01.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	55,000,000.00		
3.00.02.01.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	70,000,000.00		
3.00.02.01.01.1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	00.00		
3.00.02.01.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	93,500,000.00		
3.00.02.01.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	15,180,000.00		
3.00.02.01.01.2	Perjalanan Dinas	930,000,000.00		
3.00.02.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	772,220,000.00		
3.00.02.01.02.1	Pengadaan mebeleur	30,000,000.00		
3.00.02.01.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	100,000,000.00		
3.00.02.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	65,000,000.00		
3.00.02.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	252,720,000.00		
3.00.02.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	174,500,000.00		
3.00.02.01.02.4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	150,000,000.00		
3.00.02.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	41,000,000.00		
3.00.02.01.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	41,000,000.00		
3.00.02.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40,000,000.00		
3.00.02.01.05.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	40,000,000.00		
3.00.02.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3,000,000.00		
3.00.02.01.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3,000,000.00		
3.00.02.01.08	Perencanaan SKPD	12,000,000.00		
3.00.02.01.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	5,000,000.00		
3.00.02.01.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	7,000,000.00		
3.00.02.01.09	Pengembangan Data/Informasi	50,000,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
3.00.02.01.09.0	Pengembangan Data/Informasi	50,000,000.00		
3.00.02.01.44	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	3,713,093,000.00		
3.00.02.01.44.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS)	1,670,000,000.00		
3.00.02.01.44.0	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	350,000,000.00		
3.00.02.01.44.0	Perencanaan Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Ekonomi	432,653,000.00		
3.00.02.01.44.0	Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Sosial Budaya	321,000,000.00		
3.00.02.01.44.0	Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Manusia dan Masyarakat	379,540,000.00		
3.00.02.01.44.0	Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	559,900,000.00		
3.00.03.	KEUANGAN	12,515,865,000.00		
3.00.03.01.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6,015,865,000.00		
3.00.03.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,739,758,850.00		
3.00.03.01.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,600,000.00		
3.00.03.01.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156,000,000.00		
3.00.03.01.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	30,000,000.00		
3.00.03.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1,264,520,000.00		
3.00.03.01.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	35,040,000.00		
3.00.03.01.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	60,000,000.00		
3.00.03.01.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35,000,000.00		
3.00.03.01.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	22,000,000.00		
3.00.03.01.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	45,000,000.00		
3.00.03.01.01.1	Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	540,600,000.00		
3.00.03.01.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	43,560,000.00		
3.00.03.01.01.2	Perjalanan Dinas	501,438,850.00		
3.00.03.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	477,060,000.00		
3.00.03.01.02.0	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	00.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
3.00.03.01.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	29,000,000.00		
3.00.03.01.02.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	9,000,000.00		
3.00.03.01.02.1	Pengadaan mebeleur	5,000,000.00		
3.00.03.01.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	149,000,000.00		
3.00.03.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	247,060,000.00		
3.00.03.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	18,000,000.00		
3.00.03.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	20,000,000.00		
3.00.03.01.02.4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	00.00		
3.00.03.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	112,000,000.00		
3.00.03.01.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	112,000,000.00		
3.00.03.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25,000,000.00		
3.00.03.01.05.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	25,000,000.00		
3.00.03.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14,455,000.00		
3.00.03.01.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5,455,000.00		
3.00.03.01.06.0	Penyusunan laporan keuangan semesteran	9,000,000.00		
3.00.03.01.08	Perencanaan SKPD	9,950,000.00		
3.00.03.01.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	5,575,000.00		
3.00.03.01.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	4,375,000.00		
3.00.03.01.45	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah	2,637,641,150.00		
3.00.03.01.45.0	Pelaksanaan Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD	160,800,000.00		
3.00.03.01.45.0	Koordinasi Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	20,420,000.00		
3.00.03.01.45.0	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan	15,700,000.00		
3.00.03.01.45.0	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	70,331,000.00		
3.00.03.01.45.0	Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Aset Daerah	44,682,000.00		
3.00.03.01.45.0	Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan dan Belanja SKPD	26,050,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
3.00.03.01.45.0	Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Umum Daerah	59,360,150.00		
3.00.03.01.45.0	Pengelolaan dan Pengendalian Pengeluaran Keuangan Daerah	139,925,000.00		
3.00.03.01.45.0	Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD	110,670,000.00		
3.00.03.01.45.1	Pembinaan Administrasi Gaji PNSD	105,850,000.00		
3.00.03.01.45.1	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan	58,301,750.00		
3.00.03.01.45.1	Operasi Majelis Pertimbangan TPTGR	107,562,750.00		
3.00.03.01.45.1	Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	107,370,000.00		
3.00.03.01.45.1	Penatausahaan Barang Milik daerah	634,477,000.00		
3.00.03.01.45.1	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	59,898,000.00		
3.00.03.01.45.1	Pengamanan Barang Milik Daerah	222,685,000.00		
3.00.03.01.45.1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	69,990,000.00		
3.00.03.01.45.1	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	93,490,000.00		
3.00.03.01.45.2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	86,490,000.00		
3.00.03.01.45.2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	114,677,500.00		
3.00.03.01.45.2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	87,170,000.00		
3.00.03.01.45.2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	114,828,500.00		
3.00.03.01.45.2	Penyusunan Analisa Standar Belanja	69,185,250.00		
3.00.03.01.45.2	Penyusunan Standar Satuan Harga	57,727,250.00		
3.00.03.02.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	6,500,000,000.00		
3.00.03.02.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,110,820,000.00		
3.00.03.02.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000.00		
3.00.03.02.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	510,000,000.00		
3.00.03.02.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	321,180,000.00		
3.00.03.02.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	92,600,000.00		
3.00.03.02.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	400,000,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
3.00.03.02.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	170,560,000.00		
3.00.03.02.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30,000,000.00		
3.00.03.02.01.1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11,800,000.00		
3.00.03.02.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	84,000,000.00		
3.00.03.02.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	130,680,000.00		
3.00.03.02.01.2	Perjalanan Dinas	350,000,000.00		
3.00.03.02.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	981,400,000.00		
3.00.03.02.02.0	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	00.00		
3.00.03.02.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	00.00		
3.00.03.02.02.1	Pengadaan mebeleur	37,000,000.00		
3.00.03.02.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	250,700,000.00		
3.00.03.02.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	00.00		
3.00.03.02.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	461,700,000.00		
3.00.03.02.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	107,000,000.00		
3.00.03.02.02.4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	125,000,000.00		
3.00.03.02.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	100,150,000.00		
3.00.03.02.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100,150,000.00		
3.00.03.02.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35,000,000.00		
3.00.03.02.05.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	35,000,000.00		
3.00.03.02.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	219,000,000.00		
3.00.03.02.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	33,000,000.00		
3.00.03.02.06.0	Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah	41,000,000.00		
3.00.03.02.06.1	Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah	145,000,000.00		
3.00.03.02.08	Perencanaan SKPD	10,000,000.00		
3.00.03.02.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	5,000,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
3.00.03.02.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	5,000,000.00		
3.00.03.02.46	Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3,043,630,000.00		
3.00.03.02.46.0	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	541,500,000.00		
3.00.03.02.46.0	Pengendalian Pajak Daerah	491,750,000.00		
3.00.03.02.46.0	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	947,880,000.00		
3.00.03.02.46.0	Penagihan Pajak Daerah	669,000,000.00		
3.00.03.02.46.0	Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah	393,500,000.00		
3.00.04.	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4,381,460,000.00		
3.00.04.01.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Daerah	4,381,460,000.00		
3.00.04.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,493,671,000.00		
3.00.04.01.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000.00		
3.00.04.01.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201,000,000.00		
3.00.04.01.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	25,000,000.00		
3.00.04.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	210,000,000.00		
3.00.04.01.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	78,000,000.00		
3.00.04.01.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	107,031,000.00		
3.00.04.01.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30,000,000.00		
3.00.04.01.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6,000,000.00		
3.00.04.01.01.1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,000,000.00		
3.00.04.01.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	50,000,000.00		
3.00.04.01.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	101,640,000.00		
3.00.04.01.01.2	Perjalanan Dinas	677,000,000.00		
3.00.04.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	492,000,000.00		
3.00.04.01.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	22,000,000.00		
3.00.04.01.02.1	Pengadaan mebeleur	20,000,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
3.00.04.01.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	40,000,000.00		
3.00.04.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50,000,000.00		
3.00.04.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	250,000,000.00		
3.00.04.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	60,000,000.00		
3.00.04.01.02.4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	50,000,000.00		
3.00.04.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	40,000,000.00		
3.00.04.01.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	40,000,000.00		
3.00.04.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30,000,000.00		
3.00.04.01.05.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	30,000,000.00		
3.00.04.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,000,000.00		
3.00.04.01.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5,000,000.00		
3.00.04.01.08	Perencanaan SKPD	10,000,000.00		
3.00.04.01.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	5,000,000.00		
3.00.04.01.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	5,000,000.00		
3.00.04.01.09	Pengembangan Data/Informasi	286,959,000.00		
3.00.04.01.09.0	Pengembangan Data/Informasi	286,959,000.00		
3.00.04.01.47	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2,023,830,000.00		
3.00.04.01.47.0	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi Daerah	250,000,000.00		
3.00.04.01.47.0	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	868,830,000.00		
3.00.04.01.47.0	Pendidikan dan Pelatihan Pengkaderan Formal	120,000,000.00		
3.00.04.01.47.0	Pelayanan dan Pembinaan CPNS, PNS, dan Tenaga Kontrak	95,000,000.00		
3.00.04.01.47.0	Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kinerja Aparatur	00.00		
3.00.04.01.47.0	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Pemberian Penghargaan Satyalencana Karya Satya dan Masa Kerja Pegawai Serta Pemantauan Evaluasi SKP	150,000,000.00		
3.00.04.01.47.0	Penyusunan Laporan Pajak-pajak Pribadi PNS	00.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
3.00.04.01.47.0	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	190,000,000.00		
3.00.04.01.47.0	Seleksi Penerimaan Calon PNS	150,000,000.00		
3.00.04.01.47.1	Pembinaan KORPRI dan Kesejahteraan Pegawai	200,000,000.00		
4.	PENDUKUNG	84,055,300,000.00		
4.00.	PENDUKUNG	84,055,300,000.00		
4.00.01.	SEKRETARIAT DAERAH	50,145,850,000.00		
4.00.01.02.	Sekretariat Daerah	50,145,850,000.00		
4.00.01.02.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	10,484,477,000.00		
4.00.01.02.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21,100,000.00		
4.00.01.02.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2,230,000,000.00		
4.00.01.02.01.0	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	485,000,000.00		
4.00.01.02.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1,290,800,000.00		
4.00.01.02.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	887,440,000.00		
4.00.01.02.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	110,000,000.00		
4.00.01.02.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	150,000,000.00		
4.00.01.02.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	152,500,000.00		
4.00.01.02.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	2,380,527,000.00		
4.00.01.02.01.1	Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	65,360,000.00		
4.00.01.02.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	258,560,000.00		
4.00.01.02.01.2	Perjalanan Dinas	2,453,190,000.00		
4.00.01.02.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,704,128,000.00		
4.00.01.02.02.0	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	430,000,000.00		
4.00.01.02.02.0	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	313,000,000.00		
4.00.01.02.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	175,754,000.00		
4.00.01.02.02.0	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	28,080,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
4.00.01.02.02.1	Pengadaan mebeleur	150,000,000.00		
4.00.01.02.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	00.00		
4.00.01.02.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	120,000,000.00		
4.00.01.02.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	80,000,000.00		
4.00.01.02.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	147,900,000.00		
4.00.01.02.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1,666,594,000.00		
4.00.01.02.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	52,800,000.00		
4.00.01.02.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	137,000,000.00		
4.00.01.02.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	263,000,000.00		
4.00.01.02.02.4	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	100,000,000.00		
4.00.01.02.02.4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	40,000,000.00		
4.00.01.02.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	212,040,000.00		
4.00.01.02.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	196,800,000.00		
4.00.01.02.03.0	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	15,240,000.00		
4.00.01.02.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	215,000,000.00		
4.00.01.02.05.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	215,000,000.00		
4.00.01.02.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1,131,010,000.00		
4.00.01.02.06.0	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	200,000,000.00		
4.00.01.02.06.1	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	175,000,000.00		
4.00.01.02.06.1	Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Jambi	756,010,000.00		
4.00.01.02.32	Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	6,200,000,000.00		
4.00.01.02.32.0	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	5,450,000,000.00		
4.00.01.02.32.0	Pengembangan Data dan Informasi dan Komunikasi Sosial	750,000,000.00		
4.00.01.02.48	Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik	1,324,230,000.00		
4.00.01.02.48.0	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	338,880,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
4.00.01.02.48.0	Penataan Sistem Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	185,500,000.00		
4.00.01.02.48.0	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal, CSR dan BUD	250,000,000.00		
4.00.01.02.48.0	Pembinaan, Pemantauan Penyelenggaraan Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM)	250,000,000.00		
4.00.01.02.48.0	Pengendalian Produksi dan Distribusi	299,850,000.00		
4.00.01.02.49	Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan	10,434,000,000.00		
4.00.01.02.49.0	Penilaian Aparatur teladan/berprestasi	175,000,000.00		
4.00.01.02.49.0	Pembinaan Administasi Pemerintahan Kelurahan	425,000,000.00		
4.00.01.02.49.0	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	150,000,000.00		
4.00.01.02.49.0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanahan	9,684,000,000.00		
4.00.01.02.50	Penataan Peraturan Per-UU dan Penyelesaian Perkara Pemerintah Daerah	1,092,000,000.00		
4.00.01.02.50.0	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	530,000,000.00		
4.00.01.02.50.0	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	200,000,000.00		
4.00.01.02.50.0	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan	362,000,000.00		
4.00.01.02.51	Peningkatan Kerjasama Daerah	725,000,000.00		
4.00.01.02.51.0	Fasilitasi dan Peningkatan Kerjasama Dalam Negeri	269,740,000.00		
4.00.01.02.51.0	Fasilitasi dan Peningkatan Kerjasama Luar Negeri	212,700,000.00		
4.00.01.02.51.0	Pemberian Informasi, Evaluasi dan Pengendalian Kerjasama	242,560,000.00		
4.00.01.02.52	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda dan Kerumahtanggaan	1,443,540,000.00		
4.00.01.02.52.0	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	25,000,000.00		
4.00.01.02.52.0	Rumah Tangga Kepala daerah dan Wakil kepala daerah	1,140,000,000.00		
4.00.01.02.52.0	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	278,540,000.00		
4.00.01.02.53	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda, Aparatur dan Keprotokolan	2,949,805,000.00		
4.00.01.02.53.0	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri	335,120,000.00		
4.00.01.02.53.0	Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	2,564,880,000.00		
4.00.01.02.53.0	Pemberdayaan dan Kapasitas Staf Ahli Walikota Jambi	49,805,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
4.00.01.02.54	Tata Kelola Organisasi Pemerintahan dan Administrasi Pembangunan	2,195,620,000.00		
4.00.01.02.54.0	Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	125,000,000.00		
4.00.01.02.54.0	Penataan Instrumen Analisis Jabatan PNS	95,000,000.00		
4.00.01.02.54.0	Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK)	60,000,000.00		
4.00.01.02.54.0	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	55,620,000.00		
4.00.01.02.54.0	Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	100,000,000.00		
4.00.01.02.54.0	Pengendalian Pembangunan	200,000,000.00		
4.00.01.02.54.0	Pengelolaan Administrasi Pembangunan	1,560,000,000.00		
4.00.01.02.55	Pembinaan dan Fasilitasi bagi Organisasi dan Kegiatan Keagamaan	8,035,000,000.00		
4.00.01.02.55.0	Peningkatan Peran Serta dan Kualitas Umat Beragama	7,635,000,000.00		
4.00.01.02.55.0	Peningkatan Peran Fungsi Pemuda dan Masyarakat	200,000,000.00		
4.00.01.02.55.0	Kesejahteraan dan Jaminan Kesejahteraan Aparatur	200,000,000.00		
4.00.02.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	33,909,450,000.00		
4.00.02.02.	Sekretariat DPRD	33,909,450,000.00		
4.00.02.02.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,797,521,500.00		
4.00.02.02.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	00.00		
4.00.02.02.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	697,000,000.00		
4.00.02.02.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	168,000,000.00		
4.00.02.02.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	371,886,000.00		
4.00.02.02.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	530,875,000.00		
4.00.02.02.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	195,000,000.00		
4.00.02.02.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	295,000,000.00		
4.00.02.02.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50,000,000.00		
4.00.02.02.01.1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300,000,000.00		
4.00.02.02.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	350,000,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
4.00.02.02.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	592,800,000.00		
4.00.02.02.01.2	Perjalanan Dinas	2,246,960,500.00		
4.00.02.02.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,935,889,500.00		
4.00.02.02.02.0	Pengadaan mobil jabatan	00.00		
4.00.02.02.02.0	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	00.00		
4.00.02.02.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	155,000,000.00		
4.00.02.02.02.1	Pengadaan mebeleur	100,000,000.00		
4.00.02.02.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	166,176,500.00		
4.00.02.02.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	374,337,500.00		
4.00.02.02.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	264,800,000.00		
4.00.02.02.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	509,600,000.00		
4.00.02.02.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	225,975,500.00		
4.00.02.02.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	40,000,000.00		
4.00.02.02.02.4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100,000,000.00		
4.00.02.02.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	112,500,000.00		
4.00.02.02.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	112,500,000.00		
4.00.02.02.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	74,000,000.00		
4.00.02.02.05.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	74,000,000.00		
4.00.02.02.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	00.00		
4.00.02.02.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	00.00		
4.00.02.02.08	Perencanaan SKPD	00.00		
4.00.02.02.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	00.00		
4.00.02.02.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	00.00		
4.00.02.02.09	Pengembangan Data/Informasi	00.00		
4.00.02.02.09.0	Pengembangan Data/Informasi	00.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
4.00.02.02.56	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	24,810,709,000.00		
4.00.02.02.56.0	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3,379,800,000.00		
4.00.02.02.56.0	Rapat-Rapat Paripurna	3,026,189,000.00		
4.00.02.02.56.0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	656,000,000.00		
4.00.02.02.56.0	Reses, Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	1,987,000,000.00		
4.00.02.02.56.0	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD	4,581,150,000.00		
4.00.02.02.56.0	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	11,180,570,000.00		
4.00.02.02.57	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD	1,178,830,000.00		
4.00.02.02.57.0	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Luar Negara/Lembaga Pemerintahan/Non Lembaga Pemerintahan	455,680,000.00		
4.00.02.02.57.0	Pengadaan Pakaian Dinas Anggota Dewan beserta Perlengkapan	723,150,000.00		
5.	KEWILAYAHAN	51,078,274,500.00		
5.00.	KEWILAYAHAN	51,078,274,500.00		
5.00.01.	KECAMATAN	51,078,274,500.00		
5.00.01.01.	Kecamatan Kota Baru	4,809,831,500.00		
5.00.01.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	725,811,500.00		
5.00.01.01.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	00.00		
5.00.01.01.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128,370,500.00		
5.00.01.01.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8,000,000.00		
5.00.01.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	160,400,000.00		
5.00.01.01.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	67,071,000.00		
5.00.01.01.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	82,700,000.00		
5.00.01.01.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13,500,000.00		
5.00.01.01.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,000,000.00		
5.00.01.01.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	44,250,000.00		
5.00.01.01.01.1	Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	67,320,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
5.00.01.01.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	19,200,000.00		
5.00.01.01.01.2	Perjalanan Dinas	130,000,000.00		
5.00.01.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	248,400,000.00		
5.00.01.01.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	51,000,000.00		
5.00.01.01.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	27,000,000.00		
5.00.01.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	142,400,000.00		
5.00.01.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	28,000,000.00		
5.00.01.01.02.4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	00.00		
5.00.01.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	32,500,000.00		
5.00.01.01.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	32,500,000.00		
5.00.01.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10,000,000.00		
5.00.01.01.05.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10,000,000.00		
5.00.01.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2,025,000.00		
5.00.01.01.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,025,000.00		
5.00.01.01.08	Perencanaan SKPD	1,500,000.00		
5.00.01.01.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	00.00		
5.00.01.01.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1,500,000.00		
5.00.01.01.09	Pengembangan Data/Informasi	49,560,000.00		
5.00.01.01.09.0	Pengembangan Data/Informasi	49,560,000.00		
5.00.01.01.27	Pemberdayaan Masyarakat	3,740,035,000.00		
5.00.01.01.27.0	Bangkit Berdaya	1,000,000,000.00		
5.00.01.01.27.0	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	1,185,085,000.00		
5.00.01.01.27.0	Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	96,290,000.00		
5.00.01.01.27.0	Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	1,458,660,000.00		
5.00.01.02.	Kecamatan Telanaipura	4,689,337,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
5.00.01.02.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	986,280,000.00		
5.00.01.02.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,978,000.00		
5.00.01.02.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123,600,000.00		
5.00.01.02.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	131,600,000.00		
5.00.01.02.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	36,000,000.00		
5.00.01.02.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	85,002,000.00		
5.00.01.02.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40,000,000.00		
5.00.01.02.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10,500,000.00		
5.00.01.02.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	37,500,000.00		
5.00.01.02.01.1	Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	254,100,000.00		
5.00.01.02.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	66,000,000.00		
5.00.01.02.01.2	Perjalanan Dinas	198,000,000.00		
5.00.01.02.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	234,037,000.00		
5.00.01.02.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	00.00		
5.00.01.02.02.1	Pengadaan mebeleur	00.00		
5.00.01.02.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	3,800,000.00		
5.00.01.02.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	92,200,000.00		
5.00.01.02.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	37,950,000.00		
5.00.01.02.02.4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100,087,000.00		
5.00.01.02.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	48,750,000.00		
5.00.01.02.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	48,750,000.00		
5.00.01.02.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10,000,000.00		
5.00.01.02.05.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10,000,000.00		
5.00.01.02.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2,120,000.00		
5.00.01.02.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,120,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
5.00.01.02.08	Perencanaan SKPD	2,120,000.00		
5.00.01.02.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	00.00		
5.00.01.02.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	2,120,000.00		
5.00.01.02.09	Pengembangan Data/Informasi	2,500,000.00		
5.00.01.02.09.0	Pengembangan Data/Informasi	2,500,000.00		
5.00.01.02.27	Pemberdayaan Masyarakat	3,403,530,000.00		
5.00.01.02.27.0	Bangkit Berdaya	1,000,000,000.00		
5.00.01.02.27.0	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	1,097,180,000.00		
5.00.01.02.27.0	Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	103,100,000.00		
5.00.01.02.27.0	Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	1,203,250,000.00		
5.00.01.02.27.0	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	00.00		
5.00.01.03.	Kecamatan Jelutung	5,193,792,000.00		
5.00.01.03.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	601,019,000.00		
5.00.01.03.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	00.00		
5.00.01.03.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80,000,000.00		
5.00.01.03.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6,400,000.00		
5.00.01.03.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	109,500,000.00		
5.00.01.03.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	76,700,000.00		
5.00.01.03.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	92,500,000.00		
5.00.01.03.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14,994,000.00		
5.00.01.03.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,650,000.00		
5.00.01.03.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	26,675,000.00		
5.00.01.03.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	69,600,000.00		
5.00.01.03.01.2	Perjalanan Dinas	119,000,000.00		
5.00.01.03.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	176,900,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
5.00.01.03.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10,000,000.00		
5.00.01.03.02.1	Pengadaan mebeleur	15,000,000.00		
5.00.01.03.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	14,500,000.00		
5.00.01.03.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	29,400,000.00		
5.00.01.03.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	93,500,000.00		
5.00.01.03.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	14,500,000.00		
5.00.01.03.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	34,000,000.00		
5.00.01.03.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	34,000,000.00		
5.00.01.03.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	42,500,000.00		
5.00.01.03.05.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	42,500,000.00		
5.00.01.03.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,000,000.00		
5.00.01.03.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5,000,000.00		
5.00.01.03.08	Perencanaan SKPD	5,000,000.00		
5.00.01.03.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	00.00		
5.00.01.03.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	5,000,000.00		
5.00.01.03.09	Pengembangan Data/Informasi	77,175,000.00		
5.00.01.03.09.0	Pengembangan Data/Informasi	77,175,000.00		
5.00.01.03.27	Pemberdayaan Masyarakat	4,252,198,000.00		
5.00.01.03.27.0	Bangkit Berdaya	1,000,000,000.00		
5.00.01.03.27.0	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	1,191,100,000.00		
5.00.01.03.27.0	Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	263,158,000.00		
5.00.01.03.27.0	Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	1,797,940,000.00		
5.00.01.03.27.0	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	00.00		
5.00.01.04.	Kecamatan Pasar	3,375,820,000.00		
5.00.01.04.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	949,796,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
5.00.01.04.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	00.00		
5.00.01.04.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210,000,000.00		
5.00.01.04.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	138,000,000.00		
5.00.01.04.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	14,520,000.00		
5.00.01.04.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	46,876,000.00		
5.00.01.04.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40,000,000.00		
5.00.01.04.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10,000,000.00		
5.00.01.04.01.1	Penyediaan peralatan rumah tangga	25,000,000.00		
5.00.01.04.01.1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10,000,000.00		
5.00.01.04.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	25,000,000.00		
5.00.01.04.01.1	Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	224,400,000.00		
5.00.01.04.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	66,000,000.00		
5.00.01.04.01.2	Perjalanan Dinas	140,000,000.00		
5.00.01.04.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	491,800,000.00		
5.00.01.04.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	35,000,000.00		
5.00.01.04.02.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	50,000,000.00		
5.00.01.04.02.1	Pengadaan mebeleur	60,000,000.00		
5.00.01.04.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	65,000,000.00		
5.00.01.04.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10,000,000.00		
5.00.01.04.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	148,800,000.00		
5.00.01.04.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15,000,000.00		
5.00.01.04.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	8,000,000.00		
5.00.01.04.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	20,000,000.00		
5.00.01.04.02.4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	80,000,000.00		
5.00.01.04.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	27,500,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
5.00.01.04.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	27,500,000.00		
5.00.01.04.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20,000,000.00		
5.00.01.04.05.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20,000,000.00		
5.00.01.04.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,000,000.00		
5.00.01.04.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5,000,000.00		
5.00.01.04.08	Perencanaan SKPD	5,000,000.00		
5.00.01.04.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	00.00		
5.00.01.04.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	5,000,000.00		
5.00.01.04.09	Pengembangan Data/Informasi	30,000,000.00		
5.00.01.04.09.0	Pengembangan Data/Informasi	30,000,000.00		
5.00.01.04.27	Pemberdayaan Masyarakat	1,846,724,000.00		
5.00.01.04.27.0	Bangkit Berdaya	216,000,000.00		
5.00.01.04.27.0	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	704,924,000.00		
5.00.01.04.27.0	Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	40,000,000.00		
5.00.01.04.27.0	Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	885,800,000.00		
5.00.01.05.	Kecamatan Jambi Selatan	4,355,305,000.00		
5.00.01.05.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	981,965,000.00		
5.00.01.05.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000.00		
5.00.01.05.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152,000,000.00		
5.00.01.05.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	120,400,000.00		
5.00.01.05.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	146,028,000.00		
5.00.01.05.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	30,360,000.00		
5.00.01.05.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	82,000,000.00		
5.00.01.05.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18,500,000.00		
5.00.01.05.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12,000,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
5.00.01.05.01.1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1,400,000.00		
5.00.01.05.01.1	Penyediaan peralatan rumah tangga	13,000,000.00		
5.00.01.05.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	40,000,000.00		
5.00.01.05.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	269,940,000.00		
5.00.01.05.01.2	Perjalanan Dinas	92,337,000.00		
5.00.01.05.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24,000,000.00		
5.00.01.05.02.1	Pengadaan mebeleur	8,000,000.00		
5.00.01.05.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	16,000,000.00		
5.00.01.05.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	00.00		
5.00.01.05.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	00.00		
5.00.01.05.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10,000,000.00		
5.00.01.05.05.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10,000,000.00		
5.00.01.05.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2,010,000.00		
5.00.01.05.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,010,000.00		
5.00.01.05.08	Perencanaan SKPD	3,010,000.00		
5.00.01.05.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	3,010,000.00		
5.00.01.05.09	Pengembangan Data/Informasi	4,800,000.00		
5.00.01.05.09.0	Pengembangan Data/Informasi	4,800,000.00		
5.00.01.05.27	Pemberdayaan Masyarakat	3,329,520,000.00		
5.00.01.05.27.0	Bangkit Berdaya	1,000,000,000.00		
5.00.01.05.27.0	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	1,078,420,000.00		
5.00.01.05.27.0	Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	00.00		
5.00.01.05.27.0	Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	1,251,100,000.00		
5.00.01.06.	Kecamatan Jambi Timur	5,783,195,000.00		
5.00.01.06.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,407,675,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
5.00.01.06.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	00.00		
5.00.01.06.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210,300,000.00		
5.00.01.06.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	147,860,000.00		
5.00.01.06.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	38,960,000.00		
5.00.01.06.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	114,700,000.00		
5.00.01.06.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12,100,000.00		
5.00.01.06.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4,700,000.00		
5.00.01.06.01.1	Penyediaan peralatan rumah tangga	2,400,000.00		
5.00.01.06.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	40,795,000.00		
5.00.01.06.01.1	Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	547,140,000.00		
5.00.01.06.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	93,720,000.00		
5.00.01.06.01.2	Perjalanan Dinas	195,000,000.00		
5.00.01.06.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	321,700,000.00		
5.00.01.06.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	14,000,000.00		
5.00.01.06.02.1	Pengadaan mebeleur	10,000,000.00		
5.00.01.06.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	10,000,000.00		
5.00.01.06.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20,000,000.00		
5.00.01.06.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	196,000,000.00		
5.00.01.06.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5,100,000.00		
5.00.01.06.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	6,600,000.00		
5.00.01.06.02.4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	60,000,000.00		
5.00.01.06.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	00.00		
5.00.01.06.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	00.00		
5.00.01.06.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	00.00		
5.00.01.06.05.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	00.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
5.00.01.06.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3,000,000.00		
5.00.01.06.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3,000,000.00		
5.00.01.06.08	Perencanaan SKPD	16,000,000.00		
5.00.01.06.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	12,000,000.00		
5.00.01.06.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	4,000,000.00		
5.00.01.06.09	Pengembangan Data/Informasi	16,000,000.00		
5.00.01.06.09.0	Pengembangan Data/Informasi	16,000,000.00		
5.00.01.06.27	Pemberdayaan Masyarakat	4,018,820,000.00		
5.00.01.06.27.0	Bangkit Berdaya	700,000,000.00		
5.00.01.06.27.0	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	1,521,720,000.00		
5.00.01.06.27.0	Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	19,400,000.00		
5.00.01.06.27.0	Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	1,777,700,000.00		
5.00.01.07.	Kecamatan Danau Teluk	3,360,849,000.00		
5.00.01.07.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	806,040,000.00		
5.00.01.07.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,800,000.00		
5.00.01.07.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60,000,000.00		
5.00.01.07.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10,000,000.00		
5.00.01.07.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	142,080,000.00		
5.00.01.07.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	40,000,000.00		
5.00.01.07.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	40,000,000.00		
5.00.01.07.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40,000,000.00		
5.00.01.07.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,000,000.00		
5.00.01.07.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	50,000,000.00		
5.00.01.07.01.1	Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	260,040,000.00		
5.00.01.07.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	54,120,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
5.00.01.07.01.2	Perjalanan Dinas	100,000,000.00		
5.00.01.07.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	164,450,000.00		
5.00.01.07.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	00.00		
5.00.01.07.02.1	Pengadaan mebeleur	00.00		
5.00.01.07.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	00.00		
5.00.01.07.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	153,450,000.00		
5.00.01.07.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	11,000,000.00		
5.00.01.07.02.4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	00.00		
5.00.01.07.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	39,000,000.00		
5.00.01.07.03.0	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	39,000,000.00		
5.00.01.07.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	00.00		
5.00.01.07.05.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	00.00		
5.00.01.07.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,000,000.00		
5.00.01.07.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5,000,000.00		
5.00.01.07.08	Perencanaan SKPD	10,000,000.00		
5.00.01.07.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	00.00		
5.00.01.07.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	10,000,000.00		
5.00.01.07.09	Pengembangan Data/Informasi	5,000,000.00		
5.00.01.07.09.0	Pengembangan Data/Informasi	5,000,000.00		
5.00.01.07.27	Pemberdayaan Masyarakat	2,331,359,000.00		
5.00.01.07.27.0	Bangkit Berdaya	600,000,000.00		
5.00.01.07.27.0	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	1,044,359,000.00		
5.00.01.07.27.0	Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	76,000,000.00		
5.00.01.07.27.0	Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	606,000,000.00		
5.00.01.07.27.0	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	5,000,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
5.00.01.08.	Kecamatan Pelayangan	3,359,477,000.00		
5.00.01.08.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	592,680,000.00		
5.00.01.08.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	00.00		
5.00.01.08.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80,000,000.00		
5.00.01.08.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	105,600,000.00		
5.00.01.08.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13,880,000.00		
5.00.01.08.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	67,000,000.00		
5.00.01.08.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	38,000,000.00		
5.00.01.08.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10,000,000.00		
5.00.01.08.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	66,000,000.00		
5.00.01.08.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	112,200,000.00		
5.00.01.08.01.2	Perjalanan Dinas	100,000,000.00		
5.00.01.08.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	162,780,000.00		
5.00.01.08.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	00.00		
5.00.01.08.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10,000,000.00		
5.00.01.08.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	137,780,000.00		
5.00.01.08.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	15,000,000.00		
5.00.01.08.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	30,000,000.00		
5.00.01.08.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	30,000,000.00		
5.00.01.08.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1,000,000.00		
5.00.01.08.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,000,000.00		
5.00.01.08.08	Perencanaan SKPD	3,500,000.00		
5.00.01.08.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	00.00		
5.00.01.08.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	3,500,000.00		
5.00.01.08.09	Pengembangan Data/Informasi	00.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
5.00.01.08.09.0	Pengembangan Data/Informasi	00.00		
5.00.01.08.27	Pemberdayaan Masyarakat	2,569,517,000.00		
5.00.01.08.27.0	Bangkit Berdaya	600,000,000.00		
5.00.01.08.27.0	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	1,214,187,000.00		
5.00.01.08.27.0	Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	63,330,000.00		
5.00.01.08.27.0	Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	691,000,000.00		
5.00.01.08.27.0	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	1,000,000.00		
5.00.01.09.	Kecamatan Alam Barajo	6,142,812,000.00		
5.00.01.09.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	746,700,000.00		
5.00.01.09.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	00.00		
5.00.01.09.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115,000,000.00		
5.00.01.09.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8,500,000.00		
5.00.01.09.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	141,600,000.00		
5.00.01.09.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	35,000,000.00		
5.00.01.09.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	80,000,000.00		
5.00.01.09.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	38,000,000.00		
5.00.01.09.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10,000,000.00		
5.00.01.09.01.1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,000,000.00		
5.00.01.09.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	48,000,000.00		
5.00.01.09.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	132,600,000.00		
5.00.01.09.01.2	Perjalanan Dinas	135,000,000.00		
5.00.01.09.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	400,000,000.00		
5.00.01.09.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	90,000,000.00		
5.00.01.09.02.1	Pengadaan mebeleur	90,000,000.00		
5.00.01.09.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	75,000,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
5.00.01.09.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	120,000,000.00		
5.00.01.09.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	7,000,000.00		
5.00.01.09.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	18,000,000.00		
5.00.01.09.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	36,900,000.00		
5.00.01.09.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	36,900,000.00		
5.00.01.09.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15,000,000.00		
5.00.01.09.05.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	15,000,000.00		
5.00.01.09.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3,000,000.00		
5.00.01.09.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3,000,000.00		
5.00.01.09.08	Perencanaan SKPD	6,000,000.00		
5.00.01.09.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	3,000,000.00		
5.00.01.09.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	3,000,000.00		
5.00.01.09.09	Pengembangan Data/Informasi	20,000,000.00		
5.00.01.09.09.0	Pengembangan Data/Informasi	20,000,000.00		
5.00.01.09.27	Pemberdayaan Masyarakat	4,915,212,000.00		
5.00.01.09.27.0	Bangkit Berdaya	1,000,000,000.00		
5.00.01.09.27.0	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	2,230,212,000.00		
5.00.01.09.27.0	Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	75,000,000.00		
5.00.01.09.27.0	Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	1,610,000,000.00		
5.00.01.10.	Kecamatan Danau Sipin	4,599,818,000.00		
5.00.01.10.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	763,840,000.00		
5.00.01.10.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	00.00		
5.00.01.10.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110,000,000.00		
5.00.01.10.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8,000,000.00		
5.00.01.10.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	170,000,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
5.00.01.10.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	41,800,000.00		
5.00.01.10.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	60,000,000.00		
5.00.01.10.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15,000,000.00		
5.00.01.10.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13,000,000.00		
5.00.01.10.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	35,000,000.00		
5.00.01.10.01.1	Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	79,200,000.00		
5.00.01.10.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	81,840,000.00		
5.00.01.10.01.2	Perjalanan Dinas	150,000,000.00		
5.00.01.10.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	391,310,000.00		
5.00.01.10.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	65,000,000.00		
5.00.01.10.02.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	97,350,000.00		
5.00.01.10.02.1	Pengadaan mebeleur	100,000,000.00		
5.00.01.10.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	113,960,000.00		
5.00.01.10.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	15,000,000.00		
5.00.01.10.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	33,500,000.00		
5.00.01.10.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	33,500,000.00		
5.00.01.10.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10,000,000.00		
5.00.01.10.05.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10,000,000.00		
5.00.01.10.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2,000,000.00		
5.00.01.10.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,000,000.00		
5.00.01.10.08	Perencanaan SKPD	2,000,000.00		
5.00.01.10.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	00.00		
5.00.01.10.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	2,000,000.00		
5.00.01.10.09	Pengembangan Data/Informasi	7,000,000.00		
5.00.01.10.09.0	Pengembangan Data/Informasi	7,000,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
5.00.01.10.27	Pemberdayaan Masyarakat	3,390,168,000.00		
5.00.01.10.27.0	Bangkit Berdaya	1,000,000,000.00		
5.00.01.10.27.0	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	1,057,298,000.00		
5.00.01.10.27.0	Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	45,470,000.00		
5.00.01.10.27.0	Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	1,287,400,000.00		
5.00.01.10.27.0	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	00.00		
5.00.01.11.	Kecamatan Paal Merah	5,408,038,000.00		
5.00.01.11.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,037,179,000.00		
5.00.01.11.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	00.00		
5.00.01.11.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169,400,000.00		
5.00.01.11.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	155,076,000.00		
5.00.01.11.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	56,310,000.00		
5.00.01.11.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	90,163,000.00		
5.00.01.11.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19,700,000.00		
5.00.01.11.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7,500,000.00		
5.00.01.11.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	60,250,000.00		
5.00.01.11.01.1	Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	240,900,000.00		
5.00.01.11.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	110,880,000.00		
5.00.01.11.01.2	Perjalanan Dinas	127,000,000.00		
5.00.01.11.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	311,409,000.00		
5.00.01.11.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	41,609,000.00		
5.00.01.11.02.1	Pengadaan mebeleur	75,400,000.00		
5.00.01.11.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	52,400,000.00		
5.00.01.11.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	132,000,000.00		
5.00.01.11.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	10,000,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
5.00.01.11.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	37,500,000.00		
5.00.01.11.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	37,500,000.00		
5.00.01.11.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5,000,000.00		
5.00.01.11.05.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5,000,000.00		
5.00.01.11.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3,200,000.00		
5.00.01.11.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3,200,000.00		
5.00.01.11.08	Perencanaan SKPD	4,000,000.00		
5.00.01.11.08.0	Penyusunan Renstra SKPD	2,000,000.00		
5.00.01.11.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	2,000,000.00		
5.00.01.11.09	Pengembangan Data/Informasi	8,000,000.00		
5.00.01.11.09.0	Pengembangan Data/Informasi	8,000,000.00		
5.00.01.11.27	Pemberdayaan Masyarakat	4,001,750,000.00		
5.00.01.11.27.0	Bangkit Berdaya	1,000,000,000.00		
5.00.01.11.27.0	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	634,465,000.00		
5.00.01.11.27.0	Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	43,285,000.00		
5.00.01.11.27.0	Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	2,324,000,000.00		
5.00.01.11.27.0	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	00.00		
6.	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2,048,310,000.00		
6.00.	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2,048,310,000.00		
6.00.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	2,048,310,000.00		
6.00.01.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,048,310,000.00		
6.00.01.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	932,193,000.00		
6.00.01.01.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	00.00		
6.00.01.01.01.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54,000,000.00		
6.00.01.01.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	11,000,000.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
6.00.01.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	408,800,000.00		
6.00.01.01.01.0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5,000,000.00		
6.00.01.01.01.0	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12,500,000.00		
6.00.01.01.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	30,000,000.00		
6.00.01.01.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13,473,000.00		
6.00.01.01.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,900,000.00		
6.00.01.01.01.1	Penyediaan peralatan rumah tangga	00.00		
6.00.01.01.01.1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	00.00		
6.00.01.01.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	17,000,000.00		
6.00.01.01.01.2	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	14,520,000.00		
6.00.01.01.01.2	Perjalanan Dinas	363,000,000.00		
6.00.01.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	253,450,000.00		
6.00.01.01.02.0	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	00.00		
6.00.01.01.02.0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	00.00		
6.00.01.01.02.1	Pengadaan mebeleur	2,500,000.00		
6.00.01.01.02.1	Pengadaan peralatan perkantoran	14,550,000.00		
6.00.01.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9,000,000.00		
6.00.01.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	161,100,000.00		
6.00.01.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6,300,000.00		
6.00.01.01.02.4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	60,000,000.00		
6.00.01.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	20,000,000.00		
6.00.01.01.03.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	20,000,000.00		
6.00.01.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5,000,000.00		
6.00.01.01.05.0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5,000,000.00		
6.00.01.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	00.00		

KODE	URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	OUTPUT	KETERANGAN
6.00.01.01.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	00.00		
6.00.01.01.06.0	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	00.00		
6.00.01.01.08	Perencanaan SKPD	00.00		
6.00.01.01.08.0	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	00.00		
6.00.01.01.58	Pembinaan, Pemberdayaan, dan Fasilitas Bagi Orkemas dan Parpol	273,848,000.00		
6.00.01.01.58.0	Koordinasi dan Pemantauan Situasi Politik serta	204,498,000.00		
6.00.01.01.58.0	Pembinaan Pertanggung-jawaban Bantuan Keuangan bagi Parpol	25,425,000.00		
6.00.01.01.58.0	Pemantauan Orkesmas	43,925,000.00		
6.00.01.01.59	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	563,819,000.00		
6.00.01.01.59.0	Fasilitas, Pemantauan dan Pengendalian Keamanan	86,529,000.00		
6.00.01.01.59.0	Peningkatan ketahanan Seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi	141,750,000.00		
6.00.01.01.59.0	Pembinaan dan Pengembangan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	266,610,000.00		
6.00.01.01.59.0	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA)	68,930,000.00		

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja Perencanaan Pemerintah Daerah meliputi Indikator Kinerja Utama atau disingkat IKU dan Indikator Kinerja Kunci atau disingkat IKK. IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah, adapun IKK adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1.
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target kinerja						Realisasi Kinerja						Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=); melampau (>)
		2012	2013	2014	2015	2016	2017**	2012	2013	2014	2015	2016	2017**	
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat													
	<i>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</i>													
1	PDRB							12.848.141,29	13.939.735,24	15.080.229,51	15.921.206,06	17.005.778,14		
2	Laju inflasi								8,74	8,72	1,37	4,54	2,68	
3	PDRB per kapita (Juta)							26.24	29.13	33.41	37.07	41.9		
	<i>Fokus Kesejahteraan Sosial</i>													
1	Angka melek huruf								0,983963	0,985611	0,9999	0,9998	0,9999	
2	Angka rata-rata lama sekolah							10,56	10,57	10,62	10,63	10,65		
3	Angka partisipasi kasar													
	SD/MI/Paket A								105.58%	108.84%	108.87%	108.88%	110.95%	
	SMP/MTS/Paket B								108.84%	108.84%	110.38%	110.40%	112%	
	SMA/SMK/Paket C								89.92%	89.92%	90.87%	93.68%	Pengelolaan Provinsi	
4	Angka pendidikan yang ditamatkan													
	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SD								10.695	9.842	11.164	11.164	11.074	
	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SMP/MTS								7.383	10.551	13.448	13.448	13.343	
5	Angka partisipasi murni													
	SD/MI/Paket A								99.76%	99.83%	99.89%	99.90%	99.97%	
	SMP/MTS/Paket B								91.37%	93.54%	94.48%	94.86%	95.08%	
	SMA/SMK/Paket C								74.11%	78.22%	79.02%	79.22%	Pengelolaan Provinsi	
6	Angka kelangsungan hidup bayi													
	Jumlah Kematian Bayi								27	9	9	9	12	
	Jumlah Kelahiran Hidup								13.592	13.079	12.745	10.43	13.039	
7	Persentase balita gizi buruk								0.03%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	
8	Penduduk Yang Bekerja (PYB)							226.607	230.478	235.722	254.351	-	268.264	
	<i>Fokus Seni Budaya dan Olahraga</i>													
1	Jumlah Grup Kesenian								185	185	185	185	185	
2	Jumlah Gedung Kesenian								0	0	0	0	0	
3	penyelenggaraan festival seni & budaya								1	3	3	5	5	
4	Jumlah Penduduk								539,242	559,571	602,970	607,796	609,620	
5	Benda Cagar Budaya yang dilestarikan								2	2	2	2	2	
6	Situs Cagar Budaya yang dilestarikan								3	3	3	3	3	
7	Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan								1	1	1	1	1	
8	Jumlah Cabor Olahraga								28	28	28	28	28	
9	Jumlah Gedung Olahraga								3	3	3	3	3	
10	Jumlah Kegiatan Olahraga								28	28	28	28	11	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target kinerja						Realisasi Kinerja						Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=); melampau (>)
		2012	2013	2014	2015	2016	2017**	2012	2013	2014	2015	2016	2017**	
11	Lapangan Olahraga								1	1	1	1	7	
12	Jumlah Organisasi Pemuda								15	15	15	14	20	
13	Jumlah Kegiatan Kepemudaan								1	6	6	6	6	
Aspek Pelayanan Umum														
Pendidikan														
1	APS SD/MI								99,769,812	99,831,772	9,985,366	998,401	99.99	
2	APS SMP/MTs								91,666,667	93,543,999	93,63	99,821	95.076	
3	Rasio Guru dan Murid													
	SD/MI								0,0497018	0,0509661	0,04970125	0,047933	0.054476	
	SMP/MTs								0,0897121	0,0653702	0,06587634	0,065077	0.059835	
Kesehatan														
1	Rasio Posyandu Per satuan Balita								7,62	8,10	7,93	8,69	6,31	
2	Rasio Rumah Sakit Per satuan Penduduk								0,003	0,003	0,002	0,002	0,003	
3	Rasio Puskesmas/Pustu Per Satuan Penduduk								0,011	0,010	0,010	0,010	0,010	
4	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk								0,047	0,046	0,042	0,042	0,010	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang														
1	Ratio Jaringan Jalan Kondisi Baik (%)								65.44	68.1	85.14	90	92	
2	Ratio Jaringan Drainase Kondisi Baik (%)								46,67	57,60	83,29	84,20	90	
3	Ratio RTH								6.70%	6.81%	6.91%	7.26%	7.36%	
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman														
1	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih								61,661 SR	62,883 SR	63,429 SR	69,379 SR	72965 SR	
2	Cakupan Pelayanan								65%	66%	66%	72%	75%	
3	Rasio Daya Tampung TPS Terhadap Jumlah Penuduk									1,150	1,204	1,282		
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat														
1	Jumlah patroli petugas satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 jam								102 kali	377 kali	552 kali	703 kali	939 kali	
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan di kab/kota)								100%	100%	100%	100%	100%	
Sosial														
1	Penanganan PMKS di Kota Jambi								3891	3891	4671	5317	7398	
Tenaga Kerja														

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target kinerja						Realisasi Kinerja						Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=); melampau (>)
		2012	2013	2014	2015	2016	2017**	2012	2013	2014	2015	2016	2017**	
1	Rasio Penduduk Yang Bekerja								92.68	89.87	92.67		94,45	
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)								60,32	62,39	64,04	dt	64,06	
3	Pencari Kerja Yang Ditempatkan								7,56	33,34	35,49	37,90	49,77	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka								7,31	10,13	7,32	dt	5,55	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan								5.34%	5.50%	6.41%	5.11%		
2	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta								94.66%	94.50%	93.59%	94.89%		
3	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan								43.05%	45.78%	46.69%			
4	Rasio Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan								100%	100%	100%	100%		
	Lingkungan Hidup													
1	Persentase penanganan sampah								60,8	64,8	65,5	69,3		
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil													
1	Jumlah Penduduk								539,242	559,571	602,970	607,796	609,620	
2	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP								299,371	301,113	301,122	308,077	348,022	
3	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah								401,560	411,483	418,231	438,234	581,230	
4	Jumlah pasangan nikah berakte nikah								72,857	73,639	74,241	78,811	94,961	
5	Jumlah keseluruhan pasangan nikah								259,092	263,684	266,605	273,263	336,393	
6	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan								299,371	301,113	301,122	308,077	348,022	
7	Jumlah penduduk wajib KTP								401,560	411,483	418,731	438,234	581,230	
8	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan								4,803	9,191	9,116	8,327	8,287	
9	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan								10,596	10,004	9,887	9,017	8,935	
	Komunikasi dan Informatika													
1	Jumlah Jaringan Telepon Genggam								5	6	6	6	6	
2	Jumlah Jaringan Telepon Stationer								1	1	1	1	1	
3	Jumlah Wartel								10	5	4	3	1	
4	Jumlah Warnet								85	92	100	103	19	
5	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal								47	47	47	47	47	
6	Jumlah Penyiaran Radio/TV								17	17	21	43	43	
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													
1	Persentase koperasi aktif								46,58	44,70	46,00	47,07	47.39	
	Penanaman Modal													

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target kinerja						Realisasi Kinerja						Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=); melampau (>)
		2012	2013	2014	2015	2016	2017**	2012	2013	2014	2015	2016	2017**	
1	Penanaman Modal								(n/a)	5	8	11	5	
2	Jumlah Realisasi Nilai Investasi PMDN/PMA								(n/a)	391.573.244.050	8.483.400.000	101.618.589.536	83.100.700.000	
3	Rasio daya serap tenaga kerja								(n/a)	284,4	82,63	46,09	318,4	
	Perpustakaan													
1	Jumlah Anggota Pustaka									663	776	1.033	922	
2	Jumlah Pengunjung Pustaka								11.769	12.692	14.896	28.435	37.337	
3	Jumlah Koleksi Judul Buku								1.549	1.215	18.298	19.569	20.128	
4	Jumlah Koleksi Buku								4.028	1.863	41.326	44.639	46.18	
	Kearsipan													
1	Jumlah SKPD Yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku								-	-	-	1	12	
Aspek Daya Saing Daerah														
	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah													
1	Total Pengeluaran RT								426.607,00	479.495,00	606.249,00	701.797,00	696.291	
2	Jumlah RT								819.972,00	924.956,00	1.066.587,00	1.254.523,00	1.272.452	
	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur													
1	Luas Seluruh Wil. Budidaya								12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	
	Fokus Iklim Berinvestasi													
1	Angka kriminalitas													
2	Jumlah kasus Narkoba								97	115	96	98	52	
3	Jumlah kasus Pembunuhan								9	1	1	-	-	
4	Jumlah Kejahatan Seksual								42	53	21	146	48	
5	Jumlah kasus Penganiayaan								60	222	326	392	139	
6	Jumlah kasus Pencurian								130	299	356	528	191	
7	Jumlah kasus Penipuan								137	206	360	528	234	
8	Jumlah kasus Pemalsuan uang								-	1	1	-	-	
9	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun								475	897	1.161	1.692	664	
1	Jumlah demonstrasi													
2	Jumlah Unjuk Rasa								265	195	280	169	65	
	Fokus Sumber Daya Manusia													
1	Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)							871.8704	852.8873	835.0611	819.1874	806.3428		
2	Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)							43.39	42.79	42.22	41.69	41.16		

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2019, merupakan penjabaran pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi 2013 – 2018 dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017. RKPD Tahun 2019 merupakan tahap pengembangan program dan kegiatan prioritas guna mewujudkan Visi dan Misi Jangka Menengah Kota Jambi. Dengan demikian, tingkat keberhasilan dari RKPD tahun 2019 ini, akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja Walikota beserta perangkat daerahnya pada tahun 2019 mendatang.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2019 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2019, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2018 yang belum tercapai. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2019, mengacu pada isu-isu strategis serta pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan.

Dalam rangkaian proses penyusunan dokumen perencanaan RKPD Kota Jambi diperlukan koordinasi antar instansi Pemerintah Kota Jambi dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum-forum yang disebut Forum Perangkat Daerah Kota Jambi atau forum gabungan OPD Kota Jambi serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan dan pula penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional.

Organisasi perangkat daerah Kota Jambi harus memiliki dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Jambi (Renja PD) untuk menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, sesuai dengan RKPD Kota Jambi.

Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimanfaatkan secara efektif, efisien serta perlu disosialisasikan kepada

semua *stakeholder* yang terkait untuk memperbesar keberhasilan pelaksanaannya, sehingga RKPD Kota Jambi 2019 berfungsi sebagai berikut :

- (1) Sebagai pedoman dan acuan yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan APBD Kota Jambi tahun 2019, baik dalam lingkup program maupun kegiatan.
- (2) Sebagai pengikat sinergi dalam pelaksanaan pembangunan Kota Jambi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.
- (3) Sebagai landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya. Peran serta maksimal dari seluruh potensi *stakeholder* Kota Jambi dalam rangka penyusunan RKPD ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Diharapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah inipun dapat mendorong peningkatan kesejahteraan warga Kota Jambi secara merata.

Pjs. WALIKOTA JAMBI,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes. The signature is positioned above the printed name 'MUHAMMAD FAUZI'.

MUHAMMAD FAUZI